

Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si.
Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.

EKONOMI POLITIK

**Pembangunan, Inovasi, Teknologi
Dan Kebijakan Untuk Kesejahteraan**



BUKU REFERENSI

EKONOMI POLITIK

**PEMBANGUNAN, INOVASI, TEKNOLOGI DAN
KEBIJAKAN UNTUK KESEJAHTERAAN**

Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si.

Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.

EKONOMI POLITIK

PEMBANGUNAN, INOVASI, TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN UNTUK KESEJAHTERAAN

Ditulis oleh:

Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si.
Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.

Editor :

Editor : Dr. Siti Rohima, SE, M. Sj

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang keras memperbanyak, menerjemahkan atau mengutip baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.



ISBN: 978-634-7457-82-0
VI + 273 hlm; 18,2 x 25,7 cm.
Cetakan I, Februari 2026

Desain Cover dan Tata Letak:
Melvin Mirsal

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT Media Penerbit Indonesia
Royal Suite No. 6C, Jalan Sedap Malam IX, Sempakata
Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan 20131
Telp: 081362150605
Email: ptmediapenerbitindonesia@gmail.com
Web: <https://mediapenerbitindonesia.com>
Anggota IKAPI No.088/SUT/2024

KATA PENGANTAR

Ekonomi politik merupakan bidang yang mengkaji bagaimana kekuatan ekonomi dan politik saling membentuk kebijakan, mengatur distribusi sumber daya, dan menentukan arah pembangunan melalui interaksi antara negara, pasar, dan masyarakat. Di tengah perubahan global yang cepat termasuk inovasi teknologi, integrasi pasar, dan meningkatnya ketimpangan, kajian ini menjadi semakin penting karena membantu menjelaskan alasan di balik suatu kebijakan, aktor yang paling diuntungkan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan publik.

Buku referensi ini membahas berbagai konsep dan paradigma dalam ekonomi politik, mulai dari hubungan antara negara, pasar, dan kekuasaan hingga peran institusi dalam menentukan arah pembangunan. Buku referensi ini membahas dinamika pembangunan, ketimpangan, kebijakan publik, globalisasi, sumber daya alam, korupsi, serta pengaruh teknologi dan media terhadap struktur ekonomi dan politik. Melalui teori, analisis, dan studi kasus, buku referensi ini memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana kebijakan ekonomi dirumuskan, siapa yang diuntungkan, dan bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Semoga buku referensi ini mampu menjadi sumber pengetahuan yang kredibel, mendukung proses pembelajaran, dan membantu pembaca memahami berbagai dinamika dalam studi ekonomi politik.

Salam Hangat

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii

BAB I PENDAHULUAN EKONOMI POLITIK.....	1
A. Definisi dan Ruang Lingkup Ekonomi Politik	1
B. Perkembangan Konsep: Klasik, Modern dan Kontemporer .5	
C. Hubungan Ekonomi dan Kekuasaan.....	7
D. Mengapa Ekonomi Politik Penting Dipelajari di Era Global9	
E. <i>Study Case</i>	12

BAB II LANDASAN TEORI DAN PARADIGMA EKONOMI POLITIK	15
A. Paradigma Liberalisme	15
B. Paradigma Marxisme	21
C. Paradigma Neogramski.....	28
D. Paradigma Institusionalisme.....	31
E. Perbandingan dan Relevansi Tiap Paradigma di Negara Berkembang.....	34
F. <i>Study Case</i>	37

BAB III NEGARA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK	39
A. Peran Negara dalam Mengatur Pasar.....	39
B. Tipe-tipe Negara: Developmental State, Welfare State, Neoliberal State	42
C. Kapasitas Negara dan <i>Governance</i>	48
D. Negara dan Elite Politik dalam Kebijakan Ekonomi.....	54
E. <i>Study Case</i>	56

BAB IV EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN	59
A. Teori Pembangunan dan Ketergantungan.....	59
B. Pembangunan di Negara Berkembang.....	63

C.	Peran Negara, LSM, dan Masyarakat Sipil	66
D.	Politik Anggaran dan Prioritas Pembangunan	68
E.	<i>Study Case</i>	71
BAB V	PASAR, MODAL, DAN MEKANISME KEKUASAAN	73
A.	Struktur Pasar dan Relasi Kekuasaan	73
B.	Modal dan Kelas Ekonomi	78
C.	Korporasi Multinasional Sebagai Aktor Politik	85
D.	Ketimpangan Kekuasaan Pasar.....	87
E.	<i>Study Case</i>	89
BAB VI	EKONOMI POLITIK KETIMPANGAN DAN KESEJAHTERAAN.....	91
A.	Ketimpangan Kelas dan Distribusi Pendapatan.....	91
B.	Politik Jaminan Sosial	95
C.	Kemiskinan Struktural	98
D.	Ekonomi Politik Gender dan Akses Sumber Daya.....	100
E.	<i>Study Case</i>	103
BAB VII	EKONOMI POLITIK SUMBER DAYA ALAM.....	105
A.	Politik Energi dan Mineral.....	105
B.	Ekonomi Politik Pangan	108
C.	Konflik SDA dan Perebutan Kepentingan.....	111
D.	Studi Kasus: Migas, Tambang, dan Agraria.....	115
E.	<i>Study Case</i>	117
BAB VIII	EKONOMI POLITIK KORUPSI DAN OLIGARKI .	119
A.	Oligarki Ekonomi dan Politik di Negara Berkembang.....	119
B.	Patronase, Rente dan Kartel Politik.....	123
C.	Korupsi Sebagai Masalah Struktural	129
D.	Studi Kasus Oligarki di Indonesia	132
E.	<i>Study Case</i>	133
BAB IX	EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL	137
A.	Teori IPE (<i>International Political Economy</i>)	137

B.	Sistem Perdagangan Internasional (WTO, IMF, <i>World Bank</i>).....	141
C.	Perang Dagang dan Konflik Ekonomi Antar Negara	146
D.	Pengaruh Hegemoni Ekonomi Global	149
E.	<i>Study Case</i>	152
BAB X	KEBIJAKAN PUBLIK DALAM EKONOMI POLITIK	153
A.	Proses Politik dalam Pembuatan Kebijakan Ekonomi.....	153
B.	Kebijakan Fiskal, Moneter dan Perdagangan	156
C.	Aktor Kebijakan: Birokrasi, Politisi, Kelompok Kepentingan.....	163
D.	Studi Kasus: Perdebatan Subsidi, Pajak dan Regulasi	168
E.	<i>Study Case</i>	169
BAB XI	EKONOMI POLITIK KEMISKINAN DAN KEBIJAKAN	173
A.	Definisi Kemiskinan Struktural dan Politis	174
B.	Ketimpangan Akses terhadap Sumber Daya	178
C.	Kemiskinan Sebagai Hasil Relasi Kekuasaan dan Distribusi Ekonomi.....	181
D.	Studi Kasus Kemiskinan di Indonesia (Desa, Kota dan Daerah Tertinggal).....	184
E.	Peran Negara, Pasar dan Elit dalam Reproduksi Kemiskinan	185
F.	<i>Study Case</i>	187
BAB XII	EKONOMI POLITIK KEBIJAKAN PERDAGANGAN DAN INDUSTRI	189
A.	Politik Industri Nasional	189
B.	Perlindungan Industri dan Subsidi.....	191
C.	Perdagangan Internasional dan <i>Power Relations</i>	195
D.	Studi Kasus Perkembangan Industri Strategis.....	198
E.	<i>Study Case</i>	198
BAB XIII	EKONOMI POLITIK GLOBALISASI	201
A.	Pengaruh Globalisasi Ekonomi terhadap Negara	201
B.	Deregulasi, Liberalisasi dan Privatisasi.....	203

C.	Regionalisme Ekonomi (ASEAN, EU, NAFTA)	208
D.	Tantangan dan Kritik Globalisasi	214
E.	<i>Study Case</i>	216
BAB XIV	EKONOMI POLITIK MEDIA DAN TEKNOLOGI..	219
A.	Media Sebagai Alat Produksi Wacana Politik.....	219
B.	Politik Informasi dan Ekonomi Digital.....	221
C.	<i>Big Data</i> , AI dan Pengaruhnya terhadap Demokrasi	224
D.	Ekonomi Politik Platform Digital (Shopee, Tokopedia, dll.)	229
E.	<i>Study Case</i>	231
BAB XV	TANTANGAN DAN ARAH MASA DEPAN	
	EKONOMI POLITIK.....	233
A.	Ekonomi Hijau dan Transisi Energi	233
B.	Geopolitik dan Ekonomi Global Masa Depan.....	237
C.	Digitalisasi dan Ekonomi Platform.....	239
D.	Prospek Riset Ekonomi Politik di Indonesia	241
E.	<i>Study Case</i>	244
	DAFTAR PUSTAKA	247
	GLOSARIUM.....	265
	INDEKS	267
	BIOGRAFI PENULIS.....	271
	SINOPSIS	273

BAB I

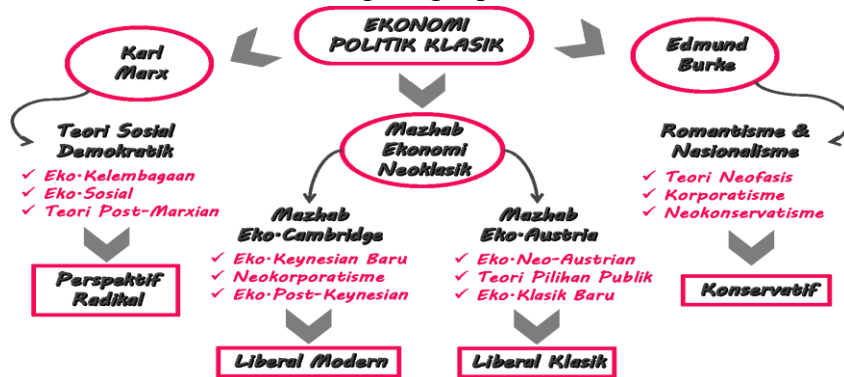
PENDAHULUAN EKONOMI POLITIK

Ekonomi politik merupakan bidang kajian yang mempelajari hubungan timbal balik antara kekuatan ekonomi dan keputusan politik dalam membentuk dinamika pembangunan suatu negara. Pembahasan ini membahas bagaimana kebijakan publik, distribusi sumber daya, serta struktur kekuasaan dapat memengaruhi proses ekonomi yang berlangsung di masyarakat. Melalui analisis ekonomi politik, kita dapat memahami bagaimana kepentingan aktor-aktor tertentu dan kondisi sosial memengaruhi kebijakan ekonomi yang dihasilkan.

A. Definisi dan Ruang Lingkup Ekonomi Politik

Ekonomi politik adalah bidang kajian yang meneliti hubungan antara kekuatan ekonomi dan struktur politik dalam membentuk kebijakan serta distribusi sumber daya. Pembahasannya mencakup bagaimana negara, pasar, dan berbagai aktor berkepentingan saling mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan. Kajian ini membantu memahami dinamika kekuasaan dan faktor ekonomi yang menentukan arah pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

Gambar 1. Ruang Lingkup Ekonomi Politik



Sumber: agrotek.id

1. Definisi Ekonomi Politik

Ekonomi politik merupakan bidang kajian yang menelaah keterkaitan antara proses ekonomi dan dinamika kekuasaan politik yang memengaruhi bagaimana keputusan publik dibentuk serta bagaimana sumber daya dialokasikan dalam suatu masyarakat. Kajian ini membahas relasi kompleks antara negara, pasar, serta aktor-aktor yang memiliki kepentingan berbeda sehingga menghasilkan suatu pola interaksi yang menentukan arah pembangunan ekonomi dan stabilitas sosial. Seperti yang dijelaskan Rodrik (2018), “ekonomi politik mempelajari bagaimana kekuatan politik membentuk kebijakan ekonomi dan bagaimana kepentingan ekonomi memengaruhi tatanan politik,” yang menegaskan bahwa ekonomi politik tidak dapat dipisahkan dari interaksi antara kepentingan ekonomi dan struktur kekuasaan politik.

Ekonomi politik juga mencerminkan bagaimana institusi, norma, serta konfigurasi kekuasaan memengaruhi proses distribusi manfaat ekonomi dan pembentukan kebijakan yang berdampak luas pada masyarakat. Dalam perkembangannya, konsep ini membantu memahami bagaimana kebijakan ekonomi sering kali tidak hanya berdasarkan analisis rasional, tetapi juga dipengaruhi oleh kompromi politik, ideologi, serta tekanan kelompok kepentingan. Dengan demikian, ekonomi politik memfasilitasi pemahaman mendalam mengenai alasan di balik berbagai kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah serta dampaknya terhadap kesejahteraan publik.

2. Ruang Lingkup Ekonomi Politik

Ruang lingkup ekonomi politik mencakup analisis berbagai aspek yang menghubungkan ekonomi dengan struktur politik, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Pembahasan ini meliputi bagaimana kebijakan ekonomi dirancang, siapa yang memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut, dan bagaimana faktor-faktor politik memengaruhi efektivitas penerapannya. Selain itu, ruang lingkup ekonomi politik juga mencakup kajian tentang peran institusi, konflik kepentingan, distribusi sumber daya, dan pengaruh globalisasi dalam proses ekonomi dan politik.

a. Hubungan antara Negara dan Pasar

Hubungan antara negara dan pasar menggambarkan keterkaitan erat antara peran pemerintah dalam mengatur perekonomian dan mekanisme pasar yang bekerja melalui penawaran, permintaan, serta interaksi para pelaku ekonomi, sehingga keseimbangan antara keduanya menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas, keadilan, dan efisiensi ekonomi suatu negara. Seperti dijelaskan Rodrik (2021), “negara dan pasar bukanlah institusi yang saling menggantikan, melainkan saling melengkapi dalam menciptakan perekonomian yang efektif,” yang menunjukkan bahwa campur tangan pemerintah dan dinamika pasar idealnya berjalan secara harmonis untuk menghasilkan hasil ekonomi yang optimal.

Hubungan tersebut juga mencerminkan bagaimana regulasi negara dapat membentuk struktur pasar melalui kebijakan fiskal, moneter, dan pengawasan sektor tertentu agar tidak terjadi monopoli, ketimpangan distribusi, atau kegagalan pasar yang merugikan masyarakat luas. Interaksi ini menuntut adanya keseimbangan, karena terlalu banyak intervensi dapat membatasi efisiensi pasar, sementara terlalu sedikit pengawasan dapat mendorong ketidakstabilan ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan pasar, serta meningkatnya kerentanan bagi kelompok masyarakat yang lemah.

b. Distribusi Kekuasaan dan Sumber Daya

Distribusi kekuasaan dan sumber daya menggambarkan bagaimana otoritas politik menentukan siapa yang berhak mengakses, mengendalikan, dan memanfaatkan berbagai aset ekonomi dalam masyarakat, sehingga alokasi tersebut tidak

hanya dipengaruhi oleh mekanisme ekonomi, tetapi juga oleh struktur kekuasaan yang mengatur interaksi antaraktor. Seperti ditegaskan Acemoglu (2019), “kekuasaan dan sumber daya didistribusikan melalui institusi yang membentuk insentif serta batas-batas perilaku aktor politik dan ekonomi,” yang menekankan bahwa institusi berperan sentral dalam menentukan bagaimana manfaat ekonomi tersebar di antara kelompok masyarakat.

Distribusi kekuasaan juga dapat menciptakan ketimpangan ketika kelompok dominan mampu mengarahkan kebijakan sesuai kepentingannya, sehingga akses terhadap sumber daya menjadi tidak merata dan menimbulkan perbedaan kesejahteraan. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada perekonomian, tetapi juga pada stabilitas sosial, karena kelompok yang termarginalkan sering kali tidak memiliki kapasitas untuk memengaruhi keputusan politik yang menentukan nasibnya.

c. Pengambilan Kebijakan Ekonomi

Pengambilan kebijakan ekonomi merupakan proses yang melibatkan pertimbangan rasional, dinamika politik, serta tujuan sosial yang ingin dicapai pemerintah, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan kondisi ekonomi, tetapi juga kalkulasi kekuasaan dan kepentingan kelompok tertentu. Seperti dinyatakan Stiglitz (2019), “kebijakan ekonomi yang efektif harus mempertimbangkan bagaimana pasar bekerja sekaligus memahami kegagalan yang dapat muncul ketika pemerintah tidak merumuskan intervensi yang tepat,” yang menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi selalu berada pada persimpangan antara efisiensi pasar dan kebutuhan intervensi negara.

Proses pengambilan kebijakan ekonomi sering kali dipengaruhi oleh interaksi antara pengambil keputusan, kelompok kepentingan, lembaga legislatif, serta tekanan publik yang memiliki preferensi dan prioritas berbeda, sehingga formulasi kebijakan menjadi hasil negosiasi kompleks dari berbagai kekuatan yang saling bersaing. Dinamika ini membuat kebijakan ekonomi tidak semata-mata lahir dari analisis teknokratis, tetapi dari kompromi politik yang dapat

memperkuat atau justru melemahkan tujuan pembangunan ekonomi jangka panjang.

B. Perkembangan Konsep: Klasik, Modern dan Kontemporer

Ekonomi politik telah berkembang melalui berbagai pendekatan yang mencerminkan perubahan sosial, ekonomi, dan politik sepanjang sejarah, mulai dari pemikiran klasik, modern, hingga kontemporer. Setiap tahap menekankan hubungan antara kekuatan ekonomi dan politik dengan cara yang berbeda, sehingga memberikan kerangka analisis yang semakin kompleks dan kontekstual. Pemahaman terhadap perkembangan ini penting untuk melihat bagaimana teori ekonomi politik menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat, kebutuhan kebijakan, dan tantangan global.

1. Konsep Klasik

Konsep klasik dalam ekonomi politik berkembang pada abad ke-18 hingga awal abad ke-19, yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill. Pendekatan ini menekankan pentingnya mekanisme pasar sebagai pengatur utama aktivitas ekonomi, dengan asumsi bahwa pasar memiliki kemampuan alami untuk mencapai keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Pasar dianggap mampu mengalokasikan sumber daya secara efisien tanpa perlu intervensi negara yang berlebihan. Peran negara dalam konsep klasik sangat terbatas, biasanya hanya berkaitan dengan penegakan hukum, perlindungan hak milik, dan menjaga ketertiban umum, sementara kegiatan ekonomi sehari-hari dibiarkan berjalan sesuai dengan kepentingan individu.

Konsep klasik menekankan produksi kekayaan dan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator utama keberhasilan ekonomi. Aktivitas ekonomi dipandang sebagai hasil dari interaksi individu yang mengejar kepentingan pribadi, yang secara tidak langsung akan mendorong kesejahteraan masyarakat melalui prinsip yang dikenal sebagai “*invisible hand*.” Dalam konteks perdagangan, konsep klasik menekankan pentingnya perdagangan bebas antarnegara, karena dianggap dapat meningkatkan efisiensi produksi, memaksimalkan keuntungan, dan menyebarkan kesejahteraan secara global. Walaupun efektif dalam mendorong pertumbuhan, konsep klasik dianggap

memiliki keterbatasan dalam menangani ketimpangan distribusi pendapatan dan dampak sosial dari ketidakstabilan ekonomi, sehingga muncul pemikiran modern yang melibatkan peran negara lebih aktif.

2. Konsep Modern

Konsep modern dalam ekonomi politik muncul pada abad ke-20 sebagai respons terhadap keterbatasan konsep klasik dalam menangani ketidakstabilan ekonomi, ketimpangan sosial, dan krisis ekonomi yang sering terjadi. Pendekatan modern menekankan peran negara yang lebih aktif dalam mengatur ekonomi, bukan hanya sebagai pengawas hukum dan pelindung hak milik seperti pada konsep klasik. Negara dianggap memiliki tanggung jawab untuk melakukan intervensi melalui kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi agar perekonomian stabil, efisien, dan adil. Konsep modern juga menekankan pentingnya kesejahteraan sosial, pemerataan distribusi pendapatan, dan pengurangan kemiskinan sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi.

Pada konsep modern, interaksi antara politik dan ekonomi menjadi sangat penting karena kebijakan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari dinamika kekuasaan, kepentingan kelompok, dan tekanan politik yang ada dalam masyarakat. Proses perumusan kebijakan ekonomi dipengaruhi oleh negosiasi antara pemerintah, partai politik, kelompok kepentingan, dan lembaga legislatif untuk mencapai keseimbangan antara efisiensi pasar dan kebutuhan sosial. Konsep ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup; distribusi manfaat, stabilitas sosial, dan legitimasi politik juga menjadi indikator keberhasilan ekonomi.

3. Konsep Kontemporer

Konsep kontemporer dalam ekonomi politik muncul pada akhir abad ke-20 hingga era kini, sebagai respon terhadap tantangan globalisasi, perkembangan teknologi, dan isu keberlanjutan. Pendekatan ini menekankan hubungan yang kompleks antara ekonomi, politik, dan faktor sosial dalam konteks global yang saling terhubung. Negara tidak hanya berperan dalam mengatur pasar domestik, tetapi juga harus menyesuaikan kebijakan dengan dinamika ekonomi global, investasi internasional, dan perdagangan lintas negara. Konsep kontemporer menekankan pentingnya keberlanjutan ekonomi,

lingkungan, dan etika, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari peningkatan produksi, tetapi juga dampak sosial, lingkungan, dan distribusi manfaat secara adil.

Konsep kontemporer mengedepankan analisis multidisiplin, menggabungkan ekonomi, politik, hukum, dan sosiologi untuk memahami fenomena ekonomi secara komprehensif. Perhatian terhadap inovasi, teknologi, dan perubahan struktur ekonomi menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan global. Konsep ini juga menekankan pentingnya peran aktor non-negara, seperti lembaga internasional, perusahaan multinasional, dan organisasi masyarakat sipil dalam mempengaruhi kebijakan ekonomi dan politik, sehingga keputusan ekonomi menjadi hasil interaksi antara aktor domestik dan global.

C. Hubungan Ekonomi dan Kekuasaan

Hubungan ekonomi dan kekuasaan adalah inti kajian ekonomi politik karena distribusi sumber daya ekonomi sering kali terkait langsung dengan struktur kekuasaan politik. Kekuasaan politik memungkinkan kontrol atas alokasi sumber daya, pengambilan keputusan ekonomi, serta pembentukan aturan yang memengaruhi perilaku pasar dan masyarakat. Sebaliknya, kekuatan ekonomi juga dapat memperkuat posisi politik individu atau kelompok melalui kemampuan memengaruhi kebijakan, mengendalikan sumber daya, atau menekan aktor politik untuk keuntungan tertentu. Dengan demikian, ekonomi dan kekuasaan saling terkait dalam sistem timbal balik yang menentukan arah pembangunan, stabilitas sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

1. Distribusi Kekayaan dan Akses Sumber Daya

Distribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya menunjukkan bahwa ketimpangan material sangat erat terkait dengan struktur kekuasaan politik, di mana kekuatan ekonomi memberi kemampuan besar kepada aktor kaya untuk memengaruhi kebijakan demi melindungi dan memperkuat posisinya dalam struktur politik. Seperti dijelaskan oleh Jeffrey A. Winters (2021), “ketidaksetaraan material yang ekstrem menghasilkan ketidaksetaraan politik yang ekstrem pula,” yang menegaskan bahwa kekayaan bukan hanya

indikator ekonomi tetapi juga sumber daya kekuasaan yang bisa digunakan secara strategis dalam arena politik.

Ketika kelompok elit menguasai sebagian besar sumber daya ekonomi, memperoleh akses yang jauh lebih besar ke mekanisme politik seperti pembiayaan kampanye, lobi legislatif, dan jaringan korporasi, yang pada gilirannya memperkuat dominasi dalam pembuatan kebijakan. Akses istimewa ini memicu siklus di mana akumulasi kekayaan memudahkan pengaruh politik, dan pengaruh politik digunakan untuk mempertahankan atau memperluas akumulasi kekayaan, sehingga menyediakan dasar struktural bagi oligarki dan sistem kekuasaan yang eksklusif.

2. Kekuatan Ekonomi sebagai Alat Politik

Kekuatan ekonomi sebagai alat politik sangat krusial dalam struktur kekuasaan, karena aktor ekonomi besar seperti perusahaan dan investor kaya dapat menggunakan modal untuk mendanai kampanye, melobi kebijakan, dan memengaruhi agenda legislatif demi kepentingan sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh Thomas Ferguson, “sistem politik dengan kompetisi partai sebenarnya adalah kompetisi untuk investasi dari segmen kaya dalam masyarakat, karena hanya pihak kaya yang memiliki kemampuan finansial untuk menyokong kampanye kemenangan partai” (Ferguson, 2022).

Para aktor ekonomi ini tidak hanya berperan sebagai pemberi dana tetapi juga sebagai investor strategis yang memilih dan mendukung kandidat yang kebijakannya menguntungkannya, menjadikan perpolitikan sebagai instrumen investasi. Intervensi semacam ini menciptakan hubungan timbal-balik di mana kekayaan memberi akses politik, sementara akses politik memungkinkan proteksi dan ekspansi akumulasi kekayaan, sebuah siklus yang memperkuat dominasi elit ekonomi dalam arena politik.

3. Implikasi terhadap Pembangunan dan Stabilitas Sosial

Implikasi hubungan antara ekonomi dan kekuasaan terhadap pembangunan dan stabilitas sosial sangat signifikan karena ketimpangan dalam distribusi kekayaan dan akses politik dapat memicu konflik sosial serta menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Seperti yang dijelaskan oleh Acemoglu dan Robinson, “ketika institusi politik dan ekonomi tidak inklusif, kekuasaan dan kekayaan

terkonsentrasi pada segelintir elite, sehingga pembangunan ekonomi jangka panjang menjadi terhambat dan stabilitas sosial rentan terganggu” (Acemoglu & Robinson, 2019).

Ketimpangan kekuasaan ini menciptakan siklus di mana kelompok yang berkuasa dapat mempertahankan dominasi ekonomi melalui pengaruh politik, sementara kelompok kurang beruntung kehilangan akses terhadap peluang pembangunan, pendidikan, dan sumber daya penting lainnya. Akibatnya, ketidaksetaraan tidak hanya berdampak pada kesejahteraan material tetapi juga pada legitimasi politik, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan kohesi sosial, yang menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan.

D. Mengapa Ekonomi Politik Penting Dipelajari di Era Global

Ekonomi politik sangat relevan di era global karena keputusan ekonomi suatu negara kini memiliki dampak lintas batas, memengaruhi pasar internasional, hubungan diplomatik, dan stabilitas sosial. Memahami interaksi antara kekuasaan politik dan distribusi ekonomi membantu masyarakat dan pembuat kebijakan merumuskan strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, kajian ekonomi politik mempersiapkan individu dan institusi untuk menghadapi tantangan global seperti krisis finansial, perubahan rantai pasok, dan ketidaksetaraan sumber daya. Berikut ini adalah Faktor-Faktor yang Menunjukkan Pentingnya Ekonomi Politik di Era Global:

1. Globalisasi dan Interkoneksi

Globalisasi dan interkoneksi menjadi faktor penting dalam mempelajari ekonomi politik di era global karena pertumbuhan perdagangan internasional, arus investasi lintas negara, dan kemajuan teknologi membuat ekonomi nasional saling tergantung satu sama lain. Keputusan ekonomi suatu negara tidak hanya berdampak pada domestik tetapi juga memengaruhi stabilitas pasar internasional, hubungan diplomatik, dan ketahanan ekonomi global. Seperti dijelaskan oleh Joseph E. Stiglitz, “dalam konteks globalisasi, kebijakan ekonomi nasional harus mempertimbangkan dampak lintas batas karena interkoneksi ekonomi internasional menentukan efektivitas dan keberlanjutan kebijakan tersebut” (Stiglitz, 2019).

Pemahaman ekonomi politik memungkinkan pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat untuk menganalisis bagaimana negara berinteraksi dalam tatanan global serta merancang strategi yang adaptif terhadap perubahan internasional.

Globalisasi juga menciptakan peluang dan tantangan baru dalam distribusi kekayaan, akses sumber daya, dan pengaruh politik, sehingga negara atau aktor ekonomi yang lebih terintegrasi ke pasar global dapat memanfaatkan keunggulan kompetitif. Interkoneksi ekonomi ini memerlukan koordinasi kebijakan lintas negara, pengaturan perdagangan, serta pengawasan investasi asing untuk memastikan stabilitas ekonomi dan mencegah ketidakadilan struktural. Oleh karena itu, mempelajari ekonomi politik membantu memahami hubungan timbal balik antara globalisasi, kekuasaan politik, dan dinamika ekonomi, serta merancang mekanisme untuk mengelola risiko sekaligus memaksimalkan manfaat globalisasi.

2. Distribusi Kekayaan dan Kekuasaan

Distribusi kekayaan dan kekuasaan menjadi faktor penting dalam mempelajari ekonomi politik di era global karena ketimpangan ekonomi yang signifikan sering kali berimplikasi langsung terhadap kemampuan suatu kelompok atau negara dalam memengaruhi kebijakan politik dan ekonomi. Ketika kekayaan terkonsentrasi pada segelintir elit, memperoleh akses yang lebih besar untuk membentuk regulasi, memengaruhi legislasi, dan mengarahkan kebijakan ekonomi sesuai kepentingannya. Seperti yang dijelaskan oleh Branko Milanović, “ketimpangan ekonomi global mencerminkan distribusi kekuasaan yang tidak merata, sehingga negara atau aktor kaya memiliki pengaruh lebih besar terhadap aturan ekonomi dan politik internasional” (Milanović, 2019). Pemahaman ekonomi politik memungkinkan analis dan pembuat kebijakan untuk menilai bagaimana konsentrasi kekayaan dapat menimbulkan ketidakadilan, menghambat pembangunan, dan mengancam stabilitas sosial di tingkat global.

Distribusi kekayaan yang timpang juga berdampak pada akses terhadap sumber daya penting, pendidikan, dan peluang ekonomi bagi masyarakat yang kurang beruntung, sehingga memperkuat siklus dominasi elit. Ketidakmerataan ini tidak hanya menimbulkan ketidakadilan domestik tetapi juga memengaruhi posisi suatu negara dalam sistem ekonomi global, di mana negara dengan sumber daya dan

kekuasaan politik yang lebih besar cenderung memperoleh keuntungan strategis. Oleh karena itu, studi ekonomi politik membantu memahami hubungan antara kekayaan, kekuasaan, dan pengambilan keputusan dalam konteks global, sekaligus merumuskan strategi untuk mengurangi ketimpangan.

3. Kesiapan Menghadapi Tantangan Global

Kesiapan menghadapi tantangan global menjadi faktor penting dalam mempelajari ekonomi politik karena dinamika ekonomi dan politik dunia berubah dengan cepat akibat globalisasi, inovasi teknologi, dan pergeseran kekuatan ekonomi internasional. Negara dan aktor ekonomi yang tidak siap menghadapi perubahan ini berisiko tertinggal dalam persaingan global, mengalami krisis ekonomi, atau menghadapi ketidakstabilan sosial akibat kebijakan yang tidak adaptif. Seperti yang dijelaskan oleh Dani Rodrik, “kemampuan negara untuk merespons perubahan global dan mengadaptasi kebijakan ekonomi domestik terhadap tantangan internasional adalah kunci untuk mempertahankan pertumbuhan dan stabilitas sosial” (Rodrik, 2020). Pemahaman ekonomi politik memungkinkan pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat menilai risiko global, merancang strategi adaptif, dan memanfaatkan peluang dari integrasi ekonomi internasional.

Kesiapan menghadapi tantangan global juga mencakup kemampuan mengantisipasi krisis finansial, fluktuasi harga komoditas, dan perubahan pasar tenaga kerja akibat pergeseran teknologi dan perdagangan internasional. Negara yang memahami interaksi antara kekuasaan politik, distribusi sumber daya, dan dinamika ekonomi global dapat merumuskan kebijakan yang lebih fleksibel dan inklusif, sehingga mencegah ketimpangan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Dengan pendekatan ekonomi politik, strategi pembangunan dapat disusun untuk memperkuat daya saing nasional sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah ketidakpastian global.

E. Study Case

1. Krisis Ekonomi Venezuela dan Hubungannya dengan Kekuasaan Politik

a. Latar Belakang

Venezuela, salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia, mengalami krisis ekonomi yang parah sejak pertengahan 2010-an. Pendapatan negara yang sangat bergantung pada ekspor minyak menyebabkan ekonomi Venezuela rentan terhadap fluktuasi harga minyak global. Selain itu, distribusi kekuasaan politik yang terpusat pada satu partai politik dan pengaruh elite ekonomi tertentu memperkuat dominasi kelompok tertentu dalam pengambilan kebijakan.

b. Masalah Utama

- 1) Ketimpangan Kekuasaan dan Kekayaan: Elite politik memiliki kontrol penuh atas sumber daya negara, sementara mayoritas penduduk menghadapi kelangkaan pangan, obat-obatan, dan inflasi tinggi.
- 2) Kebijakan Ekonomi yang Tidak Berkelanjutan: Subsidi besar-besaran untuk bahan pokok dan pengendalian harga menyebabkan defisit anggaran yang meningkat dan cadangan devisa menipis.
- 3) Dampak Sosial dan Politik: Ketidakstabilan ekonomi memicu migrasi besar-besaran, protes sosial, dan menurunnya legitimasi pemerintah di mata masyarakat dan dunia internasional.

c. Analisis Ekonomi Politik

Analisis ekonomi politik dalam studi kasus Venezuela menunjukkan bahwa konsentrasi kekuasaan yang terlalu besar pada pemerintah dan elite politik menjadi faktor utama yang memperburuk kondisi ekonomi negara. Ketergantungan pada minyak sebagai sumber pendapatan tunggal membuat kebijakan ekonomi sangat rentan terhadap perubahan harga global, sehingga stabilitas nasional terancam ketika harga minyak jatuh. Pengendalian politik atas sumber daya juga mengakibatkan distribusi kekayaan tidak merata dan memperluas ketimpangan sosial. Situasi ini menunjukkan bagaimana keputusan politik

yang tidak responsif terhadap kondisi ekonomi dapat menimbulkan krisis berkepanjangan.

Minimnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ekonomi berdampak pada menurunnya kepercayaan publik dan meningkatnya konflik sosial. Intervensi internasional seperti sanksi ekonomi turut memperparah situasi, memperlihatkan bahwa dinamika global memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi domestik. Krisis ini menjadi bukti bahwa keseimbangan antara kekuasaan politik dan kebijakan ekonomi sangat diperlukan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, studi kasus ini menegaskan pentingnya tata kelola yang baik dalam menjaga hubungan antara ekonomi dan kekuasaan agar stabilitas sosial dapat terjaga.

d. Solusi dan Rekomendasi

Solusi dan rekomendasi dalam studi kasus Venezuela dapat difokuskan pada peningkatan tata kelola pemerintahan melalui transparansi, akuntabilitas, dan penguatan lembaga politik agar kebijakan ekonomi lebih stabil dan berkelanjutan. Diversifikasi ekonomi juga perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada minyak dengan mendorong sektor industri lain seperti pertanian dan manufaktur. Selain itu, kerja sama internasional yang lebih konstruktif dapat membantu pemulihan ekonomi dan menciptakan stabilitas sosial jangka panjang.

BAB II

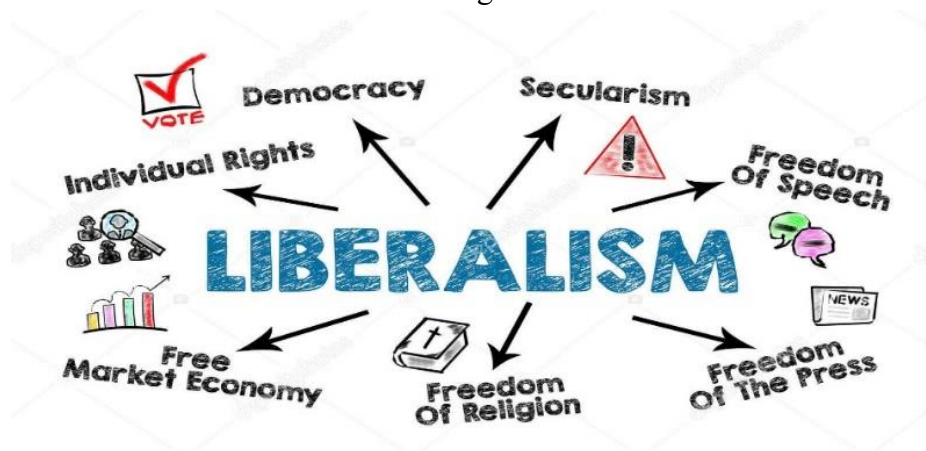
LANDASAN TEORI DAN PARADIGMA EKONOMI POLITIK

Landasan teori dan paradigma ekonomi politik memberikan kerangka untuk memahami bagaimana kekuatan ekonomi dan politik saling mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan publik. Kajian ini membahas hubungan antara negara, pasar, serta masyarakat dalam mengelola sumber daya dan menetapkan kebijakan yang berdampak luas. Pendekatan tersebut membantu menjelaskan dinamika kekuasaan, distribusi kepentingan, dan arah pembangunan dalam suatu sistem ekonomi.

A. Paradigma Liberalisme

Paradigma liberalisme merupakan pendekatan yang menekankan kebebasan individu, peran minimal negara, serta dominasi mekanisme pasar dalam mengatur aktivitas ekonomi dan sosial. Dalam perspektif ini, individu dipandang sebagai aktor rasional yang mampu menentukan pilihan terbaik bagi dirinya, sehingga sistem yang memberi ruang kebebasan dianggap paling efektif menghasilkan kemakmuran. Liberalisme juga melihat bahwa ketika negara terlalu dominan, potensi penyalahgunaan kekuasaan meningkat dan dapat menghambat inovasi serta efisiensi ekonomi.

Gambar 2. Paradigma Liberalisme



1. Ciri dan Prinsip Utama Liberalisme

a. Kebebasan Individu sebagai Fondasi

Kebebasan individu sebagai fondasi liberalisme menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menentukan pilihan hidupnya tanpa tekanan atau dominasi dari negara, kelompok tertentu, maupun struktur sosial yang membatasi ruang otonominya. Dalam konteks modern, kebebasan ini dipahami sebagai syarat terciptanya masyarakat yang inovatif dan dinamis, karena individu diberi ruang untuk mengekspresikan ide, keyakinan, dan preferensinya secara terbuka. Selain itu, kebebasan individu menjadi titik awal bagi lahirnya sistem ekonomi berbasis pasar yang mendorong kompetisi sehat, karena setiap orang dapat mengembangkan potensi dan mengambil keputusan ekonomi secara mandiri. Hal ini sejalan dengan pandangan Gaus (2021) yang menjelaskan bahwa masyarakat liberal ideal adalah masyarakat yang “menghormati otonomi moral individu sebagai prinsip dasar kehidupan sosial.” Kebebasan individu juga berfungsi sebagai mekanisme pengamanan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengancam hak-hak dasar warga negara. Ketika negara diatur oleh prinsip liberalisme, kebebasan setiap individu dilindungi melalui institusi hukum yang memastikan kesempatan setara dan mencegah tindakan sewenang-wenang. Perlindungan ini kemudian menciptakan stabilitas politik dan sosial, karena masyarakat merasa memiliki ruang yang aman untuk berpartisipasi dalam proses sosial maupun politik.

Dengan demikian, kebebasan individu bukan hanya nilai moral, tetapi juga instrumen yang memastikan tata kelola negara berjalan secara transparan dan akuntabel.

b. Pasar Bebas sebagai Mekanisme Alokasi

Pasar bebas sebagai mekanisme alokasi dalam liberalisme dipandang sebagai sistem yang mampu menyalurkan sumber daya secara efisien melalui interaksi alami antara penawaran dan permintaan tanpa campur tangan negara yang berlebihan. Mekanisme harga dianggap sebagai sinyal utama yang menentukan keputusan produksi, konsumsi, dan distribusi, sehingga setiap pelaku ekonomi dapat menyesuaikan tindakannya berdasarkan informasi pasar yang tersedia. Efisiensi ini tercapai karena individu yang rasional membuat keputusan sesuai kepentingan masing-masing, sementara pasar mengkoordinasikan keputusan tersebut secara spontan. Sejalan dengan hal itu, Mankiw (2021) menegaskan bahwa “dalam perekonomian pasar, harga menjadi sinyal yang membimbing keputusan ekonomi para pelaku pasar.”

Pada liberalisme, pasar bebas tidak hanya berfungsi sebagai arena pertukaran barang dan jasa, tetapi juga sebagai instrumen yang mendorong inovasi serta kemajuan teknologi melalui kompetisi yang sehat. Ketika regulasi pemerintah terlalu minimum, perusahaan terdorong untuk menciptakan produk andalan, meningkatkan kualitas, dan menekan biaya guna mempertahankan daya saing. Mekanisme kompetitif ini juga memungkinkan terciptanya struktur pasar yang lebih responsif terhadap perubahan preferensi masyarakat. Dengan demikian, pasar bebas dipandang sebagai fondasi yang memungkinkan dinamika ekonomi bergerak secara fleksibel dan adaptif mengikuti perkembangan zaman.

c. Peran Negara yang Terbatas

Peran negara yang terbatas dalam liberalisme menekankan bahwa pemerintah hanya berfungsi sebagai penjaga ketertiban, pelindung hak-hak dasar, dan penyedia kerangka hukum agar interaksi ekonomi maupun sosial dapat berjalan secara adil dan stabil. Negara tidak diperkenankan mengatur secara berlebihan karena intervensi yang terlalu besar dianggap dapat menghambat kebebasan individu, mematikan inovasi, dan

menciptakan ketergantungan masyarakat pada kekuasaan. Prinsip ini berpijak pada gagasan bahwa masyarakat mampu mengatur dirinya melalui mekanisme pasar dan norma sosial selama negara menyediakan institusi hukum yang efektif. Gagasan tersebut sejalan dengan pandangan Acemoglu dan Robinson (2019) yang menyatakan bahwa “kebebasan hanya dapat muncul ketika kekuasaan negara dibatasi sehingga tidak mendominasi kehidupan masyarakat.”

Pada praktiknya, peran negara yang terbatas diterapkan melalui pembatasan campur tangan terhadap aktivitas ekonomi serta pemberian ruang luas bagi pelaku pasar untuk menentukan arah produksi, investasi, dan konsumsi. Negara hanya masuk ketika terjadi kegagalan pasar atau ketika hak dan keamanan warga terancam, sehingga intervensi dilakukan secara selektif dan proporsional. Struktur seperti ini memungkinkan terciptanya lingkungan yang memacu kreativitas karena masyarakat tidak dibelenggu oleh regulasi yang menghambat proses pengambilan keputusan mandiri. Dengan demikian, model negara minimal menjadi kunci agar kebebasan individu dapat terus terjamin dan memberikan kontribusi optimal bagi perkembangan ekonomi.

2. Implikasi Kebijakan dari Paradigma Liberalisme

a. Deregulasi dan Privatisasi

Deregulasi dan privatisasi sebagai implikasi kebijakan dari paradigma liberalisme menekankan pengurangan peran negara dalam aktivitas ekonomi untuk memberikan ruang lebih besar bagi mekanisme pasar bekerja secara efisien. Deregulasi dilakukan dengan menyederhanakan atau menghapus aturan yang dianggap menghambat inovasi, kompetisi, serta fleksibilitas pelaku ekonomi dalam merespons dinamika pasar. Privatisasi, di sisi lain, memindahkan kepemilikan dan pengelolaan perusahaan milik negara kepada sektor swasta dengan asumsi bahwa insentif pasar akan meningkatkan kinerja, efisiensi, serta kualitas layanan. Pandangan ini sejalan dengan Estrin dan Pelletier (2018) yang menyatakan bahwa *“privatization tends to improve firm performance when combined with market-oriented reforms.”*

Pada penerapannya, deregulasi membuka peluang terciptanya struktur pasar yang lebih kompetitif karena pelaku usaha memiliki kebebasan mengembangkan strategi tanpa dibebani regulasi yang membatasi kreativitas dan respon cepat terhadap perubahan. Pembatasan regulasi juga mengurangi biaya birokrasi, sehingga perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya untuk inovasi, ekspansi usaha, atau peningkatan produktivitas. Privatisasi berfungsi melengkapi proses ini dengan memindahkan pengelolaan layanan dan aset negara kepada entitas swasta yang beroperasi berdasarkan pertimbangan efisiensi dan keuntungan. Dengan demikian, kombinasi deregulasi dan privatisasi menciptakan lingkungan yang mendorong dinamika pasar lebih sehat serta memperkuat peran kompetisi dalam meningkatkan kualitas ekonomi.

b. Keterbukaan Perdagangan Internasional

Keterbukaan perdagangan internasional merupakan implikasi langsung dari paradigma liberalisme yang menekankan pentingnya arus barang, jasa, dan modal yang bergerak bebas sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi global, sehingga negara didorong untuk mengurangi hambatan tarif maupun nontarif guna menciptakan kompetisi pasar yang lebih efisien dan inovatif. Dalam perspektif liberal, mekanisme pasar diyakini mampu mengalokasikan sumber daya secara optimal apabila intervensi pemerintah diminimalkan, sehingga pelaku ekonomi dapat berinteraksi secara terbuka pada tingkat global untuk memperluas peluang produksi dan distribusi. Sejalan dengan itu, O'Brien dan Williams (2020) menyatakan bahwa liberalisme mempromosikan penghapusan batas-batas ekonomi nasional agar perdagangan dapat berlangsung secara terbuka dan saling menguntungkan bagi negara-negara yang terlibat. Konsep ini kemudian diterjemahkan dalam kebijakan perdagangan yang berorientasi pada integrasi ekonomi internasional, misalnya melalui perjanjian multilateral, pengurangan hambatan perdagangan, serta peningkatan akses pasar lintas negara (O'Brien & Williams, 2020).

Pada praktiknya, keterbukaan perdagangan internasional mendorong negara untuk berpartisipasi dalam rantai pasok global sehingga produk dan jasa dapat dihasilkan melalui

spesialisasi yang meningkatkan efisiensi ekonomi, termasuk dalam pemanfaatan teknologi dan kemampuan produksi nasional. Paradigma liberal menekankan bahwa semakin rendahnya hambatan perdagangan akan meningkatkan arus investasi asing, memperluas pasar, dan memperkuat daya saing suatu negara, sehingga reformasi kebijakan diarahkan pada perbaikan regulasi yang mendukung mobilitas ekonomi internasional. Dengan dorongan ideologis bahwa pasar global bersifat saling melengkapi, negara kemudian berupaya menciptakan stabilitas makroekonomi, keteraturan hukum, dan iklim bisnis yang kondusif agar dapat menarik lebih banyak mitra ekonomi internasional. Kebijakan tersebut tidak hanya memperluas interaksi ekonomi antarnegara, tetapi juga memperkecil potensi distorsi pasar yang dapat menghambat pertumbuhan jangka panjang.

c. Pasar Tenaga Kerja Fleksibel

Pasar tenaga kerja fleksibel merupakan salah satu implikasi kebijakan utama dari paradigma liberalisme yang menempatkan mekanisme pasar sebagai pengatur utama hubungan kerja, sehingga regulasi pemerintah dibuat seminimal mungkin untuk memberi ruang bagi mobilitas tenaga kerja dan penyesuaian upah yang dipengaruhi oleh dinamika pasar. Dalam perspektif liberal, fleksibilitas dianggap sebagai prasyarat terciptanya efisiensi ekonomi karena perusahaan membutuhkan kebebasan untuk menyesuaikan jumlah tenaga kerja, pola kontrak, serta struktur kompensasi sesuai kebutuhan pasar agar tetap kompetitif pada lingkungan global yang terus berubah. Kebijakan ini sejalan dengan pandangan Edwards (2019) yang menyatakan bahwa liberalisme mendorong pasar tenaga kerja yang lebih terbuka dan adaptif dengan menekankan mekanisme pasar ketimbang intervensi pemerintah sebagai cara utama mengatur hubungan industrial. Oleh karena itu, pasar tenaga kerja fleksibel berkembang sebagai instrumen untuk mempercepat respons perusahaan terhadap perubahan permintaan, memperkuat efisiensi produksi, dan meningkatkan daya saing nasional (Edwards, 2019).

Pada implementasinya, pasar tenaga kerja fleksibel mendorong lahirnya beragam bentuk kontrak kerja seperti kontrak jangka

pendek, kerja paruh waktu, outsourcing, dan sistem kerja berbasis proyek yang diyakini mampu memberi kelincuhan struktural bagi perusahaan dalam menghadapi tekanan global. Model pasar ini dianggap mampu membantu perusahaan mengurangi biaya tenaga kerja ketika kondisi ekonomi melambat, sekaligus memperluas kesempatan kerja ketika permintaan meningkat tanpa harus terikat pada regulasi ketenagakerjaan yang kaku. Liberalisme berargumen bahwa fleksibilitas tersebut akan meningkatkan mobilitas tenaga kerja lintas sektor serta memberikan ruang bagi pekerja untuk memilih pola kerja sesuai kebutuhan ekonomi dan sosial, walaupun tetap menuntut adanya ketangguhan adaptasi yang lebih tinggi dalam menghadapi ketidakpastian pasar. Dengan demikian, pasar tenaga kerja fleksibel menjadi salah satu instrumen penting bagi negara yang menerapkan kebijakan ekonomi liberal dalam menciptakan iklim kerja yang lebih dinamis dan kompetitif.

B. Paradigma Marxisme

Paradigma Marxisme merupakan kerangka teoretis dalam ilmu sosial dan ekonomi politik yang menekankan bahwa struktur ekonomi suatu masyarakat menjadi dasar utama pembentukan politik, hukum, budaya, dan relasi kekuasaan. Paradigma ini melihat masyarakat sebagai arena konflik kelas, di mana kepentingan kelas pemilik modal (borjuis) dan kelas pekerja (proletar) saling bertentangan, sehingga perubahan sosial terjadi melalui dinamika konflik tersebut. Marxisme menekankan bahwa ketimpangan ekonomi dan kepemilikan alat produksi menentukan distribusi kekuasaan politik, serta bahwa ideologi, hukum, dan institusi negara berfungsi untuk mempertahankan dominasi kelas yang menguasai ekonomi. Dengan kata lain, pendekatan ini mengintegrasikan analisis ekonomi dan politik secara kritis untuk memahami bagaimana kekuasaan dan sumber daya didistribusikan dalam masyarakat.

Gambar 3. Paradigma Marxisme



Sumber: *Mengeja Indonesia*

1. Dasar Pemikiran Paradigma Marxisme dalam Ekonomi Politik

Paradigma Marxisme berakar pada karya Karl Marx dan Friedrich Engels, terutama dalam *Das Kapital* dan *The Communist Manifesto*. Pendekatan ini menekankan beberapa asumsi dasar:

a. Materialisme Historis

Materialisme historis merupakan asumsi dasar Marxisme yang menekankan bahwa struktur ekonomi, berupa hubungan produksi dan kepemilikan alat produksi, menentukan seluruh aspek kehidupan sosial, politik, dan budaya, sehingga konflik antar kelas yang muncul dari ketimpangan ekonomi menjadi motor perubahan sejarah yang fundamental. Pendekatan ini memandang bahwa setiap transformasi sosial atau politik tidak dapat dipahami tanpa memperhatikan kondisi material masyarakat, karena basis ekonomi membentuk superstruktur yang mencerminkan kepentingan kelas penguasa.

Pada analisis ekonomi politik kontemporer, materialisme historis memberikan kerangka untuk memahami bagaimana konsentrasi modal dan dominasi ekonomi memengaruhi kebijakan publik, regulasi, serta distribusi kekuasaan, sehingga fenomena seperti globalisasi, privatisasi, dan dominasi korporasi multinasional dapat ditelaah sebagai manifestasi hubungan produksi yang timpang. Paradigma ini menjadikan

konflik kelas sebagai titik fokus, karena ketimpangan antara pemilik modal dan pekerja secara langsung membentuk arah kebijakan ekonomi dan dinamika sosial-politik.

b. Hubungan Produksi dan Kepemilikan

Hubungan produksi dan kepemilikan merupakan inti dari asumsi dasar paradigma Marxisme yang menekankan bahwa siapa yang menguasai alat produksi secara langsung menentukan distribusi kekayaan, struktur sosial, dan posisi politik dalam masyarakat, sehingga konflik antara kelas penguasa yang memiliki modal dan kelas pekerja yang hanya memiliki tenaga kerja menjadi faktor utama dalam dinamika ekonomi-politik. Paradigma ini menegaskan bahwa kepemilikan atas alat produksi bukan sekadar masalah ekonomi, tetapi juga instrumen kekuasaan yang memengaruhi hukum, ideologi, dan kebijakan publik, sehingga setiap analisis ekonomi-politik harus memperhitungkan struktur kepemilikan sebagai determinan utama.

Pada konteks modern, hubungan produksi dan kepemilikan memungkinkan pemahaman yang lebih kritis tentang ketimpangan sosial, dominasi korporasi, dan kontrol terhadap sumber daya strategis, karena kelas penguasa dapat memengaruhi kebijakan ekonomi untuk mempertahankan atau meningkatkan posisi dominannya. Hal ini membuat paradigma Marxisme relevan untuk menganalisis fenomena seperti monopoli pasar, privatisasi sektor publik, dan konsentrasi kekayaan global, di mana konflik kepentingan antara modal dan tenaga kerja tetap menjadi faktor determinan dalam setiap kebijakan ekonomi (Smith, 2020).

c. Konflik Kelas sebagai Motor Perubahan

Konflik kelas merupakan konsep sentral dalam paradigma Marxisme yang menegaskan bahwa perbedaan kepentingan antara kelas pemilik alat produksi dan kelas pekerja menciptakan ketegangan struktural yang menjadi motor utama perubahan sosial, politik, dan ekonomi, karena perjuangan kelas tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga membentuk institusi politik dan ideologi masyarakat. Paradigma ini menekankan bahwa transformasi sosial yang signifikan tidak muncul dari konsensus, tetapi dari konflik yang melekat dalam struktur

kelas, di mana perubahan dalam hubungan produksi sering kali diiringi dengan perjuangan politik dan pergeseran kekuasaan antara kelompok dominan dan subordinat.

Pada konteks ekonomi-politik kontemporer, konflik kelas membantu menjelaskan bagaimana kebijakan ekonomi, regulasi pasar, dan distribusi kekayaan sering kali mencerminkan pertarungan kepentingan antara kapitalis dan pekerja, sehingga krisis ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan mobilisasi politik masyarakat pekerja dapat dipahami sebagai manifestasi dari ketegangan kelas yang sistemik. Dengan perspektif ini, analisis ekonomi-politik tidak hanya memusatkan perhatian pada mekanisme pasar, tetapi juga pada interaksi kekuasaan dan kepentingan antara kelas yang berbeda, yang menentukan arah perkembangan ekonomi dan politik suatu negara (Wright, 2019).

2. Pandangan Marxisme terhadap Relasi Ekonomi dan Politik

Paradigma Marxisme menolak pemisahan antara ranah ekonomi dan politik sebagaimana diasumsikan oleh ekonomi klasik. Dalam Marxisme:

a. Politik adalah Alat Dominasi Kelas

Pada pandangan Marxisme, politik dipahami sebagai instrumen bagi kelas penguasa untuk mempertahankan dan memperluas dominasi ekonomi dan sosial, karena kebijakan publik, regulasi, dan lembaga negara dibentuk untuk melayani kepentingan pemilik modal, sehingga rakyat pekerja sering kali mengalami marginalisasi dalam proses pengambilan keputusan politik. Paradigma ini menegaskan bahwa negara dan lembaga politik bukanlah entitas netral, melainkan mekanisme struktural yang mencerminkan ketimpangan hubungan produksi, sehingga setiap kebijakan ekonomi dan politik harus dianalisis melalui lensa konflik kelas untuk memahami siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan.

Pada konteks modern, politik sebagai alat dominasi kelas menjelaskan bagaimana elit ekonomi dapat memengaruhi legislasi, anggaran, dan distribusi sumber daya, sehingga keputusan politik cenderung memperkuat posisi dominan sekaligus membatasi akses kelas pekerja terhadap kekuasaan dan peluang ekonomi. Pendekatan ini memungkinkan analisis

kritis terhadap fenomena seperti neoliberalisme, konsentrasi kekayaan, dan pengaruh korporasi multinasional dalam menentukan arah kebijakan publik, karena semua praktik politik yang terjadi tidak lepas dari kepentingan kelas yang menguasai ekonomi (Piketty, 2018).

b. Ideologi sebagai Alat Pengendalian

Pada perspektif Marxisme, ideologi dipahami sebagai instrumen yang digunakan oleh kelas penguasa untuk membentuk kesadaran sosial dan menjaga dominasi ekonomi-politik, karena media, pendidikan, dan budaya populer sering kali menyebarkan nilai, norma, dan keyakinan yang mendukung kepentingan elit sehingga rakyat bekerja dan berpikir sesuai dengan kepentingan kelas dominan. Paradigma ini menekankan bahwa ideologi tidak hanya berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan, tetapi juga menciptakan "kesadaran palsu" yang menutupi ketimpangan struktural dan konflik kelas, sehingga masyarakat cenderung menerima status quo tanpa menyadari eksploitasi yang terjadi (Eagleton, 2018).

Pada konteks ekonomi-politik kontemporer, ideologi sebagai alat pengendalian menjelaskan bagaimana narasi politik dan kebijakan publik sering kali dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi, sehingga konsep meritokrasi, kebebasan pasar, atau pembangunan nasional dapat digunakan untuk membenarkan ketimpangan dan menjaga posisi dominan kelas penguasa. Pendekatan ini memungkinkan analisis kritis terhadap praktik komunikasi politik, propaganda, dan pendidikan yang menginternalisasi norma kapitalis, karena semua bentuk ideologi tersebut berfungsi untuk memelihara struktur kekuasaan yang ada.

c. Negara sebagai Arena Pertarungan Kelas

Pada perspektif Marxisme, negara dipandang sebagai arena di mana konflik kepentingan kelas dominan dan kelas subordinat dimediasi dan diperebutkan, karena lembaga politik, aparat hukum, dan kebijakan publik secara struktural dibentuk oleh kepentingan ekonomi tetapi tetap menjadi ruang bagi tekanan, negosiasi, dan perlawanan kelas subordinat untuk mempengaruhi arah kebijakan. Paradigma ini menekankan bahwa meskipun negara sering mencerminkan dominasi kelas

penguasa, dinamika politik tidak sepenuhnya deterministik, karena pertarungan antar kelas yang terus berlangsung dapat menghasilkan kompromi, reformasi, atau transformasi struktural tertentu yang memengaruhi distribusi kekuasaan dan sumber daya (Jessop, 2019).

Pada konteks ekonomi-politik modern, memahami negara sebagai arena pertarungan kelas memungkinkan analisis tentang bagaimana kebijakan fiskal, hukum, dan regulasi pasar menjadi medan pertempuran antara kepentingan elit ekonomi dan tuntutan pekerja atau kelompok subordinat, sehingga dinamika politik tidak bisa dilepaskan dari konteks hubungan produksi dan kepemilikan alat produksi. Pendekatan ini juga relevan untuk menilai fenomena globalisasi, lobi korporasi, dan mobilisasi sosial, karena negara berfungsi sebagai mediator sekaligus arena konflik yang menentukan sejauh mana kepentingan kelas dominan dipertahankan atau dibatasi oleh tekanan sosial.

3. Analisis Ekonomi Politik Berbasis Marxisme

Pada ekonomi politik, paradigma Marxisme digunakan untuk menganalisis struktur ketimpangan, kekuatan modal, dan dampaknya terhadap kebijakan publik.

a. Struktur Kepemilikan dan Konsentrasi Modal

Struktur kepemilikan dalam paradigma Marxis menekankan bahwa kepemilikan alat produksi menentukan distribusi kekuasaan ekonomi dan politik dalam masyarakat, dan konsentrasi modal pada kelompok kecil memperkuat dominasi kelas pemilik terhadap kebijakan publik dan institusi negara. Hal ini membuat konflik kelas menjadi jelas, karena kelas pekerja hanya memiliki tenaga kerja sebagai modal dan posisinya lemah dibandingkan pemilik modal (Mandel, 2024).

Konsentrasi modal memungkinkan perusahaan besar dan elit ekonomi untuk mengontrol sektor strategis, memengaruhi regulasi pasar, dan memperkuat monopoli, sehingga distribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya menjadi semakin timpang. Paradigma Marxisme melihat fenomena ini sebagai refleksi dari hubungan produksi yang timpang, di mana kelas

penguasa mampu menjaga posisi dominannya melalui akumulasi kapital dan pengaruh politik.

b. Eksploitasi dan *Surplus Value*

Eksploitasi dalam paradigma Marxisme terjadi karena buruh hanya dibayar upah sebesar nilai tenaga kerjanya, sedangkan nilai yang sebenarnya diciptakan melalui kerja melebihi itu, yakni *surplus value*, di mana kapitalis mengklaim selisih nilai tersebut sebagai keuntungan tanpa memberikan kompensasi yang setara. Dalam kerangka analisis ekonomi politik, surplus value menjadi inti dari kritik Marxis terhadap kapitalisme karena ia menunjukkan bahwa keuntungan kapitalis bersumber langsung dari kerja tidak dibayar buruh, bukan dari pertumbuhan utamanya pada modal semata (Nasution *et al.*, 2025).

Konsep *surplus value* ini menjelaskan mengapa konflik kelas antara pekerja dan pemilik modal tak pernah jauh dari sistem kapitalis, karena kapitalis secara sistemik memaksimalkan durasi kerja atau produktivitas pekerja demi meningkatkan nilai lebih yang bisa dieksploitasi, tanpa menaikkan upah secara proporsional. Analisis Marxis menegaskan bahwa eksploitasi bukan sekadar bentuk ketidakadilan moral, tetapi fenomena struktural yang berdampak pada akumulasi modal, konsentrasi kekayaan, dan reproduksi hubungan kekuasaan kelas di dalam masyarakat.

c. Globalisasi dan Imperialisme

Globalisasi dalam kerangka Marxisme dipahami sebagai ekspansi modal kapitalis global yang mendorong negara-negara dominan untuk mengeksploitasi pasar dan tenaga kerja di negara-negara subordinat, sehingga hubungan produksi bersifat internasional dan memfasilitasi dominasi ekonomi lintas batas. Proses ini tidak hanya menciptakan jaringan perdagangan dan investasi global, tetapi juga memperkuat imperialisme sebagai wujud konkret dari pertumbuhan kapital yang terkonsentrasi, di mana negara imperialis menggunakan kekuatan ekonomi dan politik untuk mempertahankan hegemoninya dan memperdalam ketergantungan ekonomi negara-negara berkembang (Pradella, 2020).

Analisis Marxis terhadap globalisasi membahas bahwa kapitalisme global tidak bersifat netral karena konsentrasi modal dalam korporasi multinasional memungkinkan untuk mendikte regulasi internasional dan menekan kedaulatan negara demi melanggengkan ekspansi kapital. Paradigma ini menunjukkan bahwa konflik kelas tidak lagi hanya lokal tetapi juga berskala global, dengan kapital imperialis berkuasa yang menyusun struktur ekonomi dunia untuk memaksimalkan ekstraksi nilai dari negara subordinat.

C. Paradigma Neogramski

Paradigma *Neo-Gramsci* merupakan pengembangan dari teori Antonio Gramsci yang menekankan konsep hegemoni budaya dalam analisis kekuasaan dan politik, terutama dalam konteks ekonomi-politik modern. Paradigma ini melihat bahwa kekuasaan bukan hanya diperoleh melalui kontrol langsung atas negara atau kekuatan militer, tetapi melalui pengaruh ideologi, norma, dan budaya yang membuat kelas dominan diterima sebagai pemimpin oleh masyarakat. Dengan kata lain, dominasi kelas tidak selalu bersifat koersif, melainkan bisa terjadi secara konsensual melalui internalisasi nilai-nilai yang mendukung status quo. Beberapa karakteristik utama paradigma *Neo-Gramsci* antara lain:

1. Hegemoni Budaya

Hegemoni budaya menurut *Neo-Gramsci* adalah mekanisme dominasi kelas penguasa yang tidak hanya melalui kekerasan atau kontrol negara, tetapi melalui persetujuan ideologis, di mana nilai, norma, dan pandangan dunia kelas dominan dijadikan sebagai “*common sense*” sehingga masyarakat subordinat menerima kepemimpinan kelas atas sebagai sesuatu yang wajar dan sah secara sosial dan moral (Purwanti, 2023). Alat-alat budaya seperti media, pendidikan, agama, dan lembaga sosial menjadi medan perjuangan ideologis karena kelas penguasa menyebarkan ideologi dominannya agar dapat mempertahankan kekuasaan tanpa paksaan langsung.

Hegemoni budaya bersifat dinamis, sehingga kelas subordinat tidak sepenuhnya pasif; dapat mengkritik, bernegosiasi, atau membentuk counter-hegemoni melalui intelektual organik dan institusi

budaya. Proses ini menegaskan bahwa dominasi ideologis bukan sekadar penerimaan pasif, tetapi merupakan hasil interaksi antara tekanan kelas penguasa dan kesadaran kolektif masyarakat. Dengan demikian, hegemoni budaya menjadi pusat analisis dalam memahami bagaimana kekuasaan kelas dominan dipertahankan dalam masyarakat modern.

2. Peran Intelektual Organik

Intelektual organik menurut *Neo-Gramsci* adalah tokoh-tokoh yang muncul dari kelas sosial tertentu dan secara aktif mengartikulasikan kepentingan kelas tersebut dalam ranah ideologi dan budaya, sehingga berfungsi sebagai mediator antara struktur ekonomi dan kesadaran masyarakat. Tidak berdiri netral, melainkan menjadi bagian dari praktek sosial dan perjuangan kelas, karena kehadirannya memperkuat kohesi kelas melalui penyebaran gagasan yang mencerminkan pengalaman dan aspirasi kelas yang diwakili (Yahya, 2019). Dengan demikian, intelektual organik menjadi agen strategis dalam membangun hegemoni budaya karena mampu menerjemahkan struktur material ke dalam kerangka ideologis yang dapat diterima secara luas oleh masyarakat subordinat.

Peran intelektual organik mencakup pengorganisasian kesadaran kolektif dengan cara menghubungkan teori dengan praktik sosial, sehingga gagasan-gagasan revolusioner atau transformasional tidak hanya menjadi wacana teoretis, tetapi juga dipraktikkan melalui organisasi massa, partai, dan institusi sipil. Bekerja dalam lembaga seperti partai politik, serikat pekerja, atau komunitas lokal untuk membangun basis sosial dan mobilisasi politik, menjadikan ideologi kelas sebagai alat perjuangan dan perubahan sosial jangka panjang. Karena itu, berperan dalam strategi “*war of position*” Gramsci, yaitu perjuangan ideologis yang perlahan-lahan menggeser dominasi kelas penguasa melalui pendidikan, budaya, dan diskursus publik.

3. Dominasi dan Konsensus

Paradigma *Neo-Gramsci* melihat bahwa struktur kekuasaan kelas dominan tidak hanya dibangun melalui tekanan kasar atau dominasi langsung, tetapi juga melalui konsensus sosial di mana nilai, norma dan institusi kelas penguasa diterima oleh masyarakat luas sebagai hal yang wajar dan sah secara moral dan budaya. Dalam

hubungan ini dominasi kelas bukan hanya soal penguasaan alat produksi atau instrumen negara, melainkan soal bagaimana mampu membuat kekuasaannya tampak “alami” dan mendapat persetujuan (*consent*) aktif dari kelas subordinat, sehingga stabilitas sosial-politik lebih tahan lama dan perubahan arus bisa dikendalikan secara ideologis. Proses ini menunjukkan bahwa dominasi dan konsensus saling terkait: dominasi membutuhkan konsensus agar tidak selalu harus bertumpu pada kekerasan, dan konsensus itu sendiri dibangun melalui pengorganisasian budaya, pendidikan, media dan lembaga sipil oleh intelektual organik kelas penguasa.

Pada konteks analisis ekonomi-politik kontemporer, karakteristik dominasi dan konsensus menjelaskan bagaimana kelas kapitalis besar tidak hanya mengontrol modal dan alat produksi, tetapi juga memengaruhi agenda publik, kebijakan ekonomi dan kerangka pikir kolektif agar struktur kekuasaan tetap berlangsung dengan sedikit resistensi terbuka. Melalui lembaga-lembaga negara dan masyarakat sipil, dominasi kelas penguasa dibentuk bukan hanya lewat regulasi dan kebijakan yang menguntungkannya, tetapi juga lewat narasi yang memosisikan kepentingannya sebagai “kepentingan bersama” atau “nasional” sehingga dialektika konflik kelas diredam melalui konsensus budaya yang tampak. Dengan demikian, paradigma *Neo-Gramsci* menawarkan kerangka kritis untuk melihat bahwa penguasaan kelas dominan di era neoliberal dan globalisasi bukan semata soal kontrol ekonomi, tetapi soal bagaimana membangun persetujuan sosial yang melekat dan mengkonsolidasikan kekuasaannya dengan sedikit paksaan langsung (Mello, 2022).

4. Analisis Struktural dan Agensi

Paradigma *Neo-Gramsci* menekankan bahwa analisis kekuasaan dan perubahan sosial tidak bisa hanya dilihat dari struktur sosial atau ekonomi, tetapi juga dari peran aktor atau agen sosial yang berinteraksi dengan struktur tersebut; hubungan antara struktur dan agensi membentuk hegemoni karena kelas penguasa menciptakan aturan dan institusi yang memfasilitasi dominasi, sementara aktor sosial memiliki kapasitas untuk mematuhi, menegosiasi, atau menentang aturan tersebut (Bieler, 2019). Dengan pendekatan ini, perubahan sosial tidak bersifat deterministik karena agensi memungkinkan kelas subordinat atau kelompok perlawanan untuk membangun counter-hegemoni,

menyebarkan ideologi alternatif, dan menantang konsensus yang telah terbentuk, sehingga struktur tidak sepenuhnya mengekang peluang perlawanan. Paradigma ini memandang struktur sosial, politik, dan ekonomi sebagai medan perjuangan yang dinamis, di mana aktor berperan aktif dalam mereproduksi atau mengubah pola dominasi melalui strategi, narasi, dan institusi budaya.

Analisis struktural dan agensi memungkinkan kita memahami bagaimana lembaga negara, media, dan pendidikan membentuk kesadaran kolektif, sekaligus menyediakan ruang bagi intelektual organik dan organisasi sosial untuk memanfaatkan celah-celah dalam struktur guna membangun perubahan sosial. Interaksi antara struktur dan agensi menegaskan bahwa hegemoni bukan hanya soal kontrol material, tetapi juga pengaruh ideologis dan persetujuan sosial yang dapat dimodifikasi melalui tindakan strategis aktor sosial. Dengan demikian, paradigma *Neo-Gramsci* menawarkan kerangka kritis untuk menilai peluang transformasi sosial dengan menyeimbangkan pemahaman tentang determinasi struktural dan potensi agensi.

D. Paradigma Institusionalisme

Paradigma Institusionalisme adalah kerangka analisis dalam ilmu sosial dan ekonomi politik yang menekankan peran institusi, baik formal maupun informal, dalam membentuk perilaku individu, struktur sosial, dan proses politik. Paradigma ini berfokus pada bagaimana aturan, norma, prosedur, dan organisasi memengaruhi keputusan ekonomi, politik, dan sosial, sehingga institusi tidak sekadar wadah pasif, tetapi merupakan aktor yang membentuk hasil sosial dan politik. Dalam perspektif ini, perubahan sosial atau ekonomi tidak dapat dipahami hanya dari perilaku individual atau kekuatan pasar, karena institusi menyediakan konteks, batasan, dan peluang yang menentukan interaksi sosial. Beberapa karakteristik utama paradigma institusionalisme antara lain

1. Penekanan pada Aturan dan Norma

Penekanan pada aturan dan norma dalam paradigma institusionalisme menekankan bahwa perilaku individu dan kelompok sosial dibentuk oleh kerangka formal seperti hukum, regulasi, dan prosedur organisasi, maupun kerangka informal seperti adat, tradisi,

dan nilai-nilai sosial yang diinternalisasi, sehingga keputusan ekonomi, politik, dan sosial tidak dapat dipisahkan dari konteks institusional yang mengaturnya. Dengan kata lain, aturan dan norma berfungsi sebagai mekanisme pembatas sekaligus pemandu perilaku, yang memungkinkan masyarakat mencapai prediktabilitas dan stabilitas dalam interaksi sosial dan proses pengambilan keputusan (North, 2018).

Aturan dan norma tidak hanya bersifat pasif, tetapi aktif membentuk kesempatan, batasan, dan konsekuensi bagi individu dan organisasi, sehingga struktur institusional secara langsung memengaruhi hasil-hasil sosial dan ekonomi. Paradigma ini menunjukkan bahwa setiap inovasi, kebijakan, atau perubahan sosial harus dianalisis dalam konteks institusi yang ada, karena institusi menyediakan kerangka yang menentukan apa yang mungkin dan apa yang sulit dicapai dalam praktik nyata masyarakat.

2. Pengaruh Struktur terhadap Perilaku

Pengaruh struktur terhadap perilaku dalam paradigma institusionalisme menekankan bahwa individu dan organisasi tidak bertindak sepenuhnya bebas karena perilakunya dibatasi dan diarahkan oleh struktur institusional yang ada, termasuk hukum, prosedur birokrasi, norma sosial, dan mekanisme pengawasan, sehingga keputusan dan tindakan sehari-hari selalu dipandu oleh konteks institusional. Dengan demikian, struktur institusi menentukan peluang dan batasan bagi aktor sosial, sehingga hasil-hasil sosial dan ekonomi tidak bisa dipahami tanpa melihat kerangka struktural yang memengaruhi perilaku tersebut (Thelen, 2018).

Pengaruh struktur terhadap perilaku juga menjelaskan mengapa organisasi dan individu sering menunjukkan pola tindakan yang konsisten, karena institusi menyediakan aturan main, sanksi, dan reward yang menstabilkan interaksi sosial serta meminimalkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Paradigma ini menekankan bahwa perubahan sosial dan inovasi tidak hanya bergantung pada keinginan atau kemampuan individu, tetapi juga pada sejauh mana struktur institusional memungkinkan atau menghalangi implementasi tindakan baru.

3. Interaksi antara Agen dan Institusi

Interaksi antara agen dan institusi dalam paradigma institusionalisme menekankan bahwa individu atau kelompok sosial tidak hanya dipengaruhi oleh aturan, norma, dan struktur institusional, tetapi juga memiliki kapasitas untuk menegosiasikan, memodifikasi, atau menciptakan institusi baru sesuai dengan kepentingan dan strateginya, sehingga tercipta hubungan dinamis antara struktur dan agensi yang memungkinkan reproduksi atau transformasi sosial. Paradigma ini menunjukkan bahwa institusi bukanlah entitas statis, karena aktor sosial secara aktif berperan dalam membentuk dan menyesuaikan institusi agar selaras dengan kebutuhan dan aspirasinya, sehingga perubahan sosial selalu merupakan hasil interaksi antara batasan struktural dan tindakan agen (Hall & Taylor, 2018).

Interaksi ini menjelaskan mengapa institusi dapat bertahan lama sekaligus fleksibel, karena agen sosial dapat menyesuaikan perilakunya dengan struktur yang ada sambil memperkenalkan inovasi atau adaptasi yang merespons tantangan eksternal maupun internal. Hubungan timbal balik antara agen dan institusi menegaskan bahwa stabilitas sosial tidak hanya bergantung pada aturan formal, tetapi juga pada bagaimana aktor memahami, menggunakan, dan terkadang merombak institusi untuk mencapai tujuan tertentu.

4. Fokus pada Stabilitas dan Perubahan

Paradigma institusionalisme menekankan bahwa institusi berperan ganda dalam menciptakan stabilitas sosial dan memungkinkan perubahan, karena menyediakan aturan, norma, dan prosedur yang membuat interaksi sosial dapat diprediksi sekaligus memberikan kerangka untuk adaptasi terhadap tekanan internal maupun eksternal. Dengan demikian, analisis institusional harus memperhatikan bagaimana institusi menjaga kontinuitas dan ketertiban dalam masyarakat sambil memungkinkan transformasi melalui reformasi, inovasi, atau penyesuaian kebijakan, sehingga stabilitas dan perubahan tidak saling eksklusif tetapi saling terkait (Schmidt, 2019).

Fokus pada stabilitas dan perubahan menjelaskan mengapa institusi cenderung bertahan lama meskipun lingkungan sosial, politik, dan ekonomi mengalami tekanan, karena aktor sosial menggunakan mekanisme adaptasi untuk mempertahankan fungsi institusi sekaligus merespons tuntutan baru. Paradigma ini menegaskan bahwa keberlanjutan institusi bukan semata-mata hasil struktur yang kaku,

tetapi hasil interaksi dinamis antara aturan formal, norma sosial, dan tindakan agen yang dapat memperkuat atau mengubah institusi.

E. Perbandingan dan Relevansi Tiap Paradigma di Negara Berkembang

Di negara berkembang, dinamika ekonomi, politik, dan sosial sangat kompleks, termasuk ketimpangan ekonomi, konflik kelas, kelemahan institusi, serta tekanan globalisasi. Untuk menganalisis fenomena ini secara komprehensif, berbagai paradigma ekonomi politik digunakan: Liberalisme, Marxisme, Neo-Gramsci, dan Institusionalisme, masing-masing menekankan aspek berbeda dari interaksi antara aktor, struktur, dan institusi.

1. Paradigma Liberalisme

Paradigma liberalisme menekankan pentingnya kebebasan individu, hak kepemilikan, dan mekanisme pasar bebas sebagai penentu alokasi sumber daya yang efisien. Dalam konteks negara berkembang, liberalisme relevan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan internasional, investasi asing, dan pengembangan sektor swasta. Paradigma ini menekankan peran negara yang minimal, sehingga individu dan perusahaan memiliki ruang untuk berinovasi dan berkompetisi. Namun, penerapan liberalisme harus disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi lokal agar tidak memperlebar kesenjangan dan ketimpangan sosial. Dengan demikian, liberalisme menawarkan kerangka yang membantu memahami dinamika pertumbuhan, peluang ekonomi, dan peran pasar dalam pembangunan.

Liberalisme dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana deregulasi dan reformasi pasar mempengaruhi akses masyarakat terhadap sumber daya dan layanan dasar. Paradigma ini menekankan bahwa efektivitas kebijakan ekonomi bergantung pada kapasitas pasar untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat. Di negara berkembang, liberalisasi ekonomi dapat mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas nasional. Meskipun demikian, liberalisme juga menghadapi tantangan terkait stabilitas sosial dan keberlanjutan lingkungan, sehingga intervensi selektif dari pemerintah sering diperlukan. Dengan pendekatan ini, liberalisme membantu

menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan kebijakan sosial untuk pembangunan yang lebih inklusif.

2. Paradigma Marxisme

Paradigma Marxisme menekankan konflik kelas, dominasi ekonomi, dan distribusi kekayaan sebagai kunci untuk memahami dinamika sosial dan politik di negara berkembang. Pendekatan ini relevan untuk menganalisis ketimpangan struktural, eksploitasi buruh, dan konsentrasi kekuasaan yang kerap terjadi di tengah pembangunan ekonomi yang tidak merata. Marxisme membahas bagaimana elit ekonomi dan politik mempertahankan kontrol melalui kepemilikan sumber daya dan pengaruh institusional. Dengan perspektif ini, pembangunan tidak hanya dinilai dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana keadilan sosial dan distribusi sumber daya dapat tercapai. Paradigma ini membantu menjelaskan mengapa ketimpangan dan kemiskinan kronis seringkali menjadi hambatan utama dalam proses pembangunan di negara berkembang.

Marxisme menekankan bahwa perubahan sosial dan ekonomi terjadi melalui konflik dan perjuangan antara kelas-kelas yang memiliki kepentingan berbeda. Paradigma ini relevan untuk menilai kebijakan ekonomi, reformasi agraria, dan redistribusi sumber daya sebagai strategi untuk mengurangi ketimpangan. Di negara berkembang, konflik kelas sering muncul akibat ketidakmerataan pembangunan, perbedaan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Marxisme menawarkan kerangka untuk memahami hubungan antara kepemilikan modal, struktur politik, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, analisis Marxisme membantu mengidentifikasi akar masalah ketimpangan dan menyediakan dasar untuk intervensi yang lebih adil dan berkelanjutan.

3. Paradigma Neo-Gramsci

Paradigma *Neo-Gramsci* menekankan konsep hegemoni budaya, peran intelektual organik, dan konsensus sosial sebagai cara untuk memahami dominasi kekuasaan yang tidak hanya bersifat ekonomi atau politik. Pendekatan ini relevan di negara berkembang karena kekuasaan sering dijaga melalui persetujuan sosial, nilai budaya, pendidikan, dan media, bukan hanya melalui kontrol ekonomi. Paradigma ini membantu menganalisis bagaimana elit politik dan

ekonomi membentuk wacana, membangun legitimasi kekuasaan, dan mempengaruhi perilaku masyarakat. Dengan perspektif Neo-Gramsci, perubahan sosial juga dipahami sebagai hasil dari interaksi antara kelompok dominan dan subordinat melalui perjuangan ideologis dan pembentukan konsensus alternatif. Hal ini membuat pendekatan ini penting untuk menilai strategi pemberdayaan masyarakat dan transformasi sosial.

Neo-Gramsci menekankan bahwa intelektual organik berperan penting dalam menciptakan kesadaran kolektif dan menantang hegemoni yang ada. Paradigma ini relevan untuk menganalisis bagaimana kelompok masyarakat atau gerakan sosial dapat mengembangkan counter-hegemoni untuk menyeimbangkan ketimpangan kekuasaan. Di negara berkembang, dominasi ideologi sering muncul melalui pendidikan, media, dan budaya populer yang mendukung kepentingan elit. Paradigma ini memungkinkan penilaian terhadap strategi komunikasi politik, mobilisasi sosial, dan pembangunan kesadaran kritis di masyarakat. Dengan demikian, *Neo-Gramsci* menawarkan kerangka untuk memahami dinamika kekuasaan yang tidak terlihat secara langsung tetapi sangat mempengaruhi pembangunan dan perubahan sosial.

4. Paradigma Institusionalisme

Paradigma Institusionalisme menekankan pentingnya aturan, norma, dan struktur institusi dalam membentuk perilaku individu maupun kelompok dalam masyarakat. Di negara berkembang, paradigma ini relevan untuk menganalisis bagaimana institusi politik, hukum, dan ekonomi mempengaruhi stabilitas sosial dan efektivitas kebijakan publik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya bergantung pada kekuatan pasar atau konflik kelas, tetapi juga pada kemampuan institusi untuk menegakkan aturan dan mengarahkan tindakan agen sosial. Paradigma ini membantu menjelaskan mengapa beberapa kebijakan sulit diimplementasikan meskipun secara teoritis logis, karena institusi dapat membatasi atau memfasilitasi perilaku aktor. Dengan demikian, Institusionalisme memberikan kerangka untuk menilai peran struktur formal dan informal dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Paradigma ini membahas interaksi dinamis antara agen dan institusi, di mana aktor sosial tidak hanya dipengaruhi oleh aturan tetapi

juga dapat memodifikasi atau menciptakan institusi baru sesuai kebutuhan. Di negara berkembang, interaksi ini penting untuk memahami bagaimana reformasi birokrasi, kebijakan desentralisasi, dan penguatan tata kelola dapat diterapkan secara efektif. Paradigma ini relevan untuk menilai bagaimana stabilitas dan perubahan sosial-politik dapat dicapai melalui kombinasi aturan formal, norma sosial, dan tindakan agen. Dengan pendekatan ini, analisis pembangunan menjadi lebih realistis karena mempertimbangkan kapasitas institusi dan batasan struktural. Oleh karena itu, Institusionalisme membantu memahami mekanisme keberlanjutan institusi sekaligus peluang perubahan.

F. Study Case

1. Studi Kasus: Dampak Kebijakan Subsidi Energi terhadap Ketimpangan Ekonomi di Negara Berkembang

Di sebuah negara berkembang, pemerintah menerapkan kebijakan subsidi energi untuk menekan biaya listrik dan bahan bakar bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dari perspektif paradigma liberalisme, subsidi ini dapat dilihat sebagai intervensi yang bertujuan sementara di pasar yang seharusnya beroperasi berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan, sehingga kebijakan jangka panjang sebaiknya diarahkan pada penciptaan pasar energi yang kompetitif dan efisien. Dari sudut pandang paradigma Marxisme, kebijakan ini membahas ketimpangan kelas karena subsidi sering lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang lebih mampu, sementara kelas pekerja yang miskin tetap menghadapi kesulitan akses energi dan beban ekonomi lainnya, sehingga konflik kelas dan distribusi kekayaan menjadi relevan untuk dianalisis.

Pendekatan *Neo-Gramsci* menekankan aspek ideologi dan konsensus sosial, di mana pemerintah menggunakan subsidi sebagai alat legitimasi politik dan membangun persetujuan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, subsidi tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga terkait pembentukan opini publik dan dominasi ideologis agar masyarakat menerima kebijakan pemerintah sebagai sesuatu yang adil dan bermanfaat. Sementara itu, paradigma institusionalisme membahas peran aturan, birokrasi, dan kapasitas institusi dalam implementasi subsidi, termasuk pengawasan distribusi, akuntabilitas, dan mekanisme adaptasi kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat.

Analisis multi-paradigma menunjukkan bahwa kebijakan subsidi energi tidak dapat dievaluasi hanya dari satu sudut pandang. Liberalisme menekankan efisiensi pasar dan pengurangan intervensi, Marxisme membahas ketimpangan dan distribusi, *Neo-Gramsci* melihat peran ideologi dan legitimasi sosial, sedangkan Institusionalisme menekankan efektivitas regulasi dan kapasitas institusi. Studi kasus ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang landasan teori dan paradigma ekonomi politik sangat penting untuk merancang kebijakan yang tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial, sah secara politik, dan berkelanjutan secara institusional.

BAB III

NEGARA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK

Negara dalam perspektif ekonomi politik dipandang sebagai aktor utama yang memengaruhi distribusi sumber daya dan kekuasaan dalam masyarakat. Peran negara meliputi pengaturan kegiatan ekonomi, penetapan kebijakan publik, dan pengawasan terhadap kepentingan berbagai kelompok sosial. Interaksi antara negara dan ekonomi membentuk dinamika pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

A. Peran Negara dalam Mengatur Pasar

Negara berperan sentral dalam mengatur pasar untuk memastikan kegiatan ekonomi berjalan adil, efisien, dan stabil. Tanpa peran negara, pasar dapat mengalami ketidakpastian, praktik monopoli, dan ketimpangan yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, intervensi negara diperlukan untuk menyeimbangkan kepentingan pelaku ekonomi dengan perlindungan publik. Berikut rincian peran negara dalam mengatur pasar.

Gambar 4. Peran Negara dalam Pasar



Sumber: *Master Plan Desa*

1. Menyusun Regulasi dan Kebijakan Pasar

Negara menyusun regulasi dan kebijakan pasar sebagai mekanisme vital untuk memperbaiki kegagalan pasar (market failure) dan melindungi kepentingan publik, seperti konsumen dan pelaku usaha kecil. Dalam kerangka regulasi ini, negara menerapkan instrumen seperti undang-undang persaingan, pajak, dan standar kualitas guna menjamin kompetisi yang sehat serta mencegah penyalahgunaan kekuatan pasar. Menurut Vértsey (2024), regulasi pasar dalam sektor keuangan sangat penting untuk mencegah risiko sistemik seperti fenomena “*too big to fail*” dan moral hazard, sekaligus melindungi konsumen dan memastikan stabilitas jangka panjang.

Dengan peraturan yang jelas dan konsisten, negara menciptakan kepastian hukum yang mendorong investasi dan inovasi, karena pelaku usaha tahu batasan dan risiko yang harus dipatuhi. Regulasi juga berfungsi sebagai pengawas (supervisi) agar praktik monopoli atau kolusi tidak merugikan masyarakat, serta menjaga agar konsentrasi pasar tidak merusak persaingan. Selain itu, kebijakan fiskal seperti subsidi dan pajak diarahkan untuk menyeimbangkan efisiensi ekonomi dengan keadilan sosial, sehingga kebijakan regulasi bisa menciptakan alokasi sumber daya yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

2. Menjaga Stabilitas Ekonomi

Negara menjaga stabilitas ekonomi dengan memanfaatkan kebijakan fiskal dan moneter secara terkoordinasi untuk meredam fluktuasi makro seperti inflasi, pengangguran, dan guncangan eksternal.

Dalam fase kontraksi ekonomi, pemerintah dapat memperluas pengeluaran publik atau menurunkan pajak untuk mendorong konsumsi dan investasi, sementara otoritas moneter melonggarkan kebijakan suku bunga dan meningkatkan likuiditas guna mendorong pemulihan. Sebaliknya, ketika ekonomi terlalu panas, tindakan kontras seperti menaikkan suku bunga atau menyesuaikan pengeluaran negara dapat diambil untuk menahan laju inflasi dan menjaga daya beli.

Koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi kunci karena jika salah satu kebijakan berjalan sendiri tanpa dukungan dari yang lain, efek stabilisasi bisa melemah atau bahkan kontra-produktif. Misalnya, menurut Zulaikah (2024), sinergi kebijakan fiskal dan moneter sangat penting untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan stabilitas harga dan lapangan kerja. Kebijakan kontra-siklus semacam ini fiskal ekspansif saat resesi dan kontraktif saat overheating membantu negara menjaga kerangka ekonomi yang kokoh dalam jangka panjang.

3. Mencegah Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat

Negara mencegah monopoli dan persaingan tidak sehat dengan memberdayakan lembaga pengawas independen seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengawasi dan menindak pelaku usaha yang menyalahgunakan posisi dominan atau bersekongkol dalam kartel. KPPU diberi wewenang melalui undang-undang untuk melakukan penilaian terhadap perjanjian usaha dan tindakan dominan yang berpotensi menutup persaingan, serta menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar. Menurut Noranisa, Fathurahman, dan Paikah (2025), fungsi pengawasan preventif dan korektif KPPU sangat penting untuk menjaga pasar tetap kompetitif dan mencegah praktik monopoli yang dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha lain.

Negara melalui regulasi persaingan memperjelas aturan tentang kegiatan yang dilarang seperti harga *predatory*, persekongkolan, dan pembagian wilayah pemasaran, sehingga mengurangi peluang pelaku usaha menguasai pasar melalui cara curang. Dengan kejelasan regulasi tersebut, pelaku usaha memahami batasan perilaku dan potensi konsekuensi hukumnya, yang mendorong praktik bisnis yang lebih adil dan transparan. Negara pun mampu menyeimbangkan kepentingan

berbagai pelaku, termasuk usaha kecil dan menengah, agar tidak tertindas oleh pemain besar yang mencoba mendominasi pasar.

4. Melindungi Konsumen dan Kelompok Rentan

Negara melindungi konsumen dan kelompok rentan dengan merumuskan regulasi yang menjamin hak konsumen atas informasi, keselamatan, dan keadilan dalam transaksi, terutama di era digital yang rentan terhadap penyalahgunaan oleh pelaku usaha. Dalam konteks e-commerce misalnya, pemerintah menetapkan aturan agar pelaku usaha membuka transparansi kontrak dan klausul eksonerasi demi mencegah konsumen diperlakukan semena-mena, serta membangun lembaga penyelesaian sengketa konsumen agar kelompok berdaya tawar rendah dapat mengakses keadilan. Sebagaimana dinyatakan oleh Ghozali dan Hardyanthi (2024), tugas utama pemerintah adalah merumuskan kebijakan dan peraturan yang membentuk kerangka kerja hukum yang kokoh untuk melindungi konsumen dari praktik merugikan.

Negara menerapkan kebijakan redistributif seperti subsidi atau bantuan sosial pada kelompok ekonomi lemah agar mampu mengakses barang dan jasa esensial tanpa mengalami eksploitasi harga. Perlindungan ini dirancang agar konsumen yang secara ekonomi atau sosial berada pada posisi rentan, misalnya masyarakat berpenghasilan rendah, lanjut usia, atau penyandang disabilitas, tidak menjadi korban praktik usaha yang diskriminatif atau tidak adil. Melalui mekanisme pengawasan dan intervensi publik, negara dapat memastikan agar pasar tidak hanya menguntungkan pelaku besar, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan konsumen yang paling lemah.

B. Tipe-tipe Negara: Developmental State, Welfare State, Neoliberal State

Negara dapat dikategorikan ke dalam beberapa tipe berdasarkan peran dan intervensinya dalam ekonomi serta tanggung jawab sosialnya. Tiga tipe negara yang paling umum adalah developmental state, welfare state, dan neoliberal state, masing-masing memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda. Berikut penjelasan rinci mengenai tiap tipe:

1. Developmental State

Developmental State adalah tipe negara yang menekankan peran aktif pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang, industrialisasi, dan peningkatan kapasitas nasional. Negara jenis ini tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai perencana strategis yang mengarahkan investasi, teknologi, dan sumber daya ke sektor-sektor prioritas untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Karakteristik utama dan peranannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Perencanaan Ekonomi yang Terarah

Perencanaan ekonomi yang terarah menjadi karakteristik utama developmental state karena pemerintah menetapkan strategi dan target pembangunan jangka panjang untuk sektor-sektor prioritas agar sumber daya nasional dialokasikan secara efisien dan produktif. Dengan pendekatan ini, negara mampu mengarahkan perubahan struktural melalui investasi, pengembangan infrastruktur, dan prioritas industri demi pertumbuhan ekonomi yang cepat dan berkelanjutan.

Pendekatan perencanaan ini juga memastikan bahwa kebijakan fiskal, moneter, dan investasi selaras dengan sasaran pembangunan nasional, sehingga negara tidak hanya menunggu mekanisme pasar bekerja sendiri, tetapi aktif mengendalikan variabel makroekonomi untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan. Menurut Mudrajad Kuncoro (2018), kerangka perencanaan pembangunan menghubungkan tabungan, investasi, dan tenaga kerja dengan sasaran ekonomi agar pertumbuhan dapat dikendalikan dan hasilnya maksimal.

b. Intervensi Aktif di Pasar

Intervensi aktif di pasar merupakan karakteristik utama dari developmental state karena pemerintah tidak membiarkan mekanisme pasar berjalan sepenuhnya secara bebas, melainkan secara strategis mengarahkan investasi, subsidi, dan regulasi untuk mendorong sektor-sektor yang dianggap prioritas demi meningkatkan kapasitas produksi nasional dan daya saing industri. Menurut Amsal dan Nugroho (2022), intervensi pemerintah yang terarah ini memungkinkan negara mengurangi ketidakpastian ekonomi, mempercepat industrialisasi, dan memastikan pertumbuhan yang stabil sekaligus inklusif.

Dengan intervensi aktif, pemerintah juga melindungi industri domestik dari persaingan luar yang terlalu kuat, mendorong pengembangan teknologi, dan mendukung penelitian serta inovasi agar perusahaan nasional mampu bersaing di pasar global. Kebijakan ini mencakup dukungan finansial, pemberian insentif pajak, serta regulasi yang mengatur kualitas dan standar produksi agar tujuan pembangunan ekonomi tercapai secara optimal.

c. Fokus pada Industrialisasi dan Ekspor

Fokus pada industrialisasi dan ekspor menjadi karakteristik utama developmental state karena negara menempatkan pembangunan sektor industri sebagai motor pertumbuhan ekonomi dan menggunakan ekspor sebagai sarana untuk meningkatkan devisa serta memperkuat daya saing global. Menurut Suryanto dan Prasetyo (2021), strategi industrialisasi yang terarah dan orientasi ekspor memungkinkan negara berkembang untuk mempercepat transformasi ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan produktivitas nasional secara signifikan.

Pemerintah mengarahkan investasi, teknologi, dan sumber daya manusia ke sektor-sektor manufaktur strategis serta mendukung pengembangan infrastruktur produksi agar industri domestik mampu memenuhi standar internasional. Dengan memfokuskan pada ekspor, negara tidak hanya menstimulasi permintaan domestik tetapi juga memperluas pasar global bagi produk lokal, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih cepat dan stabil.

2. Welfare State

Welfare State adalah tipe negara yang menekankan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan perlindungan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Fokus utama negara ini adalah mengurangi kesenjangan sosial, menjamin akses terhadap kebutuhan dasar, dan memastikan kualitas hidup masyarakat meningkat secara merata. Karakteristik utama dan peranannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Perlindungan Sosial yang Luas

Perlindungan sosial yang luas merupakan karakteristik utama welfare state karena pemerintah menyediakan jaminan sosial, termasuk asuransi kesehatan, pensiun, tunjangan pengangguran, dan program bantuan bagi kelompok rentan, sehingga seluruh warga negara memiliki akses terhadap kesejahteraan dasar dan risiko sosial dapat diminimalkan. Menurut Fitriani dan Hidayat (2022), implementasi sistem perlindungan sosial yang komprehensif memungkinkan negara mengurangi ketimpangan ekonomi, meningkatkan stabilitas sosial, dan menciptakan masyarakat yang lebih produktif serta sejahtera.

Penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang merata mendukung terciptanya kesempatan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga semua warga dapat berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial secara adil. Pemerintah mengalokasikan anggaran signifikan untuk memastikan kualitas layanan publik tetap tinggi dan menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

b. Penyediaan Layanan Publik Berkualitas

Penyediaan layanan publik berkualitas menjadi karakteristik utama welfare state karena pemerintah memastikan akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, dan transportasi tersedia secara merata dan terjangkau bagi seluruh warga negara, sehingga meningkatkan kualitas hidup dan kesempatan sosial ekonomi masyarakat. Menurut Rahmawati dan Santoso (2021), layanan publik yang efektif dan merata dapat menekan kesenjangan sosial, mendorong partisipasi warga dalam pembangunan, serta menciptakan masyarakat yang lebih produktif dan berdaya saing.

Pemerintah mengalokasikan sumber daya dan anggaran secara signifikan untuk menjaga kualitas layanan publik agar semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, memperoleh manfaat yang setara, sehingga tercipta keadilan sosial dan stabilitas ekonomi. Kualitas layanan publik yang tinggi juga memungkinkan masyarakat mengakses pendidikan dan kesehatan yang memadai, yang pada gilirannya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia nasional secara keseluruhan.

c. Redistribusi Kekayaan

Redistribusi kekayaan merupakan karakteristik utama welfare state karena pemerintah menerapkan kebijakan fiskal, pajak progresif, subsidi, dan bantuan sosial untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan pendapatan serta sumber daya dapat dinikmati secara lebih merata oleh seluruh warga negara. Menurut Handayani dan Pratama (2020), mekanisme redistribusi yang efektif tidak hanya meningkatkan keadilan sosial tetapi juga mendukung stabilitas ekonomi dan politik dengan memperkuat daya beli masyarakat serta mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan nasional.

Dengan redistribusi kekayaan, negara mampu memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti masyarakat berpenghasilan rendah, lansia, dan penyandang disabilitas, sehingga kesenjangan sosial dapat ditekan dan peluang ekonomi lebih merata. Kebijakan ini menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif dan memungkinkan seluruh warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses layanan publik, pendidikan, dan lapangan kerja.

3. Neoliberal State

Neoliberal State adalah tipe negara yang menekankan peran minimal pemerintah dalam ekonomi, dengan fokus utama pada kebebasan pasar dan efisiensi alokasi sumber daya melalui mekanisme pasar. Negara jenis ini percaya bahwa pasar yang kompetitif akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang optimal, sehingga intervensi pemerintah dibatasi hanya pada penciptaan aturan dasar dan penegakan hukum. Karakteristik utama dan peranannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Minimnya Intervensi Pemerintah

Minimnya intervensi pemerintah merupakan karakteristik utama neoliberal state karena negara membatasi peranannya dalam kegiatan ekonomi sehingga mekanisme pasar menjadi penentu utama alokasi sumber daya, harga, dan produksi, sementara pemerintah berfokus pada penciptaan aturan dasar dan penegakan hukum untuk menjamin kepastian ekonomi. Menurut Prasetyo dan Lestari (2019), pengurangan intervensi negara memungkinkan efisiensi pasar meningkat, mendorong

persaingan, dan menciptakan insentif bagi inovasi serta pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Dengan minimnya campur tangan pemerintah, pelaku usaha diberikan kebebasan untuk menentukan strategi bisnis, harga, dan investasi sesuai mekanisme pasar, sehingga tercipta dinamika persaingan yang tinggi dan efisiensi alokasi sumber daya lebih optimal. Pendekatan ini mendorong inovasi dan produktivitas karena perusahaan harus bersaing secara sehat tanpa ketergantungan pada bantuan atau perlindungan pemerintah.

b. Privatisasi dan Deregulasi

Privatisasi dan deregulasi merupakan karakteristik utama neoliberal state karena pemerintah mendorong pengalihan kepemilikan perusahaan milik negara ke sektor swasta dan mengurangi regulasi yang dianggap menghambat efisiensi pasar, sehingga tercipta persaingan yang lebih kompetitif dan produktif. Menurut Hidayat dan Nugroho (2020), kebijakan privatisasi dan deregulasi meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, mendorong inovasi, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme pasar yang lebih fleksibel dan responsif.

Dengan privatisasi, perusahaan swasta mengambil alih pengelolaan sektor strategis atau layanan publik sehingga alokasi sumber daya lebih efisien dan biaya operasional lebih terkendali, sementara deregulasi membuka peluang bagi investor baru untuk masuk dan memperluas persaingan. Langkah ini bertujuan menstimulus inovasi, menurunkan harga, dan meningkatkan kualitas produk atau jasa yang tersedia bagi konsumen, sekaligus mengurangi beban negara dalam pembiayaan dan manajemen sektor ekonomi.

c. Liberalisasi Perdagangan dan Investasi

Liberalisasi perdagangan dan investasi merupakan karakteristik utama neoliberal state karena pemerintah membuka pasar domestik bagi kompetisi internasional, mengurangi tarif, kuota, dan hambatan investasi asing, sehingga alokasi sumber daya menjadi lebih efisien dan peluang pertumbuhan ekonomi meningkat. Menurut Pranata dan Widodo (2021), liberalisasi perdagangan dan investasi mendorong ekspansi pasar,

meningkatkan daya saing nasional, serta memacu inovasi dan produktivitas perusahaan melalui persaingan global yang lebih ketat.

Dengan kebijakan liberalisasi, investor asing memiliki akses yang lebih mudah untuk menanamkan modal di sektor strategis, sementara perusahaan domestik terdorong untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan inovasi agar tetap kompetitif. Hal ini menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan global, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih cepat dan berkelanjutan.

C. Kapasitas Negara dan *Governance*

Pada perspektif ekonomi politik, kapasitas negara dan *governance* menjadi kunci untuk memahami bagaimana negara dapat mengelola sumber daya, mengatur masyarakat, dan mendorong pembangunan ekonomi. Negara bukan hanya aktor politik, tetapi juga aktor ekonomi yang mempengaruhi distribusi kekayaan, pertumbuhan, dan stabilitas sosial. Berikut uraian rinci:

1. Kapasitas Negara (*State Capacity*)

Kapasitas negara merujuk pada kemampuan institusi negara untuk merancang, melaksanakan, dan menegakkan kebijakan serta mengelola sumber daya secara efektif. Dalam perspektif ekonomi politik, kapasitas negara menjadi faktor kunci dalam menentukan efektivitas pembangunan ekonomi, stabilitas sosial, dan kualitas tata kelola pemerintahan. Kapasitas negara dapat dibagi menjadi beberapa dimensi utama:

a. Kapasitas Administratif (*Administrative Capacity*)

Kapasitas administratif (*Administrative Capacity*) merupakan dimensi utama dari kapasitas negara yang mengacu pada kemampuan birokrasi untuk merancang, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan publik secara efektif dan efisien, sehingga memastikan bahwa tujuan pembangunan dan layanan publik dapat tercapai secara optimal. Kemampuan ini mencakup profesionalisme aparatur negara, koordinasi antar lembaga, serta pemanfaatan sumber daya manusia dan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas operasional birokrasi, yang

secara langsung mempengaruhi kualitas implementasi kebijakan ekonomi, sosial, dan politik. Dalam konteks ekonomi politik, kapasitas administratif yang kuat menjadi fondasi bagi negara untuk mengelola pembangunan ekonomi, memastikan stabilitas sosial, dan menegakkan aturan hukum dengan konsisten, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kapasitas administratif juga mencakup kemampuan adaptasi terhadap dinamika lingkungan internal dan eksternal, termasuk perubahan kebutuhan publik, tekanan politik, dan tantangan globalisasi, yang memerlukan birokrasi fleksibel namun tetap terstruktur. Negara dengan kapasitas administratif yang tinggi mampu melakukan perencanaan strategis yang komprehensif, mengalokasikan sumber daya secara tepat, serta melakukan evaluasi kebijakan secara berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja institusi publik. Hal ini menegaskan pentingnya investasi dalam pelatihan aparatur negara, penguatan sistem manajemen publik, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelayanan publik, sebagaimana dijelaskan oleh Grindle (2018) yang menekankan bahwa kualitas administrasi publik sangat menentukan efektivitas kebijakan pembangunan dan stabilitas negara.

b. Kapasitas Ekstraktif (*Extractive Capacity*)

Kapasitas ekstraktif (*Extractive Capacity*) adalah dimensi penting dari kapasitas negara yang merujuk pada kemampuan pemerintah untuk mengumpulkan sumber daya finansial dan non-finansial dari masyarakat dan sektor ekonomi, termasuk pajak, pungutan resmi, serta pengelolaan sumber daya alam, sehingga memungkinkan negara membiayai pengeluaran publik, investasi infrastruktur, dan program pembangunan sosial secara berkelanjutan. Kemampuan ini mencerminkan efisiensi sistem perpajakan, transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta koordinasi antar lembaga fiskal untuk memastikan bahwa pengumpulan sumber daya tidak menimbulkan distorsi ekonomi atau ketidakadilan sosial, sehingga berdampak langsung pada stabilitas ekonomi dan legitimasi politik negara. Dalam perspektif ekonomi politik, kapasitas ekstraktif yang tinggi

memungkinkan negara untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal dan meningkatkan kedaulatan fiskal, yang menjadi prasyarat bagi pembangunan jangka panjang dan pengelolaan konflik sosial yang efektif.

Kapasitas ekstraktif juga mencakup kemampuan negara dalam menyesuaikan mekanisme pengumpulan sumber daya dengan dinamika ekonomi dan kebutuhan masyarakat, termasuk kemampuan merespons krisis fiskal, fluktuasi harga komoditas, dan perubahan struktur ekonomi nasional. Negara dengan kapasitas ekstraktif yang kuat mampu merancang kebijakan fiskal yang adil dan progresif, memaksimalkan pendapatan tanpa membebani masyarakat secara berlebihan, serta mendukung alokasi anggaran yang tepat sasaran untuk pembangunan sosial dan ekonomi. Hal ini sejalan dengan temuan Besley dan Persson (2019) yang menekankan bahwa kemampuan negara dalam mengekstraksi sumber daya secara efektif merupakan kunci untuk meningkatkan kapasitas fiskal, stabilitas politik, dan kemampuan negara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

c. Kapasitas Koersif (*Coercive Capacity*)

Kapasitas koersif (*Coercive Capacity*) merupakan dimensi utama dari kapasitas negara yang merujuk pada kemampuan pemerintah untuk menegakkan hukum, menjaga keamanan, dan mempertahankan ketertiban melalui penggunaan aparat penegak hukum, militer, dan lembaga keamanan lainnya, sehingga menjamin stabilitas politik dan sosial yang menjadi prasyarat bagi pembangunan ekonomi dan efektivitas kebijakan publik. Kapasitas ini mencakup efektivitas institusi hukum, disiplin aparat keamanan, dan kemampuan negara dalam merespons ancaman internal maupun eksternal, termasuk konflik sosial, kriminalitas, dan gangguan politik, yang semua faktor tersebut secara langsung memengaruhi legitimasi negara dan kepercayaan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi politik, kapasitas koersif yang tinggi memungkinkan negara untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, pertumbuhan ekonomi, serta koordinasi antara kebijakan fiskal dan sosial, sehingga mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kapasitas koersif juga berkaitan dengan kemampuan negara dalam menyeimbangkan antara penggunaan kekuatan dan perlindungan hak asasi warga, di mana negara yang efektif mampu menegakkan hukum tanpa memunculkan represifitas yang merusak kepercayaan publik, serta memastikan stabilitas sosial yang diperlukan untuk mobilisasi sumber daya dan implementasi kebijakan ekonomi. Negara dengan kapasitas koersif yang kuat dapat mengelola konflik internal secara damai, menegakkan peraturan secara konsisten, dan memperkuat posisi negosiasi internasional terkait keamanan dan ekonomi, yang semuanya berdampak pada kemampuan negara untuk memaksimalkan fungsi pembangunan dan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan temuan Migdal (2019) yang menyatakan bahwa kekuatan koersif yang terorganisir secara efektif merupakan fondasi utama bagi terciptanya stabilitas negara, legitimasi politik, dan kapasitas pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

2. Governance (Tata Kelola Pemerintahan)

Pada perspektif ekonomi politik, *governance* (tata kelola pemerintahan) bukan hanya soal aturan formal, tetapi juga mencakup kemampuan negara dan institusi terkait untuk mengelola interaksi antara pemerintah, pasar, dan masyarakat agar tercapai tujuan pembangunan yang adil, efektif, dan berkelanjutan. Kapasitas *governance* mengacu pada kemampuan institusi untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan menjamin efektivitas kebijakan. Kapasitas *governance* dapat dijabarkan melalui beberapa dimensi utama:

a. Efektivitas Kebijakan (*Policy Effectiveness*)

Efektivitas kebijakan (*Policy Effectiveness*) merupakan dimensi utama dari kapasitas *governance* yang mencerminkan kemampuan pemerintah dan institusi publik untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan secara konsisten sehingga menghasilkan dampak yang sesuai dengan tujuan pembangunan dan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dimensi ini menekankan koordinasi antar lembaga, alokasi sumber daya yang tepat, serta pemanfaatan data dan teknologi informasi

untuk memantau pelaksanaan kebijakan, sehingga kesenjangan antara rancangan kebijakan dan hasil nyata dapat diminimalkan, serta respons terhadap tantangan dan perubahan eksternal dapat ditingkatkan secara efektif. Dalam perspektif ekonomi politik, efektivitas kebijakan sangat menentukan legitimasi pemerintah, kemampuan negara dalam memobilisasi sumber daya, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola publik, sehingga mendukung pembangunan berkelanjutan dan stabilitas sosial-ekonomi.

Efektivitas kebijakan juga berkaitan dengan kapasitas institusi untuk menyesuaikan strategi dan implementasi sesuai konteks lokal, memperhatikan dinamika sosial-politik, serta menyelaraskan kebijakan sektoral agar menghasilkan sinergi yang optimal, termasuk melalui evaluasi berkelanjutan dan reformasi kebijakan bila diperlukan. Negara yang mampu meningkatkan efektivitas kebijakan mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, mendorong inovasi publik, dan mengurangi ketimpangan sosial, sehingga kontribusi kebijakan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih nyata. Hal ini ditegaskan oleh Grindle (2018) yang menyatakan bahwa efektivitas kebijakan merupakan indikator utama dari kualitas *governance* dan kemampuan institusi untuk mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan.

b. *Rule of Law* (Penegakan Hukum)

Rule of Law (penegakan hukum) merupakan dimensi utama dari kapasitas *governance* yang menunjukkan kemampuan negara untuk menegakkan hukum secara adil, konsisten, dan tanpa diskriminasi, sehingga menciptakan kepastian hukum yang menjadi fondasi stabilitas politik, ekonomi, dan sosial. Dimensi ini meliputi efektivitas sistem peradilan, independensi lembaga penegak hukum, serta perlindungan hak-hak warga negara, yang bersama-sama memastikan bahwa kebijakan publik dapat diterapkan secara konsisten, mengurangi risiko korupsi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam perspektif ekonomi politik, penegakan hukum yang kuat memungkinkan negara untuk menegakkan kontrak, melindungi

hak kepemilikan, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. *Rule of Law* juga mencakup kemampuan institusi negara untuk menyesuaikan mekanisme penegakan hukum dengan perubahan sosial, tekanan politik, dan dinamika ekonomi global, sehingga hukum tetap relevan dan diterima oleh masyarakat. Negara yang memiliki kapasitas tinggi dalam penegakan hukum mampu meminimalkan konflik sosial, meningkatkan transparansi, serta menjamin keadilan dalam distribusi sumber daya dan layanan publik, sehingga efektivitas *governance* secara keseluruhan meningkat. Hal ini sejalan dengan temuan North, Wallis, dan Weingast (2019) yang menekankan bahwa kepatuhan terhadap hukum dan penegakan aturan yang konsisten merupakan kunci bagi stabilitas institusi dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

c. **Transparansi dan Akuntabilitas (*Transparency & Accountability*)**

Transparansi dan akuntabilitas (*Transparency & Accountability*) merupakan dimensi utama dari kapasitas *governance* yang mencerminkan kemampuan institusi negara untuk bertindak secara terbuka, melaporkan penggunaan sumber daya publik, dan bertanggung jawab atas keputusan serta kebijakan yang diambil, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan legitimasi pemerintah. Dimensi ini melibatkan mekanisme pengawasan internal dan eksternal, publikasi informasi yang dapat diakses masyarakat, audit independen, serta respons terhadap pengaduan publik, yang secara langsung meminimalkan praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan kebijakan yang tidak tepat sasaran. Dalam perspektif ekonomi politik, transparansi dan akuntabilitas yang kuat memungkinkan pengelolaan sumber daya publik secara efisien, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kemampuan negara dalam menegakkan transparansi dan akuntabilitas juga berkaitan dengan budaya politik dan sistem kelembagaan yang mendorong partisipasi masyarakat, sehingga kebijakan publik dapat dipantau dan dievaluasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitasnya. Negara yang

memiliki kapasitas tinggi dalam dimensi ini mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif, memperkuat legitimasi institusi, serta mengurangi konflik sosial dan politik yang muncul akibat ketidakadilan atau ketidakjelasan pengambilan keputusan. Hal ini diperkuat oleh Kaufmann (2018), yang menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan komponen krusial dalam meningkatkan kualitas governance, legitimasi institusi, dan keberlanjutan pembangunan ekonomi.

D. Negara dan Elite Politik dalam Kebijakan Ekonomi

Negara dan elite politik berperan sentral dalam pembentukan dan implementasi kebijakan ekonomi, karena keputusannya menentukan arah pembangunan, distribusi sumber daya, serta stabilitas ekonomi suatu negara. Elite politik, yang terdiri dari pejabat pemerintah, anggota legislatif, dan pengambil keputusan strategis, berfungsi sebagai penentu prioritas pembangunan, perancang kebijakan, dan pengarah alokasi sumber daya. Sementara itu, negara menyediakan kapasitas administratif dan institusional untuk mengeksekusi kebijakan tersebut melalui birokrasi, lembaga fiskal, regulasi, dan mekanisme pengawasan, sehingga kebijakan tidak hanya berbentuk dokumen tetapi benar-benar berdampak di masyarakat. Beberapa fungsi dan mekanisme penting yang menunjukkan peran negara dan elite politik dalam kebijakan ekonomi antara lain:

1. Fungsi Perumusan Kebijakan yang Terarah

Peran terarah elite politik dalam merumuskan kebijakan ekonomi sangat krusial karena menetapkan visi pembangunan nasional yang mencerminkan kepentingan politik dan ekonomi strategis, seperti alokasi dana untuk sektor industri, target investasi, dan skema pembangunan jangka panjang. Elite politik menggunakan pengaruh untuk merancang kebijakan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada stabilitas politik dan legitimasinya, sehingga kebijakan ekonomi menjadi instrumen kekuasaan sekaligus pembangunan.

Menurut Stefan Dercon (2024), elite yang memberikan nasihat kebijakan ekonomi harus mempertimbangkan insentif politik yang

dimiliki agar saran kebijakan bisa diadopsi secara efektif dan berkelanjutan. Dalam banyak sistem, elite politik menggunakan nasihat teknokrat dan pakar ekonomi sebagai alat untuk menerjemahkan program pembangunan menjadi kebijakan publik, sekaligus menjaga dukungan politik.

2. Mekanisme Implementasi Kebijakan melalui Institusi Negara

Mekanisme implementasi kebijakan melalui institusi negara merupakan tahap penting di mana keputusan yang dirumuskan oleh elite politik diterjemahkan menjadi tindakan nyata yang berdampak pada masyarakat dan perekonomian. Negara memanfaatkan birokrasi, lembaga fiskal, regulasi, dan sistem pengawasan untuk mengeksekusi kebijakan secara konsisten, sehingga tujuan pertumbuhan, stabilitas, dan distribusi sumber daya dapat tercapai dengan efektif.

Menurut Grindle (2019), efektivitas implementasi kebijakan sangat bergantung pada kapasitas institusi negara, termasuk profesionalisme birokrasi, koordinasi antar lembaga, serta mekanisme akuntabilitas yang memastikan kebijakan tidak hanya berbentuk formalitas, tetapi memberikan hasil nyata bagi masyarakat. Mekanisme ini mencakup penyusunan prosedur operasional, monitoring pelaksanaan, dan evaluasi berkelanjutan agar kebijakan dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan.

3. Peran Strategis dalam Redistribusi Sumber Daya

Peran strategis elite politik dan negara dalam redistribusi sumber daya menjadi kunci dalam memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya meningkatkan output nasional tetapi juga memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara merata. Melalui alokasi anggaran, subsidi, bantuan sosial, dan kebijakan fiskal, elite politik menentukan prioritas distribusi yang dapat mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat kapasitas ekonomi kelompok rentan.

Menurut Haggard dan Kaufman (2018), keberhasilan redistribusi sumber daya sangat bergantung pada kemampuan negara dalam merancang mekanisme alokasi yang efisien dan transparan, sehingga kebijakan tidak hanya memenuhi tujuan politik jangka pendek tetapi juga mendorong stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Redistribusi yang dirancang dengan baik

memungkinkan negara menyeimbangkan kepentingan elit dengan kebutuhan publik, sehingga meningkatkan legitimasi politik dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

4. Dimensi Stabilitas Politik dan Kepercayaan Ekonomi

Dimensi stabilitas politik dan kepercayaan ekonomi menjadi unsur kunci dalam kebijakan ekonomi karena keduanya menentukan sejauh mana investor, pelaku usaha, dan masyarakat umum merasa aman untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Elite politik berperan strategis dalam menjaga kepastian hukum, mencegah konflik politik, serta merancang kebijakan ekonomi yang dapat diprediksi, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Menurut North, Wallis, dan Weingast (2019), stabilitas politik yang terjaga meningkatkan kepercayaan ekonomi karena mengurangi risiko ketidakpastian dan memfasilitasi perencanaan jangka panjang baik bagi investor domestik maupun asing, sehingga mendorong aliran modal dan pengembangan sektor produktif. Kepercayaan ini juga memengaruhi efektivitas kebijakan fiskal dan moneter, karena masyarakat lebih cenderung mematuhi regulasi dan berpartisipasi dalam program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah.

E. Study Case

1. Studi Kasus: Peran Negara dalam Pembangunan Industri di Korea Selatan

Korea Selatan menjadi contoh klasik dari penerapan konsep developmental state dalam perspektif ekonomi politik, di mana negara mengambil peran sentral dalam merancang, mengarahkan, dan mengintervensi ekonomi untuk mendorong industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi. Setelah perang Korea, negara menghadapi keterbatasan sumber daya, infrastruktur yang rusak, dan ketimpangan sosial yang tinggi. Dalam konteks ini, elite politik di bawah kepemimpinan Presiden Park Chung-hee menetapkan visi pembangunan nasional yang jelas, fokus pada ekspor, serta mendukung sektor industri strategis melalui kebijakan fiskal, subsidi, dan perlindungan terhadap industri lokal.

Negara juga mengembangkan kapasitas birokrasi yang profesional dan lembaga-lembaga perencanaan ekonomi yang mampu merumuskan kebijakan jangka panjang. Contohnya, *Economic Planning Board* (EPB) bertanggung jawab untuk menyusun rencana lima tahun, memantau implementasi kebijakan, dan menyesuaikan prioritas pembangunan berdasarkan kondisi global dan domestik. Mekanisme ini menunjukkan bagaimana institusi negara mampu mengeksekusi kebijakan secara konsisten, sehingga negara tidak hanya menetapkan arah pembangunan tetapi juga menjamin pelaksanaan yang efektif.

Redistribusi sumber daya dilakukan melalui pendidikan, pelatihan tenaga kerja, dan subsidi teknologi untuk mendukung industrialisasi, sehingga pertumbuhan ekonomi Korea Selatan menjadi inklusif dan berkelanjutan. Stabilitas politik yang dijaga oleh elite politik juga mendorong kepercayaan investor domestik maupun asing, memungkinkan aliran modal, teknologi, dan pengetahuan masuk ke dalam ekonomi. Kasus ini menunjukkan bahwa kombinasi kapasitas negara, intervensi strategis, dan *governance* yang baik menjadi faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi dalam perspektif ekonomi politik.

BAB IV

EKONOMI POLITIK

PEMBANGUNAN

Ekonomi politik pembangunan mempelajari hubungan antara kekuasaan politik dan kebijakan ekonomi dalam upaya mencapai pembangunan nasional. Kajian ini menekankan peran negara, institusi, dan aktor politik dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi serta distribusi sumber daya. Proses pembuatan kebijakan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknis, tetapi juga oleh kepentingan politik dan dinamika sosial. Dengan memahami interaksi ini, negara dapat merancang strategi pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Pendekatan ini juga membahas pentingnya stabilitas politik dan legitimasi pemerintah dalam mendukung kemajuan ekonomi.

A. Teori Pembangunan dan Ketergantungan

Teori Pembangunan dan Teori Ketergantungan merupakan dua pendekatan utama dalam memahami proses pembangunan negara, terutama di negara berkembang. Teori Pembangunan menekankan transformasi internal melalui pertumbuhan ekonomi, modernisasi sosial, dan penguatan institusi sebagai jalan menuju kemakmuran. Sementara itu, Teori Ketergantungan membahas faktor eksternal dan struktur global yang timpang, yang membuat negara berkembang sering berada dalam posisi subordinasi terhadap negara maju. Kedua teori ini saling melengkapi untuk menjelaskan dinamika pembangunan dari perspektif internal dan hubungan internasional.

1. Teori Pembangunan (*Development Theory*)

Teori Pembangunan (*Development Theory*) merupakan kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana negara-negara berkembang dapat mengalami transformasi ekonomi, sosial, dan politik

menuju kemakmuran dan modernisasi. Teori ini menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, modernisasi sosial, dan penguatan institusi sebagai pilar utama pembangunan. Pembangunan dipandang sebagai proses yang sistematis, di mana perubahan struktural di masyarakat tradisional menuju masyarakat modern menjadi indikator keberhasilan. Beberapa fokus utama pembangunan menurut teori pembangunan adalah:

a. Modernisasi Sosial dan Ekonomi

Modernisasi sosial dan ekonomi dalam teori pembangunan menekankan transformasi masyarakat dari pola tradisional menuju pola modern yang produktif dan berdaya saing, dengan penerapan teknologi, nilai, dan praktik ekonomi baru yang mampu mendorong efisiensi dan pertumbuhan nasional. Perubahan ini tidak hanya mencakup aspek material, tetapi juga mencakup perubahan budaya, pendidikan, dan perilaku sosial yang mendukung terciptanya masyarakat yang adaptif terhadap dinamika global (Todaro & Smith, 2020).

Transformasi sosial dan ekonomi yang diusung oleh modernisasi mencakup pergeseran struktur pekerjaan dari sektor agraris ke sektor industri dan jasa, peningkatan literasi dan pendidikan masyarakat, serta perluasan akses terhadap teknologi yang mempermudah integrasi ekonomi nasional dengan pasar global. Proses ini bertujuan menciptakan masyarakat yang mampu memanfaatkan peluang ekonomi modern sekaligus mengurangi ketergantungan pada pola produksi tradisional.

b. Pertumbuhan Ekonomi sebagai Landasan Pembangunan

Modernisasi sosial dan ekonomi sebagai fokus utama teori pembangunan berarti bahwa pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial saling menguat dalam menciptakan fondasi pembangunan berkelanjutan; transformasi dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat industri modern menjadikan adopsi teknologi, nilai-nilai modern, dan efisiensi produksi sebagai kunci peningkatan kapasitas nasional. Dalam kerangka ini, pertumbuhan ekonomi bukan hanya target kuantitatif (misalnya PDB), tetapi juga sarana untuk memperkuat struktur sosial, meningkatkan pendidikan, dan memperluas kesempatan ekonomi sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan.

Menurut Meier dan Stiglitz, pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan sebagai kondisi necessary bagi pembangunan, karena tanpanya akumulasi modal dan ekspansi struktural tidak dapat berlangsung secara efektif (dikutip dalam Sope, 2019). Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi diposisikan sebagai landasan fundamental agar pembangunan tidak hanya bersifat temporer, melainkan menghasilkan perubahan struktural jangka panjang dalam perekonomian dan masyarakat.

c. Peran Negara sebagai Pengarah dan Fasilitator

Modernisasi sosial dan ekonomi sebagai fokus utama teori pembangunan berarti bahwa pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial saling menguat dalam menciptakan fondasi pembangunan berkelanjutan; transformasi dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat industri modern menjadikan adopsi teknologi, nilai-nilai modern, dan efisiensi produksi sebagai kunci peningkatan kapasitas nasional. Dalam kerangka ini, pertumbuhan ekonomi bukan hanya target kuantitatif (misalnya PDB), tetapi juga sarana untuk memperkuat struktur sosial, meningkatkan pendidikan, dan memperluas kesempatan ekonomi sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan.

Menurut Meier dan Stiglitz, pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan sebagai kondisi necessary bagi pembangunan, karena tanpanya akumulasi modal dan ekspansi struktural tidak dapat berlangsung secara efektif (dikutip dalam Sope, 2019). Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi diposisikan sebagai landasan fundamental agar pembangunan tidak hanya bersifat temporer, melainkan menghasilkan perubahan struktural jangka panjang dalam perekonomian dan masyarakat.

2. Teori Ketergantungan (*Dependency Theory*)

Teori Ketergantungan (*Dependency Theory*) merupakan kerangka analisis yang muncul sebagai kritik terhadap teori pembangunan konvensional. Teori ini menekankan bahwa pembangunan di negara-negara berkembang sering terhambat oleh ketergantungan ekonomi, politik, dan teknologi terhadap negara maju. Dalam pandangan teori ini, ketergantungan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga bersifat struktural dan historis, di mana posisi

subordinasi negara berkembang dibentuk melalui interaksi global yang timpang. Fokus utama Teori Ketergantungan meliputi:

a. Ketergantungan Ekonomi

Ketergantungan ekonomi menekankan bahwa negara-negara berkembang sering berada dalam posisi subordinasi terhadap negara maju melalui mekanisme perdagangan, investasi, dan teknologi, sehingga pembangunan terhambat oleh struktur global yang timpang; kondisi ini menyebabkan ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan impor barang jadi, yang membatasi kemampuan negara berkembang untuk mengontrol arah pembangunan ekonomi sendiri. Proses ketergantungan ini tidak hanya berdampak pada ekonomi makro, tetapi juga memengaruhi distribusi kekayaan, stabilitas politik, dan kapasitas negara dalam mengambil keputusan strategis di tingkat domestik maupun internasional (Dos Santos, 2019).

Pada konteks ini, negara berkembang sulit mengakumulasi modal internal dan mengembangkan industri domestik karena tekanan pasar global dan dominasi negara maju, sehingga upaya modernisasi dan industrialisasi sering mengalami hambatan struktural. Ketergantungan ekonomi menjelaskan mengapa pertumbuhan ekonomi di negara berkembang sering bersifat parsial, tidak merata, dan cenderung menguntungkan pihak luar, sehingga kemakmuran masyarakat lokal tidak otomatis meningkat meski terjadi pertumbuhan ekonomi nominal.

b. Relasi Pusat-Perifer

Relasi pusat-perifer menekankan struktur global yang membagi negara menjadi pusat (maju) dan perifer (berkembang), di mana negara pusat mengeksploitasi sumber daya alam, tenaga kerja, dan pasar negara perifer untuk mempertahankan keunggulan ekonomi dan politik; struktur ini menciptakan ketimpangan yang sistematis, sehingga negara perifer sulit berkembang secara mandiri dan cenderung terjebak dalam posisi subordinasi dalam ekonomi global (Frank, 2018). Relasi ini memengaruhi seluruh aspek pembangunan di negara perifer, termasuk kemampuan untuk mengakumulasi modal, membangun industri domestik, dan merumuskan kebijakan ekonomi yang otonom.

Pada relasi pusat-perifer, perdagangan internasional dan aliran modal sering diarahkan sedemikian rupa agar menguntungkan negara pusat, sehingga negara perifer menjadi pemasok bahan mentah murah dan konsumen barang jadi dari negara maju; pola ini memperkuat dominasi negara pusat dan menghambat transformasi struktural yang seimbang di negara perifer, membuat pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut tetap terbatas.

c. *Hegemoni teknologi dan Modal*

Hegemoni teknologi dan modal menekankan bahwa negara maju memiliki kendali dominan atas teknologi, pengetahuan, dan modal finansial, sehingga negara berkembang sering kesulitan mengembangkan industri domestik dan inovasi sendiri; dominasi ini memperkuat ketergantungan ekonomi dan membatasi kapasitas negara berkembang untuk bersaing secara otonom di pasar global, sehingga pembangunan sering bersifat parsial dan menguntungkan pihak luar (Dos Santos, 2020). Akibatnya, negara berkembang sulit melakukan industrialisasi yang mandiri dan harus menyesuaikan diri dengan standar teknologi dan modal yang ditetapkan oleh negara maju, yang menimbulkan ketimpangan struktural.

Pada konteks global, hegemonisasi teknologi dan modal menyebabkan aliran investasi, inovasi, dan pengetahuan cenderung diarahkan untuk kepentingan negara maju, sementara negara berkembang lebih banyak menjadi konsumen teknologi dan modal eksternal; kondisi ini membatasi kemampuan negara berkembang untuk mengakumulasi sumber daya internal dan memperkuat basis ekonomi sendiri, sehingga ketergantungan tetap berlanjut.

B. Pembangunan di Negara Berkembang

Pembangunan di negara berkembang merupakan proses kompleks yang melibatkan perubahan ekonomi, sosial, politik, dan institusional dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Pembangunan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mencakup pemerataan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, peningkatan

kapasitas manusia, dan penguatan institusi negara agar mampu mengelola sumber daya secara efektif. Beberapa tantangan dan fokus utama pembangunan yang menjadi perhatian negara berkembang meliputi:

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menjadi tantangan utama bagi negara berkembang karena memerlukan akumulasi modal, peningkatan produktivitas, dan transformasi sektor ekonomi yang kompleks, sementara negara-negara ini sering menghadapi keterbatasan sumber daya, teknologi, dan infrastruktur; pertumbuhan yang tidak seimbang dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan regional, sehingga strategi pembangunan harus dirancang agar pertumbuhan ekonomi dapat menjadi fondasi yang merata dan berkelanjutan (Todaro & Smith, 2020). Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari PDB atau output nasional, tetapi juga dari kemampuan negara untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat kapasitas industri domestik secara menyeluruh.

Pertumbuhan ekonomi di negara berkembang sering menghadapi tantangan eksternal, seperti fluktuasi harga komoditas, ketergantungan pada perdagangan internasional, dan persaingan global, yang dapat menghambat stabilitas ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, fokus pembangunan harus diarahkan pada diversifikasi ekonomi, peningkatan teknologi, dan penguatan investasi domestik agar negara dapat mengurangi kerentanan terhadap tekanan eksternal dan memaksimalkan potensi sumber daya internal.

2. Pemerataan dan Kesejahteraan Sosial

Pemerataan dan kesejahteraan sosial menjadi tantangan utama pembangunan di negara berkembang karena pertumbuhan ekonomi sering kali tidak diikuti distribusi manfaat yang merata, sehingga kesenjangan sosial dan regional dapat meningkat, menghambat stabilitas politik, dan menurunkan kualitas hidup sebagian masyarakat; oleh karena itu, pembangunan harus diarahkan untuk meningkatkan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan secara adil (UNDP, 2020). Fokus pada pemerataan sosial juga berarti memperkuat kapasitas negara dalam mengidentifikasi kelompok rentan,

merancang program inklusif, dan meminimalkan ketimpangan dalam kesempatan ekonomi.

Kesejahteraan sosial mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik yang efektif, sehingga manusia dapat berperan aktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Implementasi kebijakan yang berpihak pada pemerataan ini menjadi fokus penting bagi negara berkembang untuk mencegah marginalisasi kelompok tertentu dan membangun fondasi sosial yang stabil bagi pembangunan jangka panjang.

3. Modernisasi Sosial

Modernisasi sosial menjadi tantangan dan fokus utama pembangunan di negara berkembang karena proses transformasi masyarakat dari pola tradisional menuju pola yang lebih modern tidak hanya membutuhkan perubahan teknologi dan ekonomi, tetapi juga perubahan nilai, budaya, dan perilaku sosial yang mendukung produktivitas serta partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan; tanpa modernisasi sosial yang efektif, implementasi kebijakan pembangunan sering menghadapi resistensi budaya dan rendahnya adaptasi masyarakat terhadap inovasi, sehingga manfaat pembangunan tidak dapat dirasakan secara merata (Inglehart & Welzel, 2019). Transformasi ini meliputi pendidikan yang lebih berkualitas, peningkatan keterampilan tenaga kerja, adopsi teknologi informasi, serta perubahan pola interaksi sosial dan norma yang memfasilitasi integrasi ekonomi dan sosial secara lebih luas.

Proses modernisasi sosial juga menghadapi tantangan struktural, termasuk ketimpangan akses terhadap pendidikan dan informasi, disparitas gender, serta resistensi kelompok tertentu terhadap perubahan nilai dan praktik baru; oleh karena itu, strategi pembangunan harus mencakup program inklusif yang memperkuat kapasitas sosial, mendorong kesetaraan kesempatan, dan membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya modernisasi sebagai prasyarat untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Modernisasi sosial yang berhasil akan memungkinkan masyarakat tidak hanya menjadi konsumen pembangunan, tetapi juga menjadi agen aktif yang mampu memanfaatkan peluang ekonomi, teknologi, dan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

4. Penguatan Institusi dan Tata Kelola

Penguatan institusi dan tata kelola menjadi tantangan dan fokus utama pembangunan di negara berkembang karena keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan sangat bergantung pada kapasitas birokrasi, transparansi, dan akuntabilitas lembaga negara; kelemahan institusi sering menyebabkan kebijakan tidak efektif, penyalahgunaan sumber daya, dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga pembangunan ekonomi dan sosial tidak dapat berjalan secara berkelanjutan (Kaufmann, 2018). Fokus pada penguatan institusi mencakup reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penciptaan mekanisme kontrol yang menjamin kebijakan pembangunan dijalankan secara konsisten dan adil.

Tata kelola yang baik melibatkan koordinasi antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk menciptakan regulasi yang jelas, menegakkan hukum, serta memastikan distribusi sumber daya yang efisien dan merata; upaya ini juga termasuk pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi publik dan transparansi informasi untuk meminimalkan praktik korupsi dan meningkatkan legitimasi pemerintah dalam merancang serta menjalankan program pembangunan. Dengan tata kelola yang kuat, negara berkembang dapat memaksimalkan potensi internal dan menghadapi tantangan eksternal secara lebih efektif, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang.

C. Peran Negara, LSM, dan Masyarakat Sipil

Pembangunan yang efektif tidak hanya bergantung pada peran pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan partisipasi aktif masyarakat sipil. Kolaborasi ketiga aktor ini menciptakan sinergi yang memungkinkan kebijakan pembangunan dijalankan secara lebih inklusif, akuntabel, dan berkelanjutan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Beberapa peran spesifik dari masing-masing aktor antara lain:

1. Peran Negara

Negara berperan krusial dalam pembangunan sebagai pengatur, fasilitator, dan penyedia struktur publik yang menjembatani

kepentingan pasar dan publik; tanpa kapasitas negara yang memadai, upaya pembangunan infrastruktur, redistribusi ekonomi, dan intervensi strategis akan sulit berjalan efektif (Kusumawardhana, 2023). Sebagai aktor utama, negara tidak hanya menetapkan kebijakan makroekonomi dan regulasi, tetapi juga mengelola anggaran publik untuk membiayai proyek pembangunan, mengawasi pelaksanaan pembangunan, serta menjamin hak-hak dasar masyarakat melalui sistem birokrasi yang efisien dan akuntabel.

Negara bertanggung jawab menciptakan kondisi agar sektor swasta dan investasi asing dapat berkontribusi secara produktif tanpa mengorbankan kepentingan rakyat dan kedaulatan ekonomi; ini dilakukan melalui kebijakan fiskal, insentif, dan proteksi yang seimbang untuk mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga keadilan sosial. Selain itu, negara harus memperkuat kapasitas administrasi publik dan tata kelola untuk menghindari kesenjangan kebijakan, korupsi, dan penyalahgunaan sumber daya, karena kelemahan institusi akan menghambat efektivitas pembangunan jangka panjang.

2. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan penting dalam pembangunan karena bertindak sebagai pengawas kebijakan publik, fasilitator pelayanan sosial, dan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga memastikan bahwa kepentingan rakyat terwakili dan kebijakan pembangunan berjalan secara transparan serta akuntabel (Banks, 2019). LSM sering mengisi celah layanan publik di sektor pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial terutama di wilayah terpencil atau masyarakat rentan, sehingga meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup kelompok yang kurang terlayani.

LSM berperan dalam advokasi hak-hak masyarakat, mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, serta menyebarluaskan informasi yang memberdayakan masyarakat agar dapat menuntut hak dan terlibat aktif dalam pembangunan lokal dan nasional. Peran ini juga mencakup monitoring proyek pembangunan, menilai dampak kebijakan pemerintah, dan memberikan rekomendasi berbasis data untuk perbaikan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3. Peran Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil berperan sentral dalam pembangunan karena bertindak sebagai agen pengawas, advokasi, dan partisipasi publik yang menjembatani antara pemerintah dan warga, sehingga memastikan kebijakan pembangunan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan meminimalkan penyalahgunaan kekuasaan (Putnam, 2019). Partisipasi aktif masyarakat sipil mencakup keterlibatan dalam musyawarah lokal, konsultasi publik, dan forum perencanaan pembangunan yang memungkinkan aspirasi warga didengar dan diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Masyarakat sipil dapat membangun kesadaran sosial dan kapasitas komunitas melalui pendidikan publik, kampanye kesadaran, dan penguatan jaringan sosial yang memberdayakan warga untuk menuntut hak-haknya serta ikut serta dalam pengambilan keputusan, sehingga mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Keterlibatan masyarakat sipil juga penting dalam mengawasi pelaksanaan proyek pembangunan, memantau efektivitas layanan publik, dan menilai dampak kebijakan secara langsung, sehingga pemerintah dapat melakukan penyesuaian berbasis data dan kebutuhan nyata masyarakat.

D. Politik Anggaran dan Prioritas Pembangunan

Politik anggaran adalah proses strategis dalam menentukan alokasi sumber daya publik yang melibatkan negosiasi antara pemerintah, legislatif, aktor non-pemerintah, dan masyarakat sipil, dengan tujuan memastikan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan. Proses ini tidak hanya teknis, tetapi juga politis, karena kepentingan sektoral, tekanan kelompok kepentingan, strategi elektoral, dan hubungan pusat-daerah memengaruhi keputusan akhir. Prioritas pembangunan merupakan hasil dari proses ini, yaitu sektor, wilayah, atau program yang memperoleh fokus dan sumber daya lebih besar karena dianggap memiliki dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan keberlanjutan sosial. Beberapa mekanisme dan faktor utama yang memengaruhi proses politik anggaran dan penentuan prioritas pembangunan di negara berkembang meliputi:

1. Timing Politik dan Siklus Anggaran

Timing politik dan siklus anggaran berperan krusial dalam proses politik anggaran di negara berkembang karena aktor politik, terutama petahana, sering melakukan ekspansi pengeluaran fiskal menjelang pemilu untuk meningkatkan daya tarik publik, sementara setelah pemilunya mungkin mengurangi belanja untuk menyeimbangkan anggaran. Penelitian empiris menunjukkan bahwa pemerintah cenderung melonggarkan posisi fiskal dan meningkatkan pengeluaran publik pada tahun-tahun menjelang pemilu sebagai strategi oportunistik (Ghaniy & Qibthiyah, 2020).

Siklus anggaran ini dipengaruhi oleh ambisi elektoral, di mana politisi memanfaatkan sumber daya anggaran publik sebagai alat untuk kampanye tersembunyi, terutama melalui program sosial atau hibah yang populer. Selain itu, institusi perencanaan dan penganggaran yang lemah memungkinkan fleksibilitas kebijakan fiskal bagi pemimpin yang akan mencalonkan kembali, sehingga alokasi anggaran pada waktu tertentu menjadi sangat politis.

2. Negosiasi dan Kekuasaan Antar-Aktor

Negosiasi dan kekuasaan antaraktor dalam politik anggaran menjadi faktor utama karena berbagai aktor seperti eksekutif, legislatif, partai politik, dan kelompok kepentingan saling berkompetisi untuk menekan atau menyesuaikan alokasi anggaran sesuai dengan kepentingan. Misalnya, legislatif dapat memotong atau menambah pos anggaran melalui bargaining politik yang intens, sementara eksekutif berusaha menjual program-program strategis sebagai bagian dari visi pembangunan, dan penelitian menunjukkan bahwa proses penganggaran publik sebenarnya adalah pasar politik di mana aktor-aktor memiliki motivasi dan strategi individu untuk memperebutkan sumber daya negara sehingga anggaran mencerminkan kekuatan relatif dalam pemerintahan (Farhan, 2018).

Pertarungan kekuasaan ini sering terjadi melalui lobi informal, koalisi politik, dan negosiasi di belakang meja, bukan hanya melalui rapat resmi, sehingga aktor-aktor paling berpengaruh dapat mengamankan alokasi anggaran penting untuk proyek yang menguntungkan konstituen atau basis politik. Kekuatan bargaining legislatif digunakan untuk memperjuangkan proyek populis, sementara eksekutif menukar konsesi anggaran dengan dukungan politik yang

pada akhirnya membentuk prioritas pembangunan yang bisa lebih politikal daripada teknokratik.

3. Pengaruh Kelompok Kepentingan dan Masyarakat Sipil

Pengaruh kelompok kepentingan dan masyarakat sipil dalam politik anggaran sangat krusial karena dapat menekan dan mengarahkan alokasi anggaran melalui advokasi kebijakan, audit sosial, dan pemantauan anggaran, sehingga anggaran publik tidak hanya menjadi domain pemerintah tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Makhmudah, 2021). Kelompok kepentingan seperti LSM, komunitas lokal, dan organisasi advokasi memobilisasi aspirasi publik, melakukan kampanye transparansi, dan memperjuangkan isu-isu pembangunan tertentu misalnya kesehatan, pendidikan, atau lingkungan, sedemikian rupa sehingga ia ikut bernegosiasi dengan pembuat kebijakan untuk menjadikan prioritas pembangunan lebih inklusif dan adil.

Masyarakat sipil bisa menjadi kontrol eksternal yang kuat ketika secara aktif terlibat dalam proses perencanaan anggaran dan pengawasan publik, misalnya dengan berpartisipasi dalam forum konsultasi anggaran, penyusunan usulan proyek, atau audit masyarakat atas realisasi anggaran. Ketika suara masyarakat sipil terdengar dan diorganisasi, dapat menekan agar anggaran dialokasikan ke program yang benar-benar dibutuhkan warga, bukan hanya ke proyek politik; ini meningkatkan akuntabilitas dan legitimasi penganggaran publik.

4. Peran Donor dan Pendanaan Eksternal

Peran donor dan pendanaan eksternal dalam politik anggaran sangat menentukan karena negara berkembang sering mengandalkan bantuan luar negeri untuk membiayai proyek pembangunan strategis, sehingga donor dapat memengaruhi alokasi anggaran melalui persyaratan, target, atau prioritas tertentu yang harus dipenuhi agar pendanaan dicairkan, sehingga keputusan alokasi domestik terkadang harus menyeimbangkan antara kebutuhan nasional dan tuntutan donor (Suryanto, 2019). Kebergantungan ini membuat pemerintah harus bernegosiasi dan menyesuaikan rencana pembangunan sehingga proyek yang mendapat prioritas sering mencerminkan kepentingan donor, termasuk sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan program sosial yang dianggap prioritas oleh lembaga internasional.

Donor juga berperan dalam memperkuat kapasitas institusi pengelola anggaran melalui dukungan teknis, transfer pengetahuan, dan pelatihan, sehingga meskipun ada pengaruh eksternal, pemerintah memiliki kemampuan untuk merencanakan dan mengeksekusi anggaran lebih efektif. Interaksi antara donor dan pemerintah nasional sering kali melibatkan evaluasi kinerja dan audit eksternal, yang mendorong transparansi dan akuntabilitas, namun juga dapat membatasi fleksibilitas pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai konteks lokal.

E. Study Case

1. Studi Kasus: Ekonomi Politik Pembangunan di Indonesia – Proyek Infrastruktur Jalan Tol Trans-Jawa

Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi tantangan utama dalam pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Salah satu proyek ambisius adalah pembangunan Jalan Tol Trans-Jawa yang menghubungkan ujung barat hingga timur Pulau Jawa. Proyek ini bukan hanya soal teknis konstruksi, tetapi juga mencerminkan dinamika ekonomi politik pembangunan, karena keputusan alokasi anggaran, pemilihan investor, dan jadwal pembangunan dipengaruhi oleh kepentingan politik, negosiasi antaraktor, serta pengaruh donor dan lembaga pendanaan internasional.

Proyek ini menunjukkan bagaimana negosiasi antaraktor bekerja: pemerintah pusat berperan sebagai pengambil keputusan utama, sementara legislatif menuntut pertanggungjawaban alokasi anggaran, dan pemerintah daerah menuntut jalur tol yang mendukung pertumbuhan lokal. Selain itu, perusahaan BUMN dan swasta yang dilibatkan memiliki kepentingan ekonomi yang besar, sehingga proses pengambilan keputusan mencerminkan perpaduan antara kepentingan politik, ekonomi, dan sosial.

Proyek ini membahas pengaruh donor dan pendanaan eksternal. Beberapa bagian tol didukung oleh pinjaman multilateral dengan persyaratan tertentu, termasuk standar lingkungan dan sosial yang harus dipenuhi. Hal ini membuat pemerintah harus menyesuaikan prioritas proyek untuk memenuhi persyaratan donor, sekaligus tetap menjaga

target pembangunan nasional yang mencakup konektivitas ekonomi dan pemerataan akses.

Peran masyarakat sipil dan kelompok kepentingan juga terlihat, misalnya dalam pengawasan dampak sosial dan lingkungan. Komunitas lokal dan LSM mengawasi proses pembebasan lahan, memastikan kompensasi yang adil, dan mengawasi transparansi penggunaan anggaran. Partisipasinya menjadi kontrol eksternal yang penting untuk mencegah penyimpangan alokasi anggaran dan memastikan pembangunan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Studi kasus ini menekankan bahwa ekonomi politik pembangunan bukan sekadar soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga interaksi antara negara, elit politik, investor, donor, dan masyarakat sipil. Keberhasilan pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mengelola kepentingan yang berbeda agar alokasi sumber daya publik tepat sasaran, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB V

PASAR, MODAL, DAN MEKANISME KEKUASAAN

Pasar merupakan arena interaksi antara penawaran dan permintaan yang menentukan harga serta distribusi barang dan jasa sekaligus mencerminkan efisiensi ekonomi. Modal berfungsi sebagai sumber daya untuk investasi dan pengembangan produksi, sekaligus menunjukkan kemampuan individu atau institusi dalam mengakses dan mengendalikan sumber daya. Mekanisme kekuasaan mengatur hubungan sosial dan politik, menentukan pengaruh dalam pengambilan keputusan serta memengaruhi distribusi sumber daya dan prioritas pembangunan dalam masyarakat.

A. Struktur Pasar dan Relasi Kekuasaan

Struktur pasar dan relasi kekuasaan merupakan dua konsep yang saling terkait dalam memahami dinamika ekonomi dan sosial; struktur pasar menentukan bagaimana barang, jasa, dan sumber daya didistribusikan melalui mekanisme penawaran dan permintaan, sedangkan relasi kekuasaan menjelaskan siapa yang memiliki pengaruh untuk mengendalikan keputusan, memanfaatkan sumber daya, dan memengaruhi kebijakan. Kedua aspek ini bersama-sama membentuk pola interaksi antara pelaku ekonomi, institusi, dan pemerintah, sehingga menentukan tingkat persaingan, distribusi kekayaan, dan keseimbangan kekuatan dalam masyarakat.

1. Struktur Pasar

Struktur Pasar merupakan kerangka yang menggambarkan bagaimana pasar tersusun, termasuk jumlah pelaku ekonomi, tingkat persaingan, dan kemampuan pengaruhnya terhadap harga serta kuantitas barang dan jasa. Struktur pasar memengaruhi perilaku perusahaan, strategi pemasaran, serta distribusi sumber daya, sehingga

menjadi elemen penting dalam analisis ekonomi. Beberapa jenis struktur pasar utama meliputi:

a. Pasar Persaingan Sempurna

Pasar persaingan sempurna adalah bentuk struktur pasar yang ideal di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, sementara produk yang dijual bersifat homogen sehingga tidak ada satu pelaku pun yang dapat memengaruhi harga pasar secara individual. Dalam kondisi ini, setiap perusahaan bertindak sebagai price taker, artinya harus menerima harga yang telah ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran yang berlaku di pasar (Ramadhan, 2020). Karakteristik ini menjamin bahwa keputusan produksi dan konsumsi lebih efisien karena harga mencerminkan nilai produk secara objektif.

Pasar persaingan sempurna juga ditandai dengan kebebasan perusahaan untuk masuk dan keluar pasar tanpa hambatan, yang memungkinkan persaingan tetap sehat dan inovasi terus berkembang. Selain itu, informasi mengenai harga, kualitas, dan kuantitas produk tersedia secara sempurna bagi semua pelaku pasar, sehingga dapat membuat keputusan ekonomi yang rasional dan berdasarkan data yang akurat. Faktor ini memastikan bahwa alokasi sumber daya terjadi secara optimal dan tidak ada distorsi akibat dominasi pelaku tertentu.

b. Monopoli

Monopoli adalah jenis struktur pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai seluruh pasar, sehingga memiliki kekuatan penuh untuk menentukan harga dan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Kondisi ini muncul karena adanya hambatan masuk yang tinggi bagi pelaku baru, baik berupa regulasi, biaya investasi yang besar, maupun penguasaan sumber daya unik, sehingga perusahaan monopoli dapat mempertahankan posisinya tanpa adanya persaingan signifikan (Setiawan, 2019). Akibat dominasi ini, konsumen memiliki pilihan terbatas dan harga cenderung lebih tinggi dibandingkan dalam pasar persaingan sempurna, sementara perusahaan dapat memperoleh keuntungan jangka panjang yang stabil.

Monopoli dapat memengaruhi inovasi dan efisiensi produksi; di satu sisi, perusahaan mungkin terdorong untuk berinovasi

karena adanya kontrol penuh atas pasar, namun di sisi lain, kurangnya persaingan bisa mengurangi insentif untuk meningkatkan kualitas atau menekan biaya produksi. Pemerintah sering kali melakukan regulasi atau pengawasan untuk membatasi praktik monopoli yang merugikan konsumen, seperti penetapan harga maksimum, pembatasan penguasaan pasar, atau pendorongan masuknya pesaing baru. Dalam konteks ekonomi makro, keberadaan monopoli dapat memengaruhi distribusi pendapatan dan keseimbangan pasar, sehingga perlu diperhitungkan dalam perumusan kebijakan publik dan pembangunan ekonomi.

c. Oligopoli

Oligopoli adalah struktur pasar di mana sejumlah kecil perusahaan besar mendominasi penawaran barang atau jasa, sehingga keputusan satu perusahaan secara signifikan memengaruhi strategi pesaing lainnya. Kondisi ini mendorong terjadinya persaingan strategis, baik melalui harga, kualitas produk, inovasi, maupun pemasaran, dan sering kali perusahaan dalam oligopoli mencoba mengkoordinasikan tindakan untuk menjaga keuntungan dan stabilitas pasar (Kusuma, 2021). Produk dalam pasar oligopoli bisa homogen, seperti minyak atau baja, maupun terdiferensiasi seperti mobil dan elektronik, tergantung karakter industri yang bersangkutan.

Karakteristik utama oligopoli mencakup hambatan masuk yang cukup tinggi, sehingga perusahaan baru sulit untuk bersaing, serta interdependensi yang kuat antara pelaku pasar besar yang saling mengamati dan menyesuaikan strategi masing-masing. Sifat ini dapat menyebabkan praktik kolusi atau pembentukan kartel untuk mengatur harga atau kuantitas produksi demi menguntungkan semua pihak dominan, meskipun hal ini sering diawasi atau dilarang oleh regulator pemerintah. Keseimbangan antara kompetisi dan kolusi ini menentukan efisiensi pasar, harga bagi konsumen, dan inovasi jangka panjang dalam industri terkait.

d. Persaingan Monopolistik

Persaingan monopolistik adalah struktur pasar di mana banyak perusahaan menawarkan produk yang serupa tetapi terdiferensiasi, sehingga setiap perusahaan memiliki kekuatan

terbatas untuk memengaruhi harga melalui diferensiasi produk, branding, dan strategi pemasaran (Hidayat, 2020). Dalam kondisi ini, perusahaan bersaing tidak hanya melalui harga tetapi juga melalui kualitas, desain, layanan, dan promosi, yang memungkinkan konsumen memiliki preferensi tertentu terhadap produk tertentu. Struktur ini memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk menyesuaikan strategi sambil tetap menghadapi tekanan persaingan dari banyak pesaing di pasar.

Karakteristik utama persaingan monopolistik mencakup hambatan masuk yang relatif rendah, sehingga perusahaan baru dapat memasuki pasar dengan inovasi produk, serta pasar yang cukup cair untuk memungkinkan pergeseran preferensi konsumen. Diferensiasi produk menjadi kunci daya saing, karena meskipun harga bersaing, persepsi nilai dan keunikan produk sering kali menjadi faktor penentu keputusan pembelian. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas layanan, dan membangun loyalitas konsumen agar tetap kompetitif di pasar.

2. Relasi Kekuasaan

Relasi Kekuasaan adalah hubungan yang menggambarkan bagaimana pengaruh, kontrol, dan otoritas didistribusikan di antara individu, kelompok, atau institusi dalam masyarakat, termasuk dalam konteks ekonomi, politik, dan sosial. Relasi kekuasaan menentukan siapa yang mampu memengaruhi keputusan, mengendalikan sumber daya, dan membentuk kebijakan, sehingga menjadi faktor kunci dalam dinamika sosial dan ekonomi. Beberapa aspek penting dalam relasi kekuasaan meliputi:

a. Kekuatan Ekonomi

Kekuatan ekonomi merupakan aspek fundamental dalam relasi kekuasaan karena menentukan kemampuan individu, kelompok, atau institusi untuk mengakses, mengendalikan, dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di masyarakat, sehingga memengaruhi pengambilan keputusan dan distribusi manfaat ekonomi secara lebih luas (Putra, 2021). Pelaku yang memiliki modal besar, kontrol atas aset strategis, atau pangsa pasar dominan mampu menetapkan harga, mengarahkan investasi, dan membentuk peluang bagi pihak lain sesuai

kepentingannya, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam hubungan kekuasaan. Aspek ini tidak hanya memengaruhi dinamika pasar tetapi juga hubungan sosial dan politik, karena pengaruh ekonomi sering diterjemahkan menjadi kapasitas untuk memengaruhi kebijakan dan regulasi.

Kekuatan ekonomi juga membentuk ketergantungan antara pihak yang memiliki sumber daya terbatas dan pihak yang mendominasi, sehingga relasi kekuasaan menjadi asimetris dan menimbulkan pengaruh signifikan terhadap perilaku ekonomi dan sosial kelompok subordinat. Pelaku dominan dapat memanfaatkan posisi ini untuk memperkuat posisinya melalui strategi bisnis, investasi, atau kontrol atas jaringan distribusi, sementara pihak lain harus menyesuaikan diri agar tetap memperoleh akses terhadap sumber daya penting. Interaksi antara kekuatan ekonomi dan ketergantungan ini menjadikan ekonomi sebagai instrumen penting dalam menentukan struktur relasi kekuasaan di masyarakat.

b. Kekuatan Politik

Kekuatan politik merupakan aspek penting dalam relasi kekuasaan karena menentukan kemampuan individu, kelompok, atau institusi untuk memengaruhi kebijakan publik, regulasi, dan alokasi sumber daya dalam masyarakat, sehingga berdampak langsung pada distribusi kekuasaan dan keseimbangan sosial (Santoso, 2020). Aktor dengan akses ke lembaga politik atau jaringan birokrasi memiliki kapasitas untuk mengarahkan keputusan strategis, menetapkan prioritas pembangunan, dan membentuk lingkungan hukum serta ekonomi yang menguntungkan pihak tertentu. Kekuatan politik ini sering berinteraksi dengan kekuatan ekonomi, menciptakan relasi kompleks di mana pengaruh politik dapat memperkuat posisi ekonomi dan sebaliknya.

Kekuatan politik memungkinkan aktor untuk memobilisasi dukungan, mengatur koalisi, dan mempengaruhi opini publik demi memperkuat legitimasi keputusan dan kebijakan yang diambil. Keberadaan mekanisme politik yang efektif maupun tidaknya pengawasan terhadap kekuasaan dapat memperbesar atau membatasi dampak keputusan politik terhadap keseimbangan kekuasaan di masyarakat. Kondisi ini menjadikan

dinamika politik sebagai elemen krusial dalam memahami bagaimana kekuasaan dijalankan dan dipertahankan, serta bagaimana kepentingan berbagai pihak dapat bertemu atau bertentangan.

c. Kekuatan Sosial dan Budaya

Kekuatan sosial dan budaya merupakan aspek penting dalam relasi kekuasaan karena menentukan legitimasi, pengaruh, dan kontrol terhadap norma, nilai, serta perilaku kelompok dalam masyarakat, sehingga aktor tertentu dapat membentuk opini, kebiasaan, dan preferensi kolektif sesuai kepentingannya (Pratama, 2019). Pengaruh sosial dan budaya memungkinkan individu atau kelompok memperoleh posisi dominan melalui pengakuan moral, status sosial, atau identitas budaya yang diakui luas, sehingga mampu memengaruhi keputusan dan interaksi sosial. Aspek ini sering berinteraksi dengan kekuatan ekonomi dan politik, menciptakan dinamika relasi kekuasaan yang kompleks di berbagai tingkat masyarakat.

Kekuatan sosial dan budaya dapat memfasilitasi mobilisasi dukungan, membentuk konsensus, atau menegakkan struktur hierarki tertentu yang memperkuat dominasi aktor tertentu. Norma, adat, dan praktik budaya dapat digunakan untuk memperkuat legitimasi kekuasaan atau membatasi tindakan kelompok lain, sehingga distribusi kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh sumber daya material tetapi juga oleh pengaruh simbolik dan kultural. Hal ini menjadikan pemahaman terhadap konteks sosial dan budaya krusial dalam analisis politik dan strategi interaksi antar kelompok dalam masyarakat.

B. Modal dan Kelas Ekonomi

Modal dan kelas ekonomi merupakan dua konsep yang saling terkait dalam memahami struktur sosial dan distribusi kekayaan dalam masyarakat; modal mencakup berbagai bentuk sumber daya seperti finansial, fisik, manusia, dan sosial yang memungkinkan individu atau kelompok untuk menghasilkan nilai ekonomi dan memperoleh keuntungan, sedangkan kelas ekonomi terbentuk berdasarkan kepemilikan modal, akses terhadap peluang ekonomi, dan posisi dalam proses produksi. Interaksi antara modal dan kelas ekonomi menentukan

stratifikasi sosial, kemampuan mobilitas antar-kelas, serta distribusi kekuasaan dan pengaruh dalam masyarakat, sehingga menjadi kunci dalam analisis ekonomi, politik, dan pembangunan sosial.

1. Pengertian Modal dan Jenis-jenisnya

Modal pada dasarnya adalah sumber daya yang dapat digunakan untuk menghasilkan nilai ekonomi atau keuntungan; modal bukan hanya uang tetapi juga aset, kapasitas, dan jaringan yang memungkinkan akumulasi kekayaan dan kekuasaan. Jenis-jenis modal yang penting diperhitungkan dalam analisis kelas ekonomi meliputi:

a. Modal Finansial

Modal finansial merupakan jenis modal yang sangat penting dalam analisis kelas ekonomi karena menentukan kapasitas individu atau kelompok untuk berinvestasi, mengembangkan usaha, dan memperoleh keuntungan yang dapat memperkuat posisi sosial dan ekonomi. Akses terhadap modal finansial memungkinkan pemiliknya untuk memperbesar skala produksi, mendiversifikasi aset, dan memperoleh leverage dalam negosiasi ekonomi maupun politik, sehingga menciptakan ketimpangan yang signifikan antara kelas atas dan kelas pekerja (Rahman, 2020). Modal ini juga berperan dalam reproduksi kelas antar-generasi, karena warisan finansial dan investasi strategis memungkinkan akumulasi kekayaan berkelanjutan yang mempertahankan dominasi ekonomi tertentu.

Modal finansial berfungsi sebagai alat untuk memperoleh modal lainnya, seperti modal manusia melalui pendidikan dan pelatihan, atau modal sosial melalui jaringan dan koneksi, sehingga memperkuat akses terhadap peluang ekonomi yang lebih luas. Pemilik modal finansial besar sering memiliki kemampuan untuk memengaruhi pasar dan regulasi, misalnya melalui investasi besar atau partisipasi dalam instrumen keuangan yang kompleks, sehingga peranannya tidak hanya terbatas pada ekonomi mikro tetapi juga memengaruhi dinamika ekonomi makro. Ketergantungan pelaku ekonomi kecil terhadap pemilik modal ini menciptakan struktur relasi kekuasaan yang asimetris, di mana kontrol terhadap sumber daya menjadi faktor kunci dalam stratifikasi kelas.

b. Modal Fisik

Modal fisik merupakan jenis modal yang penting dalam analisis kelas ekonomi karena mencakup aset dan sarana produksi seperti pabrik, mesin, tanah, dan infrastruktur yang memungkinkan individu atau kelompok menghasilkan barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan serta memperkuat posisi ekonomi. Kepemilikan dan kontrol terhadap modal fisik memberikan kemampuan bagi pemilik untuk menentukan skala produksi, efisiensi biaya, serta pangsa pasar, sehingga membedakan posisi kelas ekonomi di masyarakat (Santoso, 2019). Selain itu, modal fisik memungkinkan akumulasi kekayaan yang stabil dan menjadi dasar bagi reproduksi kelas melalui investasi jangka panjang dan warisan aset antar-generasi.

Modal fisik juga berperan dalam interaksi dengan modal lainnya, seperti modal finansial yang digunakan untuk membeli atau memperluas aset produksi, serta modal manusia yang diperlukan untuk mengoperasikan dan memaksimalkan pemanfaatan aset tersebut. Perusahaan atau individu yang memiliki modal fisik besar memiliki keunggulan kompetitif karena dapat menahan tekanan persaingan, menetapkan harga, dan mengendalikan akses pasar, sehingga menciptakan struktur relasi kekuasaan ekonomi yang asimetris. Ketergantungan kelompok lain pada pemilik modal fisik untuk pekerjaan, produk, atau jasa menjadikan distribusi kekuasaan lebih terkonsentrasi pada pemilik aset.

c. Modal Manusia

Modal manusia merupakan jenis modal yang sangat penting dalam analisis kelas ekonomi karena mencakup keterampilan, pengetahuan, pendidikan, kesehatan, dan pengalaman kerja yang memungkinkan individu untuk meningkatkan produktivitas, memperoleh pendapatan lebih tinggi, serta memperkuat posisi sosial dan ekonominya. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang berkualitas menjadi faktor penentu dalam pembentukan modal manusia, yang pada gilirannya memengaruhi kemampuan seseorang untuk memasuki pekerjaan bernilai tinggi atau posisi manajerial, sehingga memperkuat stratifikasi kelas (Wijaya, 2020). Modal

manusia juga berperan dalam reproduksi kelas ekonomi, karena generasi yang memiliki pendidikan dan keterampilan tinggi cenderung mempertahankan atau meningkatkan status ekonomi keluarganya dibandingkan kelompok yang memiliki akses terbatas.

Modal manusia berinteraksi erat dengan modal finansial dan fisik; individu dengan keterampilan tinggi lebih mampu memanfaatkan investasi atau aset produksi secara efektif untuk menghasilkan keuntungan. Posisi tawar individu dalam pasar tenaga kerja juga dipengaruhi oleh kualitas modal manusia yang dimiliki, karena keterampilan dan keahlian tertentu dapat menciptakan peluang ekonomi eksklusif dan meningkatkan daya saing. Ketergantungan perusahaan terhadap pekerja terampil menjadikan distribusi modal manusia sebagai elemen penting dalam hubungan kekuasaan dan distribusi keuntungan di masyarakat.

d. Modal Sosial

Modal sosial merupakan jenis modal yang penting dalam analisis kelas ekonomi karena mencakup jaringan relasi, koneksi profesional, dan kepercayaan sosial yang memungkinkan individu atau kelompok mengakses peluang ekonomi, informasi, dan sumber daya yang tidak tersedia secara langsung. Ketersediaan modal sosial memungkinkan aktor ekonomi untuk memanfaatkan jejaring dalam memperoleh pekerjaan, kontrak bisnis, investasi, atau dukungan politik, sehingga memperkuat posisi dan mobilitas ekonomi dalam struktur kelas (Saputra, 2021). Modal sosial juga berperan dalam reproduksi kelas, karena jaringan yang kuat dan eksklusif sering kali diwariskan atau dipertahankan antar-generasi, memperkuat akses kelompok tertentu terhadap peluang dan sumber daya.

Modal sosial berinteraksi dengan jenis modal lainnya; misalnya, jaringan profesional dapat meningkatkan efektivitas penggunaan modal finansial dan fisik melalui kolaborasi bisnis atau kemitraan strategis. Dalam pasar tenaga kerja, individu dengan modal sosial yang luas memiliki keunggulan dalam memperoleh informasi lowongan pekerjaan, peluang investasi, dan akses ke mentor atau sponsor yang berpengaruh. Ketergantungan aktor

lain terhadap jejaring elit menciptakan struktur relasi kekuasaan yang kompleks, di mana kontrol terhadap modal sosial dapat menentukan posisi tawar dalam interaksi ekonomi dan sosial.

2. Kelas Ekonomi: Definisi dan Kriteria Pembentukan

Kelas ekonomi merujuk pada kelompok sosial yang dibedakan menurut posisinya dalam proses produksi, kepemilikan sumber daya, dan akses terhadap pendapatan serta peluang ekonomi. Kriteria umum pembentukan kelas meliputi:

a. Kepemilikan terhadap Sarana Produksi

Kepemilikan terhadap sarana produksi merupakan kriteria utama dalam pembentukan kelas ekonomi karena menentukan posisi individu atau kelompok dalam proses produksi, distribusi kekayaan, dan pengambilan keputusan ekonomi, sehingga menciptakan perbedaan mendasar antara pemilik dan pekerja. Pemilik sarana produksi memiliki kemampuan untuk mengendalikan output, menetapkan harga, dan memperoleh surplus nilai, sementara yang tidak memiliki akses harus menjual tenaga kerja atau keterampilan untuk bertahan hidup, sehingga tercipta relasi ketergantungan yang jelas (Prasetyo, 2019). Kepemilikan ini juga menjadi dasar bagi reproduksi kelas antar-generasi, karena aset dan kontrol atas sumber daya dapat diwariskan, memperkuat dominasi kelas tertentu dalam jangka panjang.

Kepemilikan sarana produksi memengaruhi distribusi kekuasaan dalam masyarakat karena memungkinkan pemilik menentukan kondisi kerja, akses terhadap teknologi, dan arah investasi, sehingga memiliki leverage ekonomi dan politik yang lebih besar. Perbedaan dalam kepemilikan juga berdampak pada mobilitas sosial, di mana individu tanpa akses terhadap sarana produksi menghadapi hambatan untuk naik ke kelas yang lebih tinggi. Hal ini menjadikan kepemilikan sarana produksi sebagai indikator penting dalam analisis kelas dan stratifikasi sosial, karena secara langsung memengaruhi kemampuan individu untuk mengakses sumber daya dan peluang ekonomi.

b. Sumber Pendapatan

Sumber pendapatan merupakan kriteria penting dalam pembentukan kelas ekonomi karena menentukan cara individu

atau kelompok memperoleh penghasilan dan posisinya dalam struktur sosial, sehingga membedakan antara kelas pekerja, pemilik modal, dan profesional. Pendapatan yang berasal dari upah atau gaji menempatkan individu dalam posisi bergantung pada majikan atau pasar tenaga kerja, sedangkan pendapatan dari keuntungan usaha, sewa, atau investasi memberi pemilik kontrol lebih besar terhadap alokasi sumber daya dan peluang ekonomi (Haryanto, 2020). Perbedaan sumber pendapatan ini memengaruhi akses terhadap aset, kemampuan menabung dan berinvestasi, serta peluang untuk mobilitas sosial, sehingga menjadi indikator utama dalam analisis kelas.

Sumber pendapatan juga berkaitan erat dengan stabilitas ekonomi dan keamanan sosial individu, karena pendapatan yang dapat diandalkan memungkinkan perencanaan jangka panjang, akses pendidikan, dan kesehatan, sementara pendapatan tidak tetap atau bergantung pada kondisi pasar meningkatkan kerentanan. Klasifikasi kelas berdasarkan sumber pendapatan mencerminkan hubungan kekuasaan dan ketergantungan dalam masyarakat, di mana yang mengandalkan upah memiliki posisi tawar lebih rendah dibandingkan pemilik aset atau modal. Hal ini menjadikan analisis sumber pendapatan krusial untuk memahami dinamika distribusi kekayaan, akses peluang, dan stratifikasi ekonomi dalam konteks modern.

c. Kontrol atas Proses Kerja

Kontrol atas proses kerja merupakan kriteria penting dalam pembentukan kelas ekonomi karena menentukan sejauh mana individu atau kelompok memiliki kekuasaan untuk mengatur bagaimana pekerjaan dilakukan, termasuk penentuan metode, alokasi tugas, dan penggunaan sumber daya dalam produksi, sehingga memengaruhi distribusi hasil dan posisi sosial-ekonomi. Individu atau kelompok yang menguasai proses kerja memiliki kemampuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keuntungan, sementara yang tidak memiliki kontrol hanya dapat menjual tenaga kerja, sehingga memperkuat ketergantungan dan hierarki kelas (Santoso, 2020). Kontrol ini juga memengaruhi mobilitas sosial, karena akses terhadap posisi pengawasan atau manajerial membuka peluang untuk

memperoleh penghasilan lebih tinggi, pengalaman strategis, dan pengaruh dalam organisasi.

Kontrol atas proses kerja berinteraksi dengan kepemilikan sarana produksi dan modal finansial, karena pengendalian metode produksi dan keputusan strategis dapat meningkatkan pemanfaatan aset dan investasi secara optimal. Perusahaan atau individu yang memiliki kontrol atas pekerjaan dapat menentukan standar kualitas, jadwal produksi, dan inovasi, sehingga memperkuat posisi tawar di pasar dan dalam struktur kelas ekonomi. Ketimpangan dalam kontrol atas proses kerja juga menciptakan struktur relasi kekuasaan yang asimetris antara manajemen dan pekerja, serta antara kelas atas dan kelas menengah atau bawah.

d. Akses ke Modal Non-Finansial

Akses ke modal non-finansial merupakan kriteria penting dalam pembentukan kelas ekonomi karena menentukan kemampuan individu atau kelompok untuk memanfaatkan sumber daya seperti pendidikan, keterampilan, jaringan sosial, dan informasi yang meningkatkan peluang ekonomi dan mobilitas sosial. Modal non-finansial memungkinkan individu memperoleh pekerjaan bernilai tinggi, memulai usaha, atau mengoptimalkan aset yang dimiliki, sehingga memperkuat posisi ekonomi dan sosial dibandingkan yang memiliki akses terbatas (Lestari, 2021). Perbedaan akses ini menciptakan stratifikasi kelas yang nyata karena kelompok dengan modal non-finansial yang kuat lebih mampu mempertahankan atau meningkatkan status ekonomi dibandingkan kelompok yang terpinggirkan.

Akses ke modal non-finansial berperan dalam reproduksi kelas antar-generasi, karena anak-anak dari keluarga dengan pendidikan tinggi, jaringan luas, atau pengalaman profesional cenderung memiliki peluang lebih besar untuk memasuki kelas ekonomi menengah atau atas. Ketergantungan individu terhadap akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas serta jejaring sosial menegaskan bahwa modal non-finansial menjadi faktor penting dalam menentukan posisi tawar dalam pasar tenaga kerja dan peluang investasi. Hal ini menjadikan analisis akses modal non-finansial krusial untuk memahami dinamika

kekuasaan, ketimpangan, dan peluang ekonomi dalam masyarakat modern.

C. Korporasi Multinasional Sebagai Aktor Politik

Korporasi multinasional (MNC) merupakan aktor politik penting karena pengaruhnya tidak hanya terbatas pada kegiatan ekonomi, tetapi juga menyentuh kebijakan publik, regulasi, dan agenda politik, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kekuatan politik MNC muncul dari kombinasi modal finansial besar, jaringan internasional, teknologi mutakhir, dan akses pasar global, sehingga mampu membentuk keputusan pemerintah dan regulasi industri yang sejalan dengan kepentingan bisnis. Dengan demikian, MNC berperan sebagai aktor ekonomi sekaligus politik yang memengaruhi distribusi kekuasaan dan struktur pasar. Beberapa mekanisme dan strategi MNC sebagai aktor politik meliputi:

1. Lobbying dan Advokasi Kebijakan

Lobbying dan advokasi kebijakan merupakan mekanisme strategis yang digunakan oleh korporasi multinasional (MNC) untuk memaksimalkan pengaruh terhadap pembuatan kebijakan publik dan regulasi industri, karena kapasitas finansial yang besar memungkinkan mengakses pembuat kebijakan secara langsung. Melalui aktivitas ini, MNC dapat menekan legislator atau regulator untuk menciptakan undang-undang, peraturan perdagangan, atau standar industri yang selaras dengan kepentingan bisnis, sehingga memperkuat posisi ekonomi dan daya tawar dalam pasar global. Strategi ini menjadikan MNC bukan hanya pelaku ekonomi, tetapi juga agen politik yang dapat memengaruhi distribusi kekuasaan dalam konteks nasional maupun internasional.

Lobbying dan advokasi kebijakan memungkinkan MNC untuk memperoleh perlindungan hukum, insentif pajak, atau regulasi yang mengurangi risiko bisnis dan meningkatkan profitabilitas. Akses langsung ke proses pengambilan keputusan publik memberikan keuntungan kompetitif, karena MNC dapat menyesuaikan operasinya agar lebih efisien dan memanfaatkan celah regulasi yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas politik MNC tidak bersifat pasif,

melainkan proaktif dalam membentuk lingkungan ekonomi dan kebijakan yang mendukung dominasi.

2. Negosiasi Fiskal dan Regulasi Investasi

Negosiasi fiskal dan regulasi investasi oleh korporasi multinasional (MNC) merupakan strategi politik yang sangat strategis, karena perusahaan-perusahaan besar menggunakan posisi tawar ekonominya untuk menegosiasikan insentif pajak, subsidi, dan kerangka regulasi yang lebih menguntungkan dengan pemerintah negara tuan rumah. Dalam proses ini, MNC dapat meminta keringanan pajak, *tax holiday*, atau peraturan investasi yang lebih fleksibel agar biaya modal berkurang dan arus investasi menjadi lebih efisien serta menguntungkan. Negosiasi tersebut tidak hanya memperkuat daya saing MNC, tetapi juga menggeser struktur kebijakan fiskal negara, kadang-kadang sampai mengorbankan potensi penerimaan publik demi menarik atau mempertahankan modal asing (Andriansyah, 2021).

Pada negosiasi regulasi investasi, MNC dapat menekan pemerintah untuk memberikan jaminan hukum, perlindungan terhadap nasionalisasi, dan hak repatriasi laba, sehingga risiko bisnis jangka panjang berkurang dan skema investasi menjadi lebih menarik. Keberhasilan memperoleh ketentuan fiskal dan regulasi ini meningkatkan leverage MNC dalam menentukan lokasi investasi dan pun memperkuat posisi tawar dalam negosiasi global. Interaksi ini menjadikan MNC sebagai aktor politik yang mampu mempengaruhi kebijakan fiskal domestik dan global secara signifikan.

3. Partisipasi dalam Diplomasi Ekonomi Global

Partisipasi korporasi multinasional dalam diplomasi ekonomi global adalah strategi politik yang krusial karena menggunakan kehadiran lintas-negara dan jaringan global untuk berpartisipasi aktif dalam forum internasional, asosiasi industri, dan perundingan perdagangan guna memengaruhi norma dan kebijakan ekonomi global. MNC dapat mengajukan pandangan dalam pertemuan-pertemuan multilateral, koalisi regional, atau organisasi perdagangan untuk mengadvokasi regulasi, standar global, dan perjanjian yang mendukung struktur rantai nilai global yang menguntungkannya. Dengan peran ini, MNC bukan hanya pelaku bisnis, melainkan aktor politik transnasional

yang mampu mengarahkan tata aturan ekonomi internasional dan memperkuat distribusi kekuasaan ekonomi pada level global (Ballor & Yildirim, 2020).

Dengan diplomasi ekonomi, MNC dapat memperoleh legitimasi politik di negara tuan rumah sekaligus memperkuat hubungan bilateral atau multilateral dengan pemerintah, yang memperluas pengaruh dalam kebijakan investasi dan regulasi lintas negara. Mampu membentuk aliansi dengan negara-negara tertentu untuk memperjuangkan kepentingan ekonominya dalam kesepakatan perdagangan bebas, kebijakan tarif, serta proteksi hak kekayaan intelektual yang mendukung operasional global. Pendekatan ini menjadikan MNC sebagai jembatan antara kepentingan bisnis global dan kebijakan negara, sekaligus sebagai penentu agenda pembangunan ekonomi lintas benua.

D. Ketimpangan Kekuasaan Pasar

Ketimpangan kekuasaan pasar adalah kondisi di mana beberapa pelaku ekonomi memiliki kemampuan dominan untuk memengaruhi harga, akses terhadap sumber daya, alokasi produksi, dan keputusan strategis pasar, sementara pelaku lain memiliki daya tawar yang terbatas. Ketimpangan ini sering muncul karena konsentrasi modal, kepemilikan sarana produksi, kontrol teknologi, atau akses jaringan distribusi yang eksklusif, sehingga aktor dominan dapat menetapkan aturan main pasar yang menguntungkannya sendiri. Dampak dari ketimpangan ini mencakup terhambatnya persaingan sehat, terbatasnya akses bagi pemain baru, dan terjadinya distorsi dalam distribusi keuntungan, yang dapat memperkuat kesenjangan ekonomi dan sosial. Beberapa indikator ketimpangan kekuasaan pasar meliputi:

1. Kemampuan Perusahaan Besar Menentukan Harga Pasar

Kemampuan perusahaan besar dalam menentukan harga pasar merupakan indikator utama dari ketimpangan kekuasaan pasar, karena perusahaan dengan pangsa pasar dominan dapat menetapkan harga produk atau jasa sesuai kepentingannya, sementara pelaku kecil harus menyesuaikan diri, sehingga daya tawar terbatas dan persaingan menjadi tidak seimbang. Situasi ini menciptakan hambatan masuk bagi perusahaan baru, karena harus bersaing dengan harga yang sudah

dikendalikan oleh pemain dominan, yang pada akhirnya memengaruhi distribusi keuntungan dan stabilitas pasar secara keseluruhan (Porter & Heppelmann, 2019).

Kemampuan ini memungkinkan perusahaan besar mengatur margin keuntungan, memprediksi pendapatan dengan lebih presisi, dan melakukan investasi strategis untuk meningkatkan efisiensi produksi. Dominasi harga juga membatasi pilihan konsumen, karena sering kali terpaksa menerima harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan dominan, sehingga konsentrasi ekonomi semakin menguat dan peluang persaingan sehat semakin kecil.

2. Penguasaan Teknologi dan Informasi Strategis

Penguasaan teknologi dan informasi strategis merupakan indikator penting dari ketimpangan kekuasaan pasar, karena perusahaan yang memiliki akses terhadap teknologi canggih, data pasar, dan kemampuan analisis informasi dapat mengambil keputusan lebih cepat dan tepat, sementara pesaing dengan sumber daya terbatas kesulitan menyesuaikan strategi. Hal ini memungkinkan pelaku dominan untuk meningkatkan efisiensi produksi, memprediksi tren pasar, dan menciptakan hambatan masuk yang tinggi bagi perusahaan baru, sehingga memperkuat konsentrasi ekonomi dan mengurangi persaingan (Brynjolfsson & McAfee, 2018).

Kontrol terhadap informasi strategis memberi perusahaan dominan kemampuan untuk memanipulasi harga, menargetkan segmen konsumen tertentu, dan menyesuaikan strategi pemasaran secara lebih efektif daripada pesaing yang memiliki akses terbatas. Akses ini juga memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data secara real-time, yang mengurangi risiko dan meningkatkan profitabilitas, sekaligus menciptakan kesenjangan kemampuan kompetitif yang signifikan di pasar.

3. Pengaruh dalam Pembuatan Regulasi dan Kebijakan Industri

Pengaruh perusahaan besar dalam pembuatan regulasi dan kebijakan industri merupakan indikator penting dari ketimpangan kekuasaan pasar, karena aktor dominan mampu memengaruhi pemerintah untuk merumuskan aturan yang menguntungkan kepentingannya, seperti insentif fiskal, perlindungan hukum, atau pengaturan tarif dan standar industri, sementara perusahaan kecil

memiliki akses terbatas dalam proses ini. Kondisi ini memungkinkan pelaku dominan mempertahankan posisinya di pasar, menekan pesaing potensial, dan menciptakan lingkungan bisnis yang secara struktural menguntungkan secara berkelanjutan (Faccio & Parsley, 2018).

Pengaruh ini memberikan perusahaan besar kapasitas untuk memprioritaskan kebijakan yang mendukung ekspansi, integrasi vertikal, atau inovasi dalam rantai pasok, sekaligus mengurangi risiko regulasi yang merugikan. Dengan kontrol atas pembuatan kebijakan, pelaku dominan dapat mengarahkan dinamika industri sesuai kepentingannya, memanfaatkan jaringan politik dan ekonomi, serta memperkuat daya tawar terhadap pemerintah maupun konsumen.

4. Kontrol terhadap Distribusi dan Akses Pasar

Kontrol terhadap distribusi dan akses pasar merupakan indikator penting dari ketimpangan kekuasaan pasar, karena perusahaan besar dapat menguasai rantai pasok, jaringan distribusi, dan saluran penjualan sehingga mampu menentukan ketersediaan produk di berbagai wilayah dan membatasi akses pesaing yang lebih kecil. Dengan pengendalian ini, pelaku dominan dapat memaksimalkan pangsa pasar, mengatur harga sesuai kepentingannya, dan memperkuat posisi kompetitif secara sistematis, sementara perusahaan lain menghadapi hambatan masuk yang tinggi (OECD, 2019).

Kontrol distribusi memungkinkan perusahaan dominan untuk menekan biaya logistik, memilih mitra dagang strategis, dan mengoptimalkan efisiensi operasional sehingga dapat menawarkan produk lebih cepat dan lebih luas dibandingkan pesaing yang terbatas sumber daya. Hal ini juga memberi leverage dalam negosiasi dengan pengecer dan konsumen, sehingga keputusan pasar cenderung berpihak pada kepentingan perusahaan besar.

E. Study Case

1. Studi Kasus: Dominasi Pasar oleh Industri E-Commerce di Asia Tenggara

Pada beberapa tahun terakhir, industri e-commerce di Asia Tenggara menunjukkan dinamika pasar yang mencolok di mana beberapa perusahaan besar seperti Shopee dan Tokopedia (sekarang GOTO) mampu mendominasi pasar dengan pangsa pengguna dan

transaksi yang jauh lebih tinggi dibandingkan pemain kecil. Dominasi ini muncul karena memiliki modal finansial besar, memungkinkan investasi agresif dalam teknologi, logistik, dan pemasaran, sekaligus menawarkan insentif harga yang sulit disaingi oleh perusahaan kecil. Kemampuan mengontrol harga, menyesuaikan strategi promosi, dan memperluas jangkauan distribusi merupakan contoh nyata bagaimana modal menjadi alat untuk mengonsolidasikan kekuasaan pasar.

Perusahaan-perusahaan ini juga menunjukkan penguasaan teknologi dan informasi strategis, dengan memanfaatkan algoritma data besar (*big data*) untuk memahami perilaku konsumen, meningkatkan efisiensi logistik, dan menentukan strategi penetapan harga secara real-time. Hal ini memperkuat posisi tawar terhadap pemasok, mitra dagang, dan bahkan pemerintah dalam konteks regulasi industri. Mekanisme ini menunjukkan hubungan erat antara modal, kontrol teknologi, dan kekuasaan dalam menentukan struktur pasar, di mana perusahaan dominan mampu mengarahkan arah persaingan dan menentukan “aturan main” yang menguntungkannya.

Mekanisme kekuasaan juga terlihat melalui lobi dan advokasi kebijakan. Perusahaan e-commerce besar dapat berpartisipasi dalam forum regulasi dan kebijakan pemerintah untuk mengamankan insentif fiskal, regulasi perdagangan, dan perlindungan data konsumen yang mendukung model bisnis. Misalnya, negosiasi terkait pajak e-commerce dan regulasi perlindungan konsumen digital menjadi arena di mana aktor dominan memperkuat kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi modal finansial, teknologi, dan keterlibatan dalam proses politik memungkinkan perusahaan besar mengontrol pasar secara efektif, memperlihatkan interaksi kompleks antara pasar, modal, dan mekanisme kekuasaan.

BAB VI

EKONOMI POLITIK KETIMPANGAN DAN KESEJAHTERAAN

Ekonomi politik ketimpangan dan kesejahteraan membahas bagaimana distribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi dan struktur kekuasaan, yang menentukan kualitas hidup masyarakat. Ketimpangan yang tinggi dapat menghambat mobilitas sosial dan menimbulkan ketidakstabilan, sementara distribusi kesejahteraan yang merata mendukung pertumbuhan inklusif dan memperkuat legitimasi politik.

A. Ketimpangan Kelas dan Distribusi Pendapatan

Ketimpangan kelas dan distribusi pendapatan merupakan dua fenomena yang saling terkait, di mana perbedaan kekayaan, akses terhadap sumber daya, dan peluang ekonomi antara kelompok masyarakat menciptakan jurang sosial yang signifikan. Ketimpangan kelas tidak hanya terlihat dari perbedaan pendapatan, tetapi juga dari akses terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan pengaruh politik, sementara distribusi pendapatan yang tidak merata memperkuat ketidakadilan sosial dan membatasi mobilitas ekonomi bagi mayoritas masyarakat.

1. Ketimpangan Kelas

Ketimpangan kelas adalah perbedaan yang signifikan antara kelompok masyarakat dalam hal status ekonomi, sosial, dan akses terhadap sumber daya. Fenomena ini tidak hanya terlihat dari pendapatan atau kekayaan, tetapi juga dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan, kekuasaan politik, dan pengaruh sosial. Ketimpangan kelas sering membagi masyarakat menjadi kelas atas, menengah, dan bawah, di mana kelas atas memiliki dominasi dalam akumulasi kekayaan dan akses peluang, sedangkan kelas bawah menghadapi keterbatasan dalam

berbagai aspek kehidupan. Ketimpangan kelas dapat dianalisis melalui beberapa dimensi:

a. Dimensi Ekonomi

Dimensi ekonomi dalam ketimpangan kelas menitikberatkan pada perbedaan kepemilikan modal, pendapatan, dan aset antara kelompok-kelompok sosial, yang memungkinkan kelas atas memperoleh imbal hasil investasi jauh lebih tinggi dibandingkan pendapatan kerja biasa. Sebagai bukti empiris, penelitian oleh Gil-Hernández (2025) menemukan bahwa kelas pekerja dan kelas kapitalis (pemilik aset) sangat berbeda dalam distribusi kekayaan lintas pekerjaan dan pendapatan, sehingga kekayaan menjadi salah satu pendorong utama stratifikasi sosial.

Ketimpangan ekonomi ini memperkuat dominasi kelas atas karena memiliki akses lebih besar ke aset produktif seperti saham, properti, dan bisnis, sementara kelas bawah mengandalkan pendapatan dari kerja yang cenderung stagnan. Akibatnya, tingginya konsentrasi kekayaan dalam kelompok kecil meningkatkan hambatan mobilitas sosial, karena akumulasi kekayaan cenderung diwariskan dan memperkuat posisi sosial kelas atas dari generasi ke generasi.

b. Dimensi Pendidikan dan Keterampilan

Dimensi pendidikan dan keterampilan dalam ketimpangan kelas membahas bagaimana perbedaan akses terhadap pendidikan berkualitas dan pelatihan keterampilan memperkuat stratifikasi sosial, karena pendidikan menjadi salah satu sarana utama untuk mobilitas sosial dan peningkatan pendapatan. Menurut Blanden, Doepke, dan Stuhler (2022), latar belakang sosial-ekonomi memengaruhi investasi orang tua terhadap pendidikan anak, sehingga anak dari keluarga kelas atas cenderung memiliki akses lebih besar ke pendidikan tinggi dan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja modern, sedangkan anak dari kelas bawah seringkali terbatas pada pendidikan dasar atau menengah yang kurang mendukung peluang kerja.

Keterbatasan akses pendidikan dan pelatihan bagi kelas bawah tidak hanya membatasi kesempatan untuk memperoleh pekerjaan dengan upah tinggi, tetapi juga memperkuat siklus ketimpangan lintas generasi, karena keterampilan yang terbatas

menurunkan daya saing ekonomi dan mobilitas sosial. Akibatnya, kelas atas mempertahankan dominasi dalam peluang ekonomi dan sosial, sementara kelas bawah mengalami stagnasi dalam status sosial dan ekonomi, yang menjadikan pendidikan dan keterampilan sebagai dimensi kunci dalam memahami ketimpangan kelas.

c. Dimensi Politik dan Kekuasaan

Dimensi politik dan kekuasaan dalam ketimpangan kelas membahas bagaimana kelas sosial atas memegang kendali yang jauh lebih besar dalam proses pengambilan keputusan publik dan kebijakan negara, yang memungkinkan mempromosikan kepentingan ekonominya sendiri di atas kepentingan masyarakat luas. Penelitian oleh Han dkk. (2024) menunjukkan bahwa elit politik sering berasal dari latar belakang sosial-ekonomi yang sangat terbatas, yakni kelompok kaya dan berpendidikan tinggi, yang memperkuat jurang representasi antara kelas atas dan rakyat biasa.

Dominasi politik oleh kelas atas ini menciptakan struktur kekuasaan yang eksklusif, di mana suara dan kepentingan kelas bawah atau menengah kurang diakomodasi secara adil, sehingga memperkuat ketidaksetaraan struktural dan mempertahankan status quo sosial-ekonomi. Kesempatan mobilitas politik bagi kelas non-elit menjadi terbatas karena sistem representasi dan jejaring elit sudah dirancang untuk melanggengkan dominasi kelompok kaya dalam birokrasi, legislatif, dan institusi ekonomi.

d. Dimensi Sosial dan Budaya

Dimensi sosial dan budaya dalam ketimpangan kelas mengungkap bagaimana norma, selera, dan simbol budaya yang melekat pada kelas atas diposisikan sebagai standar masyarakat, sehingga menyalurkan kekuasaan simbolik dan memperkuat stratifikasi sosial. Penelitian oleh Paccoud (2019) menggunakan konsep modal budaya Bourdieu untuk menunjukkan bahwa volume dan komposisi kapital budaya secara signifikan memengaruhi posisi kelas sosial, di mana kelas dominan memanfaatkan budaya sebagai alat reproduksi ketimpangan.

Dominasi budaya ini tercermin dalam konsumsi gaya hidup, nilai-nilai dan praktik simbolik kelas atas yang diinternalisasi

sebagai norma universal oleh masyarakat luas, sementara kelas bawah cenderung kurang diakui dalam ranah simbolik tersebut, memperkuat perbedaan dan eksklusivitas sosial.

2. Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan adalah cara pendapatan nasional atau sumber daya ekonomi dibagi di antara individu atau rumah tangga dalam suatu masyarakat. Distribusi ini mencerminkan seberapa adil atau timpangnya pembagian kekayaan, serta memengaruhi kualitas hidup, kesempatan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Distribusi pendapatan yang merata memungkinkan lebih banyak orang mengakses pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi, sementara distribusi yang timpang menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Dampak dari distribusi pendapatan yang timpang antara lain:

a. Kesenjangan Ekonomi

Ketimpangan ekonomi sebagai dampak dari distribusi pendapatan yang timpang terjadi ketika sebagian besar kekayaan terkonsentrasi di segelintir kelompok kaya, sementara mayoritas masyarakat memiliki akses pendapatan yang jauh lebih rendah. Hal ini mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi menjadi tidak inklusif, karena ketimpangan pendapatan yang tinggi menghambat akumulasi modal fisik dan sumber daya manusia, sehingga menurunkan potensi investasi jangka panjang dan produktivitas ekonomi. Menurut Shen & Zhao (2023), meningkatnya ketimpangan pendapatan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dengan cara mengurangi rata-rata investasi fisik dan akumulasi modal manusia.

Distribusi pendapatan yang sangat timpang juga memperlemah daya beli kelas menengah dan bawah, sehingga konsumsi agregat tertekan dan pertumbuhan ekonomi menjadi rapuh karena bergantung pada segelintir kelompok kaya yang mengkonsumsi secara tidak proporsional. Ketika konsentrasi pendapatan tinggi, risiko instabilitas ekonomi meningkat karena ketergantungan pada stimulus kebijakan untuk menjaga permintaan, dan ketimpangan ini bisa memicu ketidakpuasan sosial serta menurunkan kepercayaan terhadap institusi ekonomi dan politik.

b. Mobilitas Sosial Terbatas

Distribusi pendapatan yang sangat timpang membatasi mobilitas sosial karena sebagian besar sumber daya ekonomi dan peluang diwariskan dalam lingkaran tertutup kelas atas, sehingga anak-anak dari keluarga miskin memiliki hambatan struktural untuk naik kelas. Penelitian oleh Corak & van der Weide (2022) menunjukkan bahwa negara dengan ketimpangan pendapatan tinggi cenderung memiliki mobilitas antar generasi yang rendah, mencerminkan hubungan negatif antara ketimpangan dan mobilitas sosial.

Akibatnya, yang lahir dalam keluarga kelas bawah sulit mengakses instrumen mobilitas seperti pendidikan berkualitas, modal sosial, atau jaringan profesional, memperkuat siklus kemiskinan antar generasi dan membuat peluang perubahan status sosial sangat terbatas.

c. Ketidakstabilan Sosial

Distribusi pendapatan yang timpang menimbulkan ketidakstabilan sosial karena jurang kekayaan yang tajam antara kelompok kaya dan miskin memicu ketidakpuasan masif, rasa ketidakadilan, dan potensi konflik sosial. Justino (2025) menemukan bukti bahwa ketidaksetaraan ekonomi juga mendorong mobilisasi sosial antarkelompok, yang dalam kondisi tertentu dapat berubah menjadi tindakan kolektif atau kekerasan politik.

Ketika sebagian besar warga merasa terpinggirkan secara ekonomi dan tidak memiliki akses ke peluang yang adil, legitimasi institusi sosial dan politik bisa terkikis, sehingga kohesi sosial melemah dan stabilitas negara menjadi rapuh. Ketimpangan yang terus-menerus tanpa respons kebijakan redistributif dapat menyebabkan polarisasi sosial yang mendalam dan memperbesar risiko kerusuhan atau protes sosial.

B. Politik Jaminan Sosial

Politik jaminan sosial adalah kebijakan yang dirancang oleh pemerintah untuk melindungi warga dari risiko ekonomi dan sosial sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan. Melalui program ini, pemerintah menyediakan layanan dan

bantuan yang bertujuan menekan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata, sekaligus memperkuat stabilitas sosial dan legitimasi politik. Fungsi dan arah utama politik jaminan sosial dapat dijelaskan melalui beberapa fokus berikut:

1. Menjamin Perlindungan terhadap Risiko Ekonomi dan Kesehatan

Politik jaminan sosial bertujuan untuk memberikan perlindungan ekonomi dan kesehatan kepada masyarakat, terutama kelompok rentan, agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar saat menghadapi risiko seperti kehilangan pekerjaan, sakit, atau kecelakaan. Program seperti tunjangan pengangguran, asuransi kesehatan nasional, dan subsidi pengobatan berfungsi sebagai jaring pengaman yang mengurangi kemungkinan jatuh ke kemiskinan akibat risiko ekonomi atau kesehatan yang tak terduga. Menurut Barrientos dan Hulme (2018), jaminan sosial berperan penting dalam memitigasi risiko sosial-ekonomi dan memperkuat keamanan finansial rumah tangga yang rentan. Perlindungan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga mendorong stabilitas sosial dan keberlanjutan ekonomi karena masyarakat dapat tetap produktif meskipun menghadapi risiko tak terduga.

Perlindungan terhadap risiko ekonomi dan kesehatan memungkinkan keluarga miskin atau kelompok rentan mengalokasikan sumber daya untuk pendidikan, investasi produktif, dan kegiatan ekonomi lainnya tanpa harus terjerat kemiskinan akibat biaya kesehatan atau kehilangan pendapatan mendadak. Program jaminan sosial seperti asuransi kesehatan universal dan tunjangan sosial dirancang untuk menciptakan jaringan keamanan yang merata, sehingga kesenjangan sosial dan ekonomi dapat ditekan secara signifikan. Dengan demikian, perlindungan terhadap risiko ekonomi dan kesehatan menjadi fondasi utama dalam memastikan bahwa kebijakan jaminan sosial mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mengurangi ketidakadilan sosial.

2. Mengurangi Kesenjangan Pendapatan Melalui Redistribusi

Politik jaminan sosial berperan penting dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dengan memanfaatkan pajak dan iuran sosial

dari kelompok berpenghasilan tinggi untuk dialihkan kepada kelompok rentan melalui program tunjangan, subsidi, dan bantuan sosial. Mekanisme ini membantu menyeimbangkan distribusi ekonomi, sehingga meningkatkan keadilan sosial dan akses terhadap kebutuhan dasar bagi masyarakat kurang mampu.

Menurut studi ILO (2024), penerapan jaminan sosial yang efektif, termasuk transfer tunai dan asuransi sosial, terbukti menurunkan ketimpangan pendapatan di berbagai negara dan memperkuat perlindungan bagi kelompok miskin dan rentan. Redistribusi ini tidak hanya berdampak langsung pada pendapatan rumah tangga, tetapi juga mendukung pengurangan kemiskinan jangka panjang dan kesempatan ekonomi yang lebih merata.

3. Meningkatkan Akses Pendidikan dan Keterampilan untuk Mobilitas Sosial

Politik jaminan sosial berperan strategis dalam meningkatkan akses pendidikan dan keterampilan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan, dengan menyediakan beasiswa, program pelatihan kerja, dan pendidikan gratis yang memungkinkan individu memperoleh kapasitas untuk berkompetisi di pasar kerja. Menurut Blanden, Doepke, dan Stuhler (2022), akses pendidikan yang merata melalui kebijakan sosial dapat meningkatkan mobilitas sosial dan mengurangi reproduksi ketimpangan antar generasi, karena anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh peluang yang setara untuk berkembang. Dengan demikian, peningkatan akses pendidikan dan keterampilan bukan hanya meningkatkan kemampuan individu, tetapi juga memperkuat peluang ekonomi dan kesempatan sosial yang lebih adil dalam jangka panjang.

Dengan program pelatihan keterampilan yang disubsidi dan pendidikan inklusif, politik jaminan sosial memungkinkan masyarakat miskin memperoleh kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, sehingga mengurangi kesenjangan keterampilan dan meningkatkan daya saing tenaga kerja. Akses yang lebih baik ke pendidikan dan pelatihan juga memungkinkan individu membangun jaringan sosial dan profesional yang mendukung mobilitas ekonomi dan sosial. Dengan demikian, investasi pemerintah dalam pendidikan dan keterampilan melalui jaminan sosial menjadi sarana penting untuk membangun masyarakat yang lebih produktif dan inklusif.

4. Memperkuat Stabilitas Sosial dan Legitimasi Politik

Politik jaminan sosial berfungsi untuk memperkuat stabilitas sosial dan legitimasi politik dengan menyediakan perlindungan ekonomi dan layanan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga mengurangi ketidakpuasan sosial dan potensi konflik yang dapat mengganggu tatanan sosial. Menurut Barrientos dan Hulme (2018), implementasi jaminan sosial yang efektif meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga negara karena masyarakat merasakan manfaat langsung dari kebijakan tersebut, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi politik. Dengan demikian, politik jaminan sosial tidak hanya menargetkan kesejahteraan individu, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk menjaga kohesi sosial dan stabilitas politik dalam jangka panjang.

Stabilitas sosial yang diperoleh melalui jaminan sosial memungkinkan pemerintah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia, karena masyarakat merasa aman secara ekonomi dan lebih mampu berpartisipasi dalam kegiatan produktif. Dengan pengurangan ketidaksetaraan dan perlindungan terhadap kelompok rentan, risiko kerusuhan, protes, atau konflik sosial menurun, sehingga memperkuat stabilitas institusi dan tata kelola negara. Politik jaminan sosial yang terencana dengan baik memastikan bahwa program perlindungan sosial menjadi mekanisme preventif terhadap ketidakstabilan sosial dan meningkatkan legitimasi pemerintah di mata masyarakat.

C. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural merupakan kondisi di mana masyarakat miskin mengalami keterbatasan yang bersifat sistemik, bukan hanya akibat rendahnya pendapatan. Faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan institusional membentuk hambatan yang sulit diatasi oleh individu atau keluarga, sehingga kemiskinan ini cenderung bersifat jangka panjang dan dapat diwariskan antar generasi. Selain itu, kemiskinan struktural membuat masyarakat miskin memiliki akses yang terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan layak, layanan dasar, dan peluang ekonomi, sehingga mobilitas sosialnya sangat rendah. Beberapa faktor penyebab kemiskinan struktural antara lain:

1. Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Kekayaan

Ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan menjadi salah satu faktor utama kemiskinan struktural karena sebagian besar kekayaan terkonsentrasi pada kelompok kecil, sementara mayoritas masyarakat memiliki akses terbatas terhadap modal, pendidikan, dan peluang ekonomi. Kondisi ini membuat masyarakat miskin sulit mengembangkan kapasitas diri dan memperbaiki kesejahteraannya, sehingga kemiskinan cenderung bersifat jangka panjang dan diwariskan antar generasi.

Menurut Motahar (2025), ketimpangan kekayaan (*wealth inequality*) menciptakan perbedaan akses yang signifikan terhadap pendidikan dan peluang ekonomi, sehingga kelompok miskin mengalami hambatan struktural yang lebih berat dibandingkan hanya ketimpangan pendapatan biasa. Ketidakmerataan ini memperkuat stratifikasi sosial dan membatasi mobilitas sosial, sehingga rumah tangga miskin kesulitan keluar dari siklus kemiskinan.

2. Akses Pendidikan yang Tidak Merata

Ketidakmerataan akses pendidikan menjadi faktor utama kemiskinan struktural karena anak-anak dari keluarga miskin sulit mendapatkan pendidikan berkualitas dan pelatihan keterampilan yang memadai. Hal ini membatasi kemampuan untuk meningkatkan kompetensi dan memperoleh pekerjaan dengan pendapatan layak, sehingga mobilitas sosial menjadi rendah.

Menurut Ayuningtyas (2021), latar belakang ekonomi keluarga dan lokasi geografis sangat memengaruhi kesempatan anak mengakses pendidikan menengah di Kalimantan Timur, yang memperkuat kesenjangan pendidikan antar generasi dan menghambat peluang ekonomi. Ketimpangan pendidikan ini memperdalam ketimpangan sosial-ekonomi karena anak-anak dari keluarga miskin cenderung tetap berada dalam siklus kemiskinan.

3. Kesempatan Kerja Terbatas dan Kondisi Pasar Tenaga Kerja yang Tidak Inklusif

Ketidaktersediaan lapangan kerja formal yang memadai dan pasar tenaga kerja yang tidak inklusif menjadi faktor signifikan dalam kemiskinan struktural karena banyak pekerja terpaksa bekerja di sektor informal dengan upah rendah dan tanpa jaminan sosial. Kondisi ini

membuat masyarakat miskin sulit meningkatkan pendapatannya secara berkelanjutan dan memperkuat ketergantungan pada bantuan sosial.

Menurut Noor (2024), inklusi pekerjaan sangat penting dalam mengatasi kemiskinan karena tanpa akses ke pekerjaan formal yang layak, kelompok miskin terus tertinggal dalam pendapatan dan stabilitas ekonomi. Ketidakmerataan kesempatan kerja, regulasi ketenagakerjaan yang berat, dan hambatan akses bagi kelompok rentan memperkuat siklus kemiskinan dengan menghalangi integrasi sosial-ekonomi dan mobilitas.

D. Ekonomi Politik Gender dan Akses Sumber Daya

Ekonomi politik gender dan akses sumber daya membahas bagaimana struktur kekuasaan, kebijakan negara, dan norma sosial mempengaruhi peluang ekonomi berdasarkan jenis kelamin, sehingga menciptakan atau memperkuat ketimpangan dalam distribusi sumber daya, kesempatan kerja, dan kepemilikan aset. Pendekatan ini menegaskan bahwa ketidaksetaraan gender tidak sekadar persoalan individu atau budaya, melainkan terhubung dengan sistem ekonomi, hukum, dan institusi politik yang menentukan siapa yang berhak mengakses tanah, modal, pendidikan, layanan kesehatan, serta posisi pengambilan keputusan. Beberapa aspek yang menggambarkan hubungan antara gender dan akses sumber daya dalam perspektif ekonomi politik antara lain:

1. Ketimpangan Kepemilikan Aset dan Lahan

Ketimpangan kepemilikan aset dan lahan dalam perspektif ekonomi politik gender mencerminkan struktur kekuasaan yang memengaruhi siapa yang berhak menguasai, mengelola, dan mengambil manfaat dari sumber daya ekonomi, khususnya lahan, sehingga perempuan sering kali tidak memiliki posisi tawar dalam proses pengambilan keputusan maupun distribusi hasil ekonomi. Menurut Agarwal (2021), ketidaksetaraan kepemilikan lahan berbasis gender tidak hanya bersumber dari faktor ekonomi, tetapi juga dari norma sosial serta hukum yang membatasi hak perempuan dalam pewarisan, kepemilikan, dan akses terhadap sumber daya produktif, sehingga menciptakan kerentanan ekonomi yang berlapis dan berkelanjutan bagi perempuan.

Konsekuensi dari ketimpangan kepemilikan aset ini adalah munculnya siklus kemiskinan struktural yang lebih dominan terjadi pada perempuan, karena tanpa akses terhadap lahan dan aset produktif, perempuan akan lebih sulit mendapatkan pembiayaan, akses kredit, teknologi, serta pelatihan ekonomi yang umumnya mensyaratkan jaminan aset. Kondisi ini memperkuat ketergantungan perempuan terhadap struktur patriarkal yang mendominasi sistem ekonomi dan politik, sehingga memperkecil peluang partisipasinya dalam aktivitas ekonomi formal maupun kewirausahaan.

2. Akses terhadap Pekerjaan dan Pendapatan

Akses terhadap pekerjaan dan pendapatan merupakan dimensi penting dalam ekonomi politik gender karena menentukan sejauh mana perempuan dapat berpartisipasi secara mandiri dalam aktivitas ekonomi dan memperoleh kekuatan tawar dalam rumah tangga maupun ruang publik, namun diskriminasi struktural seperti bias rekrutmen, ketidaksetaraan pendidikan, dan beban kerja domestik yang tidak dibayar sering kali membatasi peluang perempuan untuk memasuki sektor pekerjaan yang layak dan bergaji tinggi. Seguino (2020) menjelaskan bahwa ketimpangan gender dalam pasar tenaga kerja tidak hanya mencerminkan distribusi kekuasaan yang timpang, tetapi juga menjadi mekanisme yang mempertahankan subordinasi ekonomi perempuan melalui peminggiran pada pekerjaan berupah rendah dan informal.

Dampak dari hambatan tersebut adalah perempuan lebih banyak bekerja dalam sektor informal yang tidak memiliki jaminan sosial, kepastian pendapatan, maupun akses yang sama terhadap pelatihan keterampilan, sehingga memperlebar kesenjangan ekonomi antargender serta mengurangi kontribusi potensial perempuan dalam pembangunan nasional. Ketertinggalan perempuan dalam memperoleh pendapatan yang memadai kemudian memperkuat ketergantungan finansial pada figur laki-laki dan melemahkan posisinya dalam struktur kuasa rumah tangga maupun komunitas.

3. Ketimpangan Akses Modal dan Keuangan

Ketimpangan akses modal dan keuangan menggambarkan bagaimana struktur ekonomi dan institusi keuangan masih memprioritaskan laki-laki sebagai pemilik aset, penanggung risiko, dan

pengambil keputusan bisnis, sehingga perempuan seringkali menghadapi hambatan berupa prosedur kredit yang bias, keterbatasan agunan, dan minimnya literasi finansial yang menghalanginya untuk mengembangkan usaha produktif maupun meningkatkan kapasitas ekonomi. Menurut UN Women (2022), ketidaksetaraan akses pembiayaan bagi perempuan bukan hanya persoalan ekonomi teknis, tetapi juga cerminan dari relasi kuasa patriarkal yang membatasi posisi perempuan dalam ekonomi formal dan meminggirkannya ke sektor usaha mikro yang sulit berkembang.

Konsekuensi dari kondisi ini terlihat pada rendahnya representasi perempuan dalam sektor kewirausahaan berskala besar dan minimnya kemampuan untuk mengakses instrumen keuangan formal seperti kredit bank, investasi berbasis teknologi finansial, maupun skema pembiayaan pemerintah yang mensyaratkan jaminan kepemilikan aset yang jarang dimiliki perempuan. Ketimpangan ini memperkuat siklus intergenerasional ketimpangan ekonomi karena perempuan yang tidak memiliki akses pembiayaan formal akan sulit meningkatkan pendapatan, berinovasi, atau berperan aktif dalam rantai nilai ekonomi yang lebih luas.

4. Akses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan

Akses pendidikan dan pelatihan keterampilan merupakan salah satu faktor penentu dalam memahami relasi gender dan distribusi sumber daya dalam perspektif ekonomi politik, karena ketimpangan akses terhadap pendidikan berkualitas dan pelatihan vokasional membuat perempuan lebih sering terjebak pada pekerjaan berupah rendah, sektor informal, atau peran domestik yang tidak diakui sebagai kontribusi ekonomi sehingga memperkuat posisi subordinat perempuan dalam struktur sosial dan ekonomi. Menurut UNESCO (2021), hambatan sosial-kultural, norma gender, dan kebijakan pendidikan yang tidak sensitif gender menjadi penyebab utama mengapa perempuan di banyak negara berkembang masih menghadapi ketidaksetaraan signifikan dalam akses pendidikan tinggi dan pelatihan profesional.

Ketika perempuan memiliki akses lebih terbatas terhadap pendidikan STEM, keterampilan digital, atau pelatihan wirausaha, maka peluang untuk terlibat dalam sektor ekonomi modern, industri kompetitif, dan jabatan kepemimpinan menjadi semakin sempit

meskipun memiliki peran besar dalam aktivitas ekonomi rumah tangga maupun sektor informal. Keterbatasan tersebut tidak hanya memengaruhi peluang kerja, tetapi juga membatasi kemampuan perempuan dalam mengakses modal, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan ekonomi, dan meningkatkan posisi tawar dalam rumah tangga maupun ruang publik.

E. Study Case

1. *Study Case: Ekonomi Politik Ketimpangan dan Kesejahteraan Studi Kasus Distribusi Akses Ekonomi Pada Sektor Pertanian di Indonesia*

Ketimpangan dan kesejahteraan dalam konteks ekonomi politik sering kali dipahami sebagai hasil interaksi antara kekuasaan, kebijakan publik, struktur ekonomi, dan distribusi akses terhadap sumber daya. Pada sektor pertanian di Indonesia, dinamika ini terlihat jelas melalui bagaimana kepemilikan lahan, akses terhadap pasar, dan intervensi negara membentuk relasi kuasa yang berdampak langsung pada kesejahteraan petani.

Pada tingkat empiris, ketimpangan agraria masih menjadi masalah struktural yang berakar pada sejarah kolonial dan regresi kebijakan. Penguasaan lahan didominasi oleh korporasi, pemilik modal lokal, dan elite politik melalui mekanisme legal, konsesi, hingga tata kelola agribisnis. Sementara itu, sebagian besar petani kecil bekerja dalam skala kepemilikan yang sangat kecil (kurang dari 0,5 hektar), sehingga tidak memiliki posisi tawar dalam rantai pasok dan pasar. Kondisi ini menghasilkan ketimpangan ekonomi yang tidak hanya bersifat material tetapi juga politik, karena kelompok petani tidak memiliki akses terhadap proses pengambilan keputusan kebijakan.

Pada dimensi kebijakan, program reforma agraria dan subsidi pupuk dirancang untuk mengurangi ketimpangan. Namun, implementasinya seringkali dipengaruhi kepentingan elite ekonomi-politik melalui lobi industri pupuk, perdagangan pangan, serta struktur kartel pasar komoditas. Hal ini menyebabkan manfaat kebijakan lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang memiliki modal dan kedekatan dengan pengambil kebijakan, bukan oleh petani kecil sebagai kelompok ekonomi rentan. Ketidakmerataan akses pasar juga diperparah oleh

dominasi tengkulak sebagai aktor perantara yang mengontrol harga dan distribusi hasil panen, menciptakan struktur pasar oligopolistik.

Dampaknya terhadap kesejahteraan terlihat dari rendahnya tingkat pendapatan petani. Banyak rumah tangga petani tetap berada pada kategori pra-sejahtera meskipun bekerja dalam produksi pangan utama bangsa. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada dimensi ekonomi, tetapi juga aspek sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan mobilitas sosial generasi berikutnya. Ketika ketidaksetaraan menjadi bagian dari struktur institusional, maka lingkaran kemiskinan akan terus berlanjut.

Dengan demikian, studi kasus sektor pertanian di Indonesia memperlihatkan bahwa ketimpangan bukan semata persoalan ekonomi, melainkan merupakan hasil dari konfigurasi kekuasaan dalam ekonomi politik. Upaya meningkatkan kesejahteraan tidak dapat diselesaikan hanya melalui program bantuan, tetapi membutuhkan reformasi struktural yang menyentuh tata kelola sumber daya, regulasi pasar, dan partisipasi politik kelompok yang selama ini termarginalkan.

BAB VII

EKONOMI POLITIK SUMBER DAYA ALAM

Ekonomi politik sumber daya alam merupakan kajian yang membahas bagaimana kekuasaan, kepentingan, dan kebijakan publik membentuk cara sumber daya dieksplorasi, dikelola, dan didistribusikan. Kajian ini menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak hanya menyangkut aspek ekonomi semata, tetapi juga melibatkan dinamika sosial, politik, dan lingkungan yang saling memengaruhi dalam menentukan kesejahteraan masyarakat.

A. Politik Energi dan Mineral

Politik energi dan mineral adalah bidang yang membahas bagaimana kekuasaan, kebijakan publik, dan kepentingan ekonomi menentukan pengelolaan sumber daya energi dan mineral dalam suatu negara. Bidang ini membahas hubungan antara negara, perusahaan, masyarakat, dan aktor internasional dalam proses eksplorasi, produksi, distribusi, serta pemanfaatan sumber daya yang memiliki nilai strategis bagi pembangunan nasional.

Politik energi dan mineral mencakup proses pengambilan keputusan mengenai tata kelola energi fosil (seperti minyak dan gas), energi terbarukan, serta komoditas tambang strategis seperti nikel, batu bara, emas, dan mineral kritis lainnya. Di dalamnya terdapat dinamika kekuasaan yang menentukan siapa yang berhak mengakses sumber daya, bagaimana keuntungan didistribusikan, dan bagaimana dampak sosial-lingkungan dikelola. Politik energi dan mineral dibentuk oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dan menentukan bagaimana sumber daya alam dieksplorasi, dikelola, serta didistribusikan dalam kerangka kepentingan nasional dan global. Berikut uraian rinci dari faktor-faktor yang berperan penting tersebut:

1. Kepentingan Negara

Kepentingan negara sebagai faktor yang memengaruhi politik energi dan mineral berkaitan dengan kebutuhan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi, keberlanjutan pembangunan, serta kedaulatan pengelolaan sumber daya yang memiliki nilai strategis bagi masa depan nasional. Dalam konteks ini, negara memposisikan diri sebagai aktor utama yang mengatur eksplorasi, produksi, dan distribusi energi maupun mineral melalui kebijakan yang diarahkan untuk mengamankan kebutuhan domestik sekaligus memperkuat posisi dalam persaingan global, sebagaimana dijelaskan oleh Bridge dan Le Billon (2018) bahwa negara cenderung membangun kontrol yang kuat terhadap sumber daya strategis guna melindungi dan memaksimalkan keuntungan politik maupun ekonomi jangka panjang.

Kepentingan negara juga tercermin dalam upaya menjaga ketahanan energi melalui diversifikasi sumber energi, pengembangan infrastruktur, dan perlindungan terhadap aset vital yang menjadi penopang aktivitas industri dan kehidupan masyarakat luas. Dalam praktiknya, negara berupaya menghindari ketergantungan yang terlalu tinggi pada impor energi dan mineral tertentu, karena kondisi tersebut dapat melemahkan posisi tawar dan meningkatkan risiko terhadap kestabilan ekonomi ataupun keamanan nasional secara keseluruhan.

2. Kepentingan Ekonomi

Kepentingan ekonomi sebagai faktor yang memengaruhi politik energi dan mineral berkaitan dengan bagaimana negara berupaya memaksimalkan pendapatan, meningkatkan nilai tambah industri, dan menjaga stabilitas ekonomi melalui pengelolaan sumber daya energi dan mineral yang bernilai tinggi. Dalam konteks tersebut, negara mengarahkan kebijakan eksplorasi, produksi, ekspor, serta hilirisasi untuk memperoleh manfaat ekonomi sebesar-besarnya, sebagaimana ditegaskan oleh Sovacool (2019) bahwa pengelolaan energi tidak pernah lepas dari orientasi keuntungan ekonomi yang memengaruhi keputusan politik dan prioritas pembangunan nasional.

Kepentingan ekonomi juga tampak melalui upaya menarik investasi dalam sektor energi dan mineral, baik dari perusahaan nasional maupun internasional, karena investasi besar diperlukan untuk kegiatan eksplorasi, teknologi pengolahan, hingga pembangunan infrastruktur pendukung. Pada saat yang sama, pemerintah

memanfaatkan kebijakan fiskal seperti pajak, royalti, dan insentif industri untuk mengatur aliran modal sekaligus menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya tersebut tetap memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan industri domestik.

3. Aktor Bisnis dan Perusahaan

Aktor bisnis dan perusahaan memiliki pengaruh besar dalam politik energi dan mineral karena menguasai modal, teknologi, serta jaringan produksi yang menentukan arah investasi dan operasi industri energi maupun pertambangan. Kekuatan ekonomi dan kapasitas teknis sering membuat perusahaan menjadi aktor kunci dalam proses perumusan kebijakan, sebagaimana dijelaskan oleh Newell (2021) bahwa perusahaan energi memiliki kemampuan struktural untuk memengaruhi keputusan politik melalui kontrol atas sumber daya, teknologi, dan agenda ekonomi yang didorong.

Pengaruh perusahaan juga terlihat dalam negosiasi kontrak, penentuan standar operasional, serta penyusunan regulasi yang berkaitan dengan eksplorasi, produksi, dan pengolahan energi maupun mineral, di mana kepentingan bisnis sering kali menentukan bentuk kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta. Selain itu, perusahaan dapat memengaruhi kebijakan melalui lobi, advokasi, serta kemitraan strategis yang memungkinkan mengamankan konsesi tambang, ruang investasi, atau skema insentif yang menguntungkan bagi keberlanjutan operasi bisnis.

4. Tekanan Masyarakat dan Lingkungan

Tekanan masyarakat dan lingkungan menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam politik energi dan mineral karena semakin banyak kelompok masyarakat yang menuntut transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap keberlanjutan ekosistem dari dampak eksploitasi sumber daya alam. Tuntutan ini muncul melalui gerakan sosial, protes publik, kampanye advokasi, hingga partisipasi dalam konsultasi kebijakan, sebagaimana dijelaskan oleh Jenkins et al. (2018) bahwa tekanan sosial berbasis keadilan lingkungan mampu mendorong negara dan perusahaan untuk menyesuaikan kebijakan energi agar lebih responsif terhadap dampak ekologis dan sosial.

Pengaruh tekanan masyarakat terlihat dari meningkatnya tuntutan terhadap perizinan yang lebih ketat, perlindungan hak masyarakat adat, dan penerapan standar lingkungan yang komprehensif, sehingga pemerintah harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekologi sebelum mengeluarkan kebijakan energi atau pertambangan baru. Selain itu, masyarakat semakin berperan dalam mendorong penerapan praktik yang bertanggung jawab seperti pengurangan emisi, rehabilitasi lahan tambang, serta penggunaan teknologi ramah lingkungan yang menjadi bagian dari tuntutan terhadap keberlanjutan sektor energi dan mineral.

B. Ekonomi Politik Pangan

Ekonomi Politik Pangan merupakan kajian yang memadukan perspektif ekonomi dan politik untuk memahami produksi, distribusi, konsumsi, dan regulasi pangan dalam masyarakat. Kajian ini menekankan bahwa isu pangan tidak hanya terkait dengan aspek teknis atau ekonomi semata, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan, kekuasaan, kepentingan politik, dan hubungan sosial yang ada. Dengan kata lain, pangan menjadi arena di mana kekuatan ekonomi dan politik saling berinteraksi, memengaruhi akses masyarakat terhadap makanan dan menentukan siapa yang mendapat manfaat dari sistem pangan tersebut. Secara rinci, ekonomi politik pangan dapat dijelaskan melalui beberapa dimensi penting:

1. Produksi Pangan

Produksi pangan dalam kerangka ekonomi politik pangan mencerminkan bagaimana kekuasaan politik dan kebijakan ekonomi negara serta aktor dominan mempengaruhi kapasitas suatu negara atau wilayah dalam menghasilkan pangan cukup bagi masyarakatnya. Sistem pangan modern tidaklah netral; produksi pangan diatur oleh kebijakan agraria, subsidi, investasi infrastruktur, serta regulasi pertanian, yang bersama-sama membentuk siapa yang bisa menanam, apa yang ditanam, dan dengan cara apa produksi terjadi. Menurut Leach *et al.* (2020), sistem pangan kontemporer “unsustainable and inequitable” sehingga perubahan dalam produksi pertanian memerlukan transformasi politik untuk mencapai sistem pangan yang adil dan berkelanjutan.

Dengan demikian, produksi pangan bukan sekadar soal teknis agronomi tetapi juga arena politik di mana keputusan tentang lahan, teknologi pertanian, penggunaan input, dan siapa yang mendapatkan akses kepada sumber daya produksi diperebutkan. Ketika kebijakan memihak korporasi atau elit agribisnis, produksi pangan bisa meningkat secara kuantitatif tetapi sering disertai degradasi lingkungan, perampasan lahan dari petani kecil, dan miskinnya hasil bagi petani kecil. Sebaliknya, produksi yang adil dan berkelanjutan membutuhkan kebijakan agraria inklusif, dukungan negara terhadap petani kecil, dan alokasi sumber daya yang mempertimbangkan keadilan serta keberlanjutan.

2. Distribusi Pangan

Distribusi pangan merupakan aspek penting dalam ekonomi politik pangan karena menentukan sejauh mana pangan yang diproduksi dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, dan hal ini tidak hanya bergantung pada ketersediaan pangan tetapi juga pada jalur logistik, infrastruktur pasar, serta kebijakan perdagangan yang berlaku. Ketimpangan distribusi pangan sering muncul akibat dominasi pelaku pasar tertentu, kendala transportasi, serta kebijakan yang lebih menguntungkan kelompok elit atau perusahaan besar, sehingga masyarakat miskin atau daerah terpencil menghadapi keterbatasan akses pangan. Menurut Clapp dan Ruder (2020), ketidakmerataan distribusi pangan di era globalisasi menimbulkan konsekuensi serius terhadap ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kerentanan kelompok rentan terhadap fluktuasi harga dan ketersediaan pangan.

Distribusi pangan juga menjadi arena negosiasi politik karena harga pangan, tarif impor, subsidi, dan regulasi pasar dapat memperkuat atau melemahkan akses pangan bagi kelompok tertentu. Sistem distribusi yang tidak adil sering menyebabkan penumpukan pangan di satu wilayah sementara wilayah lain mengalami kekurangan, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ketegangan sosial dan konflik lokal. Oleh karena itu, pengaturan distribusi pangan harus mempertimbangkan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan transparansi agar akses pangan dapat merata bagi seluruh masyarakat.

3. Akses dan Konsumsi

Akses dan konsumsi pangan merupakan dimensi kritis dalam ekonomi politik pangan karena menentukan kemampuan individu dan kelompok masyarakat untuk memperoleh pangan yang cukup, bergizi, dan terjangkau, serta dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan politik. Ketimpangan dalam akses pangan seringkali mencerminkan struktur kekuasaan dan distribusi sumber daya di masyarakat, di mana kelompok miskin atau masyarakat di daerah terpencil mengalami kerawanan pangan yang lebih tinggi dibandingkan kelompok yang lebih sejahtera. Menurut Fanzo *et al.* (2019), akses terhadap pangan yang bergizi seringkali dibatasi oleh ketidaksetaraan ekonomi dan kebijakan pangan yang tidak inklusif sehingga mengakibatkan kelompok rentan tetap menghadapi malnutrisi meskipun ketersediaan pangan secara nasional mencukupi.

Pola konsumsi pangan juga dipengaruhi oleh kebijakan subsidi, harga pangan, serta ketersediaan pangan lokal versus impor, yang dapat mengubah perilaku konsumen dan dampak kesehatannya. Ketika akses terhadap pangan sehat terbatas, masyarakat cenderung mengonsumsi pangan murah dan kurang bergizi, yang berdampak pada kesehatan jangka panjang dan produktivitas ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan publik yang memastikan distribusi pangan merata dan memperluas akses terhadap pangan bergizi menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mengurangi kesenjangan sosial.

4. Kebijakan Pangan dan Regulasi

Kebijakan pangan dan regulasi berperan sentral dalam ekonomi politik pangan karena menentukan aturan main produksi, distribusi, dan konsumsi pangan, serta menyeimbangkan kepentingan produsen, konsumen, dan pelaku pasar dalam konteks nasional maupun global. Keputusan mengenai subsidi, tarif impor, standar kualitas, dan kebijakan perdagangan internasional tidak hanya memengaruhi harga dan ketersediaan pangan, tetapi juga dapat memperkuat atau mengurangi kesenjangan akses pangan antarwilayah dan kelompok sosial. Menurut Clapp dan Moseley (2020), kebijakan pangan yang tidak inklusif atau dipengaruhi kepentingan elit ekonomi dapat memperdalam ketidaksetaraan pangan dan menghambat pencapaian ketahanan pangan yang adil dan berkelanjutan.

Regulasi pangan juga berkaitan dengan keamanan pangan dan perlindungan konsumen, di mana pemerintah menetapkan standar

produksi, distribusi, dan pelabelan pangan untuk memastikan pangan yang dikonsumsi aman, bergizi, dan sesuai hak konsumen. Kebijakan yang transparan dan berbasis bukti dapat memperkuat kepercayaan publik, mencegah praktik monopoli, dan meminimalkan volatilitas harga yang merugikan kelompok rentan. Dengan demikian, regulasi pangan tidak hanya menjadi instrumen ekonomi tetapi juga instrumen politik untuk mencapai keadilan sosial dan stabilitas pangan nasional.

C. Konflik SDA dan Perebutan Kepentingan

Konflik sumber daya alam (SDA) muncul ketika berbagai aktor dengan kepentingan berbeda bersaing untuk menguasai, mengendalikan, atau memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Sumber daya alam seperti minyak, gas, batu bara, mineral, air, dan lahan subur memiliki nilai strategis yang tinggi, sehingga kerap menjadi objek perebutan antara negara, perusahaan besar, komunitas lokal, dan kelompok kepentingan lainnya. Konflik ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga dapat memicu ketegangan sosial, politik, dan bahkan keamanan, karena setiap pihak berusaha memaksimalkan keuntungan atau mempertahankan haknya terhadap SDA tertentu.

1. Faktor Penyebab Konflik SDA

Beberapa faktor kunci yang menyebabkan terjadinya konflik sumber daya alam meliputi:

a. Ketimpangan Kepemilikan dan Akses

Ketimpangan kepemilikan dan akses terhadap sumber daya alam menjadi salah satu faktor utama yang memicu konflik karena pihak-pihak yang memiliki kontrol penuh atas lahan, hutan, tambang, atau cadangan energi cenderung menempatkan kepentingan ekonominya di atas hak dan kebutuhan masyarakat lokal, sehingga kelompok yang terpinggirkan merasa dirugikan dan terdorong untuk melakukan perlawanan. Ketidakmerataan ini menimbulkan ketegangan sosial dan politis yang berpotensi memicu konflik berkepanjangan, karena akses terhadap sumber daya alam seringkali dikaitkan dengan peluang ekonomi, penghidupan, dan legitimasi politik di tingkat lokal maupun nasional (Adams, 2020).

Di banyak kasus, masyarakat lokal atau komunitas adat yang kehilangan akses terhadap sumber daya alam mengalami marginalisasi ekonomi dan sosial karena tidak bisa mengelola lahan atau mendapatkan manfaat langsung dari SDA, sementara perusahaan besar atau pihak elite mendapatkan keuntungan dominan. Hal ini semakin diperparah oleh lemahnya regulasi atau pengawasan pemerintah yang seharusnya menjamin distribusi hak atas SDA secara adil, sehingga ketimpangan kepemilikan semakin mencolok dan konflik lebih mudah muncul.

b. Kepentingan Ekonomi

Kepentingan ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang memicu konflik sumber daya alam karena aktor-aktor yang memiliki kontrol atas cadangan minyak, gas, mineral, atau lahan subur berupaya memaksimalkan keuntungan finansial tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat lokal atau lingkungan, sehingga menciptakan ketegangan dan persaingan sengit antaraktor. Ketidaksielarasan antara tujuan ekonomi pihak pengelola SDA dengan kebutuhan sosial dan ekologis masyarakat rentan memicu konflik berkepanjangan yang berdampak pada stabilitas sosial, politik, dan ekonomi di wilayah terdampak (Bebbington, 2018).

Pada praktiknya, perusahaan besar dan investor global sering menekan regulasi atau memanfaatkan kelemahan hukum untuk memperoleh izin eksploitasi yang menguntungkannya, sementara masyarakat lokal kehilangan hak akses terhadap sumber daya dan pendapatan yang seharusnya menjadi bagian dari kesejahteraan. Persaingan untuk mengamankan keuntungan ekonomi ini tidak hanya menimbulkan konflik vertikal antara masyarakat dengan perusahaan atau pemerintah, tetapi juga konflik horizontal antara kelompok lokal yang bersaing memperebutkan akses dan kontrol atas SDA yang terbatas.

c. Kepentingan Politik dan Kekuasaan

Kepentingan politik dan kekuasaan sering menjadi faktor utama terjadinya konflik sumber daya alam karena penguasaan SDA dapat digunakan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat posisi politik, mempengaruhi kebijakan publik, atau memperluas pengaruh suatu kelompok atau negara, sehingga

pihak yang memiliki kekuasaan cenderung memprioritaskan kontrol atas sumber daya tersebut untuk memperkuat legitimasi dan dominasi politik. Ketidakseimbangan kekuasaan ini memunculkan ketegangan dengan masyarakat lokal, aktor ekonomi lain, atau kelompok politik pesaing yang merasa dirugikan, sehingga konflik tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga politis dan sosial (Ross, 2019).

Pada banyak kasus, konflik muncul karena pemerintah atau elit politik memberikan izin eksploitasi atau konsesi kepada perusahaan tertentu untuk memperoleh dukungan politik, pendapatan negara, atau aliansi strategis, sementara kepentingan masyarakat lokal dan lingkungan sering diabaikan. Perebutan kekuasaan atas SDA ini juga memicu konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah, serta konflik horizontal antar kelompok lokal yang saling bersaing mengklaim hak atau kontrol atas sumber daya yang sama.

2. Bentuk Konflik SDA

Konflik sumber daya alam dapat muncul dalam berbagai bentuk:

a. Konflik Horizontal

Konflik horizontal dalam konteks sumber daya alam terjadi ketika persaingan atau sengketa muncul antar kelompok masyarakat yang memiliki kedudukan relatif setara, seperti antar komunitas adat, desa, atau kelompok petani, yang memperebutkan akses, kontrol, atau pemanfaatan sumber daya yang sama, seperti lahan, hutan, air, atau tambang. Konflik ini sering muncul akibat perbedaan kepentingan, tradisi, atau klaim historis terhadap wilayah dan sumber daya tertentu, sehingga pertentangan tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga sosial dan kultural, memicu ketegangan yang berkepanjangan (Hoffmann et al., 2020).

Pada praktiknya, konflik horizontal dapat terjadi ketika komunitas lokal yang memiliki hak tradisional atas lahan menghadapi kelompok lain yang mencoba menguasai atau memanfaatkan lahan tersebut untuk kegiatan pertanian, perkebunan, atau tambang, sehingga menimbulkan sengketa yang melibatkan negosiasi, mediasi adat, maupun intervensi pemerintah. Persaingan antar kelompok ini sering diperburuk

oleh lemahnya regulasi, ketidakjelasan status hukum lahan, dan tekanan dari aktor eksternal seperti perusahaan atau investor, sehingga eskalasi konflik menjadi lebih mungkin terjadi.

b. Konflik Vertikal

Konflik vertikal dalam sumber daya alam terjadi ketika terjadi pertentangan antara aktor dengan posisi hierarki berbeda, misalnya antara masyarakat lokal atau komunitas adat dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau perusahaan besar yang memiliki kendali atas izin eksploitasi, konsesi, atau kebijakan pengelolaan SDA. Konflik ini muncul karena perbedaan kepentingan, ketidakadilan distribusi manfaat, serta kebijakan atau regulasi yang dianggap menguntungkan pihak berkuasa, sehingga menimbulkan ketegangan sosial, ekonomi, dan politik yang signifikan (Le Billon, 2019).

Pada praktiknya, konflik vertikal terlihat ketika pemerintah memberikan izin pertambangan atau perkebunan kepada perusahaan besar di wilayah yang selama ini dimanfaatkan masyarakat lokal untuk kehidupan sehari-hari, sehingga menimbulkan perlawanan, protes, atau sengketa hukum. Ketidakseimbangan kekuasaan antara pihak pemerintah atau perusahaan dengan masyarakat sering menyebabkan marginalisasi, akses terbatas terhadap sumber daya, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan SDA.

c. Konflik Internasional

Konflik internasional terkait sumber daya alam terjadi ketika perebutan atau pengelolaan SDA melintasi batas negara memicu persaingan antara pemerintah atau aktor negara yang berbeda, seperti sengketa atas wilayah minyak lepas pantai, gas alam, air lintas batas, atau cadangan mineral strategis. Konflik ini sering dipicu oleh kepentingan ekonomi, politik, dan keamanan nasional yang saling bertabrakan, sehingga memerlukan diplomasi, perjanjian internasional, atau intervensi lembaga multilateral untuk mencegah eskalasi kekerasan dan menjaga stabilitas regional (Kellenberg & Mobarak, 2019).

Pada praktiknya, konflik internasional dapat muncul ketika negara-negara tetangga memiliki klaim berbeda atas sumber daya yang sama, misalnya sungai yang mengalir lintas batas

atau cadangan minyak dan gas di wilayah maritim yang disengketakan, sehingga menimbulkan ketegangan diplomatik dan potensi konfrontasi militer. Persaingan ini tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga perusahaan multinasional dan lembaga internasional yang berperan dalam eksploitasi, distribusi, dan pengawasan sumber daya, sehingga dinamika konflik menjadi lebih kompleks dan multidimensi.

d. **Konflik Internal Perusahaan**

Konflik internal perusahaan dalam konteks sumber daya alam terjadi ketika perselisihan muncul di antara divisi, manajemen, atau unit operasional dalam satu perusahaan yang sama terkait alokasi sumber daya, strategi eksploitasi, atau distribusi keuntungan dari SDA yang dikelola. Konflik ini sering dipicu oleh perbedaan kepentingan antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang, prioritas ekonomi, atau kontrol atas aset strategis, sehingga dapat menghambat produktivitas dan efisiensi operasional perusahaan serta menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang luas (Lund-Thomsen & Lindgreen, 2021).

Pada praktiknya, konflik internal dapat muncul ketika divisi yang bertanggung jawab atas produksi SDA berselisih dengan divisi keuangan atau manajemen atas penggunaan cadangan, investasi proyek, atau pembagian keuntungan, sehingga memicu ketidakpastian keputusan strategis dan menimbulkan risiko bagi keberlanjutan perusahaan. Persaingan ini juga bisa diperburuk oleh tekanan eksternal, termasuk tuntutan investor, regulasi pemerintah, atau ekspektasi masyarakat lokal, yang memaksa perusahaan untuk menyeimbangkan kepentingan internal dan eksternal secara bersamaan.

D. Studi Kasus: Migas, Tambang, dan Agraria

1. Studi Kasus Migas: Blok Rokan, Riau

Blok Rokan di Riau adalah salah satu wilayah penghasil minyak terbesar di Indonesia yang awalnya dikelola oleh Chevron Pacific Indonesia sebelum dialihkan ke Pertamina pada tahun 2021. Proses alih kelola ini memunculkan berbagai tantangan, termasuk penyesuaian teknologi, manajemen SDM, dan negosiasi dengan kontraktor lokal.

Selain itu, konflik muncul terkait pembagian keuntungan dan perlindungan lingkungan, di mana masyarakat lokal menuntut kompensasi atas dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan eksploitasi minyak. Studi ini membahas pentingnya kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat dalam memastikan pengelolaan migas yang berkelanjutan.

2. Studi Kasus Tambang: Tambang Batu Bara di Kalimantan Timur

Kalimantan Timur dikenal sebagai pusat tambang batu bara yang memiliki cadangan besar, dengan perusahaan besar seperti PT Kaltim Prima Coal beroperasi di wilayah tersebut. Konflik sering muncul antara perusahaan dengan masyarakat lokal terkait hak akses lahan dan kompensasi lingkungan. Pencemaran air dan degradasi lahan akibat aktivitas tambang menjadi sumber ketegangan, di mana masyarakat menuntut rehabilitasi dan tanggung jawab sosial perusahaan. Kasus ini menunjukkan perlunya kebijakan yang transparan dan regulasi lingkungan yang ketat untuk mencegah konflik dan memastikan manfaat ekonomi juga dirasakan masyarakat sekitar.

3. Studi Kasus Agraria: Konflik Lahan di Jawa Barat

Di Jawa Barat, konflik agraria banyak terjadi terkait peralihan fungsi lahan dari pertanian rakyat ke perkebunan atau pembangunan industri. Salah satu contoh adalah konflik lahan antara petani lokal dengan perusahaan sawit atau pengembang properti, di mana masyarakat menuntut hak ulayat dan ganti rugi yang adil. Konflik ini memperlihatkan peran penting hukum agraria dan mediasi pemerintah untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi perusahaan dan hak-hak masyarakat lokal. Kasus ini juga membahas dampak sosial dan ekonomi dari alih fungsi lahan, termasuk hilangnya mata pencaharian petani dan perubahan struktur sosial desa.

E. Study Case

1. Studi Kasus: Konflik dan Pengelolaan Tambang Emas di Papua, Indonesia

a. Latar Belakang

Papua merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, termasuk emas, tembaga, dan hasil hutan. Salah satu proyek pertambangan besar adalah tambang Grasberg, yang dikelola oleh perusahaan multinasional. Proyek ini memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan nasional, tetapi menimbulkan berbagai konflik ekonomi-politik terkait pengelolaan SDA, hak masyarakat adat, dan distribusi keuntungan.

b. Dimensi Ekonomi

Tambang emas ini memberikan pendapatan signifikan melalui pajak, royalti, dan ekspor komoditas. Namun, sebagian besar keuntungan finansial mengalir ke perusahaan asing dan pemerintah pusat, sementara masyarakat lokal sering mengalami dampak negatif seperti kerusakan lingkungan dan terbatasnya kesempatan ekonomi lokal. Hal ini menimbulkan ketimpangan ekonomi yang menjadi pemicu konflik sosial dan politik.

c. Dimensi Politik

Pemerintah daerah dan pusat sering bersaing dalam pengaturan izin, pembagian keuntungan, dan pengawasan lingkungan. Ketegangan juga muncul antara masyarakat adat, perusahaan, dan aparat keamanan yang ditugaskan untuk menjaga proyek, mencerminkan bagaimana politik lokal dan nasional memengaruhi pengelolaan SDA. Selain itu, isu legitimasi dan transparansi kebijakan publik menjadi titik krusial dalam ekonomi politik SDA.

d. Dimensi Sosial dan Lingkungan

Kerusakan hutan, pencemaran air, dan pengusuran tanah adat menjadi isu utama. Konflik antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat lokal sering menimbulkan demonstrasi, tuntutan hukum, dan mediasi internasional. Studi ini menunjukkan bahwa ekonomi politik SDA tidak hanya soal keuntungan ekonomi, tetapi juga tentang keadilan sosial, hak masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan.

e. Kesimpulan

Kasus tambang emas di Papua menggambarkan kompleksitas ekonomi politik sumber daya alam, di mana kepentingan ekonomi sering berbenturan dengan hak politik, sosial, dan lingkungan masyarakat lokal. Pendekatan pengelolaan SDA yang adil dan transparan, serta keterlibatan masyarakat lokal, menjadi kunci untuk mengurangi konflik dan meningkatkan manfaat ekonomi secara merata.

BAB VIII

EKONOMI POLITIK KORUPSI DAN OLIGARKI

Ekonomi politik korupsi dan oligarki menjadi sorotan penting karena praktik korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga memperkuat struktur kekuasaan yang tidak seimbang. Dalam konteks ini, oligarki muncul sebagai kelompok elite yang menguasai sumber daya ekonomi dan politik, sehingga mempengaruhi kebijakan publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

A. Oligarki Ekonomi dan Politik di Negara Berkembang

Oligarki ekonomi dan politik terjadi ketika kekuasaan atas sumber daya ekonomi dan pengambilan keputusan politik terpusat pada sekelompok kecil elit yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jalannya negara. Kelompok elit ini biasanya terdiri dari pengusaha besar, pejabat tinggi pemerintah, atau kombinasi keduanya, yang mampu memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Fenomena ini sering menyebabkan ketimpangan ekonomi dan sosial yang mencolok, karena akses terhadap kekayaan dan kesempatan strategis hanya terbatas pada segelintir orang, sementara masyarakat luas memiliki akses yang terbatas.

1. Ciri-ciri Oligarki di Negara Berkembang

Beberapa ciri utama oligarki meliputi:

a. Penguasaan Sektor Strategis

Penguasaan sektor strategis menjadi ciri utama oligarki karena kelompok elit mampu mengendalikan sumber daya vital negara seperti energi, pertambangan, perbankan, dan infrastruktur, sehingga dapat memengaruhi kebijakan ekonomi dan politik untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Konsentrasi kontrol ini tidak hanya membatasi akses masyarakat luas

terhadap sumber daya penting, tetapi juga memperkuat posisi tawar elit dalam proses pengambilan keputusan publik yang seharusnya bersifat adil dan transparan (Smith, 2020).

Penguasaan sektor strategis memungkinkan oligarki memonopoli pasar tertentu, menghambat persaingan usaha, dan mengendalikan harga barang dan jasa penting, sehingga masyarakat luas mengalami keterbatasan akses ekonomi. Hal ini juga menimbulkan risiko korupsi dan kolusi, karena elite dapat memanfaatkan kekuasaan ekonomi untuk memengaruhi regulasi dan kebijakan negara sesuai kepentingan pribadi.

b. Pengaruh terhadap Kebijakan

Pengaruh terhadap kebijakan menjadi salah satu ciri utama oligarki ketika sekelompok kecil elite ekonomi dan politik mampu menekan proses legislasi dan regulasi agar membuat keputusan publik yang lebih menguntungkan kepentingannya. Dalam konteks ini, oligarki tidak hanya memiliki kekayaan, tetapi juga kekuatan politik untuk mempengaruhi arah kebijakan negara agar selaras dengan kepentingan (misalnya dalam hal distribusi kontrak, lisensi, atau regulasi industri), sebuah mekanisme yang digambarkan sebagai bentuk kartelisasi kebijakan (*policy cartelization*) di mana pembuatan undang-undang dan regulasi lebih mencerminkan konsensus elit daripada aspirasi publik (Sarjito, 2025).

Karena kemampuan ini, kebijakan yang dihasilkan seringkali melemahkan akuntabilitas publik dan mengabaikan partisipasi masyarakat luas. Proses legislasi bisa dijalankan tertutup, dengan sedikit ruang bagi kontrol demokratis, sehingga keputusan politik cenderung memprioritaskan keuntungan korporasi atau kepentingan elite yang sudah mapan. Hal ini menyebabkan regulasi yang seharusnya untuk kepentingan umum malah dipakai sebagai instrumen untuk mempertahankan dominasi elit.

c. Pembatasan Persaingan

Pembatasan persaingan menjadi salah satu ciri utama oligarki ketika sekelompok kecil elite ekonomi mampu mengendalikan pasar tertentu sehingga menghambat munculnya kompetitor baru dan membatasi inovasi. Praktik ini membuat usaha kecil dan menengah kesulitan berkembang karena akses terhadap

modal, kontrak, atau peluang bisnis dikontrol oleh kelompok elit yang telah mapan (Johnson, 2019).

Pembatasan persaingan memungkinkan oligarki menetapkan harga dan standar industri sesuai kepentingan, sehingga konsumen dan pelaku ekonomi lain mengalami keterbatasan pilihan dan biaya yang lebih tinggi. Kondisi ini juga memunculkan risiko kolusi antara pemerintah dan elite, karena regulasi dan kebijakan ekonomi dapat diarahkan untuk mempertahankan dominasi pasar oleh kelompok tertentu, bukan untuk kepentingan publik.

d. Intervensi Politik

Intervensi politik menjadi salah satu ciri utama oligarki ketika kelompok elit menggunakan pengaruh untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan pemerintah demi kepentingan pribadi atau kelompok, termasuk dalam penunjukan pejabat, kebijakan fiskal, dan regulasi strategis. Praktik ini memungkinkan elite mempertahankan dominasi dalam jangka panjang dan membatasi partisipasi politik masyarakat luas, sehingga demokrasi formal berjalan namun substantifnya tereduksi (Anderson, 2021).

Intervensi politik oligarki sering memunculkan praktik kolusi antara pejabat negara dan pengusaha, di mana kebijakan publik diarahkan untuk melindungi kepentingan elit dan menghambat persaingan politik maupun ekonomi. Kondisi ini juga berdampak pada lemahnya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, sehingga ruang bagi pengawasan publik dan kontrol demokratis menjadi semakin sempit.

2. Dampak Oligarki

Kehadiran oligarki di negara berkembang memiliki dampak luas:

- a. Lemahnya demokrasi karena keputusan politik cenderung berpihak pada elit.
- b. Ketimpangan distribusi kekayaan dan kesempatan ekonomi semakin melebar.
- c. Meningkatnya ketidakadilan sosial, termasuk akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik.

- d. Potensi konflik sosial meningkat karena masyarakat merasa dirugikan oleh konsentrasi kekuasaan.
- e. Korupsi dan nepotisme menjadi lebih sistematis karena kolusi antara elit politik dan ekonomi.

3. Upaya Mitigasi dan Solusi

Mengurangi pengaruh oligarki membutuhkan pendekatan komprehensif:

a. Reformasi Politik dan Transparansi

Reformasi politik dan transparansi menjadi strategi utama dalam mengurangi pengaruh oligarki dengan cara memperkuat mekanisme akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan publik, sehingga elite tidak dapat lagi memanipulasi kebijakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Pendekatan ini mencakup pembatasan intervensi politik oligarki melalui regulasi partai politik, mekanisme pengawasan legislatif, serta akses publik terhadap informasi kebijakan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan (Martinez, 2022).

Peningkatan transparansi dalam proses penganggaran dan pengadaan publik dapat mencegah praktik korupsi dan kolusi yang sering dimanfaatkan oleh kelompok elit untuk mempertahankan dominasi. Hal ini juga memungkinkan masyarakat dan lembaga pengawas independen melakukan kontrol yang efektif terhadap kebijakan pemerintah, sehingga keputusan publik lebih mencerminkan kepentingan umum daripada kepentingan segelintir elite.

b. Regulasi Ekonomi

Regulasi ekonomi menjadi instrumen penting dalam mengurangi pengaruh oligarki karena memungkinkan pemerintah mengatur pasar secara adil, membatasi dominasi segelintir elite, dan memastikan persaingan usaha yang sehat sehingga peluang bagi pelaku usaha kecil dan menengah tetap terbuka. Kebijakan seperti pengawasan antimonopoli, pembatasan kepemilikan sektor strategis, dan transparansi pengadaan publik dapat mengurangi peluang elite untuk memanipulasi pasar demi keuntungan pribadi, sekaligus memperkuat akses masyarakat luas terhadap sumber daya ekonomi (Lee, 2021).

Regulasi ekonomi yang efektif mencegah praktik kolusi dan korupsi yang sering dimanfaatkan oligarki untuk mempertahankan posisi dominan dalam industri tertentu. Hal ini juga mendorong terciptanya mekanisme pasar yang lebih adil, di mana kebijakan pemerintah tidak hanya berpihak pada kelompok elit, melainkan mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

c. Pengawasan Institusi Anti-Korupsi

Pengawasan institusi anti-korupsi menjadi salah satu strategi kunci dalam mengurangi pengaruh oligarki karena lembaga ini berperan untuk memantau, menindak, dan mencegah praktik kolusi, nepotisme, dan korupsi yang sering digunakan oleh elite untuk mempertahankan dominasi politik dan ekonomi. Kehadiran institusi yang independen dan memiliki wewenang kuat memungkinkan penegakan hukum berjalan efektif, sehingga elite oligarki tidak dapat lagi dengan mudah memanipulasi kebijakan atau sumber daya negara untuk keuntungan pribadi (Ramadhani, 2023).

Pengawasan institusi anti-korupsi mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi publik, termasuk pengadaan barang dan jasa, alokasi anggaran, dan pemberian izin usaha, sehingga ruang bagi intervensi oligarki dalam proses ekonomi dan politik menjadi lebih sempit. Masyarakat dan media juga dapat memanfaatkan laporan dan temuan institusi ini untuk melakukan kontrol sosial, memperkuat pengawasan publik, dan menekan praktik dominasi elite yang merugikan kepentingan umum.

B. Patronase, Rente dan Kartel Politik

Patronase, rente, dan kartel politik merupakan mekanisme yang sering digunakan oleh kelompok elit untuk mempertahankan kekuasaan politik dan ekonomi, serta memperkuat pengaruh dalam pengambilan keputusan publik. Ketiga mekanisme ini berkaitan erat dengan praktik oligarki, di mana elite memanfaatkan posisinya untuk mengamankan keuntungan pribadi dan kelompok, sekaligus membatasi akses pihak lain terhadap sumber daya atau kesempatan politik.

1. Patronase (*Patronage*)

Patronase adalah praktik di mana pejabat atau elite politik memberikan keuntungan, jabatan, kontrak, atau sumber daya kepada individu atau kelompok tertentu sebagai imbalan atas dukungan politik, loyalitas, atau jasa tertentu. Praktik ini merupakan salah satu mekanisme utama dalam sistem oligarki karena memungkinkan elite mempertahankan jaringan kekuasaan dan loyalitas yang solid, sekaligus mempengaruhi distribusi sumber daya di masyarakat. Patronase tidak hanya muncul dalam bentuk pemberian jabatan publik atau kontrak pemerintah, tetapi juga dalam bentuk subsidi, izin usaha, atau akses ke proyek-proyek strategis yang memberikan keuntungan finansial bagi penerima manfaat. Beberapa aspek penting dari patronase yang menjelaskan dampaknya terhadap politik dan ekonomi antara lain:

a. Membangun Jaringan Dukungan Politik

Membangun jaringan dukungan politik merupakan salah satu aspek penting dari patronase karena melalui mekanisme ini, elite politik dapat menciptakan basis loyalitas yang solid, di mana individu atau kelompok yang menerima keuntungan dari pemberian jabatan, kontrak, atau sumber daya publik cenderung mendukung kepentingan elite tersebut secara konsisten. Dampak dari jaringan dukungan ini terhadap politik terlihat pada kemampuan elite untuk mengamankan posisi kekuasaan dalam jangka panjang, memengaruhi pengambilan keputusan legislatif, serta meminimalkan tantangan dari pesaing politik atau masyarakat luas yang tidak memiliki akses ke jaringan tersebut (Hartanto, 2020). Dari sisi ekonomi, jaringan dukungan ini memungkinkan elite untuk mengontrol alokasi sumber daya strategis, mengarahkan kontrak atau proyek publik ke pihak yang loyal, dan pada akhirnya memperkuat dominasi oligarki dalam distribusi kekayaan dan peluang ekonomi.

Jaringan dukungan politik melalui patronase juga menciptakan ketergantungan, di mana penerima manfaat memiliki insentif untuk menjaga hubungan dengan elite, sehingga sistem politik menjadi semakin tersentralisasi dan sulit ditembus oleh aktor baru. Hal ini mengurangi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik, karena keputusan sering kali dibuat berdasarkan loyalitas, bukan efisiensi atau meritokrasi. Dalam jangka panjang, praktik ini memperkuat posisi oligarki,

menimbulkan ketimpangan sosial-ekonomi, dan menghambat reformasi politik yang bertujuan meningkatkan pemerataan akses serta kesempatan bagi masyarakat luas.

b. Mengendalikan Distribusi Sumber Daya

Mengendalikan distribusi sumber daya merupakan aspek penting dari patronase karena elite politik dapat menentukan siapa yang memperoleh akses terhadap kontrak, proyek publik, izin usaha, atau subsidi, sehingga mengonsolidasikan kekuasaan dan memelihara loyalitas pihak-pihak yang menerima keuntungan. Dampak terhadap politik terlihat pada meningkatnya ketergantungan penerima manfaat terhadap elite, yang memperkuat basis dukungan politik dan mengurangi tantangan terhadap kebijakan atau keputusan yang diambil oleh penguasa (Sutrisno, 2019).

Dari sisi ekonomi, kontrol terhadap distribusi sumber daya memungkinkan elite untuk mengarahkan keuntungan ekonomi kepada kelompok tertentu, memperkuat posisi oligarki, dan membatasi persaingan usaha yang sehat, sehingga pelaku ekonomi baru sulit berkembang. Dalam jangka panjang, praktik ini menimbulkan ketimpangan ekonomi yang signifikan, melemahkan meritokrasi, dan mengurangi transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik, sehingga pembangunan ekonomi dan sosial menjadi kurang inklusif.

c. Memengaruhi Keputusan Politik

Memengaruhi keputusan politik merupakan aspek penting dari patronase karena elite politik dapat menggunakan jaringan loyalitas dan akses terhadap sumber daya untuk mengarahkan kebijakan publik, regulasi, atau alokasi anggaran agar selaras dengan kepentingannya, bukan kepentingan masyarakat luas. Dampak terhadap politik terlihat pada meningkatnya dominasi elit dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan, sehingga mekanisme demokrasi formal tetap berjalan tetapi substansinya cenderung berpihak pada kelompok tertentu (Prasetyo, 2021).

Dari sisi ekonomi, kemampuan untuk memengaruhi keputusan politik memungkinkan elite mengamankan keuntungan finansial melalui proyek publik, izin usaha, atau regulasi yang menguntungkan pihak yang loyal, sehingga memperkuat posisi oligarki dan membatasi akses pelaku usaha lain. Dalam jangka

panjang, praktik ini menimbulkan ketimpangan ekonomi dan sosial, melemahkan transparansi serta akuntabilitas institusi publik, dan mengurangi peluang bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat yang adil dari kebijakan publik.

2. Rente (*Rent-Seeking*)

Rente atau *rent-seeking* adalah praktik di mana individu atau kelompok berusaha memperoleh keuntungan ekonomi tanpa menciptakan nilai tambah baru atau meningkatkan produktivitas, melainkan dengan memanfaatkan posisi politik, kekuasaan, atau akses terhadap sumber daya publik. Dalam konteks oligarki, rente sering muncul ketika elite ekonomi dan politik memanfaatkan regulasi, lisensi, atau monopoli sektor strategis untuk mendapatkan keuntungan tetap, sehingga dapat mengamankan pendapatan atau kekayaan tanpa bersaing secara sehat di pasar. Praktik ini berbeda dengan kegiatan produktif karena fokus utamanya adalah mengontrol alokasi sumber daya, bukan menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat bagi masyarakat. Beberapa aspek penting dari rente yang menjelaskan mekanisme dan dampaknya antara lain:

a. Mengamankan Keuntungan Tanpa Produksi

Mengamankan keuntungan tanpa produksi merupakan aspek penting dari rente karena elite atau kelompok tertentu memperoleh pendapatan melalui kontrol atas sumber daya, lisensi, atau regulasi yang menguntungkan tanpa menciptakan nilai tambah nyata atau meningkatkan produktivitas. Mekanisme ini terjadi ketika elite memanfaatkan posisi politik atau akses terhadap aset strategis untuk memonopoli pasar, mengatur lisensi usaha, atau memperoleh kontrak publik, sehingga keuntungan yang diperoleh berasal dari kekuasaan, bukan aktivitas ekonomi produktif (Hidayat, 2020).

Dampak dari praktik ini terlihat pada melemahnya persaingan pasar, karena pelaku usaha baru atau pihak yang lebih efisien sering terhambat oleh penguasaan pasar oleh kelompok elite, sementara inovasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat. Selain itu, ketimpangan sosial dan ekonomi meningkat karena sumber daya serta kesempatan ekonomi terpusat pada segelintir elite, dan institusi publik menjadi rentan

terhadap korupsi serta kolusi yang mempertahankan mekanisme rente ini.

b. Memanfaatkan Pengaruh Politik

Memanfaatkan pengaruh politik merupakan aspek penting dari rente karena elite atau kelompok tertentu menggunakan kedekatan atau kontrol terhadap pejabat publik untuk memperoleh keuntungan ekonomi tanpa melalui proses produksi atau inovasi, seperti penguasaan lisensi, monopoli, atau kontrak pemerintah. Mekanisme ini terjadi ketika elite memengaruhi regulasi, kebijakan fiskal, atau proses pengadaan publik sehingga mengamankan keuntungan pribadi atau kelompok dengan memanfaatkan kekuasaan politik yang dimiliki (Setiawan, 2021).

Dampak dari praktik ini terlihat pada menurunnya efisiensi pasar, karena pengusaha baru atau pelaku usaha yang lebih produktif sulit bersaing akibat hambatan regulasi yang menguntungkan elite, serta terciptanya ketimpangan ekonomi yang signifikan karena akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi terkonsentrasi pada segelintir pihak. Selain itu, institusi publik menjadi rentan terhadap praktik kolusi dan korupsi, sehingga transparansi dan akuntabilitas berkurang, dan kebijakan ekonomi lebih berpihak pada kepentingan kelompok tertentu daripada kepentingan masyarakat luas.

c. Menghambat Persaingan Pasar

Menghambat persaingan pasar merupakan aspek penting dari rente karena elite atau kelompok tertentu menggunakan kekuasaan politik, regulasi, atau kontrol atas sumber daya strategis untuk menutup peluang bagi pelaku usaha baru atau kompetitor yang lebih efisien. Mekanisme ini biasanya terjadi melalui pembatasan lisensi, proteksi monopoli, atau intervensi kebijakan yang menguntungkan kelompok elite, sehingga keuntungan ekonomi tetap terjamin tanpa harus meningkatkan produktivitas atau inovasi (Rahardjo, 2019).

Dampak dari praktik ini terlihat pada menurunnya dinamika pasar, karena pelaku usaha baru sulit masuk atau bersaing secara sehat, yang pada akhirnya mengurangi inovasi dan efisiensi ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, konsentrasi kekayaan dan akses terhadap sumber daya menjadi semakin

tinggi di tangan segelintir elite, menciptakan ketimpangan ekonomi yang signifikan, sementara transparansi dan akuntabilitas institusi publik turut tergerus karena fokus kebijakan lebih kepada melindungi kepentingan kelompok tertentu daripada kepentingan masyarakat luas.

3. Kartel Politik (*Political Cartel*)

Kartel politik atau *political cartel* adalah praktik di mana sejumlah elit politik atau partai bekerja sama untuk mengontrol proses politik dan pengambilan keputusan demi melindungi kepentingan bersama, bukan kepentingan publik secara luas. Kartel politik biasanya terbentuk untuk mempertahankan dominasi dalam pemerintahan, mengurangi kompetisi politik, dan memastikan bahwa kebijakan publik serta regulasi ekonomi berpihak pada kelompok elit tertentu. Praktik ini menandai melemahnya demokrasi substantif karena formalitas institusi demokrasi tetap dijalankan, tetapi keputusan yang dihasilkan lebih mencerminkan konsensus antar-elit daripada aspirasi masyarakat luas. Mekanisme ini biasanya terjadi melalui beberapa cara:

a. Pembagian Kekuasaan dan Jabatan

Pembagian kekuasaan dan jabatan merupakan salah satu cara mekanisme kartel politik karena elit atau partai yang tergabung dalam kartel bekerja sama untuk menempatkan anggota atau pendukungnya pada posisi strategis di eksekutif, legislatif, atau lembaga publik. Mekanisme ini memungkinkan kartel untuk mengendalikan pengambilan keputusan, memastikan kebijakan berpihak pada kepentingan bersama elit, dan meminimalkan risiko persaingan politik dari pihak luar (Wijaya, 2020).

Dampak dari pembagian kekuasaan dan jabatan ini terlihat pada meningkatnya dominasi kartel dalam proses legislatif dan administratif, sehingga kebijakan publik cenderung diarahkan untuk melindungi kepentingan elit tertentu, bukan masyarakat luas. Selain itu, praktik ini memperkuat jaringan politik dan ekonomi oligarki, mengurangi transparansi serta akuntabilitas, dan menimbulkan ketimpangan dalam distribusi peluang politik dan sumber daya ekonomi.

b. Pengaturan Alokasi Suara atau Daerah Pemilihan

Pengaturan alokasi suara atau daerah pemilihan merupakan salah satu cara mekanisme kartel politik karena elit atau partai

yang tergabung dalam kartel dapat saling mengatur pembagian wilayah pemilihan, jumlah kursi, atau koalisi untuk meminimalkan persaingan politik dan memastikan dominasi tetap terjaga. Mekanisme ini memungkinkan kartel mempertahankan mayoritas politik meskipun dukungan publik tidak merata, sehingga keputusan strategis tetap berada di tangan kelompok elit (Santoso, 2019).

Dampak dari pengaturan alokasi suara atau daerah pemilihan ini terlihat pada berkurangnya kompetisi politik yang sehat, karena calon independen atau partai baru memiliki peluang yang lebih kecil untuk bersaing secara efektif. Selain itu, praktik ini memperkuat dominasi oligarki politik, mengurangi akuntabilitas pejabat publik terhadap masyarakat, dan meningkatkan kemungkinan kebijakan publik dibuat untuk melayani kepentingan elit daripada kepentingan luas masyarakat.

c. Kesepakatan legislatif dan regulasi

Kesepakatan legislatif dan regulasi merupakan salah satu cara mekanisme kartel politik karena elit atau partai yang tergabung dalam kartel bekerja sama untuk menyepakati arah kebijakan publik, regulasi, atau alokasi anggaran yang menguntungkan kepentingan bersama. Mekanisme ini memungkinkan kartel mengendalikan proses legislasi sehingga keputusan politik lebih mencerminkan kepentingan elit daripada aspirasi masyarakat luas (Hartono, 2020).

Dampak dari kesepakatan legislatif dan regulasi ini terlihat pada terbatasnya inovasi kebijakan dan minimnya kompetisi politik, karena kebijakan yang dibuat cenderung melindungi kepentingan kelompok tertentu. Selain itu, praktik ini memperkuat dominasi oligarki politik dan ekonomi, mengurangi transparansi dan akuntabilitas publik, serta meningkatkan risiko korupsi dan kolusi dalam pengelolaan sumber daya negara.

C. Korupsi Sebagai Masalah Struktural

Korupsi sebagai masalah struktural muncul bukan hanya karena perilaku individu, tetapi karena tertanamnya praktik korupsi dalam sistem politik, ekonomi, dan sosial suatu negara sehingga menjadi bagian dari cara kerja lembaga, regulasi, dan hubungan kekuasaan.

Masalah ini bersifat sistemik karena struktur kelembagaan yang lemah, regulasi yang tidak memadai, serta konsentrasi kekuasaan politik dan ekonomi memungkinkan perilaku koruptif terus berlangsung dan sulit diberantas hanya dengan penindakan individu. Korupsi struktural menghambat pembangunan ekonomi, memperburuk ketimpangan sosial, melemahkan legitimasi pemerintah, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.

Tabel 1. Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia Tahun 2024

Indikator	Nilai
Skor CPI Indonesia	37
Peringkat Global	99 dari 180 negara
Rata-rata Skor Global	43
Skor Tertinggi Global	90 (Denmark)
Skor Terendah Global	8 (South Sudan)
Status Korupsi	Tingkat korupsi relatif masih tinggi

Sumber: Transparency International Indonesia

Tabel 1 menunjukkan posisi Indonesia dalam CPI 2024, yang menunjukkan bahwa persepsi korupsi sektor publik Indonesia masih relatif tinggi dibandingkan negara-negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Skor Indonesia (37) berada di bawah rata-rata dunia dan jauh tertinggal dari negara dengan sistem anti-korupsi kuat.

Tabel 2. Perbandingan Indeks Persepsi Korupsi Negara ASEAN (CPI 2024)

Negara ASEAN	Skor CPI 2024	Peringkat Dunia
Singapura	84	3
Malaysia	50	57
Vietnam	40	104
Indonesia	37	99
Thailand	35	101
Filipina	34	115
Myanmar	20	130

Tabel ini memperlihatkan posisi Indonesia dibandingkan negara-negara ASEAN. Indonesia berada di bawah Singapura dan Malaysia, tetapi relatif sebanding dengan Thailand dan Filipina. Hal ini menunjukkan tantangan struktural dalam pemberantasan korupsi di kawasan Asia

Tenggara. Adapun beberapa faktor penyebab utama korupsi struktural antara lain:

1. Ketergantungan pada Jaringan Patronase

Ketergantungan pada jaringan patronase menyebabkan korupsi struktural ketika pejabat publik atau elite menggunakan hubungan patron-klien untuk mengatur akses terhadap sumber daya publik dan kebijakan, sehingga distribusi jabatan, kontrak, atau proyek menjadi alat untuk membeli loyalitas daripada berdasarkan kompetensi atau kebutuhan rakyat. Dalam pola ini, klien yang bersedia memberi dukungan politik kepada patron memperoleh imbalan dalam bentuk keuntungan ekonomi atau posisi strategis, sehingga loyalitas politis dan keuntungan pribadi saling terikat dan menjadikan korupsi sebagai bagian dari mekanisme normal pemerintahan (Aboksawi, Afifuddin & Ilyas, 2024).

Akibatnya, sistem pemerintahan dan pengelolaan publik menjadi rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan: keputusan politik maupun ekonomi cenderung dibuat untuk melayani kelompok patron-klien, bukan kepentingan umum. Hal ini memperkuat ketergantungan elit terhadap klien, menghambat transparansi dan akuntabilitas, serta membuat peluang bagi pelaku di luar jaringan menjadi sangat terbatas.

2. Lemahnya Institusi Pengawas

Lembaga pengawas yang lemah, baik pengawasan internal di pemerintahan maupun pengawasan eksternal oleh badan pengawas independen, membuka celah bagi penyalahgunaan kekuasaan tanpa konsekuensi nyata, sehingga pelaku korupsi merasa aman dari risiko hukum dan tetap bisa menjalankan praktik korupsi secara sistematis. Ketika mekanisme pengawasan tidak efektif atau tidak memiliki wewenang serta sumber daya memadai, audit, kontrol anggaran, dan pengawasan reguler atas proyek atau kebijakan publik seringkali hanya bersifat formalitas tanpa pengecekan mendalam terhadap aliran dana dan keputusan, sehingga praktik korupsi dan kolusi bisa terjadi tanpa terdeteksi atau ditindak dengan tegas (Boateng et al., 2024).

Akibatnya, korupsi tidak lagi dipandang sebagai penyimpangan individual, melainkan bagian dari struktur pemerintahan. Korupsi menjadi pola yang terus terulang karena tidak ada efek jera, serta

pejabat yang seharusnya mengawasi justru menjadi bagian dari jaringan kekuasaan itu sendiri. Kondisi ini memperlemah akuntabilitas publik, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi, dan memungkinkan konsentrasi kekayaan dan kekuasaan tetap berada di tangan segelintir elite, sehingga ketimpangan sosial dan ekonomi terus melebar dan demokrasi substantif sulit ditegakkan.

3. Regulasi yang Memihak Elite

Regulasi yang memihak elite dapat menjadi faktor penyebab utama korupsi struktural karena ketika pembuat regulasi dirancang sedemikian rupa untuk mengakomodasi kepentingan segelintir elit, misalnya perusahaan besar, kelompok bisnis tertentu, atau oligarki, maka aturan tersebut mudah disalahgunakan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Dalam kondisi seperti ini, regulasi formal justru menjadi alat legal untuk memfasilitasi praktik korupsi, monopoli, atau penguasaan kebijakan publik, sehingga kontrol terhadap distribusi sumber daya dan persaingan usaha menjadi kabur (Widiati, 2024).

Regulasi bias elit ini menciptakan lingkungan di mana persaingan adil dan transparansi dalam pengadaan, lisensi, atau alokasi sumber daya sulit diwujudkan karena aturan sudah diatur sedemikian rupa agar elit tertentu mendapat keistimewaan. Akibatnya, pelaku usaha kecil dan menengah, serta masyarakat luas kehilangan akses terhadap peluang ekonomi atau layanan publik yang seharusnya tersedia, sehingga ketimpangan kekayaan dan kekuasaan semakin melebar, dan korupsi sistemik terus terpelihara dalam struktur pemerintahan dan ekonomi.

D. Studi Kasus Oligarki di Indonesia

1. Studi Kasus: Oligarki di Sektor Energi dan Pertambangan Indonesia

Di Indonesia, oligarki terlihat jelas pada sektor energi dan pertambangan, di mana segelintir konglomerat besar menguasai izin usaha, konsesi tambang, dan distribusi energi, sementara hubungan dengan elite politik memastikan perlindungan regulasi dan akses ke proyek strategis. Misalnya, beberapa perusahaan besar dalam sektor batubara dan migas memiliki hubungan dekat dengan pejabat tinggi pemerintah dan partai politik, sehingga keputusan terkait lisensi,

ekspor, dan harga komoditas sering berpihak pada kepentingannya, sementara pelaku usaha kecil atau masyarakat lokal sering kehilangan hak atau peluang ekonomi.

Dampak dari dominasi ini sangat nyata: konsentrasi kekayaan dan pengaruh politik berada di tangan segelintir elite, menghambat persaingan pasar, memperkuat ketimpangan ekonomi, dan menciptakan ketergantungan politik pada jaringan oligarkis. Selain itu, kebijakan pemerintah yang seharusnya pro-rakyat, seperti subsidi energi atau regulasi lingkungan, kerap disesuaikan untuk melindungi kepentingan elite, sehingga masyarakat luas menerima dampak negatif berupa degradasi lingkungan, harga energi yang tinggi, dan peluang ekonomi yang terbatas.

Mekanisme yang digunakan oligarki ini meliputi patronase, pengaruh politik terhadap legislasi, penguasaan sektor strategis, dan pembentukan kartel politik-ekonomi untuk meminimalkan kompetisi dan mengamankan keuntungan. Kasus ini menunjukkan bagaimana oligarki di Indonesia tidak hanya memengaruhi ekonomi, tetapi juga membentuk landscape politik, memperkuat posisi elite tertentu, dan menimbulkan tantangan besar bagi upaya reformasi dan pemerataan ekonomi.

E. Study Case

1. Studi Kasus: Ekonomi Politik, Korupsi, dan Oligarki di Indonesia

a. Latar Belakang

Indonesia memiliki sejarah panjang interaksi antara politik dan ekonomi yang erat dengan fenomena oligarki. Oligarki terjadi ketika sejumlah kecil individu atau keluarga menguasai kekayaan besar dan memengaruhi kebijakan politik demi kepentingan pribadi. Dalam konteks ekonomi politik, hal ini sering menghasilkan regulasi yang memihak elite dan membuka peluang korupsi struktural, di mana kebijakan publik lebih menguntungkan kelompok tertentu daripada masyarakat luas (Robison & Hadiz, 2017). Fenomena ini menimbulkan ketimpangan ekonomi, menghambat persaingan sehat, dan memperlemah institusi negara.

- b. Kasus Praktis – Sektor Migas dan Infrastruktur
- Salah satu contoh nyata oligarki dalam ekonomi politik Indonesia terlihat pada sektor migas dan proyek infrastruktur. Beberapa perusahaan besar milik konglomerat memiliki akses prioritas terhadap proyek strategis pemerintah, termasuk kontrak energi dan pembangunan jalan tol. Dalam banyak kasus, proses tender atau perizinan tidak transparan, dan kepentingan politik dipakai untuk memastikan keuntungan bagi elite tertentu. Hal ini memicu praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang berdampak pada hilangnya pendapatan negara dan menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.
- c. Dampak Sosial dan Ekonomi
- Oligarki yang terkait dengan korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga memperkuat ketimpangan sosial. Kelompok miskin seringkali tidak mendapatkan akses yang adil terhadap layanan publik, sementara elite memperkuat kontrol atas sumber daya ekonomi. Ketimpangan ini menciptakan siklus politik-ekonomi yang sulit diputus karena elite memiliki kekuatan untuk memengaruhi regulasi dan pemilu demi kepentingannya sendiri. Di sisi lain, tekanan dari masyarakat sipil dan media menjadi penting untuk mengurangi praktik oligarki dan mendorong transparansi.
- d. Upaya Penanggulangan
- Beberapa upaya reformasi telah dilakukan untuk membatasi kekuasaan oligarki, misalnya melalui penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), transparansi anggaran, dan regulasi konflik kepentingan. Namun, efektivitasnya terbatas jika elite politik dan ekonomi masih memiliki jaringan pengaruh yang kuat. Pendekatan multidimensional, termasuk pendidikan antikorupsi, penguatan demokrasi partisipatif, dan regulasi yang adil, dianggap kunci untuk menahan praktik oligarki dan korupsi struktural.
- e. Kesimpulan
- Kasus oligarki di Indonesia menunjukkan bagaimana interaksi antara politik dan ekonomi dapat memicu korupsi sistemik dan menghambat pemerataan ekonomi. Untuk memutus siklus ini, reformasi institusi dan regulasi yang berpihak pada kepentingan publik harus diutamakan. Tanpa langkah konkret, oligarki akan

terus memperkuat posisi elite, sementara rakyat umum tetap mengalami kerugian sosial dan ekonomi.

BAB IX

EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL

Ekonomi politik internasional mempelajari interaksi antara politik dan ekonomi di tingkat global, termasuk bagaimana kebijakan negara, perdagangan, dan investasi memengaruhi distribusi kekuasaan dan sumber daya. Kajian ini membahas peran aktor negara serta institusi internasional dalam membentuk stabilitas ekonomi dan hubungan strategis antarnegara.

A. Teori IPE (International Political Economy)

Teori IPE merupakan kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami interaksi antara politik dan ekonomi di tingkat internasional. Teori ini menekankan bagaimana keputusan politik suatu negara memengaruhi pasar global, perdagangan, investasi, dan distribusi sumber daya. IPE mengkaji hubungan kompleks antara aktor negara, perusahaan multinasional, dan institusi internasional, serta bagaimana kekuatan ekonomi dan politik saling mempengaruhi dalam sistem global. Beberapa pendekatan utama dalam IPE antara lain:

1. Liberalisme Ekonomi

Liberalisme ekonomi sebagai pendekatan utama dalam *International Political Economy* (IPE) menekankan pentingnya pasar bebas dan perdagangan internasional tanpa campur tangan yang berlebihan dari negara, dengan asumsi bahwa mekanisme pasar akan secara alami menciptakan kesejahteraan ekonomi bagi semua pihak. Pendekatan ini melihat integrasi ekonomi global sebagai sarana untuk memperkuat stabilitas politik dan meningkatkan hubungan antarnegara, karena perdagangan yang saling menguntungkan dianggap dapat mengurangi kemungkinan konflik. Liberalisme ekonomi juga menekankan peran individu dan sektor swasta sebagai aktor utama

dalam kegiatan ekonomi internasional, di mana negara sebaiknya berfungsi lebih sebagai regulator daripada pengendali langsung. Dalam perspektif ini, liberalisme ekonomi mendorong deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi perdagangan untuk menciptakan efisiensi dan inovasi di pasar global. Menurut Baylis et al. (2020), pendekatan liberal dalam IPE menekankan bahwa keterbukaan ekonomi dan interaksi pasar internasional dapat memperkuat kerja sama antarnegara serta mengurangi ketegangan politik global.

Pendekatan liberalisme ekonomi juga menekankan pentingnya institusi internasional sebagai fasilitator kerja sama ekonomi, termasuk organisasi seperti WTO, IMF, dan Bank Dunia, yang bertujuan untuk menciptakan aturan main yang stabil bagi perdagangan dan investasi lintas negara. Dengan adanya institusi-institusi ini, negara dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional sambil meminimalkan risiko konflik ekonomi dan politik. Liberalisme ekonomi percaya bahwa keuntungan komparatif negara akan memandu alokasi sumber daya secara efisien, sehingga setiap negara dapat memperoleh manfaat dari spesialisasi dan perdagangan internasional. Selain itu, liberalisme ekonomi menekankan bahwa pasar global yang terbuka mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi melalui kompetisi yang sehat antaraktor ekonomi. Dengan demikian, negara-negara yang mengadopsi prinsip-prinsip liberalisme ekonomi cenderung menekankan kebijakan perdagangan terbuka, stabilitas hukum, dan perlindungan hak kepemilikan untuk menarik investasi asing.

2. Marxisme/Kritis

Marxisme atau pendekatan kritis dalam *International Political Economy* (IPE) menekankan analisis ketimpangan kekuasaan dan distribusi sumber daya dalam sistem ekonomi global, dengan fokus utama pada dominasi negara-negara kaya dan aktor kapitalis atas negara-negara berkembang. Pendekatan ini membahas bagaimana kapitalisme internasional menciptakan hubungan hierarkis dan ketergantungan ekonomi, di mana negara berkembang seringkali terjebak dalam posisi subordinat yang menguntungkan negara-negara maju. Marxisme melihat konflik antara kepentingan ekonomi dan politik sebagai inti dari dinamika global, di mana peran kelas, modal, dan institusi transnasional menjadi faktor penting dalam menentukan

akses terhadap sumber daya. Dalam perspektif ini, perdagangan, investasi, dan kebijakan internasional bukan hanya tentang efisiensi ekonomi, tetapi juga tentang reproduksi struktur kekuasaan dan dominasi global. Menurut Gill (2019), pendekatan kritis dalam IPE mendorong analisis mendalam terhadap mekanisme global yang mempertahankan ketimpangan, serta membahas strategi transformasi sosial dan ekonomi untuk mencapai keadilan global.

Pendekatan Marxisme/Kritis juga menekankan pentingnya analisis struktur dan institusi global, termasuk korporasi multinasional, lembaga keuangan internasional, dan rezim perdagangan, yang seringkali memperkuat dominasi aktor kuat atas negara dan masyarakat lemah. Dengan menekankan aspek historis dan material, pendekatan ini memandang bahwa hubungan ekonomi internasional selalu dibentuk oleh sejarah kolonialisme, imperialisme, dan eksploitasi kelas. Selain itu, Marxisme menekankan bahwa krisis ekonomi global, seperti ketidakstabilan pasar dan depresi finansial, bukan sekadar fenomena siklus pasar, tetapi hasil dari ketegangan inheren dalam sistem kapitalis. Perspektif kritis menuntut perhatian pada bagaimana kebijakan internasional dan liberalisasi pasar dapat memperdalam ketimpangan sosial dan ekonomi, baik di tingkat domestik maupun global. Pendekatan ini memberikan kerangka untuk menganalisis resistensi dan strategi alternatif yang dapat mengurangi dominasi dan mempromosikan redistribusi sumber daya.

3. Realism (Neorealisme)

Realism atau Neorealisme sebagai pendekatan utama dalam *International Political Economy* (IPE) menekankan bahwa negara adalah aktor utama yang selalu memprioritaskan kepentingan nasional dan keamanan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan politik. Pendekatan ini melihat sistem internasional sebagai arena anarki di mana kekuatan militer dan ekonomi menjadi instrumen utama untuk mempertahankan posisi strategis dan pengaruh negara dalam hubungan global. Menurut Gilpin (2020), perspektif realis menekankan bahwa kebijakan ekonomi internasional tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan kekuasaan dan keamanan nasional, sehingga keputusan perdagangan dan investasi seringkali diarahkan untuk memperkuat posisi strategis negara.

Pada kerangka Neorealisme, interaksi ekonomi internasional dipahami melalui lensa kompetisi antarnegara, di mana negara kuat menggunakan keunggulan ekonominya untuk mempengaruhi atau menekan negara yang lebih lemah. Pendekatan ini menekankan bahwa ketergantungan ekonomi antarnegara tidak selalu menciptakan stabilitas, karena negara tetap memprioritaskan keamanan dan kepentingan nasional di atas kerja sama ekonomi. Dengan demikian, Neorealisme menekankan pentingnya strategi nasional yang memadukan kekuatan ekonomi dan militer untuk menjaga dominasi dalam sistem internasional yang kompetitif.

4. Constructivism

Constructivism sebagai pendekatan dalam *International Political Economy* (IPE) menekankan bahwa realitas ekonomi-politik internasional dibentuk oleh ide, norma, dan identitas sosial, bukan semata oleh kekuatan material atau kepentingan negara semata. Pendekatan ini melihat interaksi antarnegara dan aktor global sebagai hasil konstruksi sosial, di mana persepsi, kepercayaan, dan legitimasi berperan penting dalam menentukan perilaku ekonomi dan politik. Menurut Wendt (2018), constructivism menekankan bahwa struktur sosial internasional dibentuk oleh norma dan ide yang diterima bersama, sehingga kebijakan ekonomi global dapat berubah ketika identitas dan keyakinan aktor juga berubah.

Pada perspektif constructivist, institusi internasional dan perjanjian ekonomi bukan hanya mekanisme teknokratis, tetapi juga arena di mana norma, nilai, dan praktik sosial dikonstruksi dan dipertahankan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa faktor non-material seperti kepercayaan, persepsi risiko, dan reputasi dapat memengaruhi keputusan negara dalam perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi internasional. Constructivism menekankan pentingnya pemahaman konteks budaya, sejarah, dan sosial untuk menganalisis bagaimana aktor-aktor internasional memaknai dan menanggapi kebijakan ekonomi global.

B. Sistem Perdagangan Internasional (WTO, IMF, *World Bank*)

Sistem perdagangan internasional adalah kerangka yang mengatur hubungan ekonomi antara negara-negara, termasuk perdagangan barang, jasa, investasi, dan kebijakan ekonomi global. Sistem ini dirancang untuk menciptakan aturan yang jelas, stabil, dan adil agar negara-negara dapat saling berdagang dan berinvestasi dengan risiko konflik ekonomi yang lebih rendah. Tiga institusi utama yang berperan penting dalam sistem ini adalah WTO, IMF, dan *World Bank*.

1. *World Trade Organization* (WTO)

World Trade Organization (WTO) adalah organisasi internasional yang bertugas mengatur perdagangan global agar berlangsung adil, terbuka, dan stabil. WTO menyediakan kerangka aturan, mekanisme negosiasi, dan forum penyelesaian sengketa bagi negara anggota untuk menciptakan sistem perdagangan yang teratur dan dapat diprediksi. Fungsi dan peran WTO sangat penting untuk menjaga keteraturan perdagangan internasional, mendorong liberalisasi perdagangan, serta mendukung pembangunan ekonomi global. Berikut ini adalah fungsi dan peran utama WTO yang menjelaskan bagaimana organisasi ini berkontribusi dalam perdagangan internasional:

a. Regulasi dan Penetapan Aturan Perdagangan

Regulasi dan penetapan aturan perdagangan oleh WTO berperan penting dalam menciptakan sistem perdagangan internasional yang stabil dan adil, di mana negara anggota diharuskan mematuhi standar global terkait tarif, kuota, subsidi, dan perlindungan hak kekayaan intelektual sehingga perdagangan dilakukan secara transparan dan konsisten (Jackson et al., 2020). Dengan adanya kerangka aturan yang baku ini, WTO mampu mengurangi praktik diskriminatif dan proteksionisme, sekaligus mendorong kepastian hukum bagi pelaku ekonomi yang bertransaksi lintas negara.

Pengaturan ini memungkinkan negara-negara anggota menyesuaikan kebijakan nasionalnya sesuai standar internasional tanpa mengganggu akses pasar global, sehingga integrasi ekonomi dunia dapat berlangsung lebih efektif dan saling menguntungkan. Melalui mekanisme ini, WTO tidak

hanya menjaga keteraturan perdagangan, tetapi juga memperkuat kerjasama ekonomi antarnegara dalam menghadapi tantangan global seperti fluktuasi pasar, perang dagang, dan krisis ekonomi.

b. Fasilitasi Negosiasi Perdagangan Multilateral

Fasilitasi negosiasi perdagangan multilateral oleh WTO memungkinkan negara-negara anggota untuk berdiskusi dan mencapai kesepakatan mengenai pengurangan hambatan perdagangan, standar perdagangan, serta akses pasar secara kolektif, sehingga menciptakan lingkungan perdagangan internasional yang lebih terintegrasi dan adil (Baldwin & Evenett, 2019). Dengan adanya forum ini, perbedaan kepentingan antarnegara dapat diselesaikan melalui konsensus, yang mendorong kerja sama ekonomi global dan memperkuat stabilitas sistem perdagangan dunia.

Mekanisme negosiasi multilateral WTO mendukung inovasi dalam peraturan perdagangan serta penyesuaian kebijakan nasional dengan standar internasional, sehingga negara anggota dapat memanfaatkan peluang perdagangan global tanpa menimbulkan konflik dagang. Peran ini memperluas akses pasar bagi negara berkembang dan maju, sekaligus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan prediktabilitas dalam transaksi perdagangan internasional.

c. Penyelesaian Sengketa Perdagangan (*Dispute Settlement*)

Penyelesaian sengketa perdagangan (*Dispute Settlement*) oleh WTO berfungsi untuk memberikan mekanisme hukum yang adil, transparan, dan mengikat bagi negara anggota yang menghadapi praktik perdagangan yang merugikan, sehingga mencegah eskalasi konflik bilateral dan menjaga stabilitas sistem perdagangan internasional (Van den Bossche & Zdouc, 2021). Mekanisme ini memungkinkan anggota untuk menuntut tindakan negara lain yang dianggap melanggar aturan WTO, sekaligus memberikan keputusan yang dapat dipatuhi oleh semua pihak, sehingga menciptakan kepastian hukum dalam perdagangan global.

Sistem penyelesaian sengketa WTO meningkatkan akuntabilitas dan kepatuhan negara anggota terhadap aturan perdagangan internasional, sehingga meminimalkan praktik proteksionisme

dan diskriminatif. Dengan demikian, peran mekanisme ini tidak hanya menjaga keteraturan perdagangan internasional, tetapi juga memperkuat kepercayaan investor dan pelaku usaha dalam melakukan transaksi lintas negara.

2. *International Monetary Fund (IMF)*

International Monetary Fund (IMF) adalah organisasi internasional yang berfungsi untuk menjaga stabilitas sistem moneter global, memfasilitasi perdagangan internasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan global. IMF didirikan pada tahun 1944 dalam Konferensi Bretton Woods dengan tujuan menangani ketidakstabilan ekonomi pasca-Perang Dunia II. Organisasi ini memberikan bantuan keuangan sementara, pengawasan ekonomi, dan bimbingan kebijakan kepada negara anggota yang menghadapi krisis ekonomi atau kesulitan likuiditas, sehingga sistem keuangan internasional tetap stabil. Berikut ini adalah fungsi dan peran utama IMF yang menunjukkan bagaimana organisasi ini berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi global:

a. Pengawasan Ekonomi (*Surveillance*)

Pengawasan ekonomi (*Surveillance*) yang dilakukan IMF berfungsi untuk memantau kebijakan makroekonomi dan keuangan negara anggota serta kondisi ekonomi global secara menyeluruh, sehingga membantu negara mengenali risiko sistemik dan menyesuaikan kebijakan fiskal serta moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi (Ostry et al., 2018). Melalui laporan rutin, analisis makroekonomi, dan konsultasi kebijakan, IMF memberikan arahan strategis yang memungkinkan negara anggota mengantisipasi krisis keuangan dan mengurangi volatilitas pasar internasional.

Pengawasan IMF mendorong kerjasama ekonomi internasional dengan menciptakan standar praktik terbaik, meningkatkan transparansi, dan mendorong kepatuhan negara anggota terhadap kebijakan global. Peran ini memperkuat kepercayaan investor, mendukung stabilitas nilai tukar, serta menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi global secara lebih efektif.

b. Bantuan Keuangan (*Financial Assistance*)

Bantuan keuangan (*Financial Assistance*) yang diberikan IMF berfungsi untuk menyediakan likuiditas sementara bagi negara

anggota yang menghadapi krisis neraca pembayaran atau kesulitan likuiditas, sehingga membantu menstabilkan ekonomi nasional dan mengurangi dampak negatif terhadap perdagangan serta investasi internasional (Kentikelenis et al., 2019). Pinjaman ini biasanya disertai persyaratan reformasi ekonomi, termasuk kebijakan fiskal, stabilisasi mata uang, dan penguatan sektor keuangan, agar bantuan dapat menghasilkan pemulihan ekonomi jangka panjang dan berkelanjutan.

Peran bantuan keuangan IMF mendorong negara anggota untuk menyesuaikan kebijakan makroekonomi dengan praktik terbaik internasional, meningkatkan akuntabilitas pemerintah, dan menjaga kepercayaan pasar global. Melalui mekanisme ini, IMF berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan internasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi global yang lebih aman dan berkelanjutan.

c. Bimbingan dan Saran Kebijakan (*Policy Advice*)

Bimbingan dan saran kebijakan (*Policy Advice*) yang diberikan IMF berfungsi untuk membantu negara anggota merumuskan strategi ekonomi makro yang tepat, termasuk pengelolaan fiskal, moneter, dan struktural, sehingga mendorong stabilitas ekonomi nasional dan mengurangi risiko krisis keuangan (Bird & Rowlands, 2020). IMF memberikan analisis mendalam dan rekomendasi berbasis data yang memungkinkan pemerintah menyesuaikan kebijakan dengan praktik internasional terbaik, meningkatkan efektivitas pengelolaan ekonomi, serta memperkuat kepercayaan pasar global.

Saran kebijakan IMF juga mendukung reformasi struktural yang berkelanjutan, termasuk penguatan sektor keuangan, peningkatan efisiensi anggaran, dan stabilisasi nilai tukar, sehingga negara anggota mampu menghadapi tekanan eksternal dan menjaga pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan mekanisme ini, IMF berperan sebagai penasihat global yang memperkuat ketahanan ekonomi dunia dan integritas sistem keuangan internasional.

3. *World Bank*

World Bank adalah lembaga keuangan internasional yang bertujuan mendukung pembangunan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan sosial di negara-negara berkembang. *World Bank* didirikan pada tahun 1944 bersamaan dengan IMF dalam Konferensi Bretton Woods, dan beranggotakan lebih dari 180 negara. Lembaga ini menyediakan pinjaman, hibah, bantuan teknis, serta bimbingan kebijakan untuk membiayai proyek pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, energi, dan sektor produktif lainnya, dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Berikut ini adalah fungsi dan peran utama *World Bank* yang menunjukkan bagaimana lembaga ini berkontribusi dalam pembangunan ekonomi global:

a. Penyediaan Pinjaman dan Hibah

Penyediaan pinjaman dan hibah oleh *World Bank* berfungsi untuk mendukung negara berkembang dalam membiayai proyek pembangunan yang strategis, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan energi, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kose et al., 2021). Pinjaman lunak dengan suku bunga rendah dan jangka waktu panjang serta hibah yang diberikan memungkinkan negara anggota mengatasi keterbatasan fiskal tanpa membebani anggaran nasional, sehingga proyek pembangunan dapat dijalankan secara efektif dan berkelanjutan.

Peran *World Bank* dalam penyediaan dana pembangunan mendorong reformasi struktural, peningkatan kapasitas institusi, dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, sehingga negara anggota dapat memaksimalkan dampak sosial dan ekonomi dari proyek yang dibiayai. Melalui mekanisme ini, *World Bank* berkontribusi pada pembangunan ekonomi global yang inklusif, pengurangan kemiskinan, dan integrasi negara berkembang ke dalam pasar internasional.

b. Pembiayaan Proyek Pembangunan Infrastruktur

Pembiayaan proyek pembangunan infrastruktur oleh *World Bank* berfungsi untuk mendukung pembangunan fasilitas penting seperti transportasi, energi, air bersih, dan telekomunikasi, sehingga meningkatkan konektivitas, efisiensi

ekonomi, dan akses masyarakat terhadap layanan dasar yang esensial (Estache & Garsous, 2018). Dengan dukungan pembiayaan ini, negara anggota dapat mengurangi hambatan fiskal dalam pembangunan infrastruktur, memastikan proyek berjalan tepat waktu, dan memperkuat fondasi bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Peran *World Bank* dalam membiayai proyek infrastruktur mendorong inovasi teknologi, standar pembangunan yang berkelanjutan, dan peningkatan kapasitas manajemen proyek nasional, sehingga proyek memberikan manfaat sosial dan ekonomi maksimal bagi masyarakat. Melalui mekanisme ini, lembaga ini berkontribusi pada pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dan memperkuat integrasi ekonomi global, khususnya bagi negara berkembang.

c. Bantuan Teknis dan Kapasitas Institusi

Bantuan teknis dan penguatan kapasitas institusi yang diberikan *World Bank* berfungsi untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dan lembaga negara anggota dalam merencanakan, mengelola, dan mengawasi proyek pembangunan secara efektif, sehingga memastikan implementasi kebijakan dan program pembangunan berjalan sesuai tujuan dan berkelanjutan (Arndt & Oman, 2018). Melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan konsultasi kebijakan, *World Bank* membantu negara anggota mengembangkan kapasitas SDM, prosedur administrasi, dan tata kelola institusi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peran bantuan teknis ini mendorong reformasi kelembagaan, efisiensi pengelolaan anggaran, dan transparansi dalam pelaksanaan proyek pembangunan, sehingga meminimalkan risiko kegagalan dan meningkatkan dampak sosial-ekonomi dari investasi pembangunan. Dengan mekanisme ini, *World Bank* berkontribusi secara signifikan dalam memperkuat fondasi institusional negara berkembang dan mendukung integrasi ke dalam ekonomi global.

C. Perang Dagang dan Konflik Ekonomi Antar Negara

Perang dagang dan konflik ekonomi antar negara terjadi ketika dua atau lebih negara memberlakukan kebijakan proteksionis seperti tarif tinggi, kuota impor, atau larangan ekspor untuk melindungi industri domestik atau menekan kepentingan ekonomi negara lain, yang dapat memicu ketegangan bilateral dan mengganggu hubungan ekonomi global. Konflik ini biasanya muncul karena perbedaan kepentingan ekonomi, persaingan teknologi, ketidakseimbangan neraca perdagangan, atau tujuan geopolitik tertentu, sehingga dampaknya meluas ke perdagangan internasional, investasi, dan stabilitas ekonomi global. Beberapa hal penting yang relevan dalam memahami perang dagang dan konflik ekonomi antar negara antara lain:

1. Penerapan Tarif dan Pembatasan Impor

Penerapan tarif dan pembatasan impor merupakan strategi proteksionisme yang digunakan negara untuk melindungi industri domestik dari persaingan asing, dengan cara mengenakan pajak tambahan pada barang impor atau membatasi volume masuknya produk tertentu, sehingga meningkatkan harga barang asing dan mendorong konsumen memilih produk lokal (Bown, 2019). Langkah ini sering kali diterapkan sebagai respons terhadap defisit neraca perdagangan, persaingan industri strategis, atau untuk menekan praktik perdagangan yang dianggap tidak adil oleh negara penerap. Meskipun efektif dalam melindungi sektor tertentu dalam jangka pendek, kebijakan ini dapat memicu balasan dari negara lain, memengaruhi rantai pasok global, dan meningkatkan biaya produksi serta harga konsumen.

Penerapan tarif dan pembatasan impor memiliki dampak luas terhadap dinamika perdagangan internasional, termasuk memperlambat arus barang dan jasa, menurunkan efisiensi pasar global, serta memunculkan ketidakpastian bagi investor dan pelaku usaha lintas negara. Negara-negara yang terkena balasan tarif cenderung mencari alternatif pasar atau diversifikasi produksi, sehingga memicu restrukturisasi perdagangan global. Dengan demikian, strategi ini harus dikelola secara hati-hati agar tujuan proteksi industri domestik tidak menimbulkan distorsi ekonomi yang lebih luas dan ketegangan politik antarnegara.

2. Gangguan Rantai Pasok Global

Gangguan rantai pasok global terjadi ketika aliran bahan baku, komponen, atau produk jadi antarnegara terganggu akibat kebijakan proteksionis, konflik perdagangan, bencana alam, atau krisis ekonomi, sehingga menimbulkan keterlambatan produksi, peningkatan biaya logistik, dan ketidakpastian bagi perusahaan internasional (Ivanov, 2020). Ketergantungan tinggi pada pemasok tertentu atau wilayah strategis membuat banyak industri rentan terhadap disrupsi, terutama di sektor teknologi, otomotif, dan manufaktur. Dampak ini tidak hanya dirasakan secara lokal, tetapi dapat memicu efek domino di seluruh jaringan global, mengurangi efisiensi produksi dan mengganggu stabilitas perdagangan internasional.

Gangguan rantai pasok global mendorong negara dan perusahaan untuk mencari alternatif pemasok, mendiversifikasi sumber bahan baku, dan memperkuat manajemen risiko, sehingga tercipta strategi mitigasi yang lebih resilient. Perubahan ini mempengaruhi perencanaan jangka panjang, investasi, dan harga produk di pasar internasional. Dengan demikian, gangguan rantai pasok menjadi isu strategis yang harus diantisipasi agar perdagangan global tetap lancar dan ekonomi dunia tidak terdampak secara signifikan.

3. Dampak pada Investasi dan Pasar Keuangan

Dampak pada investasi dan pasar keuangan muncul ketika ketidakpastian akibat perang dagang atau konflik ekonomi membuat investor menahan modal, menunda proyek, dan mengurangi aliran investasi lintas negara, sehingga menimbulkan volatilitas di pasar saham, obligasi, dan valuta asing (Aizenman et al., 2019). Ketidakpastian ini sering kali memicu penyesuaian portofolio secara cepat, peningkatan premi risiko, dan penurunan likuiditas pasar, yang selanjutnya dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan memperlebar kesenjangan antarnegara. Akibatnya, investor global cenderung mencari aset yang lebih aman, sementara perusahaan multinasional menghadapi tekanan untuk menyesuaikan strategi ekspansi dan rantai pasoknya.

Gangguan pada pasar keuangan mempengaruhi keputusan moneter dan fiskal negara, karena bank sentral mungkin menyesuaikan suku bunga atau likuiditas untuk menstabilkan pasar, sementara pemerintah menimbang kebijakan proteksionis atau stimulus fiskal

untuk mendukung sektor domestik. Dampak ini menegaskan keterkaitan erat antara dinamika perdagangan internasional dan stabilitas finansial global, sehingga perang dagang atau konflik ekonomi harus dikelola dengan strategi mitigasi yang tepat agar risiko sistemik dapat diminimalkan.

4. Pengaruh terhadap Konsumen dan Masyarakat

Pengaruh terhadap konsumen dan masyarakat terjadi ketika perang dagang dan konflik ekonomi menyebabkan kenaikan harga barang impor, keterbatasan pilihan produk, dan meningkatnya biaya hidup, sehingga menurunkan daya beli masyarakat dan memengaruhi kesejahteraan secara luas (Bown & Zhang, 2021). Dampak ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial, karena konsumen terpaksa menyesuaikan pola konsumsi dan menghadapi ketidakpastian dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, kenaikan harga dan pembatasan akses produk tertentu dapat meningkatkan ketidakpuasan publik, memengaruhi persepsi terhadap pemerintah, dan menimbulkan tekanan politik domestik terkait kebijakan perdagangan.

Konflik perdagangan dapat memperburuk kesenjangan sosial karena kelompok masyarakat yang lebih rentan menghadapi kesulitan lebih besar dalam mengakses barang pokok dan layanan penting. Hal ini mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan kebijakan perlindungan konsumen, subsidi, atau intervensi pasar agar tekanan sosial dan ekonomi dapat diminimalkan. Dengan demikian, pengaruh perang dagang terhadap masyarakat menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan ekonomi nasional dan kesejahteraan publik.

D. Pengaruh Hegemoni Ekonomi Global

Hegemoni ekonomi global merujuk pada dominasi satu atau beberapa negara dalam sistem ekonomi internasional, di mana negara-negara hegemonik memiliki pengaruh besar dalam menentukan aturan perdagangan, kebijakan moneter, dan arus investasi global. Dominasi ini sering tercermin melalui kekuatan dalam lembaga internasional, kontrol atas teknologi strategis, dan kemampuan untuk memengaruhi nilai mata uang serta kondisi pasar global. Hegemoni ekonomi memungkinkan negara hegemon untuk mengeksport standar, regulasi,

dan praktik ekonomi yang menguntungkan kepentingannya, sementara negara lain cenderung mengikuti atau menyesuaikan diri agar tetap terintegrasi dalam sistem global. Beberapa pengaruh hegemoni ekonomi global meliputi:

1. Penetapan Aturan Perdagangan Internasional

Penetapan aturan perdagangan internasional sebagai pengaruh hegemoni ekonomi global terjadi ketika negara-negara dominan menggunakan kekuatan ekonomi dan politiknya untuk menentukan standar, regulasi, dan kebijakan perdagangan yang menguntungkan kepentingan nasional, sekaligus membentuk kerangka operasional lembaga multilateral seperti WTO agar selaras dengan kepentingan hegemon (Ikenberry, 2018). Pengaruh ini memungkinkan negara hegemon untuk menekan praktik perdagangan yang dianggap tidak adil, menetapkan tarif dan kuota yang strategis, serta mendorong adopsi teknologi dan standar industri tertentu yang memperkuat posisi ekonomi di pasar global.

Penetapan aturan perdagangan internasional oleh negara hegemon dapat memaksa negara-negara lain menyesuaikan kebijakan domestik dan strategi ekspor-impor agar tetap terintegrasi dalam sistem global, yang kadang menimbulkan ketergantungan struktural dan mengurangi kemandirian ekonomi negara yang lebih lemah. Negara hegemon juga memanfaatkan posisi ini untuk memperluas pengaruh politik dan ekonomi melalui perjanjian perdagangan bilateral atau regional yang mengutamakan kepentingannya. Dampak jangka panjang dari praktik ini mencakup pembentukan norma internasional yang menguntungkan negara hegemon dan potensi ketegangan ekonomi atau sengketa dagang dengan negara lain yang menolak mengikuti aturan yang ditetapkan.

2. Dominasi Arus Investasi dan Modal

Dominasi arus investasi dan modal sebagai pengaruh hegemoni ekonomi global terjadi ketika negara hegemon memanfaatkan kapasitas finansialnya untuk menarik aliran investasi asing langsung (FDI) dan portofolio, sehingga mengarahkan aliran modal global ke sektor-sektor yang menguntungkan kepentingannya sekaligus memengaruhi kebijakan ekonomi negara penerima (Subacchi, 2019). Dengan kontrol atas jaringan keuangan internasional, negara hegemon dapat

memengaruhi suku bunga, likuiditas, dan akses pembiayaan global, sehingga memperkuat posisi ekonomi dan menimbulkan ketergantungan finansial bagi negara-negara yang lebih lemah.

Dominasi ini memungkinkan negara hegemon untuk menetapkan standar investasi, mengatur mekanisme proteksi modal, dan menegosiasikan kesepakatan perdagangan serta investasi bilateral yang memprioritaskan kepentingannya, yang secara tidak langsung membatasi otonomi ekonomi negara lain. Aliran modal yang terkonsentrasi ini juga memengaruhi stabilitas pasar keuangan global, di mana perubahan kebijakan di negara hegemon dapat memicu volatilitas di negara penerima atau pasar emergen. Dampak jangka panjang mencakup restrukturisasi ekonomi negara penerima, pergeseran prioritas pembangunan, dan penyesuaian strategi fiskal serta moneter agar tetap kompatibel dengan dinamika global yang dikendalikan hegemon.

3. Kontrol Teknologi dan Inovasi

Kontrol teknologi dan inovasi sebagai pengaruh hegemoni ekonomi global terjadi ketika negara hegemon menguasai pengembangan dan distribusi teknologi strategis, termasuk teknologi informasi, energi, dan manufaktur canggih, sehingga negara lain bergantung pada akses teknologi yang dikendalikan hegemon untuk mendukung pembangunan industri dan pertumbuhan ekonomi (Friedman, 2020). Dominasi ini memungkinkan negara hegemon menetapkan standar teknologi, paten, dan hak kekayaan intelektual yang memperkuat posisinya di pasar global serta membatasi kemampuan negara lain untuk bersaing secara setara dalam inovasi.

Kontrol atas inovasi dan teknologi memungkinkan negara hegemon memanfaatkan keunggulan komparatif untuk menarik investasi, memperluas pengaruh geopolitik, dan menegosiasikan kesepakatan ekonomi yang menguntungkan kepentingannya. Negara-negara yang lebih lemah sering kali harus menyesuaikan strategi penelitian, produksi, dan investasi agar dapat memperoleh lisensi, transfer teknologi, atau akses pasar yang diperlukan. Dampak jangka panjang mencakup ketergantungan teknologi, kesenjangan inovasi, dan potensi dominasi ekonomi yang berkelanjutan dari negara hegemon terhadap negara-negara penerima.

E. Study Case

1. Studi Kasus: Ekonomi Politik Internasional – Perang Dagang As-China

Perang dagang antara Amerika Serikat dan China merupakan contoh nyata dinamika ekonomi politik internasional yang menunjukkan interaksi antara kebijakan ekonomi, kepentingan politik, dan hubungan kekuatan global. Konflik ini dimulai pada 2018 ketika Amerika Serikat, di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, mengenakan tarif tinggi terhadap barang impor dari China senilai miliaran dolar dengan alasan praktik perdagangan yang tidak adil dan defisit neraca perdagangan yang besar. China merespons dengan mengenakan tarif balasan terhadap produk-produk AS, sehingga terciptalah eskalasi tarif yang memengaruhi ratusan industri, termasuk teknologi, otomotif, dan pertanian.

Dampak dari perang dagang ini dirasakan di tingkat global. Investor menjadi lebih berhati-hati karena ketidakpastian perdagangan meningkat, nilai tukar mata uang dan harga komoditas mengalami volatilitas, dan arus rantai pasok global terganggu. Perusahaan multinasional yang beroperasi lintas negara harus menyesuaikan strategi produksi, diversifikasi pasar, dan logistik untuk meminimalkan kerugian akibat tarif dan pembatasan perdagangan.

Perang dagang ini mencerminkan pergeseran hegemoni ekonomi global. Amerika Serikat mencoba menggunakan kekuatan ekonominya untuk memaksakan aturan perdagangan yang menguntungkan kepentingannya, sementara China memperkuat strategi industrialisasi dan inovasi domestik untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi dan pasar AS. Konflik ini juga memengaruhi negosiasi multilateral di WTO, mendorong negara-negara lain meninjau strategi perdagangan, dan menimbulkan diskusi global mengenai reformasi sistem perdagangan internasional agar lebih adil dan stabil.

Studi kasus ini menunjukkan bahwa ekonomi politik internasional tidak hanya berkaitan dengan aliran barang, modal, dan jasa, tetapi juga bagaimana kekuatan ekonomi dan politik suatu negara memengaruhi keputusan strategis global, stabilitas pasar internasional, dan kesejahteraan negara lain yang terintegrasi dalam sistem perdagangan dunia.

BAB X

KEBIJAKAN PUBLIK DALAM EKONOMI POLITIK

Kebijakan publik dalam ekonomi politik merupakan alat bagi pemerintah untuk mengatur perekonomian sekaligus mencerminkan kepentingan politik dan distribusi kekuasaan. Kebijakan ini memengaruhi bagaimana sumber daya dialokasikan, siapa yang diuntungkan, dan bagaimana dinamika ekonomi serta politik saling berinteraksi.

A. Proses Politik dalam Pembuatan Kebijakan Ekonomi

Proses politik dalam pembuatan kebijakan ekonomi mencerminkan interaksi antara aktor politik, institusi, dan kepentingan ekonomi dalam menentukan arah kebijakan suatu negara. Proses ini tidak hanya melibatkan pertimbangan teknis ekonomi, tetapi juga pertarungan kepentingan, negosiasi, dan kompromi antara berbagai kelompok dengan pengaruh berbeda. Berikut uraian rinci mengenai proses politik dalam pembuatan kebijakan ekonomi:

1. Identifikasi Masalah dan Agenda Politik

Identifikasi masalah dan agenda politik merupakan tahap awal yang krusial dalam proses pembuatan kebijakan ekonomi, di mana isu-isu ekonomi seperti inflasi, pengangguran, atau ketimpangan sosial diidentifikasi melalui pengumpulan data, pengamatan kondisi masyarakat, serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan agar masalah yang paling mendesak dapat diangkat ke agenda pemerintah untuk mendapatkan perhatian formal (Sabatier & Weible, 2018). Pada tahap ini, aktor politik dan birokrasi berperan menentukan prioritas isu berdasarkan kepentingan strategis, tekanan kelompok kepentingan, dan opini publik, sehingga agenda politik yang terbentuk mencerminkan

kompromi antara kebutuhan ekonomi dan tujuan politik jangka panjang.

Setelah masalah diidentifikasi, agenda politik menjadi sarana untuk mengarahkan perhatian legislatif, eksekutif, dan publik terhadap isu-isu yang dianggap prioritas, sekaligus menetapkan batas ruang bagi pembahasan kebijakan ekonomi yang realistis dan dapat diterapkan. Dalam proses ini, dinamika politik seperti negosiasi antarpantai, tekanan kelompok kepentingan, serta strategi komunikasi publik memengaruhi bagaimana isu ekonomi dipilih, diprioritaskan, dan disosialisasikan sehingga tercipta konsensus awal mengenai langkah-langkah yang akan diambil pemerintah.

2. Perumusan Kebijakan

Perumusan kebijakan adalah tahapan di mana pemerintah dan aktor terkait mengembangkan berbagai alternatif solusi untuk menangani masalah ekonomi yang telah masuk ke agenda politik, kemudian menyeleksi opsi-opsi tersebut berdasarkan pertimbangan kelayakan teknis dan kelayakan politik. Pada tahap ini terjadi tarik-menarik kepentingan di antara aktor birokrasi, legislatif, kelompok kepentingan dan masyarakat sipil sehingga kebijakan yang dihasilkan bukan hanya efisien secara ekonomi tetapi juga dapat memperoleh dukungan politik yang cukup (Muadi, 2016).

Proses perumusan sering kali mencerminkan kompromi atau negosiasi antara tujuan ekonomi dan tekanan politik, di mana bahkan bukti riset atau data teknis bisa saja dikalahkan oleh kepentingan politik atau lobi kelompok tertentu, membuat kebijakan lebih mencerminkan kondisi kekuasaan daripada solusi ilmiah yang murni. Dengan demikian, fase perumusan kebijakan menjadi arena di mana kekuasaan, ideologi, kepentingan dan strategi politik saling berinteraksi untuk menentukan bentuk akhir kebijakan ekonomi.

3. Negosiasi dan Konsensus Politik

Negosiasi dan konsensus politik merupakan tahap krusial dalam pembuatan kebijakan ekonomi, di mana berbagai aktor politik, partai, birokrasi, dan kelompok kepentingan saling berinteraksi untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan arah kebijakan yang akan diterapkan, sehingga keputusan akhir mencerminkan kompromi antara kepentingan ekonomi dan pertimbangan politik (Anderson, 2019). Pada

tahap ini, tekanan politik, lobbying, opini publik, dan strategi komunikasi berperan penting dalam membentuk konsensus, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya layak secara teknis tetapi juga dapat diterima secara politik dan sosial.

Proses negosiasi sering kali berlangsung intens karena setiap aktor memiliki kepentingan berbeda dan kekuatan negosiasi yang tidak merata, sehingga konsensus yang tercapai biasanya merupakan hasil kompromi yang menyeimbangkan manfaat dan biaya bagi berbagai pihak. Hal ini membuat kebijakan ekonomi yang dihasilkan bersifat dinamis dan adaptif, karena harus mempertimbangkan berbagai faktor eksternal dan internal yang memengaruhi stabilitas politik dan efektivitas implementasi.

4. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam pembuatan kebijakan ekonomi merupakan tahap di mana alternatif kebijakan yang telah dirumuskan dan melalui proses negosiasi dievaluasi secara formal oleh aktor berwenang, seperti eksekutif dan legislatif, untuk ditetapkan sebagai kebijakan resmi, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan kompromi antara tujuan ekonomi dan tekanan politik (Dye, 2018). Pada tahap ini, pertimbangan teknis, data ekonomi, risiko politik, serta opini publik digabungkan untuk menghasilkan keputusan yang tidak hanya efektif secara ekonomi tetapi juga memiliki legitimasi politik yang kuat.

Proses pengambilan keputusan sering melibatkan analisis biaya-manfaat, simulasi dampak kebijakan, dan pertimbangan kepentingan kelompok yang berbeda, sehingga setiap keputusan yang diambil merupakan hasil kompromi strategis yang menyeimbangkan berbagai kepentingan. Keputusan yang dihasilkan pada tahap ini menjadi dasar bagi pelaksanaan kebijakan dan menetapkan prioritas alokasi sumber daya, sekaligus memberikan arahan bagi implementasi dan pengawasan lebih lanjut.

5. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dalam pembuatan kebijakan ekonomi adalah tahap di mana keputusan yang telah diambil diterjemahkan ke dalam tindakan nyata melalui lembaga birokrasi dan mekanisme regulasi, sehingga keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada

kapasitas administratif, koordinasi antar lembaga, dan kepatuhan aktor politik serta publik (Hill, 2018). Pada tahap ini, dinamika politik tetap berperan penting karena tekanan dari kelompok kepentingan, opini publik, dan intervensi legislatif dapat memengaruhi bagaimana kebijakan dijalankan dan seberapa efektif hasil yang dicapai.

Proses implementasi sering menghadapi tantangan berupa resistensi dari pihak yang merasa dirugikan, keterbatasan sumber daya, atau konflik kepentingan internal, sehingga keberhasilan memerlukan strategi adaptif, komunikasi yang efektif, serta mekanisme pengawasan yang kuat untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan. Dalam konteks ini, birokrasi tidak hanya menjadi pelaksana teknis, tetapi juga mediator politik yang menyeimbangkan kepentingan berbagai aktor sambil menjaga kontinuitas dan legitimasi kebijakan ekonomi.

B. Kebijakan Fiskal, Moneter dan Perdagangan

Kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan adalah instrumen utama pemerintah dalam mengatur perekonomian untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil, pemerataan kesejahteraan, dan daya saing internasional. Ketiga kebijakan ini memiliki fokus, mekanisme, dan tujuan yang berbeda, namun saling terkait dalam memengaruhi aktivitas ekonomi. Berikut penjelasan rinci beserta poin-poinnya:

1. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah salah satu instrumen utama pemerintah untuk mengatur perekonomian melalui pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara, dengan tujuan memengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dan stabilitas makroekonomi. Kebijakan fiskal dapat bersifat ekspansif atau kontraktif, tergantung pada kondisi ekonomi dan sasaran pemerintah.

a. Tujuan Kebijakan Fiskal

Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mengatur kegiatan ekonomi melalui pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara agar pertumbuhan ekonomi dapat tercapai secara optimal. Kebijakan ini dirancang untuk mendorong investasi, konsumsi, dan penciptaan lapangan kerja sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kebijakan fiskal berperan dalam mengendalikan inflasi dan menjaga

stabilitas harga agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Dengan pengelolaan yang tepat, kebijakan fiskal juga dapat membantu menyeimbangkan siklus ekonomi antara periode resesi dan ekspansi.

Kebijakan fiskal bertujuan untuk redistribusi pendapatan agar kesenjangan ekonomi dapat diminimalkan melalui subsidi, bantuan sosial, dan pajak progresif. Tujuan ini mendukung terciptanya keadilan sosial sekaligus menjaga stabilitas sosial-politik di masyarakat. Kebijakan fiskal juga digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang strategis dan infrastruktur publik sehingga mendukung pertumbuhan jangka panjang. Dengan demikian, kebijakan fiskal menjadi instrumen penting bagi pemerintah dalam mewujudkan ekonomi yang seimbang, inklusif, dan berkelanjutan.

b. Instrumen Kebijakan Fiskal

Instrumen kebijakan fiskal mencakup berbagai mekanisme yang digunakan pemerintah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara guna mencapai tujuan ekonomi dan sosial. Salah satu instrumen utama adalah pajak, yang berfungsi sebagai sumber pendapatan negara sekaligus alat untuk memengaruhi perilaku ekonomi masyarakat dan distribusi pendapatan. Selain itu, belanja pemerintah menjadi instrumen penting untuk mendorong konsumsi, investasi, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Penggunaan subsidi dan bantuan sosial juga menjadi alat untuk melindungi kelompok masyarakat kurang mampu dan menyeimbangkan ketimpangan ekonomi.

Instrumen kebijakan fiskal dapat bersifat ekspansif atau kontraktif tergantung pada kondisi ekonomi yang dihadapi pemerintah. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan melalui peningkatan belanja atau pengurangan pajak untuk mendorong aktivitas ekonomi, sementara kebijakan kontraktif menurunkan belanja atau menaikkan pajak untuk menahan inflasi. Selain itu, pemerintah juga dapat menggunakan insentif fiskal untuk mendorong investasi tertentu atau mengatur sektor strategis. Dengan demikian, instrumen fiskal menjadi alat fleksibel yang memungkinkan pemerintah menyesuaikan kebijakan sesuai dengan dinamika ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

c. Jenis Kebijakan Fiskal

Jenis kebijakan fiskal dibedakan berdasarkan tujuan dan efeknya terhadap perekonomian, serta respons pemerintah terhadap kondisi ekonomi yang dihadapi. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan dengan meningkatkan belanja pemerintah atau menurunkan pajak untuk mendorong konsumsi dan investasi, biasanya diterapkan saat perekonomian mengalami resesi atau pertumbuhan yang lambat. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat daya beli masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan permintaan agregat sehingga pertumbuhan ekonomi dapat kembali meningkat. Dengan pendekatan ini, pemerintah dapat merangsang aktivitas ekonomi secara langsung dan memberikan efek multiplikatif bagi sektor-sektor terkait.

Kebijakan fiskal kontraktif diterapkan dengan mengurangi pengeluaran pemerintah atau menaikkan pajak untuk menahan inflasi dan mencegah overheating ekonomi. Kebijakan ini digunakan ketika perekonomian tumbuh terlalu cepat atau harga-harga meningkat secara tajam sehingga stabilitas makroekonomi terancam. Tujuannya adalah menyeimbangkan permintaan dan penawaran dalam ekonomi, menjaga stabilitas harga, dan mengurangi risiko defisit anggaran yang berlebihan. Dengan demikian, kedua jenis kebijakan fiskal ini memungkinkan pemerintah menyesuaikan strategi fiskal sesuai dengan dinamika ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

2. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah instrumen pemerintah, khususnya bank sentral, untuk mengatur jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga dalam perekonomian guna mencapai tujuan stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan keseimbangan neraca pembayaran. Kebijakan moneter berperan penting dalam memengaruhi konsumsi, investasi, dan tingkat inflasi, serta dapat bersifat ekspansif atau kontraktif tergantung kondisi ekonomi.

a. Tujuan Kebijakan Moneter

Tujuan kebijakan moneter adalah untuk mengatur jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga dalam perekonomian guna mencapai stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan ini dirancang untuk menjaga inflasi pada tingkat yang terkendali sehingga daya beli masyarakat tetap stabil dan risiko ekonomi makro dapat diminimalkan. Selain itu, kebijakan moneter bertujuan mendorong investasi dan konsumsi dengan menyediakan likuiditas yang cukup dalam perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terjaga. Dengan demikian, kebijakan moneter menjadi instrumen penting dalam mengarahkan perekonomian menuju kondisi yang seimbang dan stabil.

Kebijakan moneter juga bertujuan menjaga stabilitas sistem keuangan dan nilai tukar mata uang. Dengan pengelolaan yang tepat, bank sentral dapat mencegah krisis likuiditas dan menjaga kesehatan sektor perbankan sehingga fungsi intermediasi keuangan berjalan efektif. Kebijakan moneter juga berperan dalam mendukung keseimbangan neraca pembayaran melalui pengendalian arus modal dan kurs valuta asing. Secara keseluruhan, tujuan kebijakan moneter adalah menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif bagi pembangunan nasional, investasi, dan kesejahteraan masyarakat.

b. Instrumen Kebijakan Moneter

Instrumen kebijakan moneter adalah alat yang digunakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dan memengaruhi kondisi ekonomi agar stabilitas harga dan pertumbuhan dapat tercapai. Salah satu instrumen utama adalah operasi pasar terbuka, yaitu pembelian atau penjualan surat berharga oleh bank sentral untuk menambah atau mengurangi likuiditas di pasar. Selain itu, suku bunga acuan digunakan untuk memengaruhi biaya pinjaman dan keputusan investasi, sehingga konsumsi dan investasi dapat dikendalikan sesuai kondisi ekonomi. Cadangan wajib minimum yang ditetapkan pada bank komersial juga menjadi instrumen penting untuk mengatur kemampuan kredit dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Bank sentral dapat menggunakan kebijakan nilai tukar untuk menstabilkan mata uang domestik terhadap mata uang asing dan

menjaga keseimbangan neraca perdagangan. Penggunaan instrumen moneter dapat bersifat ekspansif dengan menambah likuiditas atau kontraktif dengan mengurangi uang beredar, tergantung tujuan yang ingin dicapai. Instrumen-instrumen ini memungkinkan bank sentral menyesuaikan kebijakan dengan kondisi ekonomi makro dan dinamika pasar keuangan. Dengan kombinasi instrumen yang tepat, kebijakan moneter menjadi sarana strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

c. Jenis Kebijakan Moneter

Jenis kebijakan moneter dibedakan berdasarkan arah dan tujuan pengaruhnya terhadap jumlah uang beredar serta kondisi ekonomi secara keseluruhan. Kebijakan moneter ekspansif dilakukan dengan menurunkan suku bunga atau menambah jumlah uang beredar untuk mendorong investasi, konsumsi, dan pertumbuhan ekonomi, biasanya diterapkan saat perekonomian mengalami perlambatan atau resesi. Tujuannya adalah meningkatkan likuiditas di pasar sehingga kegiatan ekonomi menjadi lebih aktif dan penciptaan lapangan kerja meningkat. Dengan pendekatan ini, bank sentral berperan langsung dalam merangsang permintaan agregat dan mendukung stabilitas ekonomi jangka panjang.

Kebijakan moneter kontraktif diterapkan dengan menaikkan suku bunga atau mengurangi jumlah uang beredar untuk menahan inflasi dan mencegah overheating ekonomi. Kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas harga serta mencegah fluktuasi ekonomi yang terlalu ekstrem, sehingga risiko krisis keuangan dapat diminimalkan. Selain itu, kebijakan kontraktif membantu menyeimbangkan neraca pembayaran dan menjaga nilai tukar mata uang domestik. Dengan demikian, kedua jenis kebijakan moneter ini memungkinkan bank sentral menyesuaikan strategi pengendalian ekonomi sesuai dengan dinamika perekonomian nasional.

3. Kebijakan Perdagangan

Kebijakan perdagangan adalah instrumen pemerintah untuk mengatur aliran barang dan jasa antarnegara dengan tujuan meningkatkan daya saing produk domestik, menjaga stabilitas neraca

perdagangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan ini mencakup berbagai regulasi, tarif, dan perjanjian internasional yang memengaruhi ekspor, impor, serta hubungan ekonomi dengan negara lain.

a. Tujuan Kebijakan Perdagangan

Tujuan kebijakan perdagangan adalah untuk mengatur aliran barang dan jasa antarnegara agar perekonomian nasional dapat tumbuh secara optimal dan berkelanjutan. Salah satu tujuannya adalah meningkatkan daya saing produk domestik di pasar internasional melalui perlindungan atau insentif bagi industri lokal. Kebijakan perdagangan juga bertujuan mengamankan pasokan barang strategis yang dibutuhkan masyarakat dan industri, sehingga stabilitas ekonomi dalam negeri tetap terjaga. Dengan demikian, kebijakan perdagangan berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan ketahanan nasional terhadap fluktuasi pasar global.

Kebijakan perdagangan berfungsi untuk mendorong ekspor dan meningkatkan devisa negara melalui promosi perdagangan dan dukungan bagi pelaku usaha. Kebijakan ini juga digunakan untuk menjaga keseimbangan neraca perdagangan dengan mengatur impor agar tidak menimbulkan defisit yang berlebihan. Melalui perjanjian perdagangan internasional, pemerintah dapat membuka akses pasar baru sekaligus mengatur regulasi untuk melindungi kepentingan nasional. Secara keseluruhan, tujuan kebijakan perdagangan adalah menciptakan kondisi ekonomi yang kompetitif, stabil, dan berkelanjutan dalam konteks global.

b. Instrumen Kebijakan Perdagangan

Instrumen kebijakan perdagangan adalah alat yang digunakan pemerintah untuk mengatur aliran barang dan jasa antara negara agar tujuan ekonomi nasional tercapai. Salah satu instrumen utama adalah tarif atau bea masuk, yang dikenakan pada barang impor untuk melindungi industri domestik dari persaingan asing. Selain itu, kuota impor digunakan untuk membatasi jumlah barang tertentu yang masuk ke pasar domestik sehingga stabilitas harga dan pasokan dapat terjaga. Subsidi dan insentif ekspor juga menjadi instrumen penting untuk mendorong daya saing produk lokal di pasar internasional.

Instrumen lain yang digunakan adalah perjanjian perdagangan internasional, termasuk negosiasi tarif, kuota, dan regulasi, untuk mempermudah ekspor dan impor serta membuka akses pasar baru. Pemerintah juga dapat menggunakan kebijakan proteksionis atau liberalisasi sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan kondisi pasar global. Pengaturan standar kualitas, sertifikasi, dan regulasi teknis juga termasuk instrumen non-tarif yang memengaruhi perdagangan internasional. Dengan kombinasi instrumen yang tepat, kebijakan perdagangan dapat menjaga keseimbangan ekonomi, mendukung pertumbuhan, dan melindungi kepentingan nasional.

c. Jenis Kebijakan Perdagangan

Jenis kebijakan perdagangan dibedakan berdasarkan tujuan dan dampaknya terhadap perekonomian nasional serta hubungan ekonomi dengan negara lain. Kebijakan proteksionis diterapkan dengan tujuan melindungi industri dalam negeri melalui tarif tinggi, kuota, atau regulasi ketat agar produk lokal tidak kalah bersaing dengan produk impor. Kebijakan ini membantu menjaga stabilitas pasar domestik dan mendukung pertumbuhan sektor strategis yang membutuhkan perlindungan. Dengan pendekatan ini, pemerintah dapat memastikan bahwa industri lokal memiliki kesempatan untuk berkembang sebelum bersaing di pasar global.

Kebijakan liberalisasi atau perdagangan bebas bertujuan membuka akses pasar internasional dan mengurangi hambatan perdagangan, sehingga mendorong persaingan dan efisiensi ekonomi. Kebijakan ini dilakukan dengan menurunkan tarif, menghapus kuota, dan mempermudah regulasi ekspor-impor untuk memperkuat daya saing produk domestik. Tujuannya adalah meningkatkan volume perdagangan, memperluas pasar bagi produsen lokal, dan mendorong integrasi ekonomi dengan negara lain. Dengan demikian, kedua jenis kebijakan perdagangan memungkinkan pemerintah menyesuaikan strategi sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan nasional.

C. Aktor Kebijakan: Birokrasi, Politisi, Kelompok Kepentingan

Aktor kebijakan adalah pihak-pihak yang terlibat dalam proses perumusan, pengambilan, dan implementasi kebijakan publik, termasuk kebijakan ekonomi. Peran masing-masing aktor berbeda tergantung posisi, kewenangan, dan kepentingan yang dibawa dalam proses politik. Berikut penjelasan rinci mengenai aktor kebijakan beserta poin-poinnya:

1. Birokrasi

Birokrasi adalah struktur administratif yang menjalankan fungsi pemerintahan dan memiliki peran sentral dalam perumusan, implementasi, serta pengawasan kebijakan publik, termasuk kebijakan ekonomi. Birokrat bertindak sebagai penghubung antara pemerintah, politisi, masyarakat, dan kelompok kepentingan, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat politis tetapi juga berbasis teknis dan operasional. Birokrasi berperan strategis karena mampu memengaruhi prioritas kebijakan, prosedur pelaksanaan, serta distribusi sumber daya, sehingga keputusan pemerintah dapat dijalankan secara efektif. Selain itu, birokrasi juga berperan sebagai penjaga stabilitas administrasi publik dengan memastikan regulasi diterapkan secara konsisten dan efisien. Berikut adalah peran dan fungsi birokrasi secara rinci:

a. Perumusan Kebijakan

Perumusan kebijakan merupakan salah satu peran utama birokrasi yang melibatkan analisis data, penyusunan alternatif kebijakan, dan perencanaan strategi untuk mencapai tujuan publik secara efektif, dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan politik dari setiap opsi yang tersedia (Denhardt & Denhardt, 2018). Birokrat berperan kunci dalam memastikan bahwa rancangan kebijakan tidak hanya realistis dan teknis, tetapi juga konsisten dengan regulasi yang berlaku serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat.

Perumusan kebijakan oleh birokrasi mencakup koordinasi antar lembaga, konsultasi dengan pihak-pihak terkait, dan integrasi masukan dari kelompok kepentingan serta politisi untuk menghasilkan kebijakan yang komprehensif dan implementatif.

Proses ini menekankan pentingnya pendekatan berbasis bukti dan evaluasi risiko agar kebijakan yang dihasilkan memiliki akuntabilitas tinggi dan berkontribusi pada efektivitas administrasi publik secara keseluruhan.

b. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah tahap di mana birokrasi menjalankan keputusan yang telah dirumuskan dengan memanfaatkan sumber daya, prosedur, dan mekanisme administrasi untuk memastikan tujuan kebijakan tercapai secara efektif dan efisien (Kettl, 2019). Birokrat berperan dalam mengawasi setiap proses pelaksanaan agar sesuai dengan regulasi, standar teknis, dan pedoman operasional sehingga kebijakan dapat diterapkan secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

Implementasi mencakup koordinasi antar lembaga, pengelolaan hambatan operasional, serta evaluasi awal untuk menilai efektivitas kebijakan terhadap masyarakat. Pendekatan sistematis ini memungkinkan birokrasi menyesuaikan mekanisme pelaksanaan dengan dinamika lapangan, memperkuat akuntabilitas, dan memastikan kebijakan memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan publik.

c. Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan dan evaluasi merupakan peran penting birokrasi dalam memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai tujuan, prosedur, dan regulasi yang telah ditetapkan, serta mampu memberikan hasil yang efektif dan akuntabel bagi publik (Rosenbloom, 2020). Birokrat bertugas mengidentifikasi hambatan, mengukur kinerja program, dan memberikan rekomendasi perbaikan sehingga kebijakan tidak hanya menjadi dokumen formal tetapi berdampak nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional.

Pengawasan dan evaluasi membantu menilai dampak kebijakan terhadap berbagai sektor serta memastikan sumber daya digunakan secara efisien dan transparan. Dengan mekanisme ini, birokrasi dapat menyesuaikan strategi implementasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat

akuntabilitas pemerintah sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik tetap terjaga.

2. Politisi

Politisi adalah aktor kebijakan yang memiliki wewenang formal untuk menetapkan arah, prioritas, dan keputusan dalam proses pembuatan kebijakan publik, termasuk kebijakan ekonomi. Peran politisi sangat strategis karena menentukan isu yang menjadi agenda publik, memobilisasi dukungan legislatif maupun masyarakat, serta memberikan legitimasi terhadap kebijakan yang dihasilkan. Politisi beroperasi dalam konteks politik yang kompleks, di mana kepentingan publik, kelompok kepentingan, dan tekanan elektoral menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan. Selain itu, politisi berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah, masyarakat, dan birokrasi agar kebijakan yang dibuat dapat diterima dan dilaksanakan dengan efektif. Berikut adalah peran dan fungsi politisi secara rinci:

a. Penentuan Agenda Politik

Penentuan agenda politik merupakan peran strategis politisi dalam proses pembuatan kebijakan publik, di mana memutuskan isu mana yang menjadi prioritas pemerintah berdasarkan kepentingan publik, tekanan politik, dan konteks sosial-ekonomi (McNutt, 2019). Politisi menggunakan wewenangnya untuk membahas masalah yang dianggap penting, mengarahkan perhatian media dan publik, serta membentuk persepsi masyarakat terhadap urgensi kebijakan tertentu.

Penentuan agenda politik melibatkan koordinasi dengan birokrasi dan konsultasi dengan kelompok kepentingan untuk memastikan isu yang diprioritaskan realistis dan dapat diimplementasikan. Dengan demikian, politisi tidak hanya menetapkan arah kebijakan, tetapi juga berperan dalam membangun legitimasi sosial dan politik agar kebijakan yang dirancang mendapatkan dukungan luas dan efektif di lapangan.

b. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan merupakan fungsi utama politisi dalam proses pembuatan kebijakan publik, di mana menentukan arah, prioritas, dan alternatif tindakan berdasarkan pertimbangan politik, kepentingan publik, dan konteks sosial-ekonomi yang

ada (Peters, 2018). Politisi memanfaatkan kewenangan legislatif atau eksekutif untuk menetapkan kebijakan yang dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat sekaligus memenuhi tujuan politik dan elektoral.

Pengambilan keputusan melibatkan negosiasi dengan birokrasi, konsultasi dengan kelompok kepentingan, dan kompromi antarpartai atau aktor politik untuk memperoleh dukungan yang cukup agar kebijakan dapat diterapkan secara efektif. Dengan peran ini, politisi tidak hanya menetapkan kebijakan secara formal, tetapi juga memastikan bahwa keputusan yang diambil realistis, dapat diimplementasikan, dan memiliki legitimasi politik serta sosial yang kuat.

c. Negosiasi dan Konsensus

Negosiasi dan konsensus merupakan peran penting politisi dalam proses pembuatan kebijakan publik, di mana berinteraksi dengan berbagai aktor, termasuk birokrasi, kelompok kepentingan, dan partai politik, untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima semua pihak dan mendukung implementasi kebijakan secara efektif (Kingdon, 2018). Proses ini menuntut kemampuan diplomasi, kompromi, dan strategi politik agar kepentingan yang berbeda dapat diseimbangkan tanpa mengorbankan tujuan utama kebijakan.

Negosiasi dan konsensus memungkinkan politisi membangun dukungan sosial dan politik yang luas sehingga kebijakan memperoleh legitimasi publik dan dapat bertahan dalam jangka panjang. Melalui pendekatan ini, politisi tidak hanya berfokus pada keputusan akhir, tetapi juga memastikan proses pengambilan kebijakan inklusif, transparan, dan responsif terhadap dinamika politik serta kebutuhan masyarakat.

3. Kelompok Kepentingan (*Interest Groups*)

Kelompok kepentingan, atau *interest groups*, adalah aktor non-pemerintah yang berperan dalam memengaruhi proses pembuatan kebijakan publik dengan tujuan melindungi atau memajukan kepentingan anggotanya. Kelompok ini dapat berupa asosiasi bisnis, serikat pekerja, organisasi profesi, lembaga masyarakat sipil, atau kelompok advokasi tertentu yang memiliki tujuan spesifik. Perannya sangat penting karena memberikan informasi, analisis, dan tekanan

politik kepada pemerintah dan politisi untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan mempertimbangkan kepentingan tertentu. Kelompok kepentingan bertindak sebagai mediator antara masyarakat atau sektor tertentu dengan birokrasi dan politisi, sehingga proses pembuatan kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan publik. Berikut adalah peran dan fungsi kelompok kepentingan secara rinci:

a. Advokasi dan Lobbying

Advokasi dan lobbying merupakan peran utama kelompok kepentingan dalam memengaruhi proses pembuatan kebijakan publik, di mana ia berupaya mempromosikan kepentingan anggota atau sektor tertentu melalui penyampaian informasi, argumen, dan tekanan politik kepada pembuat keputusan (Berry, 2019). Kelompok kepentingan menggunakan strategi ini untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi kelompok yang diwakili, sekaligus meningkatkan kemungkinan implementasi yang efektif.

Advokasi dan lobbying memungkinkan kelompok kepentingan membangun hubungan jangka panjang dengan politisi, birokrasi, dan pihak terkait lainnya, sehingga dapat berperan dalam proses konsultasi, penyusunan regulasi, dan evaluasi kebijakan. Dengan cara ini, kelompok kepentingan tidak hanya memengaruhi arah kebijakan, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan publik melalui mekanisme partisipasi yang terstruktur.

b. Penyedia Informasi dan Analisis

Penyedia informasi dan analisis merupakan peran penting kelompok kepentingan dalam proses pembuatan kebijakan, di mana ia menyampaikan data, riset, dan evaluasi berbasis bukti kepada politisi dan birokrasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efektif (Smith, 2020). Melalui peran ini, kelompok kepentingan membantu memastikan bahwa kebijakan tidak hanya bersifat normatif tetapi juga berdasarkan fakta dan analisis mendalam terkait dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Penyediaan informasi dan analisis memungkinkan kelompok kepentingan untuk menjadi mitra strategis dalam konsultasi publik, identifikasi isu prioritas, dan penilaian risiko kebijakan,

sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Dengan mekanisme ini, tidak hanya memengaruhi konten kebijakan tetapi juga meningkatkan kualitas perencanaan dan implementasi kebijakan secara keseluruhan.

c. Pengawasan Implementasi Kebijakan

Pengawasan implementasi kebijakan adalah salah satu peran penting kelompok kepentingan, di mana ia memantau pelaksanaan kebijakan untuk memastikan bahwa program dan regulasi dijalankan sesuai dengan tujuan awal serta kepentingan anggota yang diwakili (Baumgartner et al., 2018). Kelompok kepentingan menggunakan mekanisme ini untuk menilai efektivitas kebijakan, mengidentifikasi penyimpangan atau hambatan, dan memberikan masukan atau tekanan agar pelaksanaan tetap akuntabel dan transparan.

Pengawasan implementasi memungkinkan kelompok kepentingan membangun komunikasi dengan birokrasi dan politisi untuk melakukan penyesuaian kebijakan atau intervensi strategis jika ditemukan ketidaksesuaian. Dengan demikian, ia berperan tidak hanya sebagai pengamat tetapi juga sebagai agen kontrol sosial yang memperkuat kualitas, legitimasi, dan keberlanjutan pelaksanaan kebijakan publik.

D. Studi Kasus: Perdebatan Subsidi, Pajak dan Regulasi

1. Studi Kasus: Perdebatan Subsidi, Pajak dan Regulasi Energi Terbarukan di Indonesia

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam transisi energi, di mana pemerintah berupaya mendorong penggunaan energi terbarukan sambil menjaga ketersediaan energi fosil bagi kebutuhan ekonomi. Dalam hal ini, perdebatan muncul antara kebijakan subsidi, pajak, dan regulasi yang diterapkan. Pemerintah sebelumnya memberikan subsidi bahan bakar fosil untuk menjaga daya beli masyarakat, namun subsidi ini dianggap membebani anggaran negara dan memperlambat adopsi energi bersih. Sebagai respons, muncul wacana pengalihan subsidi dari BBM ke energi terbarukan seperti listrik dari PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) dan kendaraan listrik.

Kelompok politisi dan birokrasi memandang pengurangan subsidi BBM dan penerapan pajak karbon sebagai instrumen penting untuk mengubah perilaku konsumen dan mendorong investasi di sektor energi bersih. Di sisi lain, kelompok kepentingan industri energi fosil menentang kebijakan ini karena khawatir meningkatkan biaya produksi dan menurunkan daya saing perusahaan. Perdebatan ini juga melibatkan regulasi pemerintah terkait harga energi, izin pembangunan proyek energi baru, dan standar emisi yang ketat, yang menjadi titik pertemuan kepentingan antara pemerintah, industri, dan masyarakat.

Contohnya, pada 2023 pemerintah mengajukan kebijakan pajak karbon sebagai bagian dari upaya pengurangan emisi gas rumah kaca, sementara kelompok masyarakat menuntut agar hasil pajak tersebut digunakan untuk subsidi energi bersih agar tidak membebani masyarakat miskin. Di sisi lain, industri menekankan perlunya regulasi yang jelas agar investasi energi terbarukan dapat berjalan dengan kepastian hukum. Kasus ini menunjukkan kompleksitas pengambilan keputusan kebijakan ekonomi, di mana subsidi, pajak, dan regulasi saling terkait dan menimbulkan perdebatan antara berbagai aktor dengan kepentingan berbeda.

E. Study Case

1. Studi Kasus: Kebijakan Subsidi Energi di Indonesia

a. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki sumber daya energi yang melimpah, terutama minyak bumi dan gas alam. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) selama puluhan tahun dengan tujuan menjaga daya beli masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah, dan mendorong stabilitas sosial-politik. Namun, kebijakan ini memunculkan dilema ekonomi-politik karena subsidi cenderung lebih dinikmati oleh kelompok kaya yang mengonsumsi BBM lebih banyak, sementara beban anggaran negara membengkak dan mengurangi ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik lainnya.

b. Aktor dan Kepentingan

Kebijakan subsidi energi melibatkan berbagai aktor politik dan ekonomi: pemerintah pusat, partai politik, elite birokrasi,

perusahaan energi, serta masyarakat. Partai politik dan pejabat sering menggunakan subsidi sebagai alat populer untuk memenangkan dukungan pemilih. Perusahaan energi, baik BUMN maupun swasta, memiliki kepentingan dalam pengelolaan produksi dan distribusi BBM. Masyarakat menuntut harga BBM yang terjangkau, tetapi kelompok pengusaha lebih terdorong oleh kepastian investasi dan keuntungan jangka panjang.

c. Dinamika Ekonomi-Politik

Kebijakan subsidi BBM mencerminkan hubungan antara politik dan ekonomi dalam pengambilan keputusan publik. Tekanan politik dari masyarakat untuk menurunkan harga BBM sering berbenturan dengan kepentingan ekonomi jangka panjang, seperti alokasi anggaran untuk pembangunan atau pengurangan defisit fiskal. Reformasi subsidi pada tahun 2015, yang menaikkan harga BBM bersubsidi dan memperluas program bantuan langsung tunai (BLT), menimbulkan pro-kontra: pemerintah menekankan efisiensi dan pemerataan, sementara sebagian masyarakat menilai kenaikan harga memberatkan kebutuhan sehari-hari.

d. Analisis

Kasus ini menunjukkan bahwa kebijakan publik di bidang ekonomi-politik tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi, tetapi juga oleh kekuatan politik, tekanan sosial, dan strategi kepentingan kelompok. Kebijakan yang dirancang untuk kesejahteraan sosial dapat menghadapi resistensi jika terdapat distribusi manfaat yang timpang atau jika kepentingan elite lebih dominan. Reformasi kebijakan subsidi BBM juga memperlihatkan pentingnya integrasi kebijakan ekonomi dengan mekanisme politik yang transparan, partisipatif, dan berbasis data.

e. Kesimpulan

Kebijakan publik dalam konteks ekonomi-politik merupakan hasil kompromi antara tujuan ekonomi, kepentingan politik, dan tuntutan sosial. Kebijakan subsidi BBM di Indonesia menjadi contoh nyata bagaimana keputusan publik bisa dipengaruhi oleh berbagai aktor dengan kepentingan berbeda, dan bagaimana reformasi kebijakan memerlukan strategi komunikasi, legitimasi

politik, dan keadilan distribusi manfaat untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang.

BAB XI

EKONOMI POLITIK KEMISKINAN DAN KEBIJAKAN

Ekonomi politik kemiskinan dan kebijakan membahas hubungan antara struktur politik, kekuasaan ekonomi, dan distribusi sumber daya dalam masyarakat. Analisis ini membahas bagaimana kebijakan publik dan keputusan pemerintah dapat memengaruhi tingkat kemiskinan serta kesenjangan sosial secara signifikan. Tabel 1 dibawah ini menyajikan tingkat kemiskinan nasional di Indonesia dalam 5 tahun terakhir.

Tabel 3. Tingkat Kemiskinan Nasional Indonesia (2020–2025)

Tahun / Periode	Tingkat Kemiskinan (%)	Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)
Sep 2020	10,19%	27,55 juta
Mar 2021	10,14%	27,54 juta
Sep 2021	9,71%	26,5 juta
Mar 2022	9,54%	26,16 juta
Sep 2022	9,57%	26,36 juta
Mar 2023	9,36%	25,9 juta
Mar 2024	9,03%	25,22 juta
Sep 2024	8,57%	24,06 juta
Mar 2025	8,47%	23,85 juta

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa tingkat kemiskinan nasional cenderung menurun setiap tahun sejak 2020. Pada Maret 2025, kemiskinan mencapai 8,47%, atau sekitar 23,85 juta orang yang merupakan angka terendah dalam periode ini. Hal ini berarti bahwa Indonesia menunjukkan tren penurunan kemiskinan yang konsisten pascapandemi COVID-19. Penurunan ini mencerminkan perbaikan kondisi kesejahteraan secara umum, meskipun masih ada tantangan

struktural terutama di daerah dengan angka kemiskinan yang relatif tinggi.

A. Definisi Kemiskinan Struktural dan Politis

Kemiskinan merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya terkait dengan keterbatasan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial dan dinamika politik. Pemahaman mengenai kemiskinan struktural dan politis penting untuk menganalisis bagaimana ketimpangan sistemik dan ketidakmampuan berpartisipasi dalam proses politik dapat memperkuat siklus kemiskinan.

1. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural merujuk pada kondisi kemiskinan yang muncul akibat adanya ketimpangan sistemik dalam masyarakat dan ekonomi. Hal ini biasanya terkait dengan struktur sosial, ekonomi, dan politik yang membatasi akses individu terhadap sumber daya penting, seperti pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Ciri-ciri kemiskinan struktural antara lain:

a. Keterbatasan Akses terhadap Sumber Daya

Keterbatasan akses terhadap sumber daya merupakan ciri utama kemiskinan struktural karena individu atau kelompok miskin sering kali tidak memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Kondisi ini mengakibatkannya tertinggal secara sosial dan ekonomi, sehingga sulit untuk keluar dari lingkaran kemiskinan meskipun ada upaya pribadi untuk memperbaiki kondisi hidup. Akses yang terbatas ini juga memperkuat kesenjangan antar kelompok dalam masyarakat, karena kelompok yang lebih beruntung dapat memanfaatkan sumber daya secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraannya, sehingga kemiskinan menjadi masalah sistemik yang membutuhkan perhatian kebijakan publik (Smith, 2019).

Keterbatasan akses terhadap sumber daya memengaruhi kemampuan masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi dan politik secara efektif, sehingga suaranya sering terabaikan dalam pengambilan keputusan publik. Ketidakmampuan mengakses informasi dan teknologi

terbaru semakin memperkuat posisi marginal dalam struktur sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, intervensi kebijakan yang adil dan inklusif menjadi kunci untuk membuka akses sumber daya bagi semua lapisan masyarakat dan mengurangi kemiskinan struktural secara berkelanjutan.

b. Ketergantungan pada Sistem Ekonomi yang Tidak Adil

Ketergantungan pada sistem ekonomi yang tidak adil memperparah kemiskinan struktural karena individu atau kelompok miskin terjebak dalam kerangka ekonomi yang mendistorsi distribusi kekayaan dan kesempatan. Sistem kapitalis yang berakar pada akumulasi modal dan surplus nilai sering kali memusatkan kekayaan pada segelintir pemilik modal sementara pekerja (termasuk yang miskin) menerima imbalan yang minimal meskipun menjadi sumber utama produksi, sehingga struktur ekonomi itu secara inheren mengeksploitasi dan mendiskriminasi (Firdaus, 2025). Ketidakadilan ini membuat kemiskinan tidak hanya soal pendapatan rendah, tetapi juga soal ketidakbebasan dalam mengakses kekayaan, pekerjaan layak, dan pengaruh ekonomi sehingga kemiskinan jadi sistemik dan sulit diputus hanya dengan upaya individu.

Pada konteks ini, kemiskinan tidak muncul karena kelemahan individu semata, melainkan karena struktur ekonomi yang mempertahankan ketidaksetaraan, di mana kebijakan ekonomi, distribusi modal, dan relasi kerja memperkuat posisi orang miskin secara sistemik. Akibatnya, meskipun ada pertumbuhan ekonomi, tanpa redistribusi yang adil dan reformasi struktural, kelompok miskin akan terus terperangkap dalam kemiskinan karena tidak memiliki akses terhadap kekayaan, kekuasaan, dan kontrol atas alat produksi.

c. Ketimpangan Sosial

Ketimpangan sosial merupakan ciri utama kemiskinan struktural karena menciptakan jarak yang signifikan antara kelompok masyarakat yang memiliki akses terhadap sumber daya dan yang tidak. Ketika kesempatan untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan tidak merata, kelompok miskin menjadi semakin terpinggirkan, sehingga posisinya dalam masyarakat sulit diperbaiki hanya dengan upaya individu (Anderson, 2020). Ketimpangan ini tidak hanya berdampak

pada pendapatan, tetapi juga pada kualitas hidup, peluang sosial, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan, sehingga kemiskinan menjadi fenomena yang terstruktur dan berulang secara lintas generasi.

Pada konteks ketimpangan sosial, perbedaan posisi ekonomi dan sosial sering diperkuat oleh norma dan kebijakan yang mendukung kelompok tertentu sementara mengabaikan kebutuhan kelompok marginal. Hal ini menyebabkan akses terhadap kekayaan, pengaruh politik, dan layanan dasar menjadi terbatas bagi masyarakat miskin, memperkuat siklus kemiskinan. Oleh karena itu, pengurangan kemiskinan struktural memerlukan intervensi yang menitikberatkan pada keadilan sosial dan pemerataan akses terhadap sumber daya untuk semua lapisan masyarakat.

2. Kemiskinan Politis

Kemiskinan politis terjadi ketika individu atau kelompok tidak memiliki kemampuan atau kesempatan untuk memengaruhi keputusan politik yang berdampak pada kehidupannya. Hal ini membuatnya tidak mampu memperjuangkan kebijakan yang dapat mengurangi kemiskinan atau meningkatkan kesejahteraan. Ciri-ciri kemiskinan politis antara lain:

a. Ketidakikutsertaan dalam Proses Politik

Ketidakikutsertaan dalam proses politik dapat menjadi salah satu tanda khas dari kemiskinan politis, karena individu atau kelompok miskin sering tidak dilibatkan secara bermakna dalam ruang pengambilan keputusan politik misalnya tidak memilih, tidak aktif di organisasi masyarakat atau politik, atau tidak diikutsertakan dalam proses kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga soal kekuasaan dan representasi politik. Penelitian menunjukkan bahwa “ketidaksetaraan pendapatan dan kondisi sosial ekonomi yang buruk secara signifikan menurunkan kemungkinan warga miskin untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, bergabung partai politik, atau melakukan aksi kolektif,” yang kemudian memperlebar jurang antara elite dan warga miskin dalam hal pengaruh politik (Marx et al., 2018).

Akibat dari ketidakikutsertaan ini, aspirasi dan kebutuhan kelompok miskin jarang muncul dalam kebijakan publik, sehingga kebijakan sulit mencerminkan interes. Kekurangan akses ke pendidikan politik dan informasi, serta beban kebutuhan hidup sehari-hari, membuatnya lebih terfokus pada bertahan hidup daripada aktif secara politik. Oleh karena itu, kemiskinan politis bukan sekadar soal suara yang hilang, tetapi representasi dan peluang untuk mengubah struktur sosial politik tetap tertutup baginya.

b. Kurangnya Representasi dalam Pengambilan Keputusan

Kurangnya representasi dalam pengambilan keputusan merupakan ciri utama kemiskinan politis karena kelompok miskin sering tidak memiliki wakil yang mampu menyuarakan kepentingannya dalam lembaga legislatif, eksekutif, atau forum publik lainnya. Ketika suaranya tidak diakomodasi dalam perumusan kebijakan, kebutuhan dan aspirasinya cenderung diabaikan, sehingga kebijakan publik lebih menguntungkan kelompok elite atau yang memiliki akses terhadap kekuasaan (Rodriguez, 2021). Kondisi ini memperkuat ketidaksetaraan struktural dan politis karena ketidakmampuan untuk memengaruhi keputusan politik memperpanjang siklus kemiskinan lintas generasi.

Kurangnya representasi juga berdampak pada legitimasi kebijakan publik, karena masyarakat miskin merasa terpinggirkan dan kurang memiliki keterikatan dengan proses politik. Ketidakmampuan untuk mengekspresikan kepentingannya dalam pengambilan keputusan menimbulkan alienasi politik, mengurangi partisipasi, dan melemahkan demokrasi substantif. Oleh karena itu, penguatan representasi politik bagi kelompok miskin menjadi strategi penting untuk mengurangi kemiskinan politis dan menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dan adil.

c. Rentan terhadap Kebijakan Diskriminatif

Kelompok miskin sering rentan terhadap kebijakan diskriminatif karena posisinya yang lemah dalam struktur politik membuat suara dan kepentingannya mudah diabaikan atau dimarginalkan. Kebijakan yang dibuat tanpa mempertimbangkan kebutuhan kelompok miskin dapat

memperkuat ketidakadilan sosial dan ekonomi, sehingga semakin sulit mengakses sumber daya, layanan publik, dan peluang ekonomi yang setara (Hernandez, 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan politis bukan hanya soal keterbatasan ekonomi, tetapi juga soal ketidakmampuan untuk melindungi diri dari keputusan politik yang merugikan.

Kerentanan terhadap kebijakan diskriminatif juga memperkuat siklus kemiskinan, karena kelompok miskin tidak memiliki mekanisme untuk mempengaruhi atau menolak kebijakan yang merugikannya. Tanpa representasi yang memadai, tidak mampu menuntut hak-hak dasar atau perubahan kebijakan yang adil. Oleh karena itu, perlindungan hukum, inklusi politik, dan partisipasi aktif menjadi kunci untuk mengurangi kemiskinan politis dan mencegah eksklusi sistemik bagi kelompok rentan.

B. Ketimpangan Akses terhadap Sumber Daya

Ketimpangan akses terhadap sumber daya merujuk pada situasi di mana individu, kelompok, atau wilayah tertentu tidak memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan sumber daya penting yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Sumber daya ini dapat berupa pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, informasi, teknologi, atau modal ekonomi. Ketimpangan akses sering muncul akibat faktor struktural, sosial, ekonomi, dan politik yang tidak merata. Beberapa bentuk nyata ketimpangan akses terhadap sumber daya yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Keterbatasan Akses Pendidikan

Keterbatasan akses pendidikan sebagai bentuk nyata ketimpangan akses terhadap sumber daya dapat dilihat dari bagaimana latar belakang sosial ekonomi dan geografis membatasi kesempatan seseorang untuk memperoleh pendidikan yang layak. Sebagai contoh, dalam studi pada wilayah Kalimantan Timur ditemukan bahwa meskipun sebagian besar anak usia sekolah dasar dapat mengakses pendidikan, akses menuju pendidikan menengah tetap tidak merata terutama dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga dan tempat tinggal (Ayuningtyas, 2021).

Akibatnya, anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah atau yang tinggal di lokasi terpencil menghadapi hambatan seperti biaya sekolah, transportasi, atau kurangnya sarana prasarana pendidikan sehingga lebih mungkin terputus sekolah atau hanya mengenyam pendidikan dasar. Ketimpangan tersebut memperburuk kesenjangan sosial, karena yang tidak mendapat pendidikan memadai cenderung memiliki peluang kerja dan pendapatan lebih rendah. Karena pendidikan adalah salah satu instrumen utama mobilitas sosial, ketidakmerataan akses ini menyebabkan kemiskinan dan ketidaksetaraan dapat diwariskan lintas generasi.

2. Ketidakmerataan Akses Pekerjaan dan Penghasilan

Ketidakmerataan akses terhadap pekerjaan dan penghasilan menjadi bentuk nyata dari ketimpangan akses terhadap sumber daya ketika sebagian besar masyarakat hanya memperoleh pekerjaan yang tidak layak dan penghasilan rendah khususnya yang bekerja di sektor informal. Di banyak kasus, pekerja di sektor informal mengalami ketidakstabilan pendapatan, kurangnya jam kerja penuh, serta minimnya perlindungan sosial, sehingga pendapatannya tidak mencukupi untuk kebutuhan dasar meskipun bekerja keras. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses terhadap pekerjaan formal dan penghasilan layak bukan tersedia secara merata bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga kelompok tertentu terus tertinggal secara ekonomi (Hotimah et al., 2025)

Situasi tersebut berimplikasi pada semakin besar peluang kemiskinan bagi yang tidak mampu mendapatkan pekerjaan stabil dan bergaji cukup, karena tanpa pekerjaan formal dengan jaminan upah, jam kerja tetap, dan perlindungan sosial seseorang sulit membangun kehidupan yang layak dan aman. Bersamaan dengan itu, ketidakpastian pekerjaan serta fluktuasi penghasilan membuatnya rentan terhadap krisis ekonomi atau perubahan pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, ketidakmerataan akses pekerjaan dan penghasilan menjadi komponen krusial dari ketimpangan struktural yang memerlukan perhatian kebijakan untuk menjamin kesempatan kerja dan penghasilan adil bagi semua kelompok masyarakat.

3. Keterbatasan Akses Layanan Kesehatan

Keterbatasan akses layanan kesehatan sebagai bentuk nyata ketimpangan akses terhadap sumber daya terlihat dari kesulitan masyarakat miskin atau yang tinggal di daerah terpencil untuk memperoleh pelayanan medis yang memadai, baik berupa fasilitas kesehatan, tenaga medis, maupun obat-obatan. Hal ini mengakibatkan tingginya risiko penyakit, angka kematian ibu dan anak yang lebih besar, serta rendahnya kualitas hidup masyarakat yang terdampak, meskipun tinggal di wilayah dengan fasilitas kesehatan yang secara keseluruhan tersedia (Sari, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan dalam akses layanan kesehatan bukan hanya persoalan individu, tetapi juga mencerminkan ketidakadilan sistemik dalam distribusi sumber daya vital.

Keterbatasan akses layanan kesehatan berdampak pada kemampuan masyarakat untuk menjaga produktivitas ekonomi dan sosial, karena kesehatan yang buruk membatasi kapasitas bekerja dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Kelompok yang tidak memiliki akses memadai terhadap layanan kesehatan juga cenderung menghadapi biaya pengobatan yang lebih tinggi karena keterlambatan dalam penanganan penyakit. Oleh karena itu, pemerataan akses layanan kesehatan menjadi salah satu strategi penting untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

4. Kesenjangan Akses terhadap Teknologi dan Informasi

Kesenjangan akses terhadap teknologi dan informasi merupakan bentuk nyata ketimpangan akses terhadap sumber daya, karena individu atau kelompok yang tidak memiliki perangkat digital, koneksi internet, atau keterampilan teknologi tertinggal dalam memperoleh informasi, pendidikan, dan peluang ekonomi. Hal ini menyebabkannya sulit bersaing dalam dunia kerja modern, mengakses layanan publik berbasis digital, atau memanfaatkan peluang bisnis dan inovasi, sehingga posisi sosial ekonomi semakin terpinggirkan (Prasetyo, 2021). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan digital tidak hanya berdampak pada kemampuan berkomunikasi, tetapi juga pada peluang partisipasi ekonomi, sosial, dan politik yang adil.

Kesenjangan akses terhadap teknologi dan informasi memperkuat siklus ketimpangan lintas generasi, karena anak-anak dari keluarga yang tidak memiliki akses digital terbatas dalam pendidikan

dan pengembangan keterampilan, cenderung kehilangan kesempatan untuk belajar literasi digital, keterampilan teknis, dan informasi yang dibutuhkan untuk mempersiapkan karier atau usaha di masa depan. Oleh karena itu, pemerataan akses teknologi dan informasi menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketimpangan sosial, meningkatkan produktivitas, dan membuka peluang bagi semua lapisan masyarakat.

C. Kemiskinan Sebagai Hasil Relasi Kekuasaan dan Distribusi Ekonomi

Kemiskinan bukan sekadar kekurangan materi atau pendapatan, tetapi juga produk dari struktur sosial, ekonomi, dan politik yang timpang. Relasi kekuasaan menentukan siapa yang memiliki kontrol terhadap sumber daya dan siapa yang tertinggal, sehingga kelompok miskin sering berada pada posisi subordinat. Kelompok elite mampu memaksimalkan keuntungan dari sistem ekonomi, sementara kelompok yang lemah secara struktural kesulitan memperoleh kesempatan untuk keluar dari kemiskinan. Faktor-faktor yang membentuk kemiskinan melalui relasi kekuasaan dan distribusi ekonomi:

1. Faktor Struktural

Faktor struktural sebagai penyebab kemiskinan melalui relasi kekuasaan dan distribusi ekonomi terlihat dari bagaimana institusi sosial, ekonomi, dan politik membentuk ketimpangan akses terhadap sumber daya. Sistem ekonomi yang tidak merata, kontrol elite atas tanah, modal, dan fasilitas produksi, serta regulasi yang berpihak pada kelompok berkuasa menempatkan sebagian besar masyarakat pada posisi subordinat, sehingga peluangnya untuk keluar dari kemiskinan sangat terbatas (Rizky, 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan bukan hanya akibat kurangnya kemampuan individu, tetapi juga hasil dari struktur yang menahan akses terhadap kesempatan dan sumber daya penting.

Faktor struktural memperkuat siklus kemiskinan karena kelompok miskin sulit bersaing dalam memperoleh pekerjaan yang layak, pendidikan berkualitas, maupun layanan kesehatan memadai. Ketergantungannya pada sistem yang timpang membuat kelompok ini rentan terhadap fluktuasi ekonomi, krisis, dan kebijakan yang diskriminatif, sehingga kemiskinan menjadi kondisi yang diwariskan

lintas generasi. Oleh karena itu, reformasi struktural menjadi langkah penting untuk menciptakan pemerataan kesempatan dan mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan.

2. Faktor Politik

Faktor politik sebagai penyebab kemiskinan melalui relasi kekuasaan dan distribusi ekonomi muncul ketika kelompok miskin tidak memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan politik sehingga kebijakan publik dan ekonomi cenderung menguntungkan kelompok elite. Ketidakmerataan partisipasi politik ini menyebabkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat miskin jarang diakomodasi dalam perumusan kebijakan, termasuk dalam hal akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan layanan dasar (Handayani, 2019). Akibatnya, kelompok miskin tetap berada pada posisi subordinat dan sulit keluar dari siklus kemiskinan karena tidak memiliki kontrol atas kebijakan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari.

Dominasi politik oleh kelompok berkuasa memperkuat ketimpangan ekonomi karena kebijakan fiskal, subsidi, atau regulasi sering dirancang untuk mempertahankan status quo dan keuntungan kelompok elite. Kelompok miskin yang tidak memiliki akses terhadap kekuasaan politik cenderung menerima manfaat minimal dari pembangunan, sehingga kesenjangan sosial dan ekonomi semakin melebar. Oleh karena itu, pemerataan akses politik dan pemberdayaan masyarakat miskin menjadi strategi penting untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan keadilan sosial.

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi berperan sangat besar dalam membentuk kemiskinan karena distribusi pendapatan dan kesempatan ekonomi tidak tersebar secara merata di masyarakat. Dalam banyak daerah, pertumbuhan ekonomi dan kenaikan output tidak otomatis diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan bagi seluruh lapisan akibat disparitas dalam produktivitas tenaga kerja, investasi, dan distribusi modal yang cenderung terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sedangkan kelompok lemah tetap terpinggirkan (Prasetyo & Pangestuty, 2023). Akibatnya, meskipun perekonomian nasional atau regional tumbuh, kesenjangan pendapatan dan kemiskinan bisa tetap bertahan atau bahkan melebar.

Ketimpangan dalam akses terhadap pekerjaan layak, upah minimum, dan peluang ekonomi formal menyebabkan sebagian masyarakat hanya memperoleh pekerjaan informal dengan pendapatan rendah dan tidak stabil. Ketidakadilan dalam struktur ekonomi membuat sebagian besar manfaat ekonomi dinikmati oleh segelintir elite pemilik modal atau perusahaan, sedangkan pekerja atau kelompok marginal sulit memperoleh bagian yang proporsional dari hasil produksi. Oleh karena itu, kemiskinan akibat faktor ekonomi bukan semata hasil dari kegagalan individu, melainkan manifestasi dari distribusi kekayaan dan kesempatan yang timpang dalam sistem ekonomi yang memerlukan intervensi struktural untuk menjamin pemerataan akses terhadap kerja dan pendapatan.

4. Faktor Sosial

Faktor sosial menjadi penyebab kemiskinan melalui relasi kekuasaan dan distribusi ekonomi ketika jaringan sosial, status, dan akses terhadap layanan dasar terbatas bagi kelompok miskin, sehingga posisinya dalam masyarakat semakin subordinat. Terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan informasi sosial membuat kelompok miskin kesulitan meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan peluang ekonomi, sehingga kesenjangan sosial dan ekonomi terus berlanjut (Wijayanti, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya merupakan masalah ekonomi, tetapi juga merupakan konsekuensi dari struktur sosial yang membatasi kemampuan kelompok tertentu untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari sistem ekonomi secara adil.

Diskriminasi sosial, stigma, dan posisi marginal dalam masyarakat memperkuat siklus kemiskinan karena kelompok miskin sering diabaikan dalam pembangunan dan kebijakan publik. Ketidakmampuan untuk membangun jaringan sosial yang kuat atau mengakses sumber daya melalui koneksi sosial membuatnya rentan terhadap fluktuasi ekonomi dan kebijakan yang diskriminatif. Oleh karena itu, intervensi sosial yang meningkatkan akses terhadap layanan dasar, pendidikan, dan peluang jaringan sosial menjadi langkah penting untuk mengurangi kemiskinan struktural yang diakibatkan oleh faktor sosial.

D. Studi Kasus Kemiskinan di Indonesia (Desa, Kota dan Daerah Tertinggal)

1. Studi Kasus Kemiskinan di Indonesia: Desa, Kota dan Daerah Tertinggal

a. Kemiskinan di Desa (Daerah Pedesaan)

Di banyak desa di Indonesia, kemiskinan masih tinggi akibat keterbatasan akses terhadap tanah, modal usaha, dan fasilitas produksi. Misalnya, di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, sebagian besar masyarakat tergantung pada pertanian subsisten dengan produktivitas rendah dan minimnya akses ke pasar, sehingga pendapatannya tidak mencukupi untuk kebutuhan dasar. Selain itu, terbatasnya akses pendidikan dan kesehatan memperkuat siklus kemiskinan, membuat anak-anak desa sulit keluar dari keterbatasan ekonomi orang tua.

b. Kemiskinan di Kota (Daerah Perkotaan)

Di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, kemiskinan tidak hanya terkait kekurangan materi, tetapi juga muncul dalam bentuk kemiskinan perkotaan yang sering terlihat pada pemukiman padat, informal, dan kumuh. Pekerja sektor informal seperti pedagang kaki lima atau buruh harian lepas mengalami pendapatan tidak tetap dan terbatasnya akses jaminan sosial, sehingga rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Walaupun berada di pusat ekonomi, kelompok ini sulit memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai, memperkuat ketimpangan sosial di perkotaan.

c. Kemiskinan di Daerah Tertinggal

Daerah tertinggal seperti Papua, Maluku Utara, atau pedalaman Kalimantan menghadapi kemiskinan struktural yang kompleks akibat kombinasi faktor geografis, ekonomi, dan sosial. Infrastruktur minim, akses transportasi terbatas, dan layanan dasar seperti listrik, air bersih, sekolah, dan rumah sakit sulit dijangkau. Hal ini menyebabkan masyarakat di daerah tertinggal mengalami kemiskinan kronis, kesulitan mengakses pasar, pendidikan, dan pekerjaan, sehingga ketimpangan dengan daerah maju semakin melebar.

d. Kesimpulan

Kemiskinan di Indonesia memiliki karakteristik berbeda-beda tergantung konteks wilayahnya. Di desa, keterbatasan sumber daya dan akses pendidikan menjadi masalah utama; di kota, kemiskinan lebih terkait ketidakstabilan pekerjaan sektor informal dan akses layanan sosial; sedangkan di daerah tertinggal, kombinasi faktor geografis, infrastruktur, dan layanan dasar yang terbatas memperkuat kemiskinan struktural. Penanganan kemiskinan harus disesuaikan dengan konteks wilayah, dengan fokus pada peningkatan akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta pembangunan infrastruktur yang merata.

E. Peran Negara, Pasar dan Elit dalam Reproduksi Kemiskinan

Kemiskinan tidak muncul secara alami, melainkan sering direproduksi melalui interaksi antara kekuasaan politik, mekanisme pasar, dan kontrol sumber daya oleh elit. Peran negara, pasar, dan elit dalam hal ini saling terkait, membentuk struktur sosial-ekonomi yang menempatkan sebagian masyarakat pada posisi subordinat dan membatasi peluang untuk keluar dari kemiskinan. Pemahaman tentang reproduksi kemiskinan penting untuk melihat bagaimana kebijakan, distribusi kekayaan, dan struktur sosial dapat mempertahankan ketimpangan lintas generasi.

1. Peran Negara

Negara memiliki peran strategis dalam menentukan distribusi sumber daya serta akses layanan publik, dan keputusan kebijakan serta alokasi anggaran pemerintah sering kali memengaruhi apakah kemiskinan dapat berkurang atau justru direproduksi. Misalnya, meskipun adanya pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, atau bantuan sosial, jika kebijakan tersebut tidak tepat sasaran, kurang terintegrasi, atau tidak menjangkau kelompok marginal, kemiskinan bisa tetap bertahan bahkan bertahan secara struktural (Arliansyah *et al.*, 2024). Ini menunjukkan bahwa kemiskinan bukan hanya persoalan kemiskinan individu, tetapi juga diproduksi dan dipertahankan lewat kebijakan negara.

Kegagalan negara dalam menjalankan fungsi redistribusi dan penyediaan layanan dasar dengan adil dapat memperkuat kesenjangan, karena masyarakat miskin tetap tertinggal dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan formal, dan perlindungan sosial. Ketergantungannya pada kebijakan pemerintah membuatnya rentan ketika regulasi atau program berubah, dan tanpa mekanisme inklusif, siklus kemiskinan sulit diputus. Oleh karena itu, intervensi negara harus bersifat menyeluruh, responsif, dan terarah agar tidak justru memperkuat kemiskinan struktural.

2. Peran Pasar

Pasar berperan penting dalam reproduksi kemiskinan melalui mekanisme distribusi ekonomi yang tidak merata, di mana kelompok miskin sering memiliki akses terbatas terhadap modal, teknologi, dan informasi yang dibutuhkan untuk berpartisipasi secara produktif. Ketidakseimbangan kekuatan pasar menyebabkan keuntungan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh kelompok berkuasa atau pemilik modal, sementara masyarakat miskin tetap berada di posisi subordinat dan bergantung pada pekerjaan informal dengan pendapatan rendah (Saputra, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan bukan semata akibat kurangnya kemampuan individu, tetapi juga manifestasi dari mekanisme pasar yang memperkuat ketimpangan sosial dan ekonomi.

Dominasi pasar oleh aktor ekonomi tertentu membuat kelompok miskin lebih rentan terhadap fluktuasi harga, pengangguran, dan perubahan regulasi yang tidak berpihak padanya. Ketidakadilan dalam alokasi sumber daya dan kesempatan ekonomi memperkuat siklus kemiskinan, karena masyarakat miskin sulit meningkatkan produktivitas atau mendapatkan akses ke jaringan bisnis yang menguntungkan. Oleh karena itu, intervensi regulasi pasar yang adil dan inklusif menjadi kunci untuk mengurangi reproduksi kemiskinan dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih merata.

3. Peran Elit

Elit politik dan ekonomi memiliki peran signifikan dalam reproduksi kemiskinan karena kemampuan untuk mengontrol kebijakan, sumber daya, dan peluang ekonomi sehingga kelompok miskin tetap berada pada posisi subordinat. Dominasi elit atas tanah,

modal, jaringan bisnis, dan posisi politik memungkinkan mempertahankan kekayaan dan kekuasaan, sementara masyarakat miskin sulit memperoleh akses yang sama terhadap peluang ekonomi dan perlindungan sosial (Hidayat, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan individu, tetapi juga oleh struktur kekuasaan yang menempatkan sebagian masyarakat pada posisi yang kurang menguntungkan.

Pengaruh elit dalam pembuatan kebijakan dan alokasi sumber daya sering menghasilkan regulasi dan praktik ekonomi yang menguntungkan kelompok tertentu, sementara kelompok marginal tetap terpinggirkan. Siklus kemiskinan pun diperkuat karena generasi baru dari kelompok miskin mewarisi posisi subordinat dan kesulitan memperoleh akses terhadap pendidikan, pekerjaan, atau modal yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, pengurangan dominasi elit dalam distribusi sumber daya dan peningkatan mekanisme inklusif menjadi langkah penting untuk memutus siklus kemiskinan struktural.

F. Study Case

1. Studi Kasus: Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Konteks Ekonomi Politik Kemiskinan di Indonesia

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu kebijakan sosial unggulan pemerintah Indonesia yang bertujuan mengurangi kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin. Secara ekonomi politik, implementasi PKH menunjukkan interaksi antara negara, pasar, dan elit dalam reproduksi kemiskinan. Negara berperan sebagai penyedia bantuan langsung, pasar memengaruhi peluang ekonomi keluarga miskin untuk meningkatkan pendapatan, sementara elit politik memiliki pengaruh terhadap alokasi anggaran dan penentuan prioritas wilayah penerima bantuan.

Di beberapa daerah, bantuan PKH berhasil meningkatkan akses pendidikan anak-anak miskin, menurunkan angka putus sekolah, dan mendorong akses layanan kesehatan. Namun, dalam praktiknya, distribusi bantuan masih terkendala masalah birokrasi, kurang tepat sasaran, dan ketergantungan keluarga miskin pada bantuan jangka pendek. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah perlu dikombinasikan dengan strategi pemberdayaan ekonomi agar

masyarakat miskin tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi juga memiliki kemampuan produktif untuk keluar dari kemiskinan struktural.

Dari perspektif ekonomi politik, PKH membahas pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme partisipatif dalam perumusan kebijakan. Tanpa pengawasan yang baik, bantuan dapat dimanfaatkan sebagai alat politik atau menjadi tidak efektif dalam memutus siklus kemiskinan. Studi kasus ini menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan memerlukan pendekatan yang menyeluruh, termasuk reformasi struktural, regulasi pasar yang adil, dan pemberdayaan masyarakat sebagai penerima manfaat.

2. Kesimpulan

PKH merupakan contoh nyata bagaimana kebijakan sosial berinteraksi dengan struktur ekonomi dan politik di Indonesia. Program ini menunjukkan potensi kebijakan negara dalam mengurangi kemiskinan, tetapi keberhasilannya bergantung pada implementasi yang tepat, dukungan ekonomi lokal, dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan.

BAB XII

EKONOMI POLITIK KEBIJAKAN PERDAGANGAN DAN INDUSTRI

Ekonomi politik kebijakan perdagangan dan industri merupakan kajian yang membahas hubungan antara kekuatan politik dan keputusan ekonomi yang mempengaruhi perdagangan serta perkembangan sektor industri. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah seringkali menentukan arah investasi, proteksi pasar domestik, dan daya saing produk nasional di pasar global.

A. Politik Industri Nasional

Politik industri nasional adalah strategi pemerintah untuk mengarahkan, membina, dan memperkuat sektor industri dalam negeri agar mampu bersaing secara efektif di pasar domestik maupun global. Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas, mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing produk nasional. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah menggunakan berbagai instrumen kebijakan yang menjadi alat utama dalam penerapan politik industri, sehingga setiap langkah bisa terukur dan terarah. Beberapa instrumen kebijakan utama dalam politik industri nasional antara lain:

1. Perlindungan Industri Domestik

Perlindungan industri domestik merupakan salah satu instrumen kebijakan utama dalam politik industri nasional yang digunakan pemerintah untuk menjaga keberlangsungan dan daya saing industri dalam negeri terhadap tekanan persaingan global. Melalui kebijakan tarif impor, kuota, serta subsidi, pemerintah berupaya menciptakan kondisi pasar yang kondusif bagi pelaku industri lokal sehingga memiliki ruang untuk tumbuh, berinovasi, dan meningkatkan

produktivitas tanpa terganggu oleh dominasi produk impor yang lebih murah atau berskala besar.

Perlindungan industri domestik juga berperan dalam mendorong pengembangan industri strategis yang memiliki nilai tambah tinggi, sehingga dapat memperkuat basis ekonomi nasional dan meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Dukungan berupa kebijakan fiskal, regulasi, dan fasilitas teknologi yang diarahkan secara tepat sasaran akan mempermudah adaptasi industri lokal terhadap dinamika pasar global serta meningkatkan kemampuan untuk bersaing secara berkelanjutan (Setyawan, 2021).

2. Insentif Investasi

Insentif investasi merupakan instrumen kebijakan utama dalam politik industri nasional yang dirancang untuk menarik modal baik dari investor domestik maupun asing, sehingga mendorong ekspansi dan pengembangan sektor industri strategis. Pemerintah memberikan kemudahan fiskal, seperti pengurangan pajak dan pembebasan bea masuk, serta fasilitas non-fiskal, seperti penyederhanaan perizinan dan penyediaan infrastruktur, agar iklim investasi menjadi lebih kondusif dan kompetitif di tingkat global.

Kebijakan insentif investasi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan jumlah investasi, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat kapabilitas industri nasional melalui teknologi, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia yang unggul, sehingga mampu menghasilkan produk dengan nilai tambah tinggi dan bersaing secara berkelanjutan. Dukungan yang sistematis dan terarah melalui insentif ini membantu menciptakan ekosistem industri yang stabil, menarik minat investor, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka panjang (Prasetyo, 2020).

3. Pengembangan Teknologi dan Inovasi

Pengembangan teknologi dan inovasi merupakan instrumen kebijakan utama dalam politik industri nasional yang bertujuan meningkatkan daya saing industri domestik di tingkat global melalui adopsi teknologi canggih dan proses inovatif. Pemerintah mendukung pengembangan ini melalui fasilitas riset, hibah penelitian, kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pusat riset, serta program

pengembangan kapasitas teknologi untuk mendorong produktivitas dan kualitas produk industri dalam negeri.

Instrumen ini tidak hanya mendorong pertumbuhan industri strategis, tetapi juga menciptakan ekosistem inovasi yang memungkinkan perusahaan domestik menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, meningkatkan efisiensi produksi, dan mampu bersaing secara berkelanjutan. Dukungan teknologi dan inovasi yang terarah menjadi fondasi penting bagi transformasi industri nasional, sehingga mampu menjawab tantangan globalisasi dan perubahan cepat dalam permintaan pasar (Suryanto, 2022).

B. Perlindungan Industri dan Subsidi

Perlindungan industri adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi industri domestik dari persaingan asing yang tidak seimbang. Tujuannya agar industri lokal mampu bertahan, berkembang, dan meningkatkan kontribusinya terhadap ekonomi nasional. Bentuk perlindungan ini dapat berupa tarif impor, kuota, regulasi non-tarif, atau larangan ekspor tertentu untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan industri dalam negeri.

Subsidi adalah bantuan finansial atau fasilitas ekonomi yang diberikan pemerintah kepada pelaku industri atau sektor tertentu untuk menurunkan biaya produksi, meningkatkan daya saing, atau mendorong pengembangan sektor strategis. Subsidi dapat berbentuk bantuan langsung, keringanan pajak, subsidi bahan baku, subsidi energi, atau dukungan riset dan pengembangan (R&D). Kedua instrumen ini sering digunakan bersamaan untuk mendorong pertumbuhan industri, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga kedaulatan ekonomi.

1. Mekanisme Perlindungan Industri

Perlindungan industri dilakukan melalui berbagai instrumen kebijakan yang dirancang untuk menjaga kelangsungan dan daya saing industri domestik terhadap tekanan pasar global. Mekanisme ini dapat dibagi menjadi beberapa bentuk utama:

a. Tarif dan Bea Masuk

Tarif dan bea masuk merupakan salah satu mekanisme utama perlindungan industri yang digunakan pemerintah untuk menjaga daya saing produk domestik terhadap produk impor,

karena dengan membebaskan biaya tambahan pada barang asing, harga produk lokal menjadi lebih kompetitif sekaligus mendorong stabilitas produksi dan investasi dalam negeri, serta membuka ruang bagi industri baru untuk berkembang tanpa tekanan persaingan global yang berlebihan (Baldwin & Evenett, 2019). Mekanisme ini dapat diterapkan dalam bentuk tarif ad valorem, yang dihitung sebagai persentase dari nilai barang, atau tarif spesifik, yang berupa jumlah tetap per unit, dan sering dikombinasikan dengan regulasi non-tarif seperti standar kualitas dan kuota impor untuk meningkatkan efektivitas perlindungan, sehingga industri domestik dapat berkembang secara berkelanjutan dan mendorong penciptaan lapangan kerja. Penerapan tarif dan bea masuk tidak hanya berfungsi sebagai alat proteksi ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mendorong industrialisasi dan inovasi, karena industri yang dilindungi memiliki insentif untuk berinvestasi dalam peningkatan teknologi, kualitas produk, dan efisiensi produksi, sehingga secara keseluruhan dapat memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Dengan demikian, tarif dan bea masuk menjadi kebijakan yang seimbang antara melindungi kepentingan industri domestik dan menjaga stabilitas hubungan perdagangan internasional, sambil tetap mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

b. Kuota Impor

Kuota impor merupakan salah satu mekanisme utama perlindungan industri yang digunakan pemerintah untuk membatasi jumlah barang asing yang masuk ke pasar domestik, sehingga industri lokal memiliki ruang yang cukup untuk berkembang tanpa tekanan persaingan harga dari produk impor, dan kebijakan ini juga membantu menjaga keseimbangan neraca perdagangan serta stabilitas ekonomi nasional (Evenett & Fritz, 2021). Dengan adanya kuota, pemerintah dapat mengontrol suplai barang tertentu sehingga produsen domestik dapat mempertahankan kapasitas produksi dan investasi, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor industri strategis yang baru berkembang agar mampu bersaing dalam jangka panjang.

Kuota impor sering dipadukan dengan sistem lisensi atau persyaratan teknis untuk memastikan barang yang masuk

memenuhi standar kualitas, lingkungan, atau keamanan tertentu, sehingga perlindungan tidak hanya bersifat kuantitatif tetapi juga mendukung pengembangan industri yang lebih modern dan berkelanjutan. Kebijakan kuota ini juga dapat menjadi instrumen strategis untuk mendorong diversifikasi industri, inovasi teknologi, dan penciptaan lapangan kerja, karena produsen domestik memperoleh kepastian pasar yang cukup untuk melakukan investasi jangka panjang.

c. Larangan atau Pembatasan Ekspor-Import Non-Tarif

Larangan atau pembatasan ekspor-impor non-tarif merupakan salah satu mekanisme utama perlindungan industri yang diterapkan pemerintah untuk mengatur aliran barang lintas batas dengan cara selain tarif, misalnya melalui standar kualitas, sertifikasi teknis, persyaratan lingkungan, atau lisensi khusus, sehingga industri domestik dapat berkembang tanpa tekanan kompetisi dari produk luar yang tidak memenuhi standar lokal, sekaligus meningkatkan kualitas produksi nasional (Bacchetta et al., 2019). Mekanisme ini memungkinkan pemerintah untuk melindungi sektor industri strategis, mendorong industrialisasi, dan mengendalikan risiko ketergantungan pada impor, sambil tetap memfasilitasi perdagangan yang selektif dan terkontrol sesuai kepentingan nasional.

Pembatasan non-tarif sering digunakan untuk mengarahkan investasi dan inovasi industri domestik, karena produsen lokal memperoleh kepastian pasar yang relatif stabil dan dorongan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi, sehingga dalam jangka panjang dapat memperkuat daya saing produk nasional di pasar internasional. Kebijakan ini juga memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan industri, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan sumber daya alam, karena pemerintah dapat menyesuaikan regulasi untuk mengatur jenis dan jumlah barang yang boleh masuk maupun diekspor sesuai tujuan pembangunan industri nasional.

2. Mekanisme Subsidi

Subsidi merupakan bantuan ekonomi yang diberikan pemerintah kepada sektor industri untuk mendorong produksi, inovasi, dan daya saing. Mekanisme subsidi meliputi beberapa bentuk:

a. Subsidi Produksi

Subsidi produksi merupakan salah satu bentuk utama mekanisme subsidi yang diberikan pemerintah untuk menurunkan biaya produksi industri domestik, sehingga produsen lokal dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki efisiensi, dan bersaing lebih efektif dengan produk impor, sekaligus mendorong stabilitas harga di pasar domestik dan memberikan insentif bagi investasi jangka panjang dalam sektor strategis (Rodrik, 2020). Penerapan subsidi ini dapat berupa bantuan langsung berupa dana tunai, keringanan biaya energi atau bahan baku, serta dukungan logistik, yang secara keseluruhan bertujuan untuk memperkuat posisi industri nasional sekaligus menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Subsidi produksi berperan sebagai alat untuk mendorong inovasi dan pengembangan teknologi, karena produsen lokal memiliki ruang dan sumber daya untuk melakukan penelitian dan peningkatan kualitas produk tanpa tekanan kompetisi yang terlalu tinggi dari produk asing. Kebijakan ini juga memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan prioritas dukungan sesuai sektor industri yang dianggap strategis, sehingga subsidi tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi saat ini tetapi juga membangun fondasi industri yang berkelanjutan dan kompetitif di masa depan.

b. Insentif Pajak

Insentif pajak merupakan salah satu bentuk utama mekanisme subsidi yang diberikan pemerintah untuk meringankan beban fiskal industri domestik, sehingga perusahaan memiliki kapasitas finansial lebih besar untuk berinvestasi dalam peningkatan kapasitas produksi, modernisasi teknologi, dan inovasi produk, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor strategis dan penciptaan lapangan kerja (De Mooij & Keen, 2019). Bentuk insentif pajak ini dapat berupa pengurangan Pajak Penghasilan (PPh), pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), atau fasilitas pajak untuk investasi baru, yang secara keseluruhan meningkatkan daya saing industri domestik di pasar lokal maupun global.

Insentif pajak memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan dukungan fiskal dengan prioritas pembangunan industri,

sehingga sektor yang strategis atau baru berkembang memperoleh perlindungan dan kesempatan untuk mengembangkan kapasitas jangka panjang. Dengan mekanisme ini, industri lokal tidak hanya dapat menurunkan biaya operasional tetapi juga memperoleh kepastian pasar yang mendorong inovasi, efisiensi, dan keberlanjutan produksi, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

c. Subsidi Riset dan Pengembangan (R&D)

Subsidi riset dan pengembangan (R&D) merupakan salah satu bentuk utama mekanisme subsidi yang diberikan pemerintah untuk mendorong inovasi, pengembangan teknologi, dan peningkatan kualitas produk di sektor industri domestik, sehingga perusahaan memiliki kapasitas untuk menciptakan produk baru, meningkatkan efisiensi produksi, dan bersaing secara lebih efektif di pasar global, sekaligus memperkuat daya saing nasional dalam jangka panjang (OECD, 2020). Bantuan ini dapat berbentuk pendanaan langsung untuk proyek penelitian, keringanan biaya paten, atau dukungan fasilitas laboratorium dan inovasi, yang secara keseluruhan memberikan insentif kepada industri untuk berinvestasi dalam pengembangan teknologi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Subsidi R&D memungkinkan pemerintah menargetkan sektor industri yang dianggap strategis atau prioritas pembangunan nasional, sehingga inovasi yang dihasilkan tidak hanya memperkuat posisi industri saat ini tetapi juga membangun fondasi kompetitif untuk masa depan. Mekanisme ini juga mendorong kolaborasi antara industri dan institusi penelitian, mempercepat transfer teknologi, dan meningkatkan kapasitas inovasi nasional, sehingga subsidi R&D menjadi instrumen penting dalam strategi pembangunan industri berkelanjutan.

C. Perdagangan Internasional dan *Power Relations*

Perdagangan Internasional dan *Power Relations* menggambarkan interaksi ekonomi antarnegara yang tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi, tetapi juga oleh distribusi

kekuasaan global. Dalam ekonomi politik, perdagangan internasional dipahami sebagai arena di mana negara-negara berjuang untuk memperoleh keuntungan strategis, baik melalui akses pasar, kontrol teknologi, maupun pengaruh terhadap aturan global. Negara-negara dengan kapasitas ekonomi, teknologi, dan politik yang lebih kuat biasanya menempati posisi dominan dalam negosiasi perdagangan, sementara negara berkembang sering menempati posisi subordinat, yang membatasi kemampuan untuk mengejar industrialisasi mandiri. Untuk memahami dinamika ini secara sistematis, pembahasan dapat diarahkan melalui beberapa aspek utama yang menunjukkan bagaimana relasi kekuasaan memengaruhi perdagangan internasional:

1. Peran Negara Besar dan Blok Ekonomi dalam Menentukan Aturan Perdagangan

Negara-negara besar dan blok ekonomi, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Tiongkok, memiliki kapasitas untuk menetapkan standar perdagangan global, termasuk regulasi teknis, lingkungan, dan sosial yang harus dipatuhi oleh negara lain, sehingga secara sistematis memposisikan dirinya dalam posisi dominan yang mampu mempengaruhi arah perdagangan internasional dan menetapkan kerangka aturan yang menguntungkan kepentingan industri domestik. Keunggulan ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga politis, karena negara-negara besar dapat menggunakan kekuatan pasar dan akses ke teknologi strategis untuk memaksakan kepatuhan negara lain terhadap aturan yang ditetapkan, sehingga menciptakan ketergantungan struktural di tingkat global (Baldwin, 2019).

Blok ekonomi seperti Uni Eropa dan ASEAN berperan strategis dalam merumuskan perjanjian perdagangan multilateral dan regional yang menstandarkan prosedur kepabeanan, proteksi konsumen, serta hak kekayaan intelektual, sehingga negara-negara anggota maupun mitra dagang yang lebih kecil harus menyesuaikan kebijakan domestik agar sesuai dengan norma dan regulasi yang berlaku. Strategi ini memungkinkan negara besar dan blok ekonomi untuk mengarahkan aliran perdagangan global, memaksimalkan keuntungan ekonomi, sekaligus mempertahankan pengaruh politik di forum internasional yang berpengaruh.

2. Ketergantungan Ekonomi Negara Berkembang pada Negara Maju

Negara-negara berkembang sering mengalami ketergantungan ekonomi pada negara maju karena cenderung mengeksport komoditas primer dan mengimpor barang manufaktur bernilai tinggi, sehingga aliran perdagangan menjadi asimetris dan membatasi kemampuan untuk membangun kapasitas industri domestik yang mandiri. Ketergantungan ini diperkuat oleh akses terbatas terhadap teknologi, modal, dan jaringan pasar global, yang menempatkan negara berkembang pada posisi subordinat dalam negosiasi perdagangan internasional (Kaplinsky, 2019).

Ketergantungan ekonomi ini membuat negara berkembang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global dan perubahan kebijakan ekonomi di negara maju, yang dapat berdampak langsung pada stabilitas ekonomi domestik dan pertumbuhan industri nasional. Negara maju sering memanfaatkan dominasi untuk menetapkan standar perdagangan dan regulasi yang harus dipatuhi negara berkembang, sehingga negara berkembang memiliki ruang manuver yang terbatas dalam merumuskan kebijakan industri dan perdagangan sendiri.

3. Subsidi dan Proteksionisme sebagai Alat Kekuasaan

Subsidi dan proteksionisme merupakan instrumen strategis yang digunakan oleh negara-negara kuat untuk melindungi industri domestik sekaligus memperkuat posisi tawar dalam perdagangan internasional, karena dengan memberikan bantuan finansial atau pembatasan impor, negara-negara tersebut dapat menekan pesaing dari negara lain dan menjaga keunggulan kompetitif perusahaan domestik. Mekanisme ini tidak hanya memengaruhi aliran perdagangan, tetapi juga menciptakan ketergantungan ekonomi bagi negara-negara yang menjadi mitra dagang, sehingga hubungan perdagangan global mencerminkan relasi kekuasaan yang asimetris (Evenett, 2020).

Pada praktiknya, proteksionisme dapat berupa tarif tinggi, kuota impor, atau regulasi teknis yang kompleks, sementara subsidi dapat berupa dukungan fiskal untuk penelitian dan pengembangan, keringanan pajak, atau bantuan langsung bagi sektor strategis, yang membuat negara maju mampu mendikte standar pasar dan menentukan arah alokasi sumber daya di tingkat global. Strategi ini sering digunakan untuk memperkuat posisi politik sekaligus menjaga stabilitas

ekonomi domestik, karena perusahaan domestik yang terlindungi mampu mempertahankan pangsa pasar dan kapasitas produksi tanpa tergerus oleh persaingan internasional yang lebih agresif.

D. Studi Kasus Perkembangan Industri Strategis

1. Studi Kasus: Perkembangan Industri Semikonduktor di Tiongkok

Tiongkok telah menjadikan industri semikonduktor sebagai sektor strategis untuk mendukung ambisinya menjadi kekuatan teknologi global. Pemerintah Tiongkok mengimplementasikan kebijakan proteksi dan subsidi besar-besaran melalui program “Made in China 2025”, yang melibatkan insentif fiskal, pendanaan riset dan pengembangan (R&D), serta dukungan infrastruktur untuk perusahaan domestik seperti SMIC (*Semiconductor Manufacturing International Corporation*). Strategi ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada impor chip dari negara maju, terutama Amerika Serikat, yang sebelumnya mendominasi pasokan teknologi tinggi global.

Langkah Tiongkok memicu respons proteksionis dari negara-negara maju, termasuk pembatasan ekspor bahan baku dan teknologi kritis, yang menunjukkan bahwa pengembangan industri strategis tidak lepas dari dinamika power relations di tingkat global. Dengan dukungan kebijakan negara, industri semikonduktor domestik Tiongkok mampu meningkatkan kapasitas produksi dan inovasi, sehingga secara bertahap memperkuat posisi tawarnya dalam rantai nilai global. Studi kasus ini menunjukkan bahwa pengembangan industri strategis membutuhkan kombinasi antara investasi pemerintah, kebijakan proteksionis, dan strategi inovasi teknologi untuk menghadapi ketimpangan kekuatan ekonomi internasional.

E. Study Case

1. Studi Kasus: Perlindungan Industri dan Subsidi di Industri Otomotif Indonesia

a. Latar Belakang

Industri otomotif Indonesia merupakan sektor strategis yang menyumbang signifikan terhadap PDB dan lapangan kerja. Pemerintah Indonesia melalui kebijakan perdagangan dan

industri berupaya melindungi industri ini dari kompetisi luar negeri dengan menerapkan tarif impor, kuota, dan pemberian subsidi untuk R&D dan investasi domestik. Kebijakan ini mencerminkan ekonomi politik perdagangan, di mana keputusan ekonomi dipengaruhi oleh kekuatan politik, lobi industri, dan kepentingan nasional. Perlindungan industri dan subsidi ini sering menjadi titik perdebatan antara upaya industrialisasi domestik dan tekanan liberalisasi pasar global.

b. Kebijakan yang Diterapkan

Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan proteksi, seperti Insentif Pajak Penanaman Modal, fasilitas Kawasan Berikat, serta subsidi untuk pengembangan kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Subsidi ini bertujuan mendorong inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, dan menurunkan ketergantungan terhadap impor. Di sisi perdagangan, pemerintah juga menerapkan tarif tinggi pada mobil impor dan membatasi kuota kendaraan tertentu untuk mendukung produsen lokal. Kebijakan ini menunjukkan bagaimana negara menggunakan instrumen ekonomi untuk mencapai tujuan politik, termasuk menjaga kedaulatan industri nasional.

c. Dinamika Politik dan Tantangan

Kebijakan proteksi ini menimbulkan dinamika politik karena berbagai kepentingan terlibat, termasuk kelompok industri lokal, investor asing, dan konsumen. Industri otomotif lokal mendorong perlindungan lebih kuat untuk mempertahankan pangsa pasar, sedangkan konsumen dan lembaga internasional mendorong persaingan bebas untuk menekan harga. Selain itu, tekanan dari organisasi perdagangan internasional, seperti WTO, menuntut Indonesia menyeimbangkan proteksi dengan kewajiban perdagangan global. Kasus ini menunjukkan bagaimana kebijakan perdagangan dan industri merupakan arena di mana kepentingan politik dan ekonomi bertemu.

d. Implikasi Ekonomi dan Politik

Subsidi dan proteksi industri mendorong pertumbuhan sektor otomotif domestik, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kapasitas teknologi lokal. Namun, ketergantungan pada proteksi dapat menimbulkan distorsi pasar dan menghambat inovasi jangka panjang jika tidak diimbangi

dengan efisiensi. Politik proteksi ini juga mencerminkan kekuatan elite ekonomi yang mampu memengaruhi keputusan kebijakan melalui lobi. Secara global, kebijakan semacam ini menjadi contoh ekonomi politik perdagangan, di mana strategi industrialisasi domestik dipengaruhi oleh interaksi antara kepentingan nasional dan tekanan internasional.

e. Pelajaran dan Strategi Ke Depan

Kasus ini menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan industri, subsidi, dan keterbukaan perdagangan. Strategi ke depan mencakup peningkatan kapasitas R&D domestik, insentif inovasi, dan penguatan industri pendukung. Pemerintah perlu memastikan kebijakan proteksi tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Studi ini juga menunjukkan perlunya transparansi dalam pengambilan kebijakan untuk meminimalkan konflik kepentingan dan memastikan pembangunan industri berkelanjutan.

BAB XIII

EKONOMI POLITIK GLOBALISASI

Ekonomi politik globalisasi mencerminkan keterkaitan erat antara negara-negara dalam sistem ekonomi dunia, di mana aliran modal, barang, dan jasa melintasi batas nasional dengan cepat. Proses ini memunculkan peluang pertumbuhan sekaligus tantangan dalam menjaga kedaulatan ekonomi dan mengatasi ketimpangan antara negara maju dan berkembang.

A. Pengaruh Globalisasi Ekonomi terhadap Negara

Globalisasi ekonomi telah menjadi fenomena yang memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan negara, mulai dari struktur pasar hingga kebijakan publik, dan menuntut negara untuk menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi global yang semakin cepat dan kompleks. Proses ini tidak hanya membuka peluang bagi pertumbuhan dan modernisasi, tetapi juga menimbulkan tantangan yang signifikan, termasuk ketergantungan ekonomi, persaingan internasional, dan tekanan terhadap kedaulatan nasional. Dengan memahami pengaruh globalisasi ekonomi secara menyeluruh, negara dapat merancang strategi yang tepat untuk memanfaatkan peluang sekaligus mengelola risiko yang muncul dari integrasi ke dalam sistem ekonomi dunia. Fenomena ini mencakup dampak pada investasi, industri, teknologi, serta ketimpangan sosial, sehingga membutuhkan pendekatan kebijakan yang holistik dan berorientasi jangka panjang. Secara keseluruhan, globalisasi ekonomi menuntut keseimbangan antara keterbukaan terhadap dunia dan perlindungan terhadap kepentingan nasional agar pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Berikut ini beberapa pengaruh utama yang dapat dijelaskan secara rinci:

1. Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Asing

Globalisasi ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui peningkatan arus modal dan perdagangan internasional, di mana investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment/FDI*) menjadi salah satu instrumen utama yang memperkuat sektor produksi dan menciptakan lapangan kerja. Investasi ini tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi dan teknologi, tetapi juga memperluas akses negara terhadap jaringan global sehingga dapat mendorong inovasi dan efisiensi dalam berbagai sektor ekonomi (UNCTAD, 2019).

Masuknya investasi asing memungkinkan transfer pengetahuan dan teknologi dari negara maju ke negara berkembang, yang berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional di pasar global. Selain itu, arus modal internasional dapat memperkuat sektor infrastruktur dan layanan publik yang mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang, meskipun negara harus mampu mengelola risiko ketergantungan ekonomi terhadap investor asing.

2. Persaingan dan Reformasi Industri

Globalisasi ekonomi meningkatkan intensitas persaingan industri di tingkat domestik maupun internasional, memaksa perusahaan nasional untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan kualitas produk agar tetap kompetitif di pasar global. Tekanan persaingan ini mendorong reformasi industri yang mencakup restrukturisasi perusahaan, adopsi teknologi baru, dan peningkatan kapasitas produksi untuk memenuhi standar internasional, sehingga perekonomian nasional dapat berkembang lebih dinamis (Rodrik, 2020).

Reformasi industri yang dipicu oleh globalisasi juga mendorong diversifikasi sektor ekonomi, di mana negara mencoba mengurangi ketergantungan pada sektor tradisional dan meningkatkan kontribusi sektor manufaktur dan jasa bernilai tinggi. Proses ini menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing global, meskipun perubahan ini menuntut penyesuaian regulasi dan kebijakan pemerintah yang cepat dan tepat.

3. Ketergantungan Ekonomi

Globalisasi ekonomi meningkatkan ketergantungan negara terhadap arus modal, perdagangan, dan investasi internasional,

sehingga fluktuasi ekonomi global dapat berdampak langsung pada stabilitas ekonomi domestik. Ketergantungan ini membuat negara rentan terhadap krisis keuangan, perubahan harga komoditas, dan kebijakan ekonomi dari negara atau lembaga keuangan lain, yang menuntut pengelolaan risiko yang cermat dan strategi diversifikasi ekonomi (Baldwin & Evenett, 2020).

Ketergantungan ekonomi memengaruhi kebijakan fiskal dan moneter negara, karena pemerintah harus menyesuaikan regulasi untuk menjaga kepercayaan investor dan stabilitas pasar. Negara yang terlalu bergantung pada perdagangan atau investasi tertentu perlu mengembangkan kapasitas domestik agar dapat mengurangi risiko eksternal dan meningkatkan kemandirian ekonomi dalam jangka panjang.

4. Pengaruh terhadap Kebijakan Publik

Globalisasi ekonomi memaksa negara untuk menyesuaikan kebijakan publik agar sejalan dengan standar internasional dan tuntutan pasar global, termasuk dalam perdagangan, investasi, dan regulasi industri. Penyesuaian ini sering melibatkan liberalisasi ekonomi, reformasi regulasi, dan harmonisasi hukum untuk menarik investor asing sekaligus menjaga kredibilitas negara di mata dunia (Rodrik, 2018).

Pengaruh globalisasi terhadap kebijakan publik mendorong pemerintah untuk mengintegrasikan strategi pembangunan nasional dengan tren ekonomi global, seperti digitalisasi, inovasi teknologi, dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini menuntut kapasitas institusi publik yang adaptif dan responsif, agar kebijakan yang dibuat mampu mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan kepentingan sosial dan lingkungan domestik.

B. Deregulasi, Liberalisasi dan Privatisasi

Deregulasi, liberalisasi, dan privatisasi merupakan tiga instrumen utama yang sering diterapkan dalam konteks globalisasi ekonomi untuk mendorong efisiensi, pertumbuhan, dan daya saing negara. Ketiganya memiliki tujuan dan mekanisme yang berbeda namun saling terkait dalam membentuk struktur ekonomi modern.

1. Deregulasi

Deregulasi adalah proses pengurangan atau penghapusan aturan, regulasi, dan birokrasi yang membatasi kegiatan ekonomi dan operasional perusahaan, dengan tujuan menciptakan iklim usaha yang lebih fleksibel dan efisien. Proses ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing, mendorong inovasi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme pasar yang lebih bebas. Berikut penjelasan rinci mengenai deregulasi:

a. Pengurangan Hambatan Administratif

Pengurangan hambatan administratif dalam konteks deregulasi bertujuan menyederhanakan prosedur birokrasi, seperti izin usaha, registrasi, dan persyaratan hukum lainnya, sehingga pelaku ekonomi dapat lebih cepat memulai dan mengembangkan usahanya. Langkah ini meningkatkan efisiensi operasional, menurunkan biaya, serta mendorong masuknya pelaku usaha baru yang memperkuat persaingan dan inovasi di pasar domestik (World Bank, 2019).

Pengurangan hambatan administratif memungkinkan pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan menarik bagi investor domestik maupun asing, sekaligus meningkatkan kecepatan adaptasi perusahaan terhadap perubahan pasar. Deregulasi jenis ini juga mendorong transparansi dan akuntabilitas birokrasi, sehingga risiko korupsi dan praktik monopoli dapat diminimalkan, menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan.

b. Peningkatan Persaingan Pasar

Peningkatan persaingan pasar melalui deregulasi terjadi ketika pengurangan aturan dan hambatan memungkinkan lebih banyak pelaku usaha masuk ke pasar, sehingga tercipta kompetisi yang lebih sehat dan dinamis. Persaingan ini mendorong perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, kualitas produk, inovasi, dan layanan demi mempertahankan posisinya, yang pada gilirannya meningkatkan daya saing industri secara keseluruhan (Baldwin & Evenett, 2020).

Persaingan yang meningkat akibat deregulasi menuntut perusahaan untuk beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan permintaan dan kondisi pasar, termasuk strategi harga, diversifikasi produk, dan pemanfaatan teknologi baru.

Lingkungan persaingan yang kompetitif juga memberikan manfaat bagi konsumen melalui peningkatan pilihan, penurunan harga, dan standar layanan yang lebih tinggi, sehingga pertumbuhan ekonomi nasional dapat lebih optimal.

c. **Fleksibilitas Ekonomi**

Fleksibilitas ekonomi dalam deregulasi tercermin dari kemampuan pelaku usaha untuk menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan pasar, termasuk inovasi produk, strategi harga, dan ekspansi usaha tanpa dibatasi prosedur birokrasi yang kompleks. Fleksibilitas ini memungkinkan sektor swasta merespons dinamika global secara lebih efisien, meningkatkan adaptasi terhadap permintaan konsumen, serta memacu pertumbuhan dan daya saing ekonomi secara berkelanjutan (Rodrik, 2019).

Deregulasi yang meningkatkan fleksibilitas ekonomi memungkinkan pemerintah dan pelaku usaha untuk lebih responsif dalam menghadapi gejolak pasar, krisis finansial, dan perubahan teknologi. Dengan adaptasi yang cepat dan manajemen sumber daya yang efisien, negara dapat meminimalkan risiko ekonomi dan memaksimalkan peluang pertumbuhan, sehingga stabilitas dan keberlanjutan ekonomi lebih terjaga.

2. Liberalisasi

Liberalisasi adalah proses pembukaan pasar domestik terhadap perdagangan dan investasi internasional dengan tujuan meningkatkan efisiensi, daya saing, dan integrasi ekonomi negara ke dalam sistem global. Kebijakan ini mendorong penghapusan hambatan perdagangan, seperti tarif, kuota, dan regulasi proteksionis, serta mempermudah masuknya modal dan perusahaan asing ke pasar domestik. Berikut penjelasan rinci mengenai liberalisasi:

a. **Pembukaan Pasar**

Pembukaan pasar dalam liberalisasi mengacu pada penghapusan hambatan perdagangan, tarif, dan regulasi proteksionis agar barang, jasa, dan investasi asing dapat lebih mudah masuk ke pasar domestik, sehingga memperluas pilihan konsumen dan menekan harga. Proses ini juga mendorong perusahaan domestik meningkatkan efisiensi, inovasi, dan kualitas produk

agar mampu bersaing secara internasional, sekaligus memperkuat daya saing ekonomi nasional (Evenett, 2020).

Pembukaan pasar memungkinkan integrasi yang lebih dalam ke rantai nilai global, memperluas akses pasar ekspor, dan menarik investasi asing yang dapat meningkatkan kapasitas produksi dan teknologi. Namun, liberalisasi harus disertai kebijakan pendukung, seperti perlindungan bagi sektor domestik yang rentan, agar manfaat ekonomi tersebar merata dan risiko ketimpangan dapat diminimalkan.

b. Daya Saing dan Inovasi

Daya saing dan inovasi dalam konteks liberalisasi muncul ketika perusahaan domestik terdorong untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi operasional, dan strategi bisnis agar mampu bersaing dengan pelaku usaha asing di pasar terbuka. Proses ini memacu investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D), adopsi teknologi baru, dan peningkatan kapasitas produksi, sehingga perusahaan dapat menghasilkan produk bernilai tambah tinggi dan memperkuat posisi ekonomi nasional di pasar global (Aghion et al., 2019).

Liberalisasi yang menuntut daya saing mendorong perusahaan untuk melakukan inovasi berkelanjutan dalam desain produk, model bisnis, dan layanan konsumen, sehingga dapat menghadapi persaingan internasional secara lebih efektif. Upaya ini tidak hanya meningkatkan produktivitas dan profitabilitas perusahaan, tetapi juga memperkuat integrasi ekonomi nasional ke dalam rantai nilai global yang lebih kompleks dan kompetitif.

c. Aliran Modal dan Investasi

Aliran modal dan investasi dalam liberalisasi ekonomi memungkinkan masuknya modal asing ke dalam pasar domestik, baik melalui investasi langsung maupun portofolio, yang berperan penting dalam meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi perusahaan. Arus modal ini juga memfasilitasi transfer teknologi, pengetahuan manajerial, dan praktik bisnis modern, sehingga mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat (UNCTAD, 2021).

Investasi asing yang meningkat akibat liberalisasi membuka peluang kerja baru, memperkuat sektor strategis, dan

memperluas akses perusahaan domestik ke jaringan global. Namun, negara perlu mengatur dan mengawasi aliran modal dengan baik agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata dan risiko ketergantungan pada investor asing dapat diminimalkan.

3. Privatisasi

Privatisasi adalah proses pengalihan kepemilikan dan pengelolaan aset atau perusahaan milik pemerintah ke sektor swasta, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan melalui mekanisme pasar. Kebijakan ini diterapkan untuk mengurangi beban fiskal pemerintah, mendorong investasi baru, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Berikut penjelasan rinci mengenai privatisasi:

a. Peningkatan Efisiensi Operasional

Peningkatan efisiensi operasional dalam privatisasi terjadi ketika pengelolaan perusahaan atau aset yang sebelumnya berada di tangan pemerintah dialihkan ke sektor swasta, yang cenderung lebih responsif terhadap permintaan pasar dan tekanan kompetitif. Pergeseran ini mendorong penerapan praktik manajemen yang lebih profesional, optimalisasi sumber daya, dan inovasi dalam proses produksi sehingga produktivitas dan kualitas layanan meningkat secara signifikan (Megginson & Netter, 2019).

Efisiensi operasional yang dihasilkan dari privatisasi memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya, meningkatkan profitabilitas, dan memperkuat daya saing di pasar domestik maupun internasional. Dengan pengelolaan berbasis pasar, perusahaan dapat menyesuaikan strategi bisnis dengan cepat terhadap perubahan permintaan konsumen, teknologi, dan kondisi ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat lebih mudah dicapai.

b. Pengurangan Beban Fiskal Pemerintah

Pengurangan beban fiskal pemerintah dalam privatisasi terjadi ketika tanggung jawab pengelolaan perusahaan atau aset negara dialihkan ke sektor swasta, sehingga dana publik dapat dialokasikan untuk prioritas pembangunan lain seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dengan mengalihkan

pengelolaan ini, pemerintah tidak lagi menanggung biaya operasional dan kerugian yang mungkin timbul, sehingga anggaran negara dapat digunakan lebih efisien untuk program-program strategis (Bortolotti & Milella, 2018).

Pengurangan beban fiskal memungkinkan pemerintah fokus pada peran regulasi dan pengawasan untuk memastikan sektor privat beroperasi secara transparan dan akuntabel. Hal ini juga membuka peluang bagi pemerintah untuk mendorong investasi baru dan pertumbuhan ekonomi, karena sumber daya yang sebelumnya digunakan untuk mendukung perusahaan milik negara dapat dialihkan ke sektor-sektor produktif lainnya.

c. Mendorong Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Privatisasi mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi dengan membuka peluang bagi sektor swasta untuk menanamkan modal dalam pengelolaan perusahaan atau aset yang sebelumnya dikuasai pemerintah. Investasi ini tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi, tetapi juga memperkenalkan teknologi baru, praktik manajerial modern, dan inovasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang serta penciptaan lapangan kerja (Megginson et al., 2020).

Masuknya investasi swasta meningkatkan dinamika pasar, memperluas sektor strategis, dan memperkuat struktur ekonomi nasional. Proses privatisasi yang diikuti dengan regulasi yang efektif memungkinkan aliran modal lebih produktif dan berkelanjutan, sehingga manfaat ekonomi dari peningkatan pertumbuhan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

C. Regionalisme Ekonomi (ASEAN, EU, NAFTA)

Regionalisme ekonomi merujuk pada proses pembentukan kerja sama ekonomi di antara sekelompok negara dalam satu wilayah geografis dengan tujuan memperkuat integrasi ekonomi, meningkatkan perdagangan, investasi, dan pertumbuhan bersama. Fenomena ini mendorong liberalisasi perdagangan, harmonisasi regulasi, dan penciptaan mekanisme koordinasi ekonomi yang lebih erat, sehingga negara-negara anggota dapat memanfaatkan skala ekonomi regional dan posisi tawar yang lebih kuat di kancah global. Berikut penjelasan

rinci mengenai regionalisme ekonomi melalui contoh ASEAN, EU, dan NAFTA (sekarang USMCA):

1. ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*)

ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) merupakan organisasi regional yang dibentuk pada tahun 1967 dengan tujuan utama meningkatkan kerjasama ekonomi, politik, sosial, dan budaya di antara negara-negara anggota di Asia Tenggara. Organisasi ini berperan penting dalam memperkuat integrasi regional, menciptakan stabilitas politik, dan meningkatkan daya saing ekonomi kawasan melalui berbagai mekanisme kolaborasi. Berikut penjelasan rinci mengenai ASEAN:

a. Keanggotaan dan Struktur

Keanggotaan dan struktur ASEAN mencakup 10 negara anggota, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja, yang bekerja sama untuk mencapai integrasi regional di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Struktur organisasi ASEAN terdiri dari KTT ASEAN sebagai forum tertinggi, Sekretariat ASEAN di Jakarta, serta berbagai komite teknis yang menangani isu spesifik seperti ekonomi, keamanan, dan lingkungan, sehingga koordinasi dan implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif (Weatherbee, 2019).

ASEAN menerapkan prinsip konsensus dalam pengambilan keputusan untuk menjaga keharmonisan dan kerjasama antaranggota, sambil memastikan masing-masing negara tetap mempertahankan kedaulatan nasional. Mekanisme ini memungkinkan negara anggota untuk berpartisipasi aktif dalam pembentukan agenda regional, menyelaraskan kepentingan nasional dengan tujuan kolektif, dan memfasilitasi implementasi program yang mendukung pembangunan ekonomi dan stabilitas kawasan.

b. Integrasi Ekonomi – *ASEAN Economic Community* (AEC)

Integrasi ekonomi melalui *ASEAN Economic Community* (AEC) bertujuan menciptakan pasar tunggal dan basis produksi di Asia Tenggara dengan aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan modal, sehingga meningkatkan efisiensi dan daya saing regional. AEC mendorong harmonisasi regulasi, penghapusan tarif, dan fasilitasi perdagangan serta investasi

lintas negara anggota, yang sekaligus menarik investor asing dan memperkuat integrasi ekonomi ASEAN dengan ekonomi global (Dosch, 2020).

AEC memberikan peluang bagi perusahaan domestik untuk memperluas pasar, meningkatkan produktivitas, dan memanfaatkan keunggulan komparatif masing-masing negara anggota. Integrasi ini juga menuntut negara anggota untuk meningkatkan kapasitas institusi, memperkuat infrastruktur, dan mengembangkan sumber daya manusia agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan di seluruh kawasan.

c. Kerjasama Politik dan Keamanan

Kerjasama politik dan keamanan ASEAN bertujuan menjaga stabilitas kawasan melalui prinsip non-intervensi, penyelesaian sengketa secara damai, dan dialog diplomatik antaranggota, sekaligus memperkuat posisi kolektif dalam hubungan internasional. Forum seperti *ASEAN Regional Forum (ARF)* dan mekanisme konsultasi politik memungkinkan koordinasi kebijakan keamanan, pencegahan konflik, dan penanganan isu transnasional seperti terorisme, keamanan maritim, dan krisis migrasi (Emmers, 2019).

Kerjasama ini mendorong pengembangan kapasitas institusi keamanan nasional dan regional, meningkatkan kepercayaan antarnegara anggota, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi. ASEAN juga memfasilitasi latihan militer bersama, pertukaran informasi intelijen, dan standar prosedur keamanan yang harmonis untuk memastikan kesiapan kolektif dalam menghadapi ancaman internal maupun eksternal.

2. EU (*European Union*)

Uni Eropa (*European Union/EU*) adalah organisasi regional yang terdiri dari 27 negara anggota di Eropa yang bekerja sama dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial dengan tujuan menciptakan integrasi yang mendalam serta stabilitas kawasan. EU bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperkuat posisi global anggotanya, serta mendorong kerja sama lintas batas melalui regulasi

yang seragam dan kebijakan bersama. Berikut penjelasan rinci mengenai EU:

a. Keanggotaan dan Struktur

Keanggotaan dan struktur Uni Eropa (EU) mencakup 27 negara anggota yang bekerja sama dalam berbagai bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial untuk mencapai integrasi regional yang mendalam serta stabilitas kawasan. Struktur institusional EU meliputi Komisi Eropa sebagai badan eksekutif, Dewan Eropa sebagai forum pengambilan keputusan antarnegara anggota, Parlemen Eropa sebagai wakil rakyat, serta Mahkamah Eropa yang memastikan kepatuhan hukum, sehingga memungkinkan koordinasi kebijakan dan implementasi regulasi secara efektif di seluruh anggota (Craig & de Búrca, 2020).

Mekanisme pengambilan keputusan EU menerapkan kombinasi antara konsensus dan voting berbasis negara anggota atau populasi untuk menyeimbangkan kepentingan nasional dengan tujuan kolektif. Hal ini memungkinkan negara anggota berpartisipasi aktif dalam pembentukan kebijakan regional, menyelaraskan strategi domestik dengan agenda EU, dan memastikan integrasi yang berkelanjutan di sektor ekonomi, perdagangan, dan sosial.

b. Pasar Tunggal (*Single Market*)

Pasar tunggal (*Single Market*) Uni Eropa memungkinkan pergerakan bebas barang, jasa, modal, dan tenaga kerja di antara negara anggota, sehingga menciptakan efisiensi ekonomi dan memperluas akses pasar bagi konsumen dan perusahaan. Mekanisme ini mendorong harmonisasi regulasi, standar produk, dan prosedur administrasi di seluruh kawasan, sehingga meningkatkan daya saing industri dan memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih dalam (Barnard, 2019).

Pasar tunggal memperkuat kerjasama lintas batas, mempermudah investasi, dan menstimulasi inovasi melalui peningkatan persaingan dan efisiensi operasional. Dengan pergerakan faktor produksi yang bebas, negara anggota dapat memanfaatkan keunggulan komparatif masing-masing, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat posisi kolektif EU di pasar global.

c. Zona Euro dan Kebijakan Moneter

Zona Euro dan kebijakan moneter Uni Eropa memungkinkan 19 negara anggota menggunakan mata uang tunggal, euro, serta dikelola oleh Bank Sentral Eropa (ECB) untuk menjaga stabilitas harga, memfasilitasi perdagangan intra-regional, dan mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar antaranggota. Kebijakan moneter terpadu ini mencakup pengaturan suku bunga, pengendalian inflasi, dan intervensi pasar modal, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan integrasi ekonomi yang lebih dalam di kawasan Eurozone (De Grauwe, 2018).

Zona Euro memungkinkan koordinasi fiskal dan pengawasan ekonomi yang lebih efektif antarnegara anggota, meminimalkan risiko krisis keuangan regional, dan memberikan kepastian bagi investor serta pelaku pasar. Dengan adanya mata uang tunggal dan kebijakan moneter terpadu, EU dapat memperkuat posisi tawar kolektifnya di pasar global, meningkatkan efisiensi transaksi lintas negara, dan mendorong stabilitas ekonomi jangka panjang.

3. NAFTA/USMCA (*North American Free Trade Agreement/United States-Mexico-Canada Agreement*)

NAFTA (*North American Free Trade Agreement*) yang kemudian diperbarui menjadi USMCA (*United States-Mexico-Canada Agreement*) adalah perjanjian perdagangan bebas antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang bertujuan meningkatkan perdagangan, investasi, dan integrasi ekonomi di kawasan Amerika Utara. Perjanjian ini dirancang untuk mengurangi hambatan perdagangan, memperkuat rantai pasok regional, dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kompetitif. Berikut penjelasan rinci mengenai NAFTA/USMCA:

a. Liberalisasi Perdagangan

Liberalisasi perdagangan dalam NAFTA bertujuan menghilangkan atau mengurangi tarif dan hambatan non-tarif antar Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, sehingga mendorong pertumbuhan perdagangan intra-regional dan memperluas akses pasar bagi perusahaan di ketiga negara. Proses ini memungkinkan aliran barang dan jasa lebih efisien,

meningkatkan spesialisasi industri, serta mendorong daya saing produk regional di pasar global (Villarreal & Fergusson, 2019). Liberalisasi perdagangan NAFTA meningkatkan peluang investasi lintas batas dan memperkuat integrasi rantai pasok regional, terutama di sektor otomotif, manufaktur, dan pertanian. Dengan mekanisme ini, perusahaan dapat memanfaatkan keunggulan komparatif masing-masing negara anggota, menurunkan biaya produksi, dan memperkuat posisi ekonomi kawasan di kancah internasional.

b. Investasi dan Mobilitas Modal

Investasi dan mobilitas modal dalam NAFTA mendorong arus modal lintas batas dengan memberikan perlindungan hukum bagi investor dari Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, sehingga menciptakan kepastian untuk menanamkan modal secara produktif dan memperkuat kapasitas ekonomi regional. Mekanisme ini tidak hanya meningkatkan aliran investasi langsung, tetapi juga mendorong transfer teknologi, pengembangan sektor industri, dan penciptaan lapangan kerja yang mendukung pertumbuhan ekonomi di ketiga negara anggota (Hufbauer & Schott, 2018).

Kemudahan mobilitas modal dalam NAFTA memperkuat integrasi pasar finansial, memfasilitasi pembiayaan proyek-proyek infrastruktur dan industri, serta meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya antarnegara. Dengan kondisi investasi yang lebih transparan dan terstandarisasi, perusahaan dan investor dapat memanfaatkan peluang pasar yang lebih luas, mengoptimalkan keuntungan, dan memperkuat daya saing kawasan di tingkat global.

c. Rantai Pasok dan Integrasi Industri

Rantai pasok dan integrasi industri dalam NAFTA memungkinkan perusahaan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko untuk membangun jaringan produksi lintas negara yang efisien, khususnya di sektor otomotif, manufaktur, dan agribisnis, sehingga menurunkan biaya produksi dan meningkatkan daya saing produk di pasar global. Integrasi ini mendorong pemanfaatan keunggulan komparatif masing-masing negara anggota, memperkuat kolaborasi industri, dan memperluas akses terhadap teknologi serta sumber daya yang

dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi (Burfisher, Robinson, & Thierfelder, 2019).

Mekanisme rantai pasok lintas negara di bawah NAFTA mempercepat aliran komponen dan bahan baku, meminimalkan hambatan logistik, dan meningkatkan fleksibilitas produksi untuk memenuhi permintaan pasar regional maupun global. Integrasi industri ini juga memperkuat koordinasi kebijakan perdagangan dan regulasi teknis antaranggota, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di seluruh kawasan.

D. Tantangan dan Kritik Globalisasi

Globalisasi menghadirkan berbagai manfaat ekonomi, sosial, dan teknologi, namun juga menimbulkan tantangan dan kritik yang signifikan bagi negara, masyarakat, dan lingkungan. Berikut penjelasan rinci mengenai tantangan dan kritik globalisasi:

1. Ketimpangan Ekonomi

Ketimpangan ekonomi merupakan salah satu tantangan utama globalisasi, di mana manfaat pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional tidak didistribusikan secara merata baik antarnegara maupun di dalam negara itu sendiri. Negara dengan akses lebih besar terhadap teknologi, modal, dan pendidikan cenderung memperoleh keuntungan lebih besar, sementara kelompok yang kurang beruntung tetap tertinggal, sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan dan kesempatan ekonomi (Milanovic, 2019).

Globalisasi mendorong konsentrasi kekayaan di kota-kota besar dan sektor-sektor tertentu, sementara daerah pedesaan dan industri tradisional sering mengalami stagnasi atau penurunan ekonomi. Hal ini memicu migrasi internal, urbanisasi cepat, dan tekanan sosial yang meningkat, serta menimbulkan perasaan ketidakadilan di masyarakat yang tertinggal.

2. Kerentanan Ekonomi dan Krisis Finansial

Kerentanan ekonomi dan krisis finansial merupakan tantangan signifikan dari globalisasi, karena keterhubungan ekonomi antarnegara

memungkinkan guncangan finansial di satu negara dengan cepat menyebar ke negara lain melalui perdagangan, aliran modal, dan pasar keuangan global. Ketergantungan pada pasar internasional dan fluktuasi investasi asing meningkatkan risiko instabilitas ekonomi, sehingga negara-negara dengan struktur ekonomi yang lemah lebih rentan terhadap krisis fiskal dan moneter (Reinhart & Rogoff, 2019).

Liberalisasi pasar finansial yang didorong oleh globalisasi mempercepat mobilitas modal, namun juga meningkatkan volatilitas pasar dan spekulasi jangka pendek yang dapat memicu krisis likuiditas. Negara-negara berkembang khususnya menghadapi kesulitan dalam menahan dampak krisis eksternal, karena cadangan devisa yang terbatas dan sistem keuangan domestik yang kurang matang.

3. Degradasi Lingkungan

Degradasi lingkungan merupakan tantangan penting dari globalisasi karena ekspansi perdagangan, industrialisasi, dan investasi asing sering meningkatkan tekanan terhadap sumber daya alam, polusi, dan emisi karbon, sehingga mempercepat perubahan iklim. Aktivitas ekonomi yang terintegrasi secara global mendorong eksploitasi lahan, deforestasi, dan overfishing, yang berdampak negatif pada ekosistem dan keberlanjutan lingkungan (Rockström et al., 2021).

Persaingan global untuk produksi murah dan efisiensi mendorong perusahaan menggunakan praktik yang merusak lingkungan, termasuk penggunaan bahan kimia berbahaya, limbah industri, dan polusi udara. Negara-negara berkembang sering menghadapi dilema antara menarik investasi asing dan menjaga kelestarian lingkungan, yang menyebabkan regulasi lingkungan kurang efektif atau diabaikan.

4. Erosi Budaya dan Identitas Lokal

Erosi budaya dan identitas lokal merupakan tantangan penting dari globalisasi karena arus informasi, produk, dan gaya hidup global yang masif sering menggeser nilai, tradisi, dan praktik budaya lokal, sehingga mengancam keberagaman budaya. Dominasi budaya global, terutama dari negara-negara maju, dapat mempengaruhi pola konsumsi, bahasa, dan sistem nilai masyarakat lokal, sehingga menimbulkan homogenisasi budaya yang mengikis identitas tradisional (Tomlinson, 2020).

Penetrasi media internasional dan platform digital mempercepat penyebaran budaya populer global, sehingga generasi muda lebih mudah mengadopsi norma, gaya hidup, dan preferensi asing dibandingkan warisan budaya lokal. Kondisi ini menimbulkan konflik nilai antara generasi, dan kadang memunculkan resistensi sosial yang mencoba mempertahankan tradisi serta praktik budaya asli.

E. Study Case

1. Studi Kasus: Dampak Globalisasi terhadap Industri Otomotif di Meksiko

Meksiko telah menjadi salah satu negara yang paling terdampak oleh globalisasi ekonomi melalui integrasinya dalam rantai pasok global otomotif, terutama setelah bergabung dengan NAFTA (sekarang USMCA). Liberalisasi perdagangan membuka pasar domestik bagi investor asing dan perusahaan multinasional, sehingga pabrik otomotif dari Amerika Serikat dan Kanada mulai membangun fasilitas produksi di Meksiko untuk memanfaatkan biaya tenaga kerja yang lebih rendah. Dampak positifnya terlihat pada peningkatan investasi asing langsung (FDI), penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi lokal di beberapa kawasan industri.

Globalisasi juga menimbulkan tantangan ekonomi politik bagi Meksiko. Ketergantungan pada perusahaan asing dan rantai pasok global membuat industri domestik rentan terhadap fluktuasi ekonomi luar negeri dan keputusan perusahaan multinasional. Misalnya, kebijakan proteksionis atau tarif dari AS dapat langsung memengaruhi produksi dan ekspor Meksiko, menunjukkan kerentanan ekonomi yang meningkat akibat interkoneksi global. Selain itu, konsentrasi industri otomotif di beberapa kota besar menciptakan ketimpangan regional dan sosial, memperlebar kesenjangan ekonomi antara kawasan perkotaan dan pedesaan.

Dari perspektif politik, pemerintah Meksiko menghadapi tekanan untuk menyeimbangkan kepentingan investor asing dan kepentingan domestik. Regulasi industri dan kebijakan pajak harus disesuaikan agar tetap menarik investasi asing, namun juga mendorong pembangunan ekonomi inklusif dan perlindungan tenaga kerja lokal. Kasus ini menunjukkan bagaimana globalisasi menciptakan peluang ekonomi sekaligus tantangan politik yang membutuhkan strategi

kebijakan yang cermat agar manfaat ekonomi dapat dinikmati secara berkelanjutan.

BAB XIV

EKONOMI POLITIK MEDIA DAN TEKNOLOGI

Ekonomi politik media dan teknologi mempelajari hubungan antara kekuasaan politik, kepentingan ekonomi, dan perkembangan teknologi dalam produksi, distribusi, dan konsumsi informasi. Fenomena ini membahas bagaimana media dan teknologi tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga instrumen pengaruh politik dan alat strategi ekonomi yang kompleks.

A. Media Sebagai Alat Produksi Wacana Politik

Media berperan sebagai alat utama dalam produksi wacana politik dalam kerangka ekonomi politik karena kemampuannya membentuk opini publik, memengaruhi persepsi, dan menegaskan agenda politik tertentu. Media tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga menentukan narasi mana yang dominan dan mana yang diabaikan, sehingga turut memengaruhi proses pengambilan keputusan politik dan legitimasi kekuasaan. Dalam kerangka ekonomi politik media, terdapat beberapa mekanisme utama media sebagai alat produksi wacana politik, antara lain:

1. Agenda Setting

Agenda setting merupakan mekanisme utama media dalam membentuk wacana politik karena media memiliki kemampuan untuk membahas isu tertentu sehingga dianggap penting oleh masyarakat dan pembuat kebijakan. Dengan menekankan topik tertentu melalui frekuensi pemberitaan, penempatan, dan framing berita, media tidak hanya memengaruhi perhatian publik tetapi juga membentuk prioritas politik yang dijadikan dasar pengambilan keputusan, sehingga isu yang diabaikan cenderung kehilangan relevansi sosial dan politik.

Agenda setting memungkinkan media untuk mengarahkan diskusi publik dan membatasi cakupan wacana politik dengan menonjolkan perspektif tertentu dan menyederhanakan isu yang kompleks. Proses ini menunjukkan bahwa kekuasaan politik dan ekonomi yang terkait dengan kepemilikan media dapat memperkuat pengaruh tertentu, sehingga wacana politik menjadi produk interaksi antara media, masyarakat, dan struktur kekuasaan (McCombs, 2019).

2. Framing

Framing merupakan mekanisme utama media dalam produksi wacana politik karena media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membentuk cara masyarakat memahami dan menafsirkan suatu peristiwa melalui sudut pandang, konteks, dan penekanan tertentu. Dengan memilih aspek tertentu dari isu untuk ditonjolkan dan mengabaikan aspek lainnya, media dapat memengaruhi interpretasi publik terhadap peristiwa politik dan membentuk opini serta sikap yang mendukung kepentingan tertentu.

Proses framing juga memungkinkan media untuk menciptakan narasi yang konsisten dan menyederhanakan isu kompleks agar lebih mudah diterima oleh masyarakat, sehingga memengaruhi persepsi tentang prioritas dan urgensi masalah politik. Mekanisme ini memperlihatkan bahwa wacana politik bukan sekadar hasil interaksi masyarakat dengan informasi, tetapi juga produk dari strategi komunikasi yang diatur oleh kepentingan ekonomi dan politik yang mengendalikan media (Entman, 2020).

3. Representasi Elite

Representasi elite merupakan mekanisme penting dalam produksi wacana politik karena media cenderung memberikan ruang lebih besar bagi aktor politik, pejabat pemerintah, dan kelompok berkuasa untuk menyampaikan pandangannya. Melalui dominasi suara elite ini, media membentuk arus informasi yang tidak seimbang, sehingga opini publik lebih banyak dipengaruhi oleh perspektif kelompok yang memiliki kekuasaan politik dan akses ekonomi (Gilens, 2018).

Representasi elite memungkinkan media untuk menegaskan legitimasi kekuasaan melalui pemberitaan yang menampilkan elite sebagai sumber utama informasi politik, sehingga mempersempit ruang

bagi kelompok marginal atau oposisi untuk bersuara. Mekanisme ini memperlihatkan bahwa struktur kepemilikan dan kepentingan media ikut menentukan siapa yang berhak tampil dalam wacana publik, sehingga wacana politik yang beredar di masyarakat menjadi cerminan interaksi antara kepentingan elite, institusi media, dan struktur kekuasaan yang dominan.

4. Kontrol Simbolik dan Naratif

Kontrol simbolik dan naratif merupakan mekanisme penting media dalam produksi wacana politik karena media memiliki kemampuan untuk membentuk makna melalui penggunaan simbol, bahasa, citra, dan metafora yang memengaruhi cara masyarakat memahami isu politik tertentu. Dengan memilih simbol dan narasi yang menonjolkan aktor tertentu sebagai positif atau negatif, serta menyederhanakan realitas politik ke dalam representasi yang mudah diterima publik, media dapat membangun persepsi kolektif yang menguntungkan kepentingan tertentu dan membatasi penafsiran alternatif (Thompson, 2019).

Kontrol simbolik dan naratif memungkinkan media untuk menciptakan konteks emosional dan interpretatif yang mengarahkan cara masyarakat menilai situasi politik, sehingga wacana publik terbentuk bukan hanya dari fakta, tetapi juga dari konstruksi makna yang dirancang oleh media. Mekanisme ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan ekonomi dan politik yang berada di balik institusi media dapat mempengaruhi orientasi pemikiran masyarakat melalui pengelolaan simbol dan cerita, sehingga wacana politik menjadi arena pertarungan makna yang sangat dipengaruhi struktur kekuasaan dominan.

B. Politik Informasi dan Ekonomi Digital

Politik informasi dan ekonomi digital merujuk pada dinamika kekuasaan, kontrol, serta distribusi sumber daya informasi dalam era digital yang semakin terhubung dan berbasis data. Dalam konteks ini, informasi menjadi komoditas strategis yang tidak hanya menentukan arus komunikasi, tetapi juga memengaruhi keputusan politik, persaingan ekonomi, dan struktur sosial. Kekuasaan dalam ekonomi digital tidak lagi hanya bertumpu pada modal fisik, tetapi juga pada

kemampuan mengendalikan data, algoritma, dan infrastruktur digital yang menjadi fondasi bagi berbagai platform teknologi. Untuk memahami politik informasi dan ekonomi digital secara lebih mendalam, terdapat sejumlah aspek utama yang dapat dijadikan landasan analisis:

1. Kontrol atas Data sebagai Sumber Kekuasaan Baru

Kontrol atas data sebagai sumber kekuasaan baru muncul karena data telah menjadi aset strategis yang mampu memengaruhi keputusan politik, perilaku ekonomi, dan arah pembangunan sosial dalam skala global, sehingga aktor yang menguasainya memiliki kemampuan menentukan arus informasi dan preferensi masyarakat. Penguasaan data oleh perusahaan teknologi besar menciptakan asimetri kekuasaan antara institusi yang mampu mengolah data dalam jumlah besar dan masyarakat yang menjadi objek pemantauan digital tanpa memiliki kontrol atas informasi pribadi. Kondisi ini menghasilkan bentuk kekuasaan baru yang tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga politis karena data memungkinkan pengendalian perilaku melalui prediksi dan personalisasi informasi (Zuboff, 2019).

Kontrol data menciptakan struktur kekuasaan yang berlapis di mana perusahaan teknologi dapat memetakan perilaku masyarakat secara rinci dan kemudian menjadikannya bahan analisis untuk mengarahkan keputusan publik, konsumsi, dan pola interaksi sosial secara halus tanpa disadari. Praktik ini membuat data menjadi instrumen dominan dalam ekonomi digital karena ia memungkinkan pembentukan pasar baru, penguatan dominasi korporasi, serta penciptaan ketergantungan negara terhadap infrastruktur digital yang dikendalikan. Pada akhirnya, data berfungsi sebagai modal politik yang memperluas yurisdiksi kekuasaan teknologi ke wilayah-wilayah yang sebelumnya berada di bawah kendali pemerintah.

2. Peran Algoritma dalam Pembentukan Persepsi Publik

Algoritma memiliki peran sentral dalam pembentukan persepsi publik karena mekanisme pemilahan, pengurutan, dan rekomendasi konten yang digunakan platform digital secara langsung menentukan informasi apa yang terlihat, diperhatikan, dan dianggap relevan oleh masyarakat, sehingga persepsi dibentuk melalui seleksi otomatis yang tidak disadari pengguna. Dengan menonjolkan konten yang dianggap

paling sesuai dengan preferensi pengguna berdasarkan pola interaksi digital, algoritma menciptakan pengalaman informasi yang sangat terpersonalisasi dan mempersempit ruang pandang masyarakat terhadap isu-isu yang lebih luas (Napoli, 2019). Kondisi ini membuat algoritma tidak sekadar alat teknis, tetapi sebuah instrumen politik yang memengaruhi bagaimana realitas sosial dikonstruksi dalam ruang digital melalui proses kurasi otomatis yang menguntungkan kepentingan platform.

Algoritma beroperasi dalam logika komersial yang memprioritaskan konten yang mampu mempertahankan perhatian pengguna, sehingga informasi yang paling emosional, kontroversial, atau memicu reaksi cenderung lebih sering ditampilkan dibandingkan informasi objektif atau edukatif. Situasi ini memperlihatkan bahwa pembentukan persepsi publik sering kali tidak didorong oleh kualitas informasi, melainkan oleh potensi konten tersebut menghasilkan keterlibatan yang tinggi bagi kepentingan bisnis platform digital. Akibatnya, masyarakat terpapar pada pola informasi yang memperkuat bias, memicu polarisasi, dan membentuk opini berdasarkan konten yang secara algoritmik dimaksimalkan, bukan berdasarkan kebutuhan informasi yang sehat bagi ruang publik demokratis.

3. Monopoli Platform Digital dan Konsentrasi Kekuasaan

Monopoli platform digital dan konsentrasi kekuasaan muncul ketika segelintir perusahaan teknologi menguasai infrastruktur informasi, jaringan pengguna, dan ekosistem data dalam skala besar sehingga kemampuan untuk mengendalikan akses pasar dan arus informasi jauh melampaui aktor lain dalam ekonomi digital. Situasi ini menciptakan dominasi struktural yang sulit ditantang karena kekuatan platform bukan hanya berasal dari modal finansial, tetapi dari integrasi vertikal dan kepemilikan data yang memungkinkan menentukan standar perilaku ekonomi dan sosial di ruang digital (Khan, 2019). Dengan demikian, monopoli platform tidak hanya menghambat kompetisi, tetapi juga menciptakan ketergantungan masyarakat dan negara terhadap sistem digital yang dikendalikan sepenuhnya.

Konsentrasi kekuasaan platform digital memperkuat posisinya sebagai penentu utama perilaku pasar dan pola interaksi sosial karena mengatur algoritma distribusi konten, struktur permintaan konsumen, dan dinamika transaksi digital yang berlangsung dalam ekosistem

tertutup. Mekanisme kontrol ini memberikan kemampuan bagi platform untuk memprioritaskan produk, informasi, atau layanan tertentu sesuai dengan kepentingan internal, sehingga keputusan ekonomi dan sosial masyarakat menjadi semakin terpengaruh oleh kebijakan komersial yang tidak transparan. Ketimpangan kekuasaan ini memperluas dominasi platform ke ranah publik karena menjadi penentu arah perkembangan ekonomi, budaya, dan politik melalui kekuatan teknis yang sulit dipertanggungjawabkan secara demokratis.

C. *Big Data*, AI dan Pengaruhnya terhadap Demokrasi

Big Data dan kecerdasan buatan (AI) telah menjadi kekuatan utama dalam membentuk dinamika politik modern, terutama dalam konteks demokrasi, karena kemampuan keduanya dalam mengumpulkan, mengolah, dan memprediksi perilaku masyarakat secara masif dan cepat. Integrasi *Big Data* dan AI memungkinkan analisis pola politik, segmentasi pemilih, serta penyebaran informasi yang lebih terarah, namun sekaligus membuka ruang bagi manipulasi opini publik dan penyalahgunaan data. Dalam lingkungan demokratis, teknologi ini dapat memperkuat transparansi dan efisiensi pengambilan keputusan, tetapi juga berpotensi mengancam privasi, etika, dan keadilan politik.

1. *Big Data*

Big Data adalah kumpulan data yang sangat besar, beragam, dan terus berkembang, yang berasal dari berbagai aktivitas digital masyarakat, seperti media sosial, transaksi online, sensor publik, survei digital, dan layanan pemerintah. Dalam konteks demokrasi, *Big Data* memiliki peran strategis karena kemampuannya untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis perilaku serta opini publik secara cepat dan akurat.

Gambar 5. *Big Data*



Sumber: *Corporate Training*

Dengan pemanfaatan yang tepat, *Big Data* dapat memperkuat partisipasi warga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Meski demikian, penggunaan *Big Data* juga menimbulkan tantangan, termasuk potensi manipulasi opini publik, bias analisis, dan risiko pelanggaran privasi. Berikut ini adalah pengaruh *Big Data* terhadap demokrasi:

a. Meningkatkan Partisipasi Publik

Meningkatkan partisipasi publik merupakan salah satu pengaruh *Big Data* terhadap demokrasi karena memungkinkan pemerintah menganalisis opini, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat secara real-time melalui data dari media sosial, survei online, dan interaksi digital, sehingga proses pengambilan keputusan dapat lebih responsif terhadap isu-isu yang menjadi perhatian warga (Klievink & Janssen, 2019). Dengan pemahaman ini, pemerintah dapat merancang mekanisme konsultasi publik dan platform e-participation yang mempermudah warga menyampaikan masukan dan terlibat langsung dalam proses demokrasi.

Big Data membantu mengidentifikasi kelompok masyarakat yang kurang terdengar suaranya sehingga kebijakan publik

dapat lebih inklusif dan sesuai kebutuhan nyata warga. Analisis data ini juga mendorong interaksi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, sehingga partisipasi publik meningkat dan legitimasi demokrasi semakin kuat.

b. Memperkuat Transparansi dan Akuntabilitas

Pemanfaatan *Big Data* dalam demokrasi berperan penting dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas karena data besar memungkinkan pemantauan penggunaan anggaran, implementasi kebijakan, dan kinerja lembaga publik secara lebih terbuka, sehingga masyarakat dan media dapat mengawasi jalannya pemerintahan secara real-time (Janssen et al., 2018). Dengan akses informasi yang lebih luas ini, warga dapat menilai efektivitas program pemerintah dan mendeteksi potensi penyalahgunaan sumber daya, sehingga mekanisme kontrol sosial terhadap pemerintah menjadi lebih kuat.

Integrasi *Big Data* dalam tata kelola publik mendukung pembuatan laporan dan dashboard interaktif yang menampilkan kinerja lembaga secara jelas, sehingga akuntabilitas pejabat publik dapat ditingkatkan dan kepercayaan warga terhadap institusi demokrasi tumbuh. Penggunaan analitik data ini memungkinkan pemerintah melakukan evaluasi kebijakan secara terus-menerus dan memperbaiki proses pelayanan publik berdasarkan bukti empiris yang tersedia, sehingga keputusan yang diambil lebih transparan dan bertanggung jawab.

c. Mendukung Pengambilan Keputusan Berbasis Bukti

Big Data berperan dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti dalam demokrasi karena memungkinkan pemerintah dan lembaga publik menganalisis data masyarakat secara real-time untuk merumuskan kebijakan yang lebih akurat, relevan, dan responsif terhadap kebutuhan warga (Mergel et al., 2019). Dengan memanfaatkan analitik data dari berbagai sumber, termasuk survei digital, media sosial, dan sensor publik, pengambilan keputusan tidak lagi bergantung pada intuisi atau asumsi semata, melainkan berdasarkan bukti empiris yang konkret.

Integrasi *Big Data* memungkinkan evaluasi dan penyesuaian kebijakan secara berkelanjutan, sehingga setiap program publik dapat terus dioptimalkan sesuai perkembangan sosial dan tren

masyarakat. Proses ini meningkatkan efektivitas pelayanan publik, meminimalkan risiko kesalahan kebijakan, dan memperkuat legitimasi demokrasi karena keputusan yang diambil lebih transparan dan berbasis fakta.

2. *Artificial Intelligence* (AI)

Artificial Intelligence (AI) adalah cabang ilmu komputer yang memungkinkan sistem digital untuk belajar, mengenali pola, memproses informasi, dan membuat keputusan secara otomatis. AI semakin banyak digunakan di berbagai sektor, mulai dari bisnis, kesehatan, pendidikan, hingga pemerintahan. Dalam konteks demokrasi, AI memiliki peran strategis karena mampu menganalisis data besar, memprediksi perilaku publik, dan mengoptimalkan proses pengambilan keputusan. Namun, penggunaan AI juga membawa risiko signifikan, seperti manipulasi opini publik, penyebaran disinformasi, bias algoritma, dan potensi pelanggaran privasi. Oleh karena itu, pengaruh AI terhadap demokrasi bersifat ganda: dapat memperkuat proses demokratis, tetapi juga menimbulkan tantangan etis dan politik. Berikut ini adalah pengaruh AI terhadap demokrasi:

a. Memperkuat Partisipasi Publik dan Keterlibatan Warga

Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dalam demokrasi dapat memperkuat partisipasi publik dan keterlibatan warga karena sistem AI mampu menganalisis data dari survei online, media sosial, dan platform konsultasi digital untuk memahami aspirasi, preferensi, dan opini masyarakat secara real-time, sehingga warga lebih mudah terlibat dalam pengambilan keputusan politik secara aktif (Zheng et al., 2020). Dengan dukungan AI, pemerintah dapat mengembangkan chatbot, asisten virtual, dan platform e-participation yang mempermudah akses informasi publik serta menyalurkan masukan dari warga, sehingga interaksi antara pemerintah dan masyarakat menjadi lebih dinamis dan partisipatif.

AI memungkinkan identifikasi kelompok masyarakat yang sebelumnya kurang terdengar suaranya, sehingga mekanisme partisipasi dapat dibuat lebih inklusif dan representatif, sementara analisis data cerdas memungkinkan tindak lanjut yang lebih cepat terhadap aspirasi publik. Pendekatan ini meningkatkan rasa kepemilikan warga terhadap kebijakan

publik dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses demokrasi, sehingga legitimasi dan kualitas demokrasi secara keseluruhan dapat diperkuat.

b. Meningkatkan Efisiensi Pengambilan Keputusan Pemerintah

Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dapat meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan pemerintah dalam demokrasi karena sistem AI mampu menganalisis data besar secara cepat dan akurat, termasuk tren sosial, kebutuhan publik, serta potensi masalah sebelum terjadi, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan responsif (Mergel et al., 2019). Dengan kemampuan prediksi dan otomatisasi ini, pemerintah dapat memproses informasi kompleks dari berbagai sektor secara simultan, sehingga waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan berkurang secara signifikan tanpa mengorbankan kualitas kebijakan.

AI memungkinkan evaluasi dan pemantauan kebijakan secara berkelanjutan melalui analitik data real-time, sehingga setiap program publik dapat terus disesuaikan dengan perubahan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat legitimasi demokrasi karena keputusan pemerintah didasarkan pada informasi yang objektif dan berbasis bukti.

c. Deteksi dan Mitigasi Disinformasi

Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dalam demokrasi berperan penting untuk deteksi dan mitigasi disinformasi karena sistem AI mampu menganalisis konten digital secara cepat, termasuk postingan media sosial, berita online, dan konten video, sehingga hoaks, propaganda, dan ujaran kebencian dapat diidentifikasi sebelum menyebar secara luas dan merusak opini publik (Ferrara, 2020). Dengan kemampuan *machine learning* dan natural language processing, AI memungkinkan platform digital dan pemerintah untuk memverifikasi fakta secara otomatis, memberi peringatan dini terhadap konten berbahaya, dan mengambil langkah korektif sehingga informasi publik lebih akurat dan dapat dipercaya.

AI membantu meminimalkan dampak polarisasi politik dan manipulasi opini dengan memprioritaskan distribusi konten yang tervalidasi dan relevan, sementara algoritma cerdas juga

dapat memberikan rekomendasi edukatif untuk meningkatkan literasi digital warga. Pendekatan ini memperkuat kualitas demokrasi dengan menjaga integritas informasi publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses politik, dan mendorong partisipasi yang lebih rasional serta berbasis fakta.

D. Ekonomi Politik Platform Digital (Shopee, Tokopedia, dll.)

Ekonomi politik platform digital mengacu pada bagaimana perusahaan berbasis teknologi mengatur interaksi ekonomi, sosial, dan politik melalui dominasi pasar, pengelolaan data, dan pengaruh regulasi. Platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi, tetapi juga menjadi aktor yang menentukan distribusi kekuatan pasar, strategi perdagangan, dan perilaku konsumen, sekaligus memiliki pengaruh terhadap kebijakan pemerintah terkait regulasi digital dan perdagangan. Dominasi platform digital ini menimbulkan dinamika ekonomi-politik yang kompleks karena mengelola data besar, menetapkan aturan pasar internal, dan memengaruhi kebijakan publik. Berikut ini adalah aspek-aspek utama ekonomi politik platform digital yang memengaruhi pasar, pedagang, dan kebijakan publik:

1. Dominasi Pasar dan Strategi Persaingan

Dominasi pasar platform digital seperti Shopee dan Tokopedia memengaruhi dinamika ekonomi karena mampu mengontrol harga, visibilitas produk, dan akses pasar bagi konsumen serta pedagang melalui algoritma pencarian, promosi berbayar, dan struktur komisi yang ditetapkan secara internal, sehingga pedagang kecil seringkali harus menyesuaikan strategi agar tetap kompetitif (Haucap & Heimeshoff, 2018). Efek jaringan (*network effect*) memperkuat dominasi ini, karena semakin banyak pengguna dan pedagang bergabung, semakin besar kekuatan platform untuk menetapkan standar pasar dan menentukan perilaku ekonomi di ekosistem digital.

Dominasi pasar platform digital memberikannya posisi tawar yang tinggi dalam hubungan dengan pemasok, pedagang kecil, dan bahkan pemerintah, sehingga strategi persaingan yang diterapkan dapat memengaruhi struktur pasar secara keseluruhan. Keunggulan ini

memungkinkan platform besar menentukan aturan internal yang menguntungkan, seperti algoritma rekomendasi produk dan kebijakan promosi, sehingga mempengaruhi daya saing pedagang kecil dan mengubah pola distribusi ekonomi di pasar digital.

2. Pemanfaatan Data sebagai Instrumen Pengaruh Ekonomi

Platform digital seperti Shopee dan Tokopedia memanfaatkan data besar (*Big Data*) sebagai instrumen strategis untuk memengaruhi perilaku konsumen dan pedagang, karena analitik data memungkinkan platform memprediksi tren pembelian, menyesuaikan harga secara dinamis, dan mengatur rekomendasi produk sehingga menciptakan keuntungan ekonomi yang signifikan dan mengubah pola persaingan pasar (Srnicsek, 2017). Data ini tidak hanya berfungsi untuk strategi bisnis internal, tetapi juga meningkatkan posisi tawar platform terhadap pedagang dan pemasok, karena visibilitas produk dan akses pasar bergantung pada algoritma yang dikendalikan platform.

Pengumpulan dan analisis data pengguna memungkinkan platform menargetkan promosi secara personalisasi dan mengoptimalkan interaksi dengan konsumen, sehingga meningkatkan keterikatan pelanggan dan memperkuat dominasi pasar. Platform dapat memanfaatkan informasi ini untuk menyesuaikan strategi pemasaran, menentukan prioritas produk, dan memengaruhi keputusan konsumen, yang pada gilirannya menciptakan ketergantungan pedagang kecil pada platform digital.

3. Interaksi dengan Kebijakan Publik dan Regulasi

Platform digital modern sering terlibat langsung dalam proses pembuatan dan penyesuaian kebijakan publik karena bukan hanya pelaku ekonomi tapi juga aktor kebijakan yang memiliki daya tawar dan pengaruh terhadap regulasi yang mengatur pasar digital. Menurut literatur terbaru, perusahaan platform menggunakan strategi lobi dan komunikasi kebijakan untuk mempengaruhi hasil regulasi selama perumusan undang-undang seperti *Digital Services Act* di Eropa, dengan tujuan regulasi yang longgar, minimal, dan mengutamakan fleksibilitas pasar atas kontrol ketat negara (Gorwa dkk., 2024).

Dominasi platform dan akses terhadap data besar serta jangkauan pasar global membuat pemerintah dan regulator berada dalam posisi tawar yang kompleks pemerintah perlu menyeimbangkan

antara mendorong inovasi digital dan melindungi kepentingan publik, konsumen, serta pelaku usaha kecil agar persaingan tetap sehat. Karena itu, interaksi antara platform dan kebijakan publik membentuk dinamika baru dalam ekonomi-politik: regulasi tidak hanya menyesuaikan praktik ekonomi, tetapi juga beradaptasi dengan kekuatan dan strategi platform, yang pada akhirnya mempengaruhi struktur pasar, daya saing pedagang, dan perlindungan konsumen di era digital.

E. Study Case

1. Studi Kasus: Ekonomi Politik Media dan Teknologi di Era Platform Digital di Indonesia

a. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital dan media online di Indonesia telah menciptakan ekosistem baru di mana platform digital seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee bukan hanya sebagai media penyebaran konten dan transaksi, tetapi juga menjadi aktor politik-ekonomi yang memiliki pengaruh besar terhadap opini publik, perilaku konsumen, dan kebijakan pemerintah. Dominasi platform ini menghadirkan tantangan baru terkait konsentrasi kekuasaan, regulasi, dan dampak terhadap pelaku usaha kecil dan jurnalisme independen.

b. Analisis Ekonomi Politik

1) Dominasi Pasar dan Algoritma

Platform digital menggunakan algoritma untuk mengatur visibilitas konten dan produk, sehingga memengaruhi konsumsi masyarakat dan distribusi ekonomi. Misalnya, video atau produk yang direkomendasikan lebih sering akan mendapatkan jangkauan lebih luas, memberi keuntungan bagi kreator atau pedagang yang mampu memanfaatkan algoritma tersebut, sementara pesaing kecil menjadi kurang terlihat.

2) Data sebagai Instrumen Kekuasaan

Big Data yang dikumpulkan dari perilaku pengguna digunakan untuk strategi pemasaran, personalisasi konten, dan bahkan prediksi tren politik atau sosial. Data ini

memberi platform kekuatan untuk memengaruhi preferensi konsumen dan opini publik, sehingga memiliki implikasi ekonomi-politik yang signifikan.

3) Interaksi dengan Kebijakan Publik

Platform besar aktif melakukan lobi untuk mempengaruhi regulasi terkait pajak digital, perlindungan data, dan persaingan usaha. Regulasi pemerintah seringkali harus menyeimbangkan antara mendorong inovasi teknologi dan melindungi kepentingan publik, yang menunjukkan bagaimana ekonomi dan politik saling terkait dalam ekosistem media digital.

4) Dampak Sosial dan Politik

Media sosial dan platform digital menjadi alat bagi kampanye politik, penyebaran informasi, dan mobilisasi opini publik. Algoritma yang mengatur distribusi konten dapat meningkatkan polarisasi sosial jika konten disinformasi atau bias mendapatkan jangkauan lebih luas.

c. Kesimpulan

Ekonomi politik media dan teknologi di Indonesia menunjukkan bahwa platform digital memiliki peran ganda: sebagai penggerak ekonomi dan sebagai aktor politik yang memengaruhi opini publik dan kebijakan. Dominasi pasar, pengelolaan data, dan interaksi dengan regulasi menjadikan platform digital kekuatan strategis yang memerlukan pengawasan agar manfaat ekonomi dan sosial dapat dirasakan secara adil, terutama bagi pedagang kecil, kreator konten, dan masyarakat luas.

BAB XV

TANTANGAN DAN ARAH MASA DEPAN EKONOMI POLITIK

Tantangan ekonomi politik saat ini meliputi ketimpangan kekuasaan, dominasi korporasi, dan dampak globalisasi, sehingga menuntut kebijakan yang adaptif dan responsif. Masa depan ekonomi politik diperkirakan bergerak menuju digitalisasi, keberlanjutan, dan pemerataan kesejahteraan.

A. Ekonomi Hijau dan Transisi Energi

Ekonomi hijau dan transisi energi merupakan upaya strategis untuk membangun pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Konsep ini menekankan pemanfaatan sumber daya secara efisien, penggunaan energi terbarukan, dan penerapan teknologi bersih agar pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial tetapi juga berdampak positif bagi lingkungan dan kesejahteraan sosial.

1. Ekonomi Hijau

Ekonomi hijau adalah model pembangunan ekonomi yang menekankan pertumbuhan ekonomi sambil menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap degradasi lingkungan, perubahan iklim, dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan akibat model ekonomi konvensional. Ekonomi hijau mendorong penggunaan sumber daya secara efisien, penerapan teknologi bersih, pengelolaan limbah yang berkelanjutan, serta inovasi industri dan pertanian ramah lingkungan. Dengan pendekatan ini, pembangunan ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang dan pemerataan sosial. Tujuan atau sasaran utama ekonomi hijau meliputi:

- a. **Pengurangan Emisi Karbon dan Mitigasi Perubahan Iklim**

Pengurangan emisi karbon dan mitigasi perubahan iklim menjadi tujuan utama ekonomi hijau karena sektor energi dan industri merupakan penyumbang terbesar gas rumah kaca di dunia, sehingga pengurangan emisi ini dapat secara signifikan menekan laju pemanasan global dan menjaga keseimbangan ekosistem. Penerapan energi terbarukan, efisiensi energi, serta teknologi bersih menjadi strategi penting untuk menurunkan jejak karbon sambil tetap mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga negara dapat memenuhi target iklim internasional dan mendukung pembangunan berkelanjutan (Sachs, 2019).

Pengurangan emisi karbon juga berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, karena menurunkan polusi udara dan risiko bencana alam akibat perubahan iklim ekstrem. Dengan demikian, ekonomi hijau yang berfokus pada mitigasi emisi dapat menciptakan sinergi antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan, sekaligus mempersiapkan masyarakat menghadapi tantangan iklim di masa depan.
- b. **Pelestarian Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati**

Pelestarian sumber daya alam dan keanekaragaman hayati merupakan sasaran utama ekonomi hijau karena keberlanjutan ekosistem menjadi fondasi bagi ketahanan pangan, kualitas air, dan stabilitas iklim, sehingga menjaga keanekaragaman hayati secara langsung mendukung kesejahteraan manusia dan kelangsungan produksi ekonomi. Strategi konservasi, rehabilitasi habitat, dan pengelolaan sumber daya alam berbasis keberlanjutan memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang efisien tanpa merusak ekosistem, sehingga pembangunan ekonomi tetap sejalan dengan pelestarian lingkungan (Rockström et al., 2018).

Pelestarian keanekaragaman hayati juga berperan penting dalam mencegah degradasi tanah, mengurangi risiko bencana ekologis, dan menjaga fungsi ekosistem yang vital bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, ekonomi hijau yang menempatkan pelestarian sumber daya alam sebagai prioritas dapat menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi,

perlindungan lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

c. **Ketahanan Energi dan Diversifikasi Sumber Energi**

Ketahanan energi dan diversifikasi sumber energi menjadi tujuan utama ekonomi hijau karena ketergantungan pada satu jenis energi, terutama bahan bakar fosil, meningkatkan risiko pasokan dan kerentanan terhadap fluktuasi harga global, sehingga diversifikasi energi diperlukan untuk memastikan ketersediaan energi yang stabil dan aman bagi pembangunan ekonomi. Penerapan energi terbarukan seperti surya, angin, biomassa, dan energi hidro, serta pengembangan infrastruktur penyimpanan energi, memungkinkan negara meningkatkan ketahanan energi sekaligus mengurangi dampak lingkungan dari energi fosil (IRENA, 2019).

Diversifikasi sumber energi mendukung transisi energi yang berkelanjutan, mendorong inovasi teknologi, dan membuka peluang ekonomi baru melalui pengembangan industri energi hijau. Dengan demikian, fokus pada ketahanan energi dan diversifikasi tidak hanya memperkuat keamanan energi nasional, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan tujuan lingkungan dan keberlanjutan jangka panjang.

2. Transisi Energi

Transisi energi adalah proses pergeseran dari sistem energi berbasis bahan bakar fosil menuju sumber energi yang lebih bersih, terbarukan, dan berkelanjutan. Tujuan utama transisi energi adalah mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan ketahanan energi, dan mendukung pembangunan ekonomi hijau. Proses ini tidak hanya melibatkan penggantian sumber energi, tetapi juga transformasi infrastruktur, teknologi, kebijakan, dan pola konsumsi energi. Transisi energi dianggap sebagai langkah strategis untuk menghadapi perubahan iklim global sekaligus mendorong inovasi teknologi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Beberapa fokus utama dalam transisi energi meliputi:

a. **Pemanfaatan Energi Terbarukan Secara Maksimal**

Pemanfaatan energi terbarukan secara maksimal menjadi fokus utama dalam transisi energi karena penggantian bahan bakar fosil dengan energi surya, angin, hidro, dan biomassa dapat secara signifikan mengurangi emisi gas rumah kaca serta memperkuat ketahanan energi nasional. Peningkatan kapasitas pembangkit energi terbarukan, integrasi ke jaringan listrik, dan inovasi teknologi penyimpanan energi memungkinkan pemanfaatan sumber energi bersih secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (REN21, 2020).

Pemanfaatan energi terbarukan secara maksimal juga mendorong penciptaan lapangan kerja hijau, pengembangan industri lokal, dan diversifikasi ekonomi, sehingga transisi energi tidak hanya berdampak pada lingkungan tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi. Dengan demikian, fokus pada energi terbarukan menjadi strategi utama untuk mewujudkan sistem energi yang lebih bersih, efisien, dan berkelanjutan bagi generasi saat ini dan mendatang.

b. Peningkatan Efisiensi Energi

Peningkatan efisiensi energi menjadi fokus utama dalam transisi energi karena penggunaan energi yang lebih hemat dan optimal di sektor industri, transportasi, dan rumah tangga dapat menurunkan konsumsi energi total sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca tanpa mengorbankan produktivitas dan kenyamanan. Implementasi teknologi hemat energi, sistem manajemen energi, serta modernisasi peralatan dan infrastruktur memungkinkan pemanfaatan energi secara lebih cerdas dan berkelanjutan, sehingga mendukung tujuan ekonomi hijau dan ketahanan energi nasional (IEA, 2018).

Efisiensi energi juga memberikan manfaat ekonomi langsung berupa pengurangan biaya operasional dan investasi jangka panjang, sekaligus meningkatkan daya saing industri serta menciptakan peluang inovasi teknologi baru. Dengan demikian, fokus pada peningkatan efisiensi energi menjadi strategi kunci dalam transisi energi yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga menguntungkan secara ekonomi dan sosial.

c. Implementasi Infrastruktur Energi Pintar (*Smart Grid*)

Implementasi infrastruktur energi pintar (*smart grid*) menjadi fokus utama dalam transisi energi karena sistem ini memungkinkan pemantauan, pengendalian, dan distribusi energi secara real-time, sehingga meningkatkan efisiensi, keandalan, dan integrasi sumber energi terbarukan ke dalam jaringan listrik. Dengan memanfaatkan teknologi digital, sensor canggih, dan sistem komunikasi yang terintegrasi, *smart grid* dapat mengoptimalkan penggunaan energi, mengurangi pemborosan, dan mendukung stabilitas pasokan listrik di berbagai sektor (Gungor et al., 2019).

Smart grid juga mendorong partisipasi konsumen melalui pengelolaan konsumsi energi yang cerdas, mendukung pengembangan kendaraan listrik, dan memperkuat ketahanan energi nasional. Dengan demikian, fokus pada implementasi *smart grid* menjadi strategi kunci dalam transisi energi yang tidak hanya meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem energi, tetapi juga mempercepat pergeseran menuju energi bersih dan berkelanjutan.

B. Geopolitik dan Ekonomi Global Masa Depan

Geopolitik dan ekonomi global masa depan mencerminkan hubungan kompleks antara kekuatan politik, ekonomi, teknologi, dan sumber daya alam yang menentukan dinamika pembangunan dan stabilitas global. Dalam beberapa dekade terakhir, munculnya kekuatan ekonomi baru, pergeseran aliansi politik, serta persaingan strategis untuk sumber daya energi, air, dan pangan telah mengubah lanskap global. Faktor-faktor seperti perubahan iklim, digitalisasi, revolusi industri 4.0, dan globalisasi ekonomi juga semakin memengaruhi kebijakan nasional dan hubungan antarnegara. Di masa depan, geopolitik dan ekonomi global diprediksi akan ditandai oleh persaingan multipolar, integrasi ekonomi regional, dan ketergantungan teknologi tinggi, sehingga negara-negara dituntut lebih adaptif dan strategis dalam menghadapi risiko dan peluang global. Beberapa fokus utama yang membentuk arah geopolitik dan ekonomi global masa depan meliputi:

1. Persaingan Kekuasaan dan Aliansi Strategis

Persaingan kekuasaan dan aliansi strategis menjadi fokus utama yang membentuk arah geopolitik dan ekonomi global masa depan karena negara-negara besar berupaya mempertahankan atau memperluas pengaruh politik, ekonomi, dan militer di tengah dinamika multipolar dunia. Pembentukan aliansi strategis, baik melalui kerjasama bilateral maupun multilateral, digunakan sebagai instrumen untuk memperkuat posisi tawar dalam negosiasi perdagangan, akses terhadap sumber daya vital, dan pengaruh regional, sehingga mampu mengarahkan arah kebijakan global secara signifikan (Friedberg, 2018).

Persaingan ini juga memengaruhi distribusi investasi global dan alokasi sumber daya strategis, karena negara-negara saling bersaing untuk mengamankan pasokan energi, bahan baku, dan teknologi kritis. Kondisi ini mendorong inovasi dalam kebijakan ekonomi dan keamanan nasional, sekaligus meningkatkan pentingnya diplomasi dan strategi pertahanan dalam menjaga kepentingan nasional di arena internasional.

2. Pengelolaan Sumber Daya Vital

Pengelolaan sumber daya vital menjadi fokus utama yang membentuk arah geopolitik dan ekonomi global masa depan karena akses terhadap energi, air, pangan, dan mineral strategis menentukan kekuatan ekonomi dan stabilitas politik suatu negara. Negara-negara berupaya mengamankan pasokan sumber daya ini melalui kerjasama internasional, investasi luar negeri, dan kebijakan domestik yang strategis agar dapat mempertahankan kedaulatan sekaligus meningkatkan daya saing global (Klare, 2019).

Pengelolaan sumber daya vital juga memengaruhi aliansi geopolitik, karena negara-negara yang memiliki kelebihan sumber daya dapat membentuk jaringan perdagangan dan diplomasi yang menguntungkan, sementara negara yang bergantung pada impor harus menyesuaikan kebijakan luar negeri untuk mengamankan pasokan. Hal ini mendorong munculnya strategi diversifikasi, efisiensi penggunaan, dan inovasi teknologi untuk memaksimalkan manfaat sumber daya sambil meminimalkan risiko ketergantungan.

3. Transformasi Teknologi dan Digitalisasi

Transformasi teknologi dan digitalisasi menjadi fokus utama yang membentuk arah geopolitik dan ekonomi global masa depan karena adopsi teknologi canggih, seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan *internet of things*, memengaruhi produktivitas ekonomi, keamanan siber, dan daya saing negara di kancah internasional. Negara-negara yang berhasil menguasai teknologi strategis dapat memperkuat posisi geopolitik melalui inovasi industri, kendali informasi, dan kemampuan militer digital, sehingga teknologi menjadi instrumen utama dalam memetakan kekuatan global (Allison, 2020).

Transformasi digital mendorong integrasi ekonomi global melalui perdagangan elektronik, platform digital, dan sistem logistik pintar, yang meningkatkan efisiensi rantai pasok dan akses pasar internasional. Proses ini juga menuntut regulasi, kebijakan, dan investasi infrastruktur yang adaptif agar manfaat teknologi dapat dimaksimalkan tanpa menimbulkan ketimpangan sosial atau kerentanan terhadap serangan siber.

C. Digitalisasi dan Ekonomi Platform

Digitalisasi dan ekonomi platform telah menjadi kekuatan utama yang membentuk lanskap ekonomi politik global. Transformasi ini tidak hanya mengubah cara transaksi ekonomi dilakukan, tetapi juga memengaruhi distribusi kekuasaan politik, regulasi negara, dan struktur pasar secara keseluruhan. Beberapa aspek utama yang muncul sebagai tantangan dan arah masa depan ekonomi politik meliputi:

1. Konsolidasi Kekuasaan dan Monopoli Digital

Perusahaan platform digital besar memiliki kapasitas untuk mendominasi pasar global melalui kontrol data, jaringan pengguna, dan ekosistem teknologi yang terintegrasi, sehingga mengurangi ruang bagi kompetitor baru untuk bersaing secara efektif. Dominasi ini tidak hanya menimbulkan ketimpangan ekonomi di sektor digital, tetapi juga meningkatkan pengaruh perusahaan-perusahaan ini terhadap pembuatan kebijakan publik dan arah regulasi di tingkat nasional maupun internasional (Zuboff, 2019).

Monopoli digital juga mendorong konsentrasi kekayaan dan kekuasaan di tangan sejumlah kecil aktor global, yang dapat memengaruhi harga, akses pasar, dan inovasi di sektor-sektor kunci ekonomi. Ketergantungan pada platform besar ini semakin memperkuat posisinya sebagai aktor strategis dalam hubungan ekonomi-politik, sehingga tantangan regulasi antitrust dan kebijakan persaingan menjadi lebih kompleks dan mendesak.

2. Transformasi Pasar Tenaga Kerja dan Model Ekonomi

Digitalisasi dan ekonomi platform telah menggeser struktur pasar tenaga kerja dari model tradisional menuju ekonomi gig dan kerja fleksibel, di mana pekerja lebih banyak berinteraksi melalui aplikasi dan kontrak jangka pendek, sehingga menghadirkan tantangan baru dalam hal perlindungan sosial dan stabilitas pendapatan. Perubahan ini mempercepat kebutuhan akan keterampilan digital dan adaptasi teknologi di berbagai sektor, sementara negara dan perusahaan dituntut untuk menyiapkan mekanisme pelatihan ulang dan kebijakan kesejahteraan yang sesuai (De Stefano, 2019).

Otomatisasi dan penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam proses produksi dan layanan meningkatkan efisiensi, tetapi juga mengancam pekerjaan rutin dan berulang, sehingga meningkatkan risiko ketimpangan ekonomi dan pengangguran struktural. Pekerja yang tidak memiliki akses terhadap pelatihan digital menghadapi marginalisasi di pasar kerja, sementara perusahaan yang mampu mengelola teknologi canggih mendapatkan keunggulan kompetitif yang signifikan.

3. Pengaruh Data dan AI dalam Pengambilan Keputusan Politik

Pemanfaatan *big data* dan kecerdasan buatan (AI) dalam konteks politik memungkinkan aktor-aktor politik untuk menganalisis perilaku pemilih secara mendalam dan menyesuaikan strategi kampanye, sehingga memengaruhi opini publik dan hasil pemilu dengan presisi yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Hal ini menimbulkan tantangan serius bagi integritas demokrasi, karena algoritma dapat menciptakan filter bubble, memperkuat polarisasi, dan memanipulasi informasi yang diterima masyarakat (Rahwan et al., 2019).

Penggunaan AI dalam pengambilan keputusan publik juga memperluas kapasitas pemerintah dan platform digital untuk melakukan pengawasan, prediksi kebijakan, dan alokasi sumber daya secara otomatis, sehingga memberikan kekuatan besar kepada pihak yang menguasai teknologi ini. Ketergantungan pada algoritma dan data yang dikumpulkan oleh perusahaan swasta meningkatkan risiko bias, ketidaktransparanan, dan penyalahgunaan informasi untuk kepentingan politik tertentu.

4. Globalisasi Digital dan Persaingan Geopolitik

Globalisasi digital telah mempercepat integrasi ekonomi lintas batas melalui jaringan internet, platform digital, dan perdagangan elektronik, sehingga perusahaan-perusahaan teknologi besar kini berfungsi sebagai aktor geopolitik yang memengaruhi hubungan antarnegara dan aliansi strategis. Dominasi teknologi tertentu oleh negara-negara kuat menciptakan ketergantungan digital yang kompleks, di mana akses terhadap infrastruktur kritis dan data strategis menjadi instrumen kekuatan politik dan ekonomi (Allison, 2019).

Persaingan dalam pengembangan teknologi mutakhir seperti 5G, kecerdasan buatan, dan komputasi kuantum menempatkan negara-negara pada kompetisi global yang intens, di mana keunggulan teknologi dapat menentukan posisi tawar dalam negosiasi perdagangan, keamanan siber, dan investasi internasional. Strategi nasional yang mampu mengamankan ekosistem digital domestik sambil membangun jaringan internasional yang kuat menjadi kunci untuk mempertahankan kedaulatan digital dan pengaruh global.

D. Prospek Riset Ekonomi Politik di Indonesia

Riset ekonomi politik di Indonesia memiliki potensi yang signifikan karena dinamika politik, sosial, dan ekonomi yang kompleks, termasuk distribusi kekuasaan, regulasi industri, dan interaksi antara negara, pasar, dan masyarakat. Prospek riset ini dapat dikaji dari beberapa perspektif utama:

1. Kebijakan Publik dan Regulasi

Kebijakan publik dan regulasi di Indonesia memiliki peran sentral dalam membentuk dinamika pasar, distribusi kekuasaan

ekonomi, dan hubungan antara negara dengan aktor ekonomi, sehingga menjadi fokus penting dalam riset ekonomi politik untuk menilai efektivitas intervensi pemerintah terhadap pembangunan nasional. Kajian ini memungkinkan peneliti mengevaluasi bagaimana regulasi, termasuk kebijakan fiskal, subsidi, dan perlindungan industri, memengaruhi persaingan pasar, investasi, dan kesejahteraan masyarakat (Hadiz & Robison, 2019).

Kompleksitas implementasi regulasi di tingkat pusat dan daerah membuka peluang untuk meneliti variasi kebijakan lokal dan dampaknya terhadap distribusi sumber daya serta pertumbuhan ekonomi regional. Penelitian ini dapat mengidentifikasi hambatan birokrasi, potensi konflik kepentingan, dan peran elite politik dalam menentukan arah kebijakan yang seringkali memengaruhi ketimpangan ekonomi dan kesempatan usaha.

2. Interaksi antara Politik dan Ekonomi

Interaksi antara politik dan ekonomi di Indonesia membentuk dinamika kekuasaan yang kompleks, di mana keputusan politik memengaruhi alokasi sumber daya, regulasi pasar, dan strategi investasi, sehingga menjadi fokus penting bagi riset ekonomi politik untuk memahami hubungan antara kepentingan elite dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini dapat membahas bagaimana elit politik dan korporasi besar berperan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi serta dampaknya terhadap persaingan pasar dan distribusi kesejahteraan (Aspinall & Mietzner, 2021).

Interaksi ini menimbulkan tantangan dalam mengukur sejauh mana keputusan politik memengaruhi peluang usaha lokal dan regional, termasuk potensi konflik kepentingan, praktik oligarki, dan akses terhadap proyek infrastruktur atau sumber daya strategis. Kajian ini memberikan wawasan tentang mekanisme pengaruh politik terhadap ekonomi dan bagaimana ketergantungan politik-ekonomi dapat memperkuat atau melemahkan institusi demokrasi serta efektivitas kebijakan publik.

3. Digitalisasi dan Ekonomi Platform

Digitalisasi dan ekonomi platform telah mengubah struktur pasar dan model bisnis di Indonesia, di mana perusahaan platform menguasai distribusi informasi, transaksi digital, dan interaksi

konsumen, sehingga membuka peluang riset untuk memahami dampak dominasi platform terhadap persaingan ekonomi dan kebijakan publik. Kajian ini juga penting untuk menilai bagaimana penguasaan data, algoritma, dan ekosistem digital dapat memengaruhi distribusi kekuasaan ekonomi dan kapasitas negara dalam mengatur pasar (Suryanto, 2020).

Riset di bidang ini dapat membahas transformasi pasar tenaga kerja melalui ekonomi gig, di mana platform digital memfasilitasi pekerjaan fleksibel namun menimbulkan tantangan terkait perlindungan sosial, hak pekerja, dan stabilitas pendapatan. Penelitian dapat memetakan implikasi ekonomi politik dari adopsi teknologi digital terhadap inklusi ekonomi, ketimpangan sosial, dan strategi regulasi pemerintah untuk menyeimbangkan inovasi dan keadilan.

4. Pembangunan Inklusif dan Keadilan Sosial

Pembangunan inklusif dan keadilan sosial menjadi fokus penting dalam riset ekonomi politik di Indonesia karena ketimpangan ekonomi dan sosial masih menjadi tantangan utama, sehingga penelitian dapat membahas bagaimana kebijakan publik, distribusi sumber daya, dan intervensi pemerintah memengaruhi akses masyarakat terhadap peluang ekonomi. Kajian ini memungkinkan analisis dampak program pembangunan, subsidi, dan reformasi fiskal terhadap pemerataan kesejahteraan dan penguatan kapasitas masyarakat marginal (Firman, 2021).

Riset dapat membahas bagaimana interaksi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil memengaruhi implementasi pembangunan inklusif, termasuk hambatan birokrasi, politisasi kebijakan, dan praktik ketidakadilan struktural. Penelitian ini juga dapat mengevaluasi efektivitas mekanisme redistribusi, perlindungan sosial, dan program pemberdayaan ekonomi untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dan kelompok masyarakat di Indonesia.

E. Study Case

1. Studi Kasus: Tantangan dan Arah Masa Depan Ekonomi Politik

a. Latar Belakang

Ekonomi politik sebagai disiplin ilmu mempelajari hubungan antara kekuasaan politik, kebijakan ekonomi, dan distribusi sumber daya. Di era globalisasi dan digitalisasi, ekonomi politik menghadapi tantangan kompleks, termasuk ketimpangan ekonomi, dominasi korporasi multinasional, tekanan geopolitik, dan transisi teknologi. Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi dinamika internal seperti ketimpangan pembangunan antarwilayah, ketergantungan pada sumber daya alam, dan pengaruh oligarki dalam kebijakan ekonomi. Secara global, konflik perdagangan, proteksionisme, dan kompetisi teknologi antara negara maju memengaruhi arah kebijakan nasional. Fenomena ini menuntut strategi ekonomi politik yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

b. Tantangan Utama

- 1) Ketimpangan Ekonomi dan Sosial: Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat, distribusi pendapatan dan akses terhadap layanan publik masih timpang, yang berpotensi memicu konflik sosial.
- 2) Digitalisasi dan Ekonomi Platform: Perubahan ekonomi berbasis digital memunculkan peluang, namun juga risiko monopoli platform, pengawasan data, dan ketidaksetaraan akses teknologi.
- 3) Pengaruh Geopolitik dan *Global Supply Chain*: Ketegangan global, perang dagang, dan fragmentasi rantai pasok internasional menimbulkan risiko bagi stabilitas ekonomi nasional.
- 4) Oligarki dan Konsentrasi Kekuasaan: Dominasi kelompok elit ekonomi-politik dapat memengaruhi kebijakan publik sehingga menghambat pembangunan inklusif.
- 5) Transisi Energi dan Lingkungan: Tekanan global untuk energi hijau menuntut reformasi ekonomi dan regulasi industri yang adaptif terhadap krisis iklim.

c. Arah Masa Depan

- 1) Pembangunan Inklusif: Memperkuat kebijakan yang mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, termasuk investasi di daerah tertinggal, pengembangan UMKM, dan pendidikan berkualitas.
- 2) Regulasi Digital dan *Data Governance*: Mengembangkan kerangka hukum untuk mengatur ekonomi platform, perlindungan data, dan persaingan usaha agar lebih adil dan transparan.
- 3) Diversifikasi Ekonomi dan Industri Strategis: Mengurangi ketergantungan pada komoditas dan membangun industri manufaktur serta teknologi yang bernilai tambah tinggi.
- 4) Penguatan Demokrasi Ekonomi: Meningkatkan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan ekonomi, mencegah dominasi oligarki, dan memperkuat mekanisme akuntabilitas.
- 5) Kebijakan Hijau dan Keberlanjutan: Mengintegrasikan ekonomi rendah karbon dan industri berkelanjutan sebagai strategi jangka panjang untuk daya saing global.

d. Kesimpulan

Ekonomi politik di Indonesia dan dunia menghadapi tantangan multidimensi, mulai dari ketimpangan sosial, tekanan geopolitik, hingga transformasi digital dan lingkungan. Masa depan ekonomi politik menuntut kebijakan inklusif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan teknologi dan global. Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi kunci untuk membangun ekonomi politik yang stabil, adil, dan kompetitif di era global. Fokus pada regulasi yang adil, pembangunan inklusif, dan keberlanjutan menjadi strategi utama untuk menghadapi tantangan masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aboksawi, A. M. A., Afifuddin, A., & Ilyas, T. R. (2024). Patron-client relationships as a mechanism of public policy corruption. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(2), 224–230.
- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2019). *The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty*. Penguin Books.
- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2019). *The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty*. Penguin Press.
- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2019). *The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty*. Penguin Press.
- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2019). *The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty*. Penguin Press.
- Adams, W. M. (2020). *Unequal Access and Environmental Conflicts: Governance of Natural Resources in the 21st Century*. Routledge.
- Agarwal, B. (2021). Gender inequality in asset ownership and its implications for women's empowerment. *Journal of Peasant Studies*.
- Aghion, P., Antonin, C., & Bunel, S. (2021). *The Power of Creative Destruction: Economic Upheaval and the Wealth of Nations*. Harvard University Press.
- Aghion, P., Bergeaud, A., Boppart, T., Klenow, P. J., & Li, H. (2019). Innovation and Top Income Inequality. *The Review of Economic Studies*, 86(1), 1–45.
- Aizenman, J., Jinjarak, Y., & Zheng, H. (2019). Trade Policy Uncertainty and Financial Markets. *Journal of International Money and Finance*, 96, 1–22.
- Allison, G. (2019). *Destined for War: Can America and China Escape Thucydides's Trap?* Houghton Mifflin Harcourt.
- Allison, G. (2020). *Destined for War: Can America and China Escape Thucydides's Trap?* Houghton Mifflin Harcourt.
- Amsal, D., & Nugroho, R. (2022). Peran Intervensi Pemerintah dalam Industrialiasi Negara Berkembang: Studi Kasus Developmental State di Asia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 23(2), 115–130.
- Anderson, J. E. (2019). *Public Policymaking: An Introduction*. 8th Edition. Cengage Learning.
- Anderson, P. (2021). *Political Interventions and Elite Dominance in Emerging Economies*. New York: Routledge.

- Anderson, T. (2020). *Social inequality and poverty: Understanding structural barriers in modern societies*. Routledge.
- Andriansyah, S. H. L. (2021). *Policy-Considerations in Using Tax Incentives for Foreign Investment*. Asia Macroeconomic Research Office.
- Arliansyah, A., Fuadi, Wardhiah, Pasarela, H., & Juanda, R. (2024). Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia: Sebuah Fakta. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(1), 73–79.
- Arndt, C., & Oman, C. (2018). *Uses and Abuses of Governance Indicators*. World Bank Policy Research Working Paper, 7442.
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2021). *Indonesia's Democracy and Its Discontents: The Rise of the Oligarchy and Policy Capture*. ISEAS Publishing.
- Ayuningtyas, I. (2021). Ketimpangan akses pendidikan di Kalimantan Timur. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 6(2), 117–129.
- Ayuningtyas, I. (2021). Ketimpangan Akses Pendidikan di Kalimantan Timur. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 6(2), 117–129.
- Bacchetta, M., Espinosa, C., & Rocha, N. (2019). *Non-tariff measures: Economic assessment and policy implications*. Geneva: World Trade Organization.
- Baldwin, R. (2019). *The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization*. Harvard University Press.
- Baldwin, R., & Evenett, S. J. (2019). *Revitalising Multilateral Trade Cooperation: Global Governance and the WTO*. Centre for Economic Policy Research.
- Baldwin, R., & Evenett, S. J. (2019). *The collapse of global trade, murky protectionism, and the crisis: Recommendations for the G20*. London: CEPR Press.
- Baldwin, R., & Evenett, S. J. (2020). *COVID-19 and Trade Policy: Why Turning Inward Won't Work*. Centre for Economic Policy Research.
- Baldwin, R., & Evenett, S. J. (2020). *COVID-19 and Trade Policy: Why Turning Inward Won't Work*. Centre for Economic Policy Research.
- Ballor, G. A., & Yildirim, A. B. (2020). *Multinational Corporations and the Politics of International Trade in Multidisciplinary Perspective*. Business and Politics, Cambridge University Press.
- Banks, N. (2019). *Understanding the Role of NGOs in Development*. *Oxford Development Studies*, 47(2), 123–138.

- Barnard, C. (2019). *The Substantive Law of the EU: The Four Freedoms* (6th ed.). Oxford University Press.
- Barrientos, A., & Hulme, D. (2018). *Social protection for the poor and poorest: Concepts, policies and politics*. Palgrave Macmillan.
- Baumgartner, F. R., Berry, J. M., Hojnacki, M., Kimball, D. C., & Leech, B. L. (2018). *Lobbying and Policy Change: Who Wins, Who Loses, and Why*. University of Chicago Press.
- Baylis, J., Smith, S., & Owens, P. (2020). *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations* (8th ed.). Oxford University Press.
- Bebbington, A. (2018). *Resource Extractivism and Conflict: The Political Economy of Natural Resource Management*. Oxford University Press.
- Berry, J. M. (2019). *Lobbying for Public Policy: Linking Interests to Policy* (3rd ed.). CQ Press.
- Besley, T., & Persson, T. (2019). State Capacity, Conflict, and Development. *Econometrica*, 87(3), 1127–1164.
- Bieler, A. (2019). *Neo-Gramscian Analysis of Global Political Economy: Bringing Agency Back In*. Routledge.
- Bird, G., & Rowlands, D. (2020). IMF Advice and Policy-Making in Member Countries: Enhancing Macroeconomic Stability. *Oxford Review of Economic Policy*, 36(1), 123–145.
- Blanden, J., Doepke, M., & Stuhler, J. (2022). *Educational Inequality*. Institute for Policy Research, Northwestern University.
- Blanden, J., Doepke, M., & Stuhler, J. (2022). *Educational Inequality*. Institute for Policy Research, Northwestern University.
- Boateng, A., et al. (2024). Institutions and corruption relationship: Evidence from weak *governance* contexts. *Journal of Governance and Corruption Studies*.
- Bortolotti, B., & Milella, V. (2018). Privatization and Government Fiscal Policies: Theory and Evidence. *Journal of Public Economics*, 161, 1–18.
- Bown, C. P. (2019). *The WTO and Trade Conflict: Understanding the Rise of Trade Protectionism*. Peterson Institute for International Economics.
- Bown, C. P., & Zhang, E. (2021). Trade Wars and Consumer Welfare: Evidence from Global Supply Chains. *Journal of International Economics*, 130, 103466.
- Bridge, G., & Le Billon, P. (2018). *Oil*. Polity Press.

- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2018). *The Business of Artificial Intelligence: What It Can — and Cannot — Do for Your Organization*. Harvard Business Review.
- Burfisher, M. E., Robinson, S., & Thierfelder, K. (2019). *The US-Mexico-Canada Agreement: Overview and Implications for North American Trade*. World Bank Publications.
- Clapp, J., & Moseley, W. G. (2020). This food crisis is different: COVID-19 and the fragility of the neoliberal food security order. *The Journal of Peasant Studies*, 47(7), 1393–1417.
- Clapp, J., & Ruder, S. (2020). The global food system and food security: Distributional challenges in the 21st century. *Global Environmental Politics*, 20(4), 22–41.
- Corak, M., & van der Weide, R. (2022). Inequality, economic growth, and intergenerational mobility all around the world. ECINEQ Working Paper.
- Craig, P., & de Búrca, G. (2020). *EU Law: Text, Cases, and Materials* (7th ed.). Oxford University Press.
- De Grauwe, P. (2018). *Economics of Monetary Union* (12th ed.). Oxford University Press.
- De Mooij, R., & Keen, M. (2019). *Fiscal incentives for investment in developing countries: Evidence and policy implications*. Washington, DC: International Monetary Fund.
- De Stefano, V. (2019). The Rise of the “Just-in-Time Workforce”: On-Demand Work, Crowdwork, and Labour Protection in the “Gig-Economy”. *Comparative Labor Law & Policy Journal*, 37(3), 471–504.
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2018). *Public Administration: An Action Orientation* (7th ed.). Cengage Learning.
- Dercon, Stefan. “The Political Economy of Economic Policy Advice.” *Journal of African Economies*, vol.33, Supplement 2, 2024, pp. ii26–ii38.
- Dos Santos, T. (2019). The Structure of Dependence. *Journal of Development Studies*, 55(4), 567–582.
- Dos Santos, T. (2020). The Structure of Dependence and the Role of Technology. *Journal of Development Studies*, 56(7), 1123–1140.
- Dosch, J. (2020). *ASEAN Economic Community and Regional Integration: Challenges and Opportunities*. Palgrave Macmillan.
- Dye, T. R. (2018). *Understanding Public Policy*. 15th Edition. Routledge.
- Eagleton, T. (2018). *Ideology: An Introduction*. Verso Books.

- Edwards, R. (2019). *Labour Markets and Economic Liberalism: Contemporary Dynamics and Policy Implications*. Routledge.
- Edwards, R. (2019). *Labour Markets and Economic Liberalism: Contemporary Dynamics and Policy Implications*. Routledge.
- Emmers, R. (2019). *ASEAN and the Security of Southeast Asia: Regional Dynamics and Challenges*. Routledge.
- Entman, R. M. (2020). *Media Framing and Political Communication: Understanding the Influence of Mass Media*. Routledge.
- Estache, A., & Garsous, G. (2018). The Impact of Infrastructure on Growth in Developing Countries. *World Bank Research Observer*, 33(2), 103–134.
- Estrin, S., & Pelletier, A. (2018). Privatization in Developing Countries: What Are the Lessons of Recent Experience? *Journal of Economic Surveys*, 32(4), 1092–1119.
- Evenett, S. J. (2020). *Economic Sanctions, Trade Policy, and Global Value Chains*. Centre for Economic Policy Research.
- Evenett, S. J. (2020). *Protectionism, State Intervention and International Trade Governance*. CEPR Press.
- Evenett, S. J., & Fritz, J. (2021). *Trading down: Unpacking the crisis in global trade governance*. London: CEPR Press.
- Faccio, M., & Parsley, D. (2018). Politically Connected Firms and Government Policy Influence. *Journal of Financial Economics*, 130(2), 1–21.
- Fanzo, J., Davis, C., McLaren, R., & Choufani, J. (2019). The effect of policies on food consumption and nutrition in low- and middle-income countries. *Global Food Security*, 23, 93–101.
- Farhan, D. (2018). Proses Politik dan Kekuasaan dalam Penganggaran Publik. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 345–358.
- Ferguson, T., Jorgensen, P., & Chen, J. (2022). How Money Drives US Congressional Elections: Linear Models of Money and Outcomes. *Structural Change and Economic Dynamics*.
- Ferrara, E. (2020). Disinformation and Social Bot Operations in the Age of Artificial Intelligence. *Journal of Computational Social Science*, 3(2), 347–365.
- Firdaus, S. U. T. (2025). Ketidakadilan Ekonomi dan Alienasi Pekerja: Kritik Terhadap Sistem Ekonomi Kapitalis. *JCEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(2), 615–623.
- Firman, T. (2021). *Urban Development and Social Equity in Indonesia: Policies for Inclusive Growth*. Routledge.

- Fitriani, R., & Hidayat, S. (2022). Implementasi Perlindungan Sosial dalam Welfare State: Studi Kasus Negara Skandinavia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ekonomi*, 14(2), 101–116.
- Frank, A. G. (2018). *Dependency and Development in Latin America*. Routledge.
- Friedberg, A. L. (2018). *A Contest for Supremacy: China, America, and the Struggle for Mastery in Asia*. W.W. Norton & Company.
- Friedman, G. (2020). *The Technology Trap: Capital, Power, and Global Inequality in the 21st Century*. Oxford University Press.
- Fukuyama, F. (2020). *Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy*. Farrar, Straus and Giroux.
- Gaus, G. (2021). *The Open Society and Its Complexities*. Oxford University Press.
- Ghaniyar, E. M., & Qibthiyah, R. M. (2020). Political Budget Cycle and Financial Losses: An Indonesian Case. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 7(2).
- Ghozali, F., & Hardyanthi, T. (2024). Perlindungan Konsumen pada Platform E-Commerce: Regulasi dan Peran Pemerintah. *Ethics and Law Journal Business and Notary*.
- Gilens, M. (2018). *Affluence and Influence: Economic Inequality and Political Power in America*. Princeton University Press.
- Gil-Hernández, C. J. (2025). *Wealth and Income Stratification by Social Class in Five European Countries*. Springer.
- Gill, S. (2019). *Global Political Economy: Perspectives, Problems, and Policies* (3rd ed.). Routledge.
- Gilpin, R. (2020). *Global Political Economy: Understanding the International Economic Order* (2nd ed.). Princeton University Press.
- Gorwa, R., Lechowski, G., & Schneiß, D. (2024). Platform lobbying: Policy influence strategies and the EU's Digital Services Act. *Internet Policy Review*, 13(2).
- Grindle, M. S. (2018). *Good Governance: The Inflation of an Idea*. Harvard Kennedy School Faculty Research Working Paper Series. Harvard University.
- Grindle, M. S. (2018). *Good Governance: The Inflation of an Idea*. Harvard Kennedy School Faculty Research Working Paper Series. Harvard University.

- Grindle, Merilee S. *Good Governance: The Inflation of an Idea*. Harvard Kennedy School Faculty Research Working Paper Series, RWP19-024, 2019.
- Gungor, V. C., Sahin, D., Kocak, T., Ergut, S., Buccella, C., Cecati, C., & Hancke, G. P. (2019). Smart grid technologies: Communication technologies and standards. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 15(1), 6–18.
- Hadiz, V. R., & Robison, R. (2019). *Indonesia's Political Economy: Governance, Business, and Democracy*. Cambridge University Press.
- Haggard, Stephan, dan Robert R. Kaufman. *Development, Democracy, and Welfare States: Latin America, East Asia, and Eastern Europe*. Princeton University Press, 2018.
- Hall, P. A., & Taylor, R. C. R. (2018). *Political Science and the Three New Institutionalisms*. Routledge.
- Han, S., dkk. (2024). *Elite Politics, Mass Discontent and Political Inequality in Korea*. MDPI.
- Handayani, D. (2019). Relasi politik dan kemiskinan: Analisis distribusi kekuasaan dan akses sumber daya di Indonesia. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 7(1), 55–68.
- Handayani, R., & Pratama, B. (2020). Redistribusi Kekayaan dalam Welfare State: Dampak terhadap Keadilan Sosial dan Stabilitas Ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 21(2), 95–110.
- Hartanto, R. (2020). *Political Patronage and Power Networks in Emerging Democracies*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hartono, A. (2020). *Legislative Agreements and Political Cartels in Emerging Democracies*. Jakarta: LP3M Press.
- Harvey, D. (2018). *Marx, Capital, and the Madness of Economic Reason*. Oxford University Press.
- Haryanto, D. (2020). Sumber pendapatan dan stratifikasi kelas ekonomi dalam masyarakat kontemporer. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 16(2), 88-104.
- Haucap, J., & Heimeshoff, U. (2018). Digital Market Dominance: The Case of Online Platforms in E-Commerce. *Journal of Competition Law & Economics*, 14(4), 569–604.
- Hendriyani, R. (2021). Peran Kebijakan Pendidikan dan Kesehatan dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 9(2), 67–81.

- Hernandez, R. (2020). Discriminatory policies and political vulnerability: Impacts on marginalized communities. *Policy and Society*, 39(4), 556–573.
- Hidayat, R. (2020). Persaingan monopolistik dan strategi diferensiasi produk dalam pasar modern. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 10(1), 55-68.
- Hidayat, R. (2020). *Rent-Seeking and Economic Inequality in Emerging Markets*. Bandung: Padjadjaran University Press.
- Hidayat, R., & Nugroho, B. (2020). Privatisasi dan Deregulasi dalam Neoliberal State: Dampak terhadap Efisiensi dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(3), 87–102.
- Hidayat, T. (2021). Elit dan Kemiskinan Struktural di Indonesia: Analisis Kekuasaan dan Distribusi Sumber Daya. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 8(2), 77–91.
- Hill, M. (2018). *The Public Policy Process*. 7th Edition. Routledge.
- Hoffmann, J., Küpper, B., & Teschner, N. (2020). *Horizontal Conflicts over Natural Resources: Social Dynamics and Conflict Management in Local Communities*. Springer.
- Hotimah, D. Khusnul., Nuriat, F. & Widya Syari, L. A. (2025). Analisis Ekonomi Politik dalam Penanganan Ketimpangan Ekonomi: Studi Kasus Tentang Pekerja Serabutan di Kelurahan Kauman Kota Metro. *Indonesia Economic Journal*, 1(1), 197-205.
- Hufbauer, G. C., & Schott, J. J. (2018). *NAFTA Revisited: Achievements and Challenges*. Peterson Institute for International Economics.
- Ikenberry, G. J. (2018). *Liberal Leviathan: The Origins, Crisis, and Transformation of the American World Order*. Princeton University Press.
- ILO. (2024). *What role for universal social protection?* ILO Working Paper.
- Inglehart, R., & Welzel, C. (2019). *Modernization, Cultural Change, and Democracy: The Human Development Sequence*. Cambridge University Press.
- International Energy Agency (IEA). (2018). *Energy Efficiency 2018: Analysis and Outlooks to 2040*. IEA.
- International Renewable Energy Agency (IRENA). (2019). *Global Energy Transformation: A Roadmap to 2050*. IRENA.
- Ivanov, D. (2020). *Viable Supply Chain Model: Integrating Agility, Resilience and Sustainability Perspectives—Lessons from and*

- Directions for Supply Chain Disruption Research. *International Journal of Production Research*, 58(2), 445–461.
- Jackson, J. H., Davey, W. J., & Sykes, A. O. (2020). *Legal Problems of International Economic Relations* (6th ed.). Wolters Kluwer.
- Janssen, M., Charalabidis, Y., & Zuiderwijk, A. (2018). Big Data and the Transformation of Government: Trends, Challenges and Opportunities. *Government Information Quarterly*, 36(2), 301–308.
- Jenkins, K., McCauley, D., Heffron, R., Stephan, H., & Rehner, R. (2018). *Energy Justice: A Conceptual Review*. *Energy Research & Social Science*.
- Jessop, B. (2019). *State Theory: Putting the Capitalist State in Its Place*. Polity Press.
- Johnson, M. (2019). *Market Control and Oligarchic Structures in Emerging Economies*. London: Palgrave Macmillan.
- Justino, P. (2025). Revisiting the links between economic inequality and political violence. *Social Science & Medicine*.
- Kaplinsky, R. (2019). *Globalization, Poverty and Inequality: Between a Rock and a Hard Place*. Polity Press.
- Kaufmann, D. (2018). *Governance and Anti-Corruption in Public Administration*. World Bank Policy Research Working Paper Series.
- Kaufmann, D. (2018). *Governance and Development: The Role of Institutions*. World Bank Publications.
- Kellenberg, D. K., & Mobarak, A. M. (2019). *The Political Economy of International Resource Conflicts: Governance, Security, and Transboundary Management*. Cambridge University Press.
- Kentikelenis, A. E., Stubbs, T. H., & King, L. P. (2019). IMF Conditionality and Development Policy Space, 1985–2014. *Review of International Political Economy*, 26(2), 183–215.
- Kettl, D. F. (2019). *The Politics of the Administrative Process* (7th ed.). CQ Press.
- Khan, L. (2019). *The Separation of Platforms and Commerce*. *Columbia Law Review*.
- Kim, S., & Milner, H. V. (2019). *Multinational Corporations and their Influence Through Lobbying on Foreign Policy*. Brookings Institution.
- Kingdon, J. W. (2018). *Agendas, Alternatives, and Public Policies* (Updated 2nd ed.). Routledge.

- Klare, M. T. (2019). *The Race for What's Left: The Global Scramble for the World's Last Resources*. Metropolitan Books.
- Klievink, B., & Janssen, M. (2019). Big Data in the Public Sector: Trends, Opportunities, and Challenges. *Government Information Quarterly*, 36(2), 191–200.
- Kose, M. A., Ohnsorge, F., & Sugawara, N. (2021). *Global Economic Prospects: Slow Growth, Policy Challenges*. World Bank Publications.
- Kuncoro, Mudrajad. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Kusuma, A. R. (2021). Analisis pasar oligopoli dan implikasinya terhadap strategi perusahaan dan regulasi industri. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 15(2), 78-92.
- Kusumawardhana, I. (2023). A Dynamic System Approach: Modalitas Kontrol Pemerintah Terhadap Agenda Pembangunan di Negara Berkembang. *The Journalish*, 4(2).
- Le Billon, P. (2019). *Conflict Over Natural Resources: Political Economy, Governance, and Environmental Impacts*. Routledge.
- Leach, M., Nisbett, N., Cabral, L., Harris, J., Hossain, N., & Thompson, J. (2020). Food politics and development. *World Development*, 134, 105024.
- Lee, H. (2021). *Economic Regulation and Reducing Oligarchic Power in Emerging Markets*. Singapore: Springer.
- Lestari, M. (2021). Akses ke modal non-finansial dan dampaknya terhadap stratifikasi kelas ekonomi di masyarakat urban. *Jurnal Sosiologi Ekonomi*, 14(1), 59-77.
- Lund-Thomsen, P., & Lindgreen, A. (2021). *Corporate Governance and Internal Conflicts in Resource-Based Industries: Managing Natural Resource Extraction*. Routledge.
- Makhmudah, S. (2021). Optimalisasi Peran Sektor Sipil dalam Pengawasan Kebijakan Publik. *Jurnal Ijtihad*.
- Mandel, E. (2024). Late Capitalism and the Dynamics of Concentrated Capital. *Fourth International Review*.
- Mankiw, N. G. (2021). *Principles of Economics (9th ed.)*. Cengage Learning.
- Martinez, L. (2022). *Political Reform and Transparency: Limiting Oligarchic Influence in Emerging Democracies*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Marx, P. (2018). Anti elite parties and political inequality. *European Journal of Political Research*.
- McCombs, M. (2019). *Setting the Agenda: The Mass Media and Public Opinion*. Polity Press.
- McNutt, J. G. (2019). *Politics and Policy Making in Public Administration* (3rd ed.). Routledge.
- Megginson, W. L., & Netter, J. M. (2019). From State to Market: A Survey of Empirical Studies on Privatization. *Journal of Economic Literature*, 57(1), 1–52.
- Megginson, W. L., Nash, R. C., & van Randenborgh, M. (2020). The Financial and Operating Performance of Privatized Firms during the 2010s: International Evidence. *Journal of Corporate Finance*, 64, 101660.
- Mello, R. A. (2022). Building Bridges between *Dependency Theory* and Neo-Gramscian Critical Theory: The Agency-Structure Relation as a Starting Point. *Critical Studies on International Relations*, (...)
- ...
- Mergel, I., Rethemeyer, R. K., & Isett, K. R. (2019). Big Data and Artificial Intelligence in Public Sector Decision Making: Opportunities and Challenges. *Public Administration Review*, 79(5), 721–730.
- Mergel, I., Rethemeyer, R. K., & Isett, K. R. (2019). Big Data in Public Sector Decision Making: Issues and Opportunities. *Public Administration Review*, 79(5), 721–730.
- Migdal, J. S. (2019). *State in Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute One Another*. Cambridge University Press.
- Milanović, B. (2019). *Capitalism, Alone: The Future of the System That Rules the World*. Harvard University Press.
- Milanovic, B. (2019). *Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization* (3rd ed.). Harvard University Press.
- Motahar, S. A. (2025). Growth Effects of Wealth Inequality Through Transmission Channels. MDPI.
- Muadi, S. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan. *Jurnal Ilmu Administrasi*.
- Mukhlisin, Raden Muhammad & Rahayu, Sang Ayu Putu. (2025). Perkembangan Hukum Investasi di Indonesia: Pilar Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *Yustisi*, 12(3), 159–174.

- Napoli, P. M. (2019). *Social Media and the Public Interest: Media Regulation in the Disinformation Age*. Columbia University Press.
- Nasution, K. F. D., Pratiwi, A., Fadiya, F., Nafisha, N., Sinambela, R., & Pratama, L. (2025). Kritik Marxisme Terhadap Kapitalisme: Tinjauan Literatur Tentang Eksploitasi Dalam Sistem Ekonomi Kapitalis. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(8.A), 123–133.
- Newell, P. (2021). *Power Shift: The Global Political Economy of Energy Transitions*. Cambridge University Press.
- Noor, A. (2024). Employment Inclusion as a Solution to Overcome Poverty. *KnE Social Sciences*.
- Noranisa, F., Fathurahman, R. H., & Paikah, N. (2025). Efektivitas Fungsi Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil VI Makassar Dalam Mencegah Praktik Monopoli Perdagangan Perspektif Hukum Islam. *Hamfara : Journal of Islamic Economic Studies*.
- North, D. C. (2018). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press.
- North, D. C., Wallis, J. J., & Weingast, B. R. (2019). *Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History*. Cambridge University Press.
- North, Douglass C., John Joseph Wallis, dan Barry R. Weingast. *Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History*. Cambridge University Press, 2019.
- O'Brien, R., & Williams, M. (2020). *Global Political Economy: Evolution and Dynamics* (6th ed.). Palgrave Macmillan.
- OECD. (2019). *Market Power, Competition and Consumer Protection*. OECD Publishing.
- OECD. (2020). *OECD science, technology and innovation outlook 2020: Shaping the future of R&D*. Paris: OECD Publishing.
- Ostry, J. D., Ghosh, A. R., & Chamon, M. (2018). Surveillance and Crisis Prevention at the IMF: Policy Lessons and Research Insights. *IMF Economic Review*, 66(1), 1–26.
- Paccoud, I. (2019). A Bourdieusian approach to class-related inequalities. *Sociological Review*, 67(5), 956–974.
- Peters, B. G. (2018). *American Public Policy: Promise and Performance* (11th ed.). CQ Press.
- Piketty, T. (2018). *Capital and Ideology*. Harvard University Press.

- Porter, M. E., & Heppelmann, J. E. (2019). *How Smart, Connected Products Are Transforming Companies*. Harvard Business Review Press.
- Pradella, L. (2020). *Globalisation and the Critique of Political Economy: New Insights from Marx's Writings*. Routledge.
- Pranata, Y., & Widodo, A. (2021). Liberalisasi Perdagangan dan Investasi dalam Neoliberal State: Dampak terhadap Daya Saing dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Global*, 10(2), 75–91.
- Prasetyo, A. (2022). Strategi Pemberdayaan Ekonomi dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(1), 55–70.
- Prasetyo, B. (2019). Kepemilikan sarana produksi dan stratifikasi kelas ekonomi di masyarakat kontemporer. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 15(1), 63-81.
- Prasetyo, B. (2020). *Strategi Insentif Investasi dalam Politik Industri Nasional*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Prasetyo, B. (2021). *Political Patronage and Policy Influence in Emerging Democracies*. Jakarta: LP3M Press.
- Prasetyo, H. (2021). Digital divide and social inequality in Indonesia: Challenges and policy interventions. *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*, 12(3), 233–245.
- Prasetyo, H., & Lestari, A. (2019). Minimnya Intervensi Pemerintah dan Efisiensi Pasar dalam Neoliberal State. *Jurnal Ekonomi Politik*, 15(1), 55–70.
- Prasetyo, W. & Pangestuty, F. W. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Journal of Development Economic and Social Studies*.
- Pratama, H. (2019). Pengaruh kekuatan sosial dan budaya dalam relasi kekuasaan masyarakat modern. *Jurnal Sosiologi dan Kebudayaan*, 11(2), 88-105.
- Purwanti, A. (2023). *Consumptive Ideology Hegemony As A Lifestyle*. Biar Journal.
- Putnam, R. D. (2019). *The Prosperous Community: Social Capital and Public Life*. Cambridge University Press.
- Putra, A. D. (2021). Kekuatan ekonomi dan relasi kekuasaan dalam dinamika pasar modern. *Jurnal Ekonomi Politik*, 14(2), 102-118.
- Rahardjo, D. (2019). *Market Competition, Rent-Seeking, and Economic Inequality in Developing Countries*. Yogyakarta: UGM Press.

- Rahman, F. (2020). Peran modal finansial dalam pembentukan kelas ekonomi dan distribusi kekayaan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 18(1), 45-62.
- Rahmawati, L., & Santoso, A. (2021). Peran Layanan Publik Berkualitas dalam Implementasi Welfare State: Studi Komparatif Negara Nordik. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 9(1), 45–60.
- Rahwan, I., Cebrian, M., Obradovich, N., Bongard, J., Bonnefon, J.-F., Breazeal, C., ... & Wellman, M. (2019). Machine behaviour. *Nature*, 568(7753), 477–486.
- Ramadhan, A. W. (2020). Struktur pasar persaingan sempurna. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Repository.
- Ramadhani, F. (2023). Strengthening Anti-Corruption Agencies to Limit Oligarchic Influence in Emerging Economies. Jakarta: LP3M Press.
- Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2019). *This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly* (Updated Edition). Princeton University Press.
- REN21. (2020). *Renewables 2020 Global Status Report*. Renewable Energy Policy Network for the 21st Century.
- Rizky, A. (2020). Struktur sosial dan distribusi ekonomi: Analisis ketimpangan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ekonomi*, 15(2), 88–101.
- Rockström, J., Gaffney, O., Rogelj, J., Meinshausen, M., Nakicenovic, N., & Schellnhuber, H. J. (2018). A roadmap for rapid decarbonization. *Science*, 355(6331), 1269–1271.
- Rockström, J., Gaffney, O., Rogelj, J., Meinshausen, M., Nakicenovic, N., & Schellnhuber, H. J. (2021). Planetary Boundaries: Guiding Human Development on a Changing Planet. *Science*, 347(6223), 1259855.
- Rodriguez, L. M. (2021). Political underrepresentation and poverty: Challenges for inclusive governance. *Journal of Political Studies*, 29(3), 245–262.
- Rodrik, D. (2018). *Straight Talk on Trade: Ideas for a Sane World Economy*. Princeton University Press.
- Rodrik, D. (2018). *Straight Talk on Trade: Ideas for a Sane World Economy*. Princeton University Press.
- Rodrik, D. (2019). *Straight Talk on Trade: Ideas for a Sane World Economy*. Princeton University Press.

- Rodrik, D. (2020). *Industrial Policy for the Twenty-First Century*. Harvard University Press.
- Rodrik, D. (2020). *Industrial policy for the twenty-first century*. Cambridge: Harvard University Press.
- Rodrik, D. (2020). *Straight Talk on Trade: Ideas for a Sane World Economy*. Princeton University Press.
- Rodrik, D. (2021). Why Does Globalization Fuel Populism? Economics, Culture, and the Rise of Right-wing Populism. *Journal of International Economics*.
- Rosenbloom, D. H. (2020). *Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector* (9th ed.). McGraw-Hill Education.
- Ross, M. L. (2019). *The Political Economy of Natural Resource Conflicts: Power, Governance, and Resource Control*. Cambridge University Press.
- Sabatier, P. A., & Weible, C. M. (2018). *Theories of the Policy Process*. 4th Edition. Routledge.
- Sachs, J. D. (2019). *The Age of Sustainable Development* (2nd ed.). Columbia University Press.
- Santoso, B. (2019). *Political Cartels and Electoral Manipulation in Developing Democracies*. Yogyakarta: UGM Press.
- Santoso, R. (2019). Peran modal fisik dalam struktur kelas ekonomi dan distribusi kekayaan. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Modern*, 11(2), 73-88.
- Santoso, R. (2020). Kekuatan politik dan relasi kekuasaan dalam dinamika pemerintahan modern. *Jurnal Politik dan Administrasi*, 12(3), 67-85.
- Santoso, R. (2020). Kontrol atas proses kerja dan implikasinya terhadap stratifikasi kelas ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 13(2), 77-95.
- Saputra, R. (2021). Peran modal sosial dalam stratifikasi kelas ekonomi dan distribusi peluang di masyarakat urban. *Jurnal Sosiologi Ekonomi*, 13(2), 77-94.
- Saputra, R. (2022). Ketimpangan Ekonomi dan Peran Pasar dalam Reproduksi Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(3), 45–58.
- Sari, D. P. (2020). Efektivitas Kebijakan Bantuan Langsung dalam Mengurangi Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(3), 45–58.

- Sari, R. P. (2022). Ketimpangan akses layanan kesehatan di wilayah pedesaan Indonesia: Tantangan dan solusi. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 17(1), 45–56.
- Sarjito, A. (2025). Policy Cartelization in Post Reforms Indonesia: Oligarchy, Rent, and Elite Consensus. Indonesia Defense University.
- Schmidt, V. A. (2019). *The Futures of Political Science: Institutions and Institutional Change*. Oxford University Press
- Seguino, S. (2020). Gender, economic inequality, and economic growth: New findings and policy approaches. *Feminist Economics*.
- Setiawan, A. (2021). *Political Influence and Rent-Seeking Practices in Emerging Economies*. Jakarta: LP3M Press.
- Setiawan, I. (2019). Analisis struktur pasar monopoli dan dampaknya terhadap konsumen dan ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(3), 45-58.
- Setyawan, A. (2021). *Politik Industri Nasional dan Perlindungan Industri Domestik di Era Globalisasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Shen, C., & Zhao, (2023). How does income inequality affects economic growth at the national level? *Journal of Economic Studies*.
- Smith, J. (2019). *Structural poverty and social inequality: Understanding access to resources in contemporary societies*. Oxford University Press.
- Smith, J. (2020). *Marxist Perspectives on Political Economy in the 21st Century*. Routledge.
- Smith, J. (2020). *Oligarchic Control in Emerging Economies: Economic and Political Implications*. New York: Routledge.
- Smith, J. A. (2020). *Interest Groups and Policy Making in the Modern State*. Routledge.
- Sope, R. (2019). Teori-teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 3(1).
- Sovacool, B. K. (2019). *Visions of Energy Futures: The Political Economy of Energy Transitions*. Cambridge University Press.
- Srnicek, N. (2017). *Platform Capitalism*. Polity Press.
- Stiglitz, J. E. (2019). *Globalization and Its New Discontents: Lessons for the Future*. W.W. Norton & Company.
- Stiglitz, J. E. (2019). *People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent*. W.W. Norton & Company.
- Subacchi, P. (2019). *The People's Money: How China Is Building a Global Currency*. Columbia University Press.

- Suryanto, B., & Prasetyo, H. (2021). Strategi Industrialisasi dan Ekspor sebagai Pilar Pembangunan Ekonomi Developmental State di Asia Timur. *Jurnal Pembangunan Ekonomi*, 18(3), 201–218.
- Suryanto, H. (2019). Pengaruh Donor terhadap Kebijakan Anggaran Negara Berkembang: Studi Kasus Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(1), 55–72.
- Suryanto, R. (2022). Pengembangan Teknologi dan Inovasi dalam Politik Industri Nasional: Strategi dan Implementasi. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Suryanto, T. (2020). Digital Economy and Platform Politics in Indonesia: Opportunities and Regulatory Challenges. *Journal of Indonesian Social and Political Studies*, 12(2), 145–168.
- Sutrisno, A. (2019). Political Patronage and Resource Allocation in Emerging Economies. Yogyakarta: UGM Press.
- Thelen, K. (2018). Varieties of Liberalization and the New Politics of Social Solidarity. Cambridge University Press.
- Thompson, J. B. (2019). Media and Modernity: A Social Theory of the Media. Polity Press.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). Economic Development (13th ed.). Pearson.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). Economic Development (13th ed.). Pearson.
- Tomlinson, J. (2020). Cultural Globalization. Polity Press.
- UN Women. (2022). Progress on the Sustainable Development Goals: Gender Snapshot 2022. United Nations.
- UNCTAD. (2019). World Investment Report 2019: Special Economic Zones. United Nations Conference on Trade and Development.
- UNCTAD. (2021). World Investment Report 2021: Investing in Sustainable Recovery. United Nations Conference on Trade and Development.
- UNESCO. (2021). Gender and Education: Progress and Barriers in Global Access and Outcomes. UNESCO Publishing.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2020). Human Development Report 2020: The Next Frontier—Human Development and the Anthropocene. UNDP.
- Van den Bossche, P., & Zdouc, W. (2021). The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases, and Materials (5th ed.). Cambridge University Press.

- Varian, H. R. (2019). *Microeconomic Analysis* (4th ed.). W.W. Norton & Company.
- Vértesy, László. "Theory of Regulation of Financial Markets: Reasons and Methods." *Jogelméleti Szemle*, vol. 2, 2024, hlm. 70–94.
- Villarreal, M. A., & Fergusson, I. F. (2019). *NAFTA and the United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA)*. Congressional Research Service.
- Weatherbee, D. E. (2019). *International Relations in Southeast Asia: The Struggle for Autonomy*. Rowman & Littlefield.
- Wendt, A. (2018). *Quantum Mind and Social Science: Unifying Physical and Social Ontology*. Cambridge University Press.
- Widiati, E. P. (2024). *Regulatory Capture: Tantangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik di Negara Demokrasi*. Proceeding APHTNHAN.
- Wijaya, D. (2020). Modal manusia dan pengaruhnya terhadap stratifikasi kelas ekonomi di masyarakat modern. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 17(3), 91-107.
- Wijaya, R. (2020). *Political Cartels and Power Distribution in Emerging Democracies*. Jakarta: LP3M Press.
- Wijayanti, A. (2021). Peran faktor sosial dalam pembentukan kemiskinan struktural di Indonesia: Analisis kebijakan dan akses sumber daya. *Jurnal Sosiologi dan Pembangunan*, 14(2), 112–125.
- Winters, J. A. (2021). *Oligarchy*. Cambridge University Press.
- World Bank. (2019). *Doing Business 2019: Training for Reform*. World Bank Publications.
- Wright, E. O. (2019). *Understanding Class in the Twenty-First Century: A Marxian Perspective*. Verso Books.
- Yahya, F. A. (2019). Membangun Masyarakat Berdaya: Telaah Atas Konstruksi Teori Hegemoni dan Intelektual Organik Antonio Gramsci. *Dialogia Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 16(2).
- Zheng, Y., Chen, C., & Xu, H. (2020). Artificial Intelligence and Public Participation: Opportunities and Challenges in Smart Governance. *Government Information Quarterly*, 37(4), 101487.
- Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism*. PublicAffairs.
- Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. PublicAffairs.
- Zulaikah, Z. (2024). Peran Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Makro. *Journal of Mandalika Literature*, 6(1), 95–108.

GLOSARIUM

Nilai	Titik ukur atau angka acuan untuk mengevaluasi kebijakan publik.
Teknologi	Seluruh sistem alat, metode, aplikasi, dan inovasi yang mendorong perubahan sosial-ekonomi.
Hak	Prinsip dasar yang melindungi kepentingan warga dalam ranah ekonomi dan politik.
Upah	Imbalan yang diterima pekerja atas tenaga dan keahliannya.
Dukungan	Segala bentuk bantuan, sokongan, atau stimulus dari negara kepada masyarakat dan sektor usaha.
Dasar	Landasan berpikir yang menjadi dasar penyusunan strategi pembangunan jangka panjang.
Paket Kebijakan	Kumpulan aturan atau langkah strategis dalam satu naskah kebijakan.
Sah	Status hukum yang menetapkan legalitas suatu kebijakan, program, atau kerja sama.
Riset	Proses penelitian ilmiah untuk mengukur dampak kebijakan, merumuskan inovasi, serta memprediksi risiko ekonomi sosial.
Unggulan	Nilai tambah yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi, inovasi, maupun kebijakan publik.

Laju	Kecepatan pertumbuhan atau pergerakan ekonomi.
Tabungan	Nilai simpanan atau cadangan yang menjaga ketahanan ekonomi masyarakat dan negara.
Gas	Dorongan atau percepatan yang diberikan pemerintah untuk memajukan sektor strategis.
Cetak	Bentuk dasar atau model awal yang menjadi pola dalam merancang kebijakan, inovasi, maupun sistem kerja.

INDEKS

A

agensi, 30, 31, 33
aksesibilitas, 67
asimetri, 222
audit, 53, 70, 71, 131

B

big data, 90, 240
blockchain, 239

D

diferensiasi, 76, 254
digitalisasi, 203, 233, 237, 239, 244
diplomantik, 9, 115, 210
disparitas, 65, 182
distribusi, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15,
17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 35, 37, 38,
39, 48, 53, 54, 55, 59, 62, 64, 66, 73,
75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 87,
88, 89, 90, 91, 92, 94, 97, 99, 100, 101,
102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110,
111, 112, 114, 115, 117, 120, 121, 124,
125, 128, 131, 132, 137, 138, 151, 153,
156, 157, 163, 170, 171, 173, 175, 180,
181, 182, 183, 185, 186, 187, 195, 219,
221, 223, 228, 229, 230, 231, 232, 237,
238, 239, 241, 242, 243, 244, 253, 260,
261
domestik, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 44, 47, 48,
56, 57, 62, 63, 64, 70, 86, 101, 102,
106, 107, 139, 147, 149, 150, 152, 159,

160, 161, 162, 189, 190, 191, 192, 193,
194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 202,
203, 204, 205, 206, 207, 210, 211, 215,
216, 238, 241

E

e-commerce, 42, 89, 90, 229, 231
ekonomi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,
99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131,
132, 133, 134, 137, 138, 139, 140, 141,
142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149,
150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157,
158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 167,
168, 169, 170, 173, 174, 175, 176, 178,
179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186,
187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195,
196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203,
204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211,
212, 213, 214, 215, 216, 219, 220, 221,
222, 223, 224, 229, 230, 231, 232, 233,
234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241,

242, 243, 244, 245, 253, 256, 259, 260,
261, 262, 264, 265, 266
ekspansi, 8, 19, 27, 28, 47, 61, 69, 89, 148,
157, 190, 205, 215
emisi, 108, 169, 215, 234, 235, 236
empiris, 69, 92, 103, 226
entitas, 19, 24, 33

F

finansial, 8, 9, 11, 44, 49, 63, 78, 79, 80,
81, 84, 85, 90, 96, 101, 102, 112, 117,
119, 124, 125, 139, 149, 151, 191, 194,
197, 205, 213, 214, 215, 223, 233, 256,
260
fiskal, 3, 6, 26, 40, 41, 43, 46, 49, 50, 54,
55, 56, 67, 69, 86, 88, 90, 107, 121,
127, 143, 144, 145, 146, 148, 151, 156,
157, 158, 169, 170, 182, 190, 194, 197,
198, 203, 207, 208, 212, 215, 242, 243
fleksibilitas, 18, 20, 21, 69, 71, 76, 205,
214, 230
fluktuasi, 11, 12, 40, 50, 64, 109, 142, 160,
161, 179, 181, 183, 184, 186, 197, 203,
212, 215, 216, 235
fundamental, 22, 61, 76

G

geografis, 99, 178, 184, 185, 208
globalisasi, 3, 6, 9, 10, 11, 22, 26, 28, 30,
34, 49, 109, 191, 201, 202, 203, 214,
215, 216, 233, 237, 244

H

hoaks, 228

I

implikasi, 18, 19, 20, 232, 243
inflasi, 12, 40, 153, 156, 157, 158, 159,
160, 212
infrastruktur, 43, 44, 49, 56, 64, 67, 70, 71,
72, 80, 106, 108, 109, 119, 134, 145,
146, 157, 169, 185, 190, 198, 202, 207,
210, 213, 222, 223, 235, 236, 237, 239,
241, 242
inklusif, 8, 9, 11, 35, 40, 43, 46, 50, 53, 57,
65, 66, 68, 70, 91, 94, 97, 99, 109, 110,
123, 125, 145, 157, 166, 175, 177, 186,
187, 200, 216, 226, 227, 243, 244, 245
inovatif, 16, 19, 190
integrasi, 11, 19, 60, 65, 89, 100, 137, 141,
145, 146, 162, 163, 170, 201, 205, 206,
208, 209, 210, 211, 212, 213, 223, 226,
236, 237, 239, 241
integritas, 144, 229, 240
interaktif, 226
internet of things, 239
investasi, 6, 8, 9, 10, 18, 20, 27, 34, 40, 41,
43, 44, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 62,
63, 64, 67, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 81,
82, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 92, 94, 96,
97, 102, 106, 107, 108, 115, 137, 138,
139, 140, 141, 144, 146, 147, 148, 149,
150, 151, 156, 157, 158, 159, 160, 169,
170, 182, 189, 190, 192, 193, 194, 198,
199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207,
208, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 216,
236, 238, 239, 241, 242, 245
investor, 8, 47, 48, 56, 57, 71, 72, 112,
114, 115, 143, 147, 148, 190, 199, 202,
203, 204, 207, 210, 212, 213, 216

K

kolaborasi, 81, 116, 195, 209, 213
komoditas, 11, 50, 64, 103, 105, 117, 133,
152, 197, 203, 221, 245
komparatif, 138, 151, 210, 211, 213
komprehensif, 7, 34, 45, 49, 108, 122, 163
komputasi, 241
konkret, 27, 134, 226
kredit, 101, 102, 159

L

likuiditas, 41, 143, 148, 151, 159, 160, 215

M

manajerial, 80, 83, 206, 208
manifestasi, 22, 24, 183, 186
manipulasi, 224, 225, 227, 228
manufaktur, 13, 44, 148, 151, 197, 202,
213, 245
moneter, 3, 6, 40, 41, 43, 56, 143, 144,
148, 149, 151, 156, 158, 159, 160, 203,
212, 215

N

negosiasi, 4, 6, 25, 51, 68, 69, 71, 79, 86,
89, 90, 107, 109, 113, 115, 141, 142,
152, 153, 154, 155, 162, 166, 196, 197,
238, 241
neraca, 144, 147, 152, 158, 159, 160, 161,
192
non-tarif, 162, 191, 192, 193, 212

O

otoritas, 3, 41, 76

P

politik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 68, 69,
70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 81, 82,
85, 86, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97,
98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133,
134, 137, 138, 139, 140, 147, 149, 150,
152, 153, 154, 155, 156, 157, 163, 165,
166, 167, 169, 170, 173, 174, 176, 177,
178, 180, 181, 182, 185, 186, 187, 188,
189, 190, 196, 197, 199, 200, 201, 209,
210, 211, 216, 219, 220, 221, 222, 223,
224, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 237,
238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245,
253, 261, 265

R

rasional, 2, 4, 15, 17, 74, 229
real-time, 88, 90, 225, 226, 227, 228, 237
regulasi, 3, 6, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
24, 26, 28, 30, 31, 38, 40, 41, 42, 43,
44, 47, 54, 55, 56, 66, 67, 74, 75, 77,
79, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 100, 104,
107, 108, 109, 110, 112, 114, 115, 116,
120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128,

129, 132, 133, 134, 149, 150, 155, 161,
162, 163, 164, 167, 168, 169, 181, 182,
186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 196,
197, 202, 203, 204, 205, 208, 209, 210,
211, 214, 215, 229, 230, 231, 232, 239,
240, 241, 242, 243, 244, 245, 256

relevansi, 34, 219

revolusi, 237

royalti, 107, 117

S

siber, 239, 241

stabilitas, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
16, 20, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 40, 41,
43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 59, 62, 64, 75, 83, 88, 95, 96,
98, 100, 106, 111, 112, 114, 137, 138,
140, 142, 143, 144, 147, 148, 149, 151,
152, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161,
162, 163, 169, 191, 192, 194, 197, 203,
205, 209, 210, 211, 212, 234, 237, 238,
240, 243, 244

stigma, 183

suku bunga, 41, 145, 148, 151, 158, 159,
160, 212

T

tarif, 19, 47, 87, 88, 109, 110, 141, 147,
150, 152, 161, 162, 189, 191, 192, 193,
197, 199, 205, 209, 212, 216

teoretis, 21, 29

transformasi, 22, 23, 26, 31, 33, 36, 44, 59,
60, 61, 63, 64, 65, 108, 139, 191, 235,
239, 243, 245

transparansi, 13, 42, 49, 53, 66, 70, 71, 72,
107, 109, 117, 121, 122, 123, 124, 125,
126, 127, 128, 129, 131, 132, 134, 142,
143, 146, 167, 188, 200, 204, 224, 225,
226

U

universal, 94, 96, 254

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si.

Lahir di Kota Palembang Sumatera Selatan. Gelar S1 diselesaikan di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Jurusan Ekonomi Pembangunan. Pendidikan S2 ditempuh pada Program Pasca Sarjana (PPS) Universitas Sriwijaya di tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan S3 di Program Doktor Ilmu Ekonomi (PDIE) Universitas Brawijaya Malang dan lulus pada tahun 2013. Saat ini aktif sebagai Dosen Tetap di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Penulis sering dilibatkan oleh Perguruan Tinggi sebagai Dosen Tamu, Penguji Tamu, Narasumber, Pembimbing eksternal, melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian. Aktif menjadi pengurus organisasi profesi dan menjadi juri tamu di beberapa kegiatan kampus. Aktif menulis artikel di beberapa jurnal ilmiah juga menulis beberapa buku ber- HKI dan ber-ISBN yang diterbitkan oleh beberapa penerbit.



Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.

Lahir di Palembang 10 November 1969. Gelar S1 diselesaikan di jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya (UNSRI). Gelar S2 di tempuh di Jurusan Administrasi Publik Universitas Gajah Mada (UGM). Kemudian gelar S3 di Program Doktor Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Saat ini aktif sebagai dosen tetap di Pascasarjana Universitas Sriwijaya. Saat ini menjabat sebagai Ketua Jurusan Administrasi Publik FISIP UNSRI dari tahun 2022-2026. Penulis sering diundang sebagai dosen penguji eksternal di Program Doktor Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Penulis juga aktif sebagai pembimbing eksternal pada PTN dan PTS. Aktif melakukan penelitian dan pengabdian serta aktif menulis di beberapa jurnal ilmiah baik nasional maupun jurnal internasional serta menulis beberapa buku.

EKONOMI POLITIK

Pembangunan, Inovasi, Teknologi
Dan Kebijakan Untuk Kesejahteraan

Buku referensi “Ekonomi Politik: Pembangunan, Inovasi, Teknologi dan Kebijakan untuk Kesejahteraan” ini membahas bagaimana kekuatan politik, struktur ekonomi, serta perkembangan teknologi membentuk arah pembangunan suatu negara. Di tengah perubahan global yang berlangsung cepat mulai dari digitalisasi, otomasi, hingga persaingan ekonomi buku referensi ini memberikan perspektif kritis mengenai bagaimana peluang dan tantangan tersebut dapat dikelola untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Buku referensi ini membahas keterkaitan antara kebijakan publik, inovasi, dan distribusi sumber daya dengan fokus pada kesejahteraan sosial. Buku referensi ini juga membahas bagaimana keputusan politik mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, bagaimana inovasi dapat menjadi motor pembangunan, serta bagaimana teknologi berperan dalam memperluas akses, meningkatkan efisiensi, dan membuka lapangan pekerjaan baru. Buku referensi ini juga membahas risiko yang muncul seperti ketimpangan digital, perubahan struktur tenaga kerja, dan kebutuhan reformasi regulasi.



 mediapenerbitindonesia.com
 +6281362150605
 Penerbit Idn
 @pt.mediapenerbitidn

